

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG
KURIKULUM PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
2018



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS

Alamat: Gedung Rektorat, Limau Manis Padang - 25163
Telepon: 0751-71181,71175,71086,71087,71699 Faksimile: 0751-71085
Laman: <http://www.unand.ac.id> Email: rektorat@unand.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

KURIKULUM PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

- Menimbang :
- a. bahwa kurikulum merupakan penjabaran lebih lanjut dari Visi dan Misi Fakultas Hukum Universitas Andalas yang disusun berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan sistem hukum nasional;
 - b. bahwa kurikulum merupakan unsur utama dalam sistem pendidikan, sehingga Fakultas Hukum Universitas Andalas memerlukan pembaharuan dalam rangka memenuhi capaian pembelajaran berdasarkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 - c. bahwa Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Kurikulum Program Magister Kenotariatan Pada Fakultas Hukum Universitas Andalas perlu disesuaikan dengan perkembangan pengajaran Ilmu Hukum sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan Kesepakatan Badan Kerja Sama Dekan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri (BKS-PTN) se-Indonesia, Lokakarya Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Pertimbangan Senat Fakultas Hukum Universitas Andalas, Fakultas Hukum telah mengusulkan

perubahan Kurikulum Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d maka perlu membentuk Peraturan Rektor tentang Kurikulum Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Andalas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1045);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 434);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 596);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
10. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Peraturan Akademik Universitas Andalas;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG KURIKULUM PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Andalas.
2. Fakultas adalah Fakultas Hukum Universitas Andalas
3. Rektor adalah Rektor Universitas Andalas.
4. Dekan adalah Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
5. Dosen adalah Pengajar pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
6. Program Magister Kenotariatan yang selanjutnya disebut Program Magister Kenotariatan adalah Program Magister Kenotariatan yang berada di bawah pengelolaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
7. Mahasiswa Magister Kenotariatan adalah peserta didik pada Program Magister Kenotariatan.
8. Mahasiswa penyetaraan adalah peserta didik pada Program Magister Kenotariatan yang masuk melalui jalur khusus dengan persyaratan telah berprofesi sebagai notaris.
9. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran pada Program Magister Kenotariatan.
10. Matakuliah adalah satuan pelajaran yang diajarkan pada Program Studi Magister Kenotariatan.
11. Semester adalah satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu program pendidikan dalam suatu jenjang pendidikan.
12. Satuan Kredit Semester selanjutnya disingkat menjadi sks adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal per minggu sebanyak 60 menit perkuliahan terjadwal 60 menit kerja terstruktur dan ditambah 60 menit kerja mandiri.

13. Tesis adalah suatu karya tulis ilmiah yang ditulis berdasarkan hasil penelitian, baik berupa penelitian lapangan, dan/atau penelitian kepustakaan di bawah bimbingan dosen yang ditunjuk.
14. Ujian Komprehensif adalah ujian kemampuan menguasai berbagai mata kuliah dan tugas akhir Program Magister Kenotariatan secara menyeluruh dan terpadu dalam memecahkan suatu masalah yang diteliti.

BAB II

CAPAIAN PEMBELAJARAN

Pasal 2

- (1) Pendidikan Program Magister Kenotariatan bertujuan untuk memenuhi capaian pembelajaran sebagai berikut :
 - a. sikap;
 - b. penguasaan pengetahuan;
 - c. keterampilan umum; dan
 - d. keterampilan khusus.
- (2) Capaian pembelajaran sikap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
 - b. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
 - c. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
 - d. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
 - e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;

- f. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- g. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
- h. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan
- i. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika kewirausahaan
- j. Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial, kepedulian serta berkontribusi terhadap masyarakat dan lingkungan
- k. Menghormati, menghargai serta menginternalisasikan nilai-nilai kearifan lokal

(3) Capaian pembelajaran penguasaan pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :

- a. bidang Ilmu hukum, Teori Hukum dan Penemuan Hukum secara mendalam dan utuh sehingga dapat menjadi landasan berpikir kritis terhadap penerapan hukum positif di Indonesia;
- b. bidang hukum tertentu yang berkaitan dengan bidang kenotariatan, merupakan kajian utama secara mendalam dan utuh, sebagai pengembangan dari bidang-bidang hukum dasar dan hukum terapan
- c. Kemampuan berpikir ilmiah dengan metode penelitian hukum normatif, sosiologis dan empiris melalui pendekatan inter atau multi disipliner
- d. kemampuan untuk menggunakan teknologi dan informasi dalam menunjang bidang hukum terapan

(4) Capaian pembelajaran ketarampilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :

- a. mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai hukum sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk

tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional;

- b. mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya;
- c. mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;
- d. mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memosisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin;
- e. mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data;
- f. mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas;
- g. mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri; dan
- h. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

(5) Capaian pembelajaran keterampilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :

- a. mampu menyusun konsep penyelesaian masalah hukum dengan mengembangkan, dan/atau melalui pengembangan ilmu hukum dan hukum positif, serta melakukan penalaran hukum;

- b. mampu merumuskan ide secara argumentatif dan kreatif di bidang ilmu hukum dan/atau hukum positif khususnya di bidang kenotariatan; dan
- c. kemampuan menguasai bahasa hukum, komunikasi hukum dan sistem IT yang menunjang pengembangan ilmu hukum dan penerapannya;
- d. mampu melakukan penelitian hukum dengan pendekatan inter atau multi disipliner, secara mandiri atau kolaboratif, sehingga menghasilkan produk penelitian yang menjadi bagian dari peta penelitian bidang Ilmu Hukum dan/atau Hukum Positif Indonesia.
- e. Menguasai teknik pembuatan akta secara cermat dan benar.

BAB III BEBAN STUDI

Pasal 3

- (1) Mahasiswa reguler mempunyai beban studi sebanyak 46 (empat puluh enam) SKS yang diprogram dapat diselesaikan dalam 4 (empat) semester.
- (2) Mahasiswa Penyetaraan mempunyai beban studi sebanyak 16 (enambelas) SKS yang diprogram dapat diselesaikan dalam 2 (dua) semester.

BAB IV PENGELOMPOKAN MATAKULIAH

Pasal 4

- (1) Pengelompokan matakuliah pada Program MKn terdiri atas:
 - a. Kelompok Kemagisteran;
 - b. Kelompok Inti; dan
 - c. Kelompok Pilihan

(2) Kelompok Kemagisteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a terdiri dari matakuliah:

- a. Teori Hukum;
- b. Politik Hukum Kenotariatan;
- c. Metode Penelitian Hukum;
- d. Penemuan Hukum; dan
- e. Penelitian dan Tesis.

(3) Kelompok Inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

terdiri dari matakuliah:

- a. Peraturan Jabatan Notaris / PPAT;
- b. Hukum Perikatan;
- c. Hukum Agraria;
- d. Hukum Keluarga dan Harta Perkawinan;
- e. Hukum Perusahaan;
- f. Hukum Jaminan;
- g. Hukum Waris KUH Perdata;
- h. Pengurusan Hak Atas Tanah;
- i. Hukum Perbankan;
- j. Peraturan Lelang;
- k. Teknik Pembuatan Akta I (Akta Pemisahan dan Pembagian Harta Peninggalan);
- l. Teknik Pembuatan Akta II (Akta Berbagai Macam Perjanjian);
- m. Teknik Pembuatan Akta III (Akta Badan-Badan Usaha); dan
- n. Akta Tanah.

(4) Kelompok pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

terdiri dari matakuliah:

- a. Hukum Investasi;
- b. Hukum Tanah Adat;
- c. Hukum Waris Islam dan Adat;
- d. Hukum Pajak; dan
- e. Kontrak Bisnis Internasional.

BAB V
MATAKULIAH WAJIB, MATAKULIAH PILIHAN, KODE MATA KULIAH DAN
MATA KULIAH PRASYARAT

Bagian Kesatu
Matakuliah Wajib

Pasal 5

- (1) Matakuliah Wajib bagi Mahasiswa Reguler adalah matakuliah yang termasuk ke dalam Kelompok Kemagisteran dan Kelompok Inti.
- (2) Matakuliah Wajib bagi Mahasiswa Penyetaraan adalah matakuliah yang termasuk ke dalam Kelompok Kemagisteran.
- (3) Ketentuan mengenai Matakuliah Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat(2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 6

- (1) Matakuliah Pilihan adalah matakuliah yang termasuk ke dalam Kelompok Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) yang dapat dipilih oleh Mahasiswa Reguler berdasarkan minat dan/atau ada keterkaitannya dengan rencana usulan penelitian tesis.
- (2) Matakuliah Pilihan ditempatkan pada semester ganjil pada setiap tahun akademik.
- (3) Matakuliah Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih sebanyak 2 (dua) matakuliah dengan totaal bobot 4 (empat) SKS.

Pasal 7

- (1) Setiap mata kuliah diberi Kode Mata Kuliah.
- (2) Jumlah dan beban sks matakuliah dibagi secara proporsional dalam 4 (empat) semester.

- (3) Kode, pengelola dan sebaran mata kuliah per semester sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 8

- (1) Bagi matakuliah yang mempunyai hubungan prasyarat dapat diambil setelah matakuliah prasyarat dimaksud lulus dengan nilai minimal B.
- (2) Matakuliah yang mempunyai hubungan prasyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Hukum Waris KUHPerdara prasyarat untuk Teknik Pembuatan Akta I;
 - b. Hukum Perikatan prasyarat untuk Teknik Pembuatan Akta II;
 - c. Hukum Perusahaan prasyarat untuk Teknik Pembuatan Akta III;
 - d. Hukum Agraria prasyarat untuk Akta Tanah;

BAB VI

SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN TESIS

Bagian 1

Seminar Proposal

Pasal 9

Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Tesis dilaksanakan dalam bentuk ujian yang dihadiri oleh dosen Pembimbing dan 3 (tiga) orang dosen Penguji.

Pasal 10

- (1) Proposal Penelitian dapat diajukan oleh mahasiswa yang telah lulus mata kuliah Metode Penelitian Hukum dengan nilai minimal B.
- (2) Proposal Penelitian mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dinyatakan layak oleh tim pembahas dapat dilanjutkan ke tahap penelitian tugas akhir.

- (3) Ujian Tesis dapat dilakukan oleh mahasiswa setelah lulus matakuliah Teknik Pembuatan Akta I, Teknik Pembuatan Akta II, Teknik Pembuatan Akta III dan Akta Tanah dengan nilai minimal B.

Pasal 11

- (1) Setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan Program Magister Kenotariatan wajib lulus ujian tesis.
- (2) Ujian tesis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan apabila mahasiswa telah menyelesaikan beban studi minimal 40 sks dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Mempunyai IPK minimal 3,00 (tiga koma nol);
 - b. Tidak mempunyai nilai D, E dan BL;
- (3) Menyerahkan bukti skor TOEFL (minimal 450) dari Pusat Bahasa Universitas Andalas atau Pusat Bahasa lain yang teregistrasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang ujian tesis diatur oleh Dekan.

Pasal 12

Mahasiswa yang telah lulus ujian tesis berhak menyandang gelar Magister Kenotariatan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Mahasiswa yang tidak lulus mata kuliah pilihan dapat mengambil mata kuliah pilihan lainnya pada semester yang sama berdasarkan Peraturan Rektor ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

- (1) Pada saat Peraturan rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 11 Tahun 2010 tentang Kurikulum Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang

Pada tanggal 31 Januari 2018



REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

TAFDHIL HUSNI

NIP. 196211201987021002

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2010**



**KURIKULUM AKADEMIK
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
(PERATURAN REKTOR NOMOR 11 TAHUN 2010)**

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR 10 TAHUN 2010**

TENTANG

**KURIKULUM PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS**

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

Menimbang	:	a.	bahwa untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pendidikan, perlu disusun dan dikembangkan kurikulum dengan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan masyarakat;
		b.	bahwa dengan keluarnya Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 67/D/O/2010 Tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Magister Kenotariatan (S2) pada Fakultas Hukum Universitas Andalas, perlu ditindaklanjuti dengan penetapan kurikulum sebagai dasar penyelenggaraan pendidikan pada Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas;

		c.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Tentang Kurikulum Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
		2.	Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi, sebagaimana diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
		3.	Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
		4.	Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 67/D/O/2010 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Studi Kenotariatan (S2) pada Universitas Andalas di Padang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG
KURIKULUM PROGRAM MAGISTER
KENOTARIATAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Andalas.
2. Fakultas adalah Fakultas Hukum Universitas Andalas.
3. Rektor adalah Rektor Universitas Andalas.
4. Dekan adalah Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
5. Program Magister Kenotariatan yang selanjutnya disebut Program MKn adalah program magister kenotariatan yang berada di bawah pengelolaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
6. Mahasiswa Reguler adalah peserta didik pada Program MKn yang masuk melalui jalur reguler.
7. Mahasiswa Penyetaraan adalah peserta didik pada Program MKn yang masuk melalui jalur khusus dengan persyaratan telah berprofesi sebagai notaris.
8. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran pada program MKn.

9. Matakuliah adalah satuan pelajaran yang diajarkan pada Program MKn.
10. Semester adalah satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu program pendidikan dalam suatu jenjang pendidikan.
11. Sistem Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat SKS, adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
12. Tesis adalah suatu karya tulis ilmiah yang ditulis berdasarkan hasil penelitian, baik berupa penelitian lapangan, dan/atau penelitian kepustakaan.

BAB II BEBAN STUDI

Pasal 2

Beban studi dalam penyelenggaraan pendidikan Program MKn ditetapkan sebagai berikut:

- a. Mahasiswa reguler mempunyai beban studi sebanyak 46 (empat puluh enam) SKS yang diprogram dapat diselesaikan dalam 4 (empat) semester.
- b. Mahasiswa Penyetaraan mempunyai beban studi sebanyak 14 (empat belas) SKS yang diprogram dapat diselesaikan dalam 2 (dua) semester.

BAB III PENGELOMPOKAN MATAKULIAH

Pasal 3

- (1) Pengelompokan matakuliah pada Program MKn terdiri atas:
 - a. Kelompok Kemagisteran;

- b. Kelompok Inti; dan
 - c. Kelompok Pilihan.
- (2) Kelompok Kemagisteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari matakuliah:
- a. Teori Hukum;
 - b. Politik Hukum Kenotariatan;
 - c. Metode Penelitian Hukum;
 - d. Penemuan Hukum; dan
 - e. Penelitian dan Tesis.
- (3) Kelompok Inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari matakuliah:
- a. Peraturan Jabatan Notaris/PPAT
 - b. Hukum Perikatan;
 - c. Hukum Agraria;
 - d. Hukum Keluarga dan Harta Perkawinan;
 - e. Hukum Perusahaan;
 - f. Hukum Jaminan;
 - g. Hukum Waris KUH Perdata;
 - h. Pengurusan Hak Atas Tanah;
 - i. Hukum Perbankan;
 - j. Peraturan Lelang;
 - k. Teknik Pembuatan Akta I (Akta Pemisahan dan Pembagian Harta Peninggalan);
 - l. Teknik Pembuatan Akta II (Akta Berbagai Macam Perjanjian);
 - m. Teknik Pembuatan Akta III (Akta Badan-Badan Usaha); dan
 - n. Akta Tanah.
- (4) Kelompok Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari matakuliah:
- a. Hukum Investasi;
 - b. Hukum Tanah Adat;

- c. Hukum Waris Islam dan Adat;
- d. Hukum Pajak; dan
- e. Kontrak Bisnis Internasional.

BAB IV

MATAKULIAH WAJIB DAN MATAKULIAH PILIHAN

Bagian Kesatu Matakuliah Wajib

Pasal 4

- (1) Mata Kuliah Wajib bagi Mahasiswa Reguler adalah matakuliah yang termasuk ke dalam Kelompok Kemagisteran dan Kelompok Inti.
- (2) Matakuliah Kuliah Wajib bagi Mahasiswa Penyetaraan adalah matakuliah yang termasuk ke dalam Kelompok Kemagisteran.
- (3) Ketentuan mengenai Matakuliah Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Bagian Kedua Matakuliah Pilihan

Pasal 5

- (1) Matakuliah Pilihan adalah matakuliah yang termasuk ke dalam Kelompok Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) yang dapat dipilih oleh Mahasiswa Reguler berdasarkan minat dan/atau ada keterkaitannya dengan rencana usulan penelitian tesis.
- (2) Matakuliah Pilihan ditempatkan pada semester ganjil pada setiap tahun akademik.
- (3) Matakuliah Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dipilih sebanyak 2 (dua) matakuliah dengan total bobot 4 (empat) SKS.

Pasal 6

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 29 September 2010

REKTOR,

Prof Dr Ir Musliar Kasim. MS
NIP: 195804291984031006

Lampiran	:	Keputusan Rektor Universitas Andalas
	Nomor	: 10 Tahun 2010
	Tanggal	: 29 September 2010
	Tentang	: Kurikulum Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas

**KURIKULUM PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS**

1. Matakuliah Wajib Mahasiswa Reguler terdiri dari:

No.	Kode	Nama Mata Kuliah	Jumlah SKS
1.	MKN-511	Teori Hukum	2
2.	MKN-512	Politik Hukum Kenotariatan	2
3.	MKN-513	Peraturan Jabatan Notaris/PPAT	2
4.	MKN-514	Hukum Perikatan	2
5.	MKN-515	Hukum Agraria	2
6.	MKN-516	Hukum Keluarga dan Harta Perkawinan	2
7.	MKN-517	Hukum Perusahaan	2
8.	MKN-518	Hukum Jaminan	2
9.	MKN-521	Metode Penelitian Ilmu Hukum	2
10.	MKN-522	Penemuan Hukum	2
11.	MKN-523	Hukum Waris KUH Perdata	2
12.	MKN-526	Pengurusan Hak atas Tanah	2
13.	MKN-527	Hukum Perbankan	2
14.	MKN-528	Peraturan Lelang	2
15.	MKN-611	Teknik Pembuatan Akta I (Akta Pemisahan dan Pembagian Harta Peninggalan)	2

16	MKN-612	Teknik Pembuatan Akta II (Akta Berbagai Macam Perjanjian)	2
17.	MKN-613	Teknik Pembuatan Akta III (Akta Badan-Badan Usaha)	2
18.	MKN-614	Akta Tanah	2
19.	MKN-621	Penelitian dan Tesis	6
Total jumlah SKS			42

2. Matakuliah Wajib Mahasiswa Penyetaraan terdiri dari:

No.	Kode	Nama Mata Kuliah	Jumlah SKS
1.	MKN-511	Teori Hukum	2
2.	MKN-512	Politik Hukum Kenotariatan	2
3.	MKN-521	Metode Penelitian Ilmu Hukum	2
4.	MKN-522	Penemuan Hukum	2
5.	MKN-621	Penelitian dan Tesis	6
Total jumlah SKS			14

3. Matakuliah Pilihan Mahasiswa Reguler terdiri dari:

No.	Kode	Nama Matakuliah	Jumlah SKS
1.	MKN-529	Hukum Investasi	2
2.	MKN-525	Hukum Tanah Adat	2
3.	MKN-524	Hukum Waris Islam dan Adat	2
4.	MKN-531	Hukum Pajak	2
5.	MKN-530	Kontrak Bisnis Internasional	2

4. Struktur dan sebaran matakuliah Mahasiswa Reguler pada setiap tahun akademik sebagai berikut:

No.	Kode	Semester I	Jumlah SKS
1.	MKN-511	Teori Hukum	2
2.	MKN-512	Politik Hukum Kenotariatan	2

3.	MKN-513	Peraturan Jabatan Notaris/ PPAT	2
4.	MKN-514	Hukum Perikatan	2
5.	MKN-515	Hukum Agraria	2
6.	MKN-516	Hukum Keluarga dan Harta Perkawinan	2
7.	MKN-517	Hukum Perusahaan	2
8.	MKN-518	Hukum Jaminan	2
Total jumlah SKS			16

No.	Kode	Semester II	Jumlah SKS
1.	MKN-521	Metode Penelitian Ilmu Hukum	2
2.	MKN-522	Penemuan Hukum	2
3.	MKN-523	Hukum Waris KUH Perdata	2
4.	MKN-526	Pengurusan Hak atas Tanah	2
5.	MKN-527	Hukum Perbankan	2
6.	MKN-528	Peraturan Lelang	2
7.	MKN-529	Hukum Investasi*	2
8.	MKN-525	Hukum Tanah Adat*	2
9.	MKN-524	Hukum Waris Islam dan Adat*	2
10.	MKN-531	Hukum Pajak*	2
11.	MKN-530	Kontrak Bisnis Internasional*	2
Total jumlah SKS			16
Keterangan: (*) matakuliah pilihan yang dapat dipilih mahasiswa sebanyak 2 (dua) matakuliah			

No.	Kode	Semester III	Jumlah SKS
1.	MKN-611	Teknik Pembuatan Akta I (Akta Pemisahan dan Pembagian Harta Peninggalan).	2

2.	MKN-612	Teknik Pembuatan Akta II (Akta Berbagai Macam Perjanjian)	2
3.	MKN-613	Teknik Pembuatan Akta III (Akta Badan-Badan Usaha)	2
4.	MKN-614	Akta Tanah	2 /
Total jumlah SKS			8

No.	Kode	Semester IV	Jumlah SKS
1.	MKN-621	Penelitian dan Tesis	6
Total jumlah SKS			6

5. Struktur dan Sebaran Matakuliah Mahasiswa Penyetaraan pada setiap tahun akademik sebagai berikut:

No.	Kode	Semester I	Jumlah SKS
1.	MKN-511	Teori Hukum	2
2.	MKN-512	Politik Hukum Kenotariatan	2
3.	MKN-521	Metode Penelitian Ilmu Hukum	2
4.	MKN-522	Penemuan Hukum	2
Total jumlah SKS			8

No.	Kode	Semester IV	Jumlah SKS
1.	MKN-621	Penelitian dan Tesis	6
Total jumlah SKS			6

REKTOR,

Prof Dr Ir Musliar Kasim. MS
NIP: 195804291984031006



AKREDITASI PROGRAM STUDI MAGISTER

PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM

BUKU IIIA
BORANG PROGRAM STUDI
MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS

**BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI
2018**



AKREDITASI PROGRAM STUDI MAGISTER

BUKU III A
BORANG PROGRAM STUDI
MAGISTER KENOTARIATAN



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
2018



DAFTAR ISI

	Halaman
STANDAR 1 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, SERTA STRATEGI PENCAPAIAN	6
STANDAR 2 TATA PAMONG, KEPEMIMPINAN, SISTEM PENGELOLAAN, DAN PENJAMINAN MUTU	15
STANDAR 3 MAHASISWA DAN LULUSAN.....	40
STANDAR 4 SUMBER DAYA MANUSIA	65
STANDAR 5 KURIKULUM, PEMBELAJARAN, DAN SUASANA AKADEMIK	114
STANDAR 6 PEMBIAYAAN, SARANA DAN PRASARANA, SERTA SISTEM INFORMASI	165
STANDAR 7 PENELITIAN, PELAYANAN/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN KERJASAMA	190

BORANG PROGRAM STUDI

IDENTITAS

Program Studi (PS) : Magister Kenotariatan
Unit Pengelola Program Studi : Fakultas Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Andalas
Nomor SK Pendirian PS (*) : 67/D/O/2010 tentang Pemberian
Izin Penyelenggaraan Program Studi
Kenotariatan (S2)
Tanggal SK Pendirian PS : 9 Juni 2010.
Pejabat Penandatanganan
SK Pendirian PS : Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan Nasional Republik
Indonesia
Bulan & Tahun Dimulainya
Penyelenggaraan PS : 9 Juni 2010
Nomor SK Izin Operasional (*) : Keputusan Menteri Pendidikan Republik
Indonesia Nomor 67/D/O/2010 tentang
Pemberian Izin Penyelenggaraan Program
Studi Kenotariatan (S2) Pada Universitas Andalas
di Padang
Tanggal SK Izin Operasional : 9 Juni 2010
Peringkat (Nilai) Akreditasi Terakhir : B
Nomor SK BAN-PT : 183/SK/BAN-PT/Akred/M/VI/2014
Alamat PS : Fakultas Hukum Universitas Andalas
Jalan Pancasila No. 10 Padang
No. Telepon PS : 0751-34605, 27404
No. Faksimili PS : 0751-34605
Homepage dan E-mail PS : mkn.unand@gmail.com

(*) : Lampirkan fotokopi SK terakhir

Bagi PS yang dibina oleh Departemen Pendidikan Nasional, sebutkan nama dosen tetap institusi yang terdaftar sebagai dosen tetap PS berdasarkan SK 034/DIKTI/Kep/2002, dalam tabel di bawah ini.

No.	Nama Dosen Tetap	NIDN**	Tgl. Lahir	Jabatan Akademik	Gelar Akademik	Pendidikan S1, S2, S3 dan Asal PT	Bidang Keahlian untuk Setiap Jenjang Pendidikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Yuliandri	0018076201	18-07-1962	Guru Besar	Prof. Dr. SH., MH.	S1 Unand	Ilmu Hukum (Hukum Tata Negara)
						S2 Unpad	Ilmu Hukum
						S3 Unair	Ilmu Hukum
2.	Yulia Mirwati	0029075803	29-07-1958	Guru Besar	Prof. Dr. SH., CN., MH.	S1 Unand	Ilmu Hukum (Hukum Perdata)
						Sp1 USU	Kenotariatan
						S2 USU	Ilmu Hukum
						S3 USU	Ilmu Hukum
3.	Elwi Danil	0025066002	25-06-1960	Guru Besar	Prof. Dr. SH., MH.	S1 Unand	Ilmu Hukum (Hukum Pidana)
						S2 UI	Ilmu Hukum
						S3 UI	Ilmu Hukum
4.	Yaswirman	0001085705	01-08-1957	Guru Besar	Prof. Dr. Drs. MA.	S1 IAIN Imam Bonjol Padang	Syariah
						S2 IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta	Syariah
						S3 IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta	Syariah
5.	Ismansyah	0010105905	10-10-1959	Guru Besar	Prof. Dr. SH., MHum.	S1 Unand	Ilmu Hukum (Hukum Pidana)
						S2 Undip	Ilmu Hukum
						S3 Undip	Ilmu Hukum

6.	Saldi Isra	0020086804	20-08-1968	Guru Besar	Prof. Dr. SH., MPA.	S1 Unand	Ilmu Hukum (Hukum Tata Negara)
						S2 University Malaya Malaysia	Administrasi Publik
						S3 UGM	Ilmu Hukum
7.	Zainul Daulay	0022115904	22-11-1959	Guru Besar	Prof. Dr. SH., MHum.	S1 Unand	Ilmu Hukum (Hukum Internasional)
						S2 Unpad	Ilmu Hukum
						S3 Unhas	Ilmu Hukum
8.	Busyra Azheri	0018116901	18-11-1969	Lektor Kepala	Dr. SH., MHum.	S1 Unand	Ilmu Hukum (Hukum Perdata)
						S2 Unibraw	Ilmu Hukum
						S3 Unibraw	Ilmu Hukum
9.	Yulfasni	0007115801	07-11-1958	Lektor	Dr. SH., MH.	S1 Unand	Ilmu Hukum (Hukum Perdata)
						S2 UI	Ilmu Hukum
						S3 UI	Ilmu Hukum
10.	Azmi Fendri	0010057510	10-05-1975	Lektor	Dr. SH., MKn.	S1 Unand	Ilmu Hukum
						S2 Undip	Notariat
						S3 Unibraw	Ilmu Hukum
11.	Dahlil Marjon	0020045905	20-04-1959	Lektor Kepala	Dr. SH., M.Hum.	S1 Unand	Ilmu Hukum (hukum Perdata)
						S2 Unibraw	Ilmu Hukum
						S3 Unibraw	Ilmu Hukum
12.	Rembrandt	0022026402	22-02-1964	Lektor Kepala	Dr. SH., M.Pd.	S1 Unand	Ilmu Hukum (Hukum Administrasi Negara)
						S2 UNP	Ilmu Pendidikan
						S3 Unand	Ilmu Hukum

13.	Yuslim	0006075701	06-07-1957	Lektor Kepala	Dr. SH., MH.	S1 Unand	Ilmu Hukum
						S2 Unpad	Ilmu Hukum
						S3 Unand	Ilmu Hukum
14.	Zefrizal Nurdin	0017095704	17-09-1957	Lektor Kepala	Dr. SH., MH.	S1 UGM	Ilmu Hukum
						S2 Undip	Ilmu Hukum
						S3 Unand	Ilmu Hukum
15.	Jean Elvardi	0019116103	19-11-1961	Lektor Kepala	Dr. SH., M.H.	S1 Unand	Ilmu Hukum (Hukum Internasional)
						S2 Unair	Ilmu Hukum
						S3 Unpad	Ilmu Hukum
16.	Yussy Adelina Mannas	0018028401	18-02-1984	Asisten Ahli	Dr. SH., M.H.	S1 Unand	Ilmu Hukum (Hukum Perdata)
						S2 Unpad	Ilmu Hukum
						S3 Unpad	Ilmu Hukum

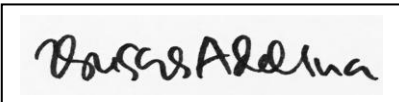
** NIDN : Nomor Induk Dosen Nasional

IDENTITAS PENGISI BORANG PROGRAM STUDI

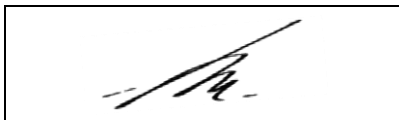
Nama : Dr. Azmi Fendri, SH.,M.Kn
NIDN : 00-1005-7510
Jabatan : Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Tanggal Pengisian : 14 Desember 2018
Tanda Tangan :



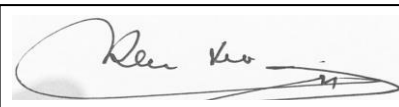
Nama : Dr. Yussy Adelina Mannas, SH., MH
NIDN : 00-1802- 8401
Jabatan : Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan
Tanggal Pengisian : 14 Desember 2018
Tanda Tangan :



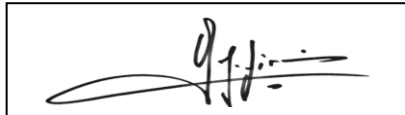
Nama : Prof. Dr. Yuliandri, SH, MH
NIDN : 131803173
Jabatan : Anggota Tim Penyusun Borang Akreditasi
Tanggal Pengisian : 14 Desember 2018



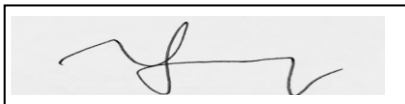
Nama : Dr. Rembrandt SH.,MPd
NIDN : 00-2202-6402
Jabatan : Anggota Tim Penyusun Borang Akreditasi
Tanggal Pengisian : 14 Desember 2018
Tanda Tangan :



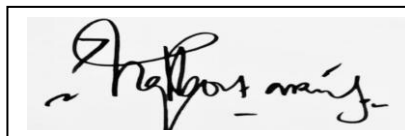
Nama : Dr. Syofirman Syofyan, SH., MH
NIDN : 00-2102-6402
Jabatan : Anggota Tim Penyusun Borang Akreditasi
Tanggal Pengisian : 14 Desember 2018
Tanda Tangan :



Nama : Dr. Yasniwati, SH., MH
NIDN : 00-1312-7204
Jabatan : Anggota Tim Penyusun Borang Akreditasi
Tanggal Pengisian : 14 Desember 2018
Tanda Tangan :



Nama : Neneng Oktarina, SH., MH
NIDN : 00-0710-6901
Jabatan : Anggota Tim Penyusun Borang Akreditasi
Tanggal Pengisian : 14 Desember 2018
Tanda Tangan :





STANDAR 1

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, SERTA STRATEGI PENCAPAIAN

IIIA

Borang Akreditasi Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Andalas

1.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran serta Strategi Pencapaian

1.1.1 Jelaskan mekanisme penyusunan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi, serta pihak-pihak yang dilibatkan.

A. MEKANISME PENYUSUNAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM STUDI

Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas (Prodi MKn FH Unand) didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 67/D/O/2010. Dalam merumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi sebagai acuan dalam penyelenggaraan kegiatan perkuliahan pada prodi M.Kn, proses penyusunannya dilakukan dalam rapat kerja yang dilaksanakan dalam beberapa tahapan secara bertingkat, meliputi :

1. Pembentukan Tim Penyusun oleh Dekan

Tim Penyusun terdiri dari Dekan Fakultas, Wakil Dekan, Ketua dan Sekretaris Program di lingkungan Fakultas (S1, S2, dan S3), perwakilan dosen tetap dan dosen tidak tetap (dosen luar biasa) dan perwakilan alumni yang berprofesi Notaris/PPAT serta asosiasi Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT).

2. Rapat Kerja

Setelah Tim Penyusun dibentuk Dekan, dilakukan Rapat Kerja Tahunan untuk merumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi MKn.

3. Lokakarya

Lokakarya Program Pascasarjana FH Unand dilaksanakan selama dua hari pada tanggal 22 dan 23 Agustus 2015 di Hotel Aliga Padang. Pada Lokakarya ini melibatkan seluruh stakeholders, baik eksternal maupun internal. Pihak Eksternal terdiri dari Ikatan Notaris Indonesia (INI), Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT), Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan lembaga perbankan. Pihak Internal terdiri dari Pimpinan fakultas,

Pimpinan program studi, Dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan dan alumni.

4. Rapat Senat Fakultas

Hasil lokakarya dibawa pada Rapat Senat Fakultas, dan pada tingkat Rapat Senat Fakultas ditetapkanlah visi, misi, tujuan dan sasaran dari Prodi MKn FH Unand, dengan mempertimbangkan visi dan misi Universitas Andalas, serta visi dan misi Fakultas Hukum Universitas Andalas. Kemudian visi, misi, tujuan dan sasaran program studi tersebut dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) FH Universitas Andalas.

B. PIHAK YANG DILIBATKAN DALAM PENYUSUNAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM STUDI MKN FH UNAND

Adapun unsur-unsur (pihak) yang dilibatkan dalam penyusunan visi, misi, tujuan dan sasaran Prodi MKn FH Unand adalah sebagai berikut :

1. Pimpinan Fakultas
2. Pengelola Program Studi
3. Dosen Program Studi
4. Perwakilan Tenaga Pendidikan
5. Perwakilan Mahasiswa setiap Program Studi
6. Alumni setiap Program Studi pada Fakultas Hukum
7. Perwakilan Anggota Ikatan Notaris Indonesia (INI) Sumatera Barat.
8. Perwakilan Anggotan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Sumatera Barat.
9. Badan Pertanahan Nasional (BPN)
10. Perwakilan Lembaga Perbankan

Visi Program Studi

Menjadi program pendidikan Magister Kenotariatan terkemuka dan bermartabat serta mampu bersaing pada tingkat nasional dan regional.

Penjelasan Visi :

Rumusan Visi Prodi MKn FH Unand dapat diuraikan sebagai berikut :

Terkemuka : Hal ini terkait dengan perkembangan ilmu kenotariatan dan peningkatan minat untuk memilih Prodi MKn FH Unand sebagai lembaga pendidikan lanjut bagi lulusan Sarjana.

Bermartabat : Hal ini terkait dengan integritas lulusan dari Prodi MKn FH Unand yang menjunjung tinggi nilai agama, etika, moral dan akademik.

Mampu bersaing pada tingkat nasional : Menjadi lembaga pendidikan Magister Kenotariatan yang memiliki komponen yang diperlukan untuk menjalankan operasional pendidikan seperti meningkatkan kualitas dosen dan mahasiswa, sarana prasarana, struktur organisasi, monitoring, evaluasi dan penjaminan mutu.

Mampu bersaing pada tingkat regional : Menjadi lembaga pendidikan yang berstandar internasional sehingga mampu bersaing secara regional.

Misi Program Studi

Untuk mewujudkan visi program studi, maka ditetapkanlah misi Prodi MKn FH Unand Unand sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi notaris yang berkualitas, berkarakter serta berkesinambungan.
2. Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif serta pengabdian yang berkualitas untuk menunjang kemandirian bangsa.
3. Mengembangkan organisasi dalam meningkatkan kualitas tata kelola program Magister Kenotariatan yang baik, menuju tata kelola yang unggul serta mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan strategis.
4. Menjalin jaringan kerja sama yang produktif dan berkelanjutan dengan lembaga pendidikan program Magister Kenotariatan, pemerintah dan dunia usaha di tingkat daerah, nasional dan internasional.

Tujuan Program Studi

Tujuan dari Prodi MKn FH Unand sebagai berikut :

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
2. Mampu menyusun konsep penyelesaian masalah hukum dengan mengembangkan, dan/atau melalui pengembangan ilmu hukum dan hukum positif, serta melakukan penalaran hukum;
3. Mampu merumuskan ide secara argumentatif dan kreatif di bidang ilmu hukum dan/atau hukum positif khususnya di bidang kenotariatan; dan

4. Kemampuan menguasai bahasa hukum, komunikasi hukum dan sistem informasi dan teknologi yang menunjang pengembangan ilmu hukum dan penerapannya;
5. Mampu melakukan penelitian hukum dengan pendekatan inter atau multi disipliner, secara mandiri atau kolaboratif, sehingga menghasilkan produk penelitian yang menjadi bagian dari peta penelitian bidang Ilmu Hukum dan/atau Hukum Positif Indonesia.
6. Menguasai teknik pembuatan akta secara cermat dan benar.

1.1.2 Sasaran dan Strategi Pencapaian Program Studi

Sasaran Program Studi :

Prodi MKn FH Unand memiliki sasaran untuk menghasilkan lulusan yang memahami teori-teori dalam ilmu hukum, doktrin, dan memiliki keahlian dalam membuat akta, baik selaku seorang Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) maupun ahli hukum pada umumnya serta menghasilkan penelitian yang dapat dipublikasikan pada jurnal-jurnal yang terakreditasi, baik dalam lingkup nasional maupun internasional.

Strategi Pencapaian Program Studi :

1. Mengembangkan kurikulum berbasis kompetensi dengan memperhatikan aspek kemagisteran dan aspek keprofesian;
2. Melakukan lokakarya kurikulum sekali dua tahun dengan melibatkan *Stakeholders*;
3. Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam penguasaan dan pemahaman materi perkuliahan melalui kegiatan dalam bentuk tutorial, diskusi kelompok, tugas mandiri atau kelompok, ujian tengah semester dan ujian akhir semester secara terjadual.
4. Meningkatkan jumlah koleksi buku perpustakaan, mempersiapkan perpustakaan online & *e-book library*, dan meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan.
5. Meningkatkan kompetensi dan keahlian mahasiswa dalam pembuatan akta melalui kegiatan terstruktur di Labor Akta;
6. Meningkatkan manajemen internal dan mengembangkan metode pembelajaran berbasis *Problem Based Learning* (PBL);

7. Melaksanakan kegiatan diskusi ilmiah dan seminar dengan melibatkan dosen, mahasiswa dan asosiasi profesi INI dan IPPAT;
8. Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi Proses Belajar Mengajar (PBM);
9. Meningkatkan dan menyediakan dana penelitian serta pengabdian pada masyarakat yang bersifat kompetitif kepada dosen dengan melibatkan mahasiswa;
10. Menghasilkan penelitian yang dapat dipublikasikan dalam jurnal yang terakreditasi;

Meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait, seperti Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (pengurus pusat, wilayah, dan daerah), Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

Penjelasan Sasaran dan Strategi Pencapaian :

Penyusunan visi, misi, sasaran dan tujuan Prodi MKn FH Unand dirumuskan dengan berdasar kepada Rencana Strategis (Renstra) Universitas Andalas dan Renstra Fakultas Hukum Universitas Andalas. Untuk mewujudkan visi program studi, diperlukan rentang waktu 15 – 20 tahun guna menjadi Program Studi yang mampu bersaing pada tingkat nasional, regional dan berstandar internasional, dengan sasaran sebagai berikut :

Strategi pencapaian dilakukan dalam 4 aspek strategis :

1. Aspek Pendidikan
2. Aspek Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
3. Aspek Kemahasiswaan dan Alumni
4. Aspek Kelembagaan dan Kerjasama

Aspek - aspek strategis diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. **Tahun 2015 - 2020** : Menjadi program pendidikan Magister Kenotariatan terkemuka dan bermartabat serta mampu bersaing pada tingkat nasional, dengan strategi :
 - a. Strategi Pada Aspek Pendidikan : Melakukan peningkatan mutu program studi, Melakukan peningkatan kualitas Dosen, Melakukan percepatan

guru besar, Melakukan peningkatan mutu calon mahasiswa.

- b. Strategi Pada Aspek Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat: Melakukan peningkatan mutu penelitian, Melakukan peningkatan kerja sama penelitian dalam negeri, Melakukan peningkatan kerja sama penelitian luar negeri.
- c. Strategi Pada Aspek Kemahasiswaan dan Alumni : Meningkatkan pembentukan jati diri mahasiswa, Meningkatkan inovasi dan kreativitas mahasiswa, Meningkatkan jumlah mahasiswa penerima beasiswa, meningkatkan peran mahasiswa pada konferensi nasional.
- d. Strategi pada Aspek Kelembagaan dan Kerjasama : Melakukan pengembangan sistem Informasi, Melakukan pengembangan sistem monitoring dan evaluasi, Melakukan peningkatan sarana dan prasarana yang berstandar International, Meningkatkan Akreditasi Program Studi, Melakukan peningkatan sumber dana baru.

2. Tahun 2020 - 2025 : Menjadi program pendidikan Magister Kenotariatan terkemuka dan bermartabat serta mampu bersaing pada tingkat regional

- a. Strategi Pada Aspek Pendidikan : Melakukan peningkatan efisiensi proses belajar mengajar, Melakukan perbaikan sarana dan prasarana proses belajar mengajar, Melakukan peningkatan sumber dan media pendidikan, Melakukan peningkatan daya saing lulusan dan daya saing internasional
- b. Strategi Pada Aspek Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat: Melakukan peningkatan kapasitas sumber daya dalam bidang penelitian. Melakukan peningkatan kapasitas kelembagaan penelitian, Melakukan peningkatan kualitas dan kuantitas publikasi, Peningkatan jurnal internasional yang bereputasi.
- c. Strategi Pada Aspek Kemahasiswaan dan Alumni : Meningkatkan prestasi mahasiswa, Meningkatkan peran mahasiswa pada konferensi tingkat regional dan internasional.
- d. Strategi pada Aspek Kelembagaan dan Kerjasama : Melakukan penataan organisasi, Melakukan peningkatan kualitas dan kuantitas daya tampung, Melakukan peningkatan kualitas Tenaga Kependidikan.

- 3. Tahun 2025 - 2030** : Menjadi program pendidikan Magister Kenotariatan terkemuka dan bermartabat serta berstandar internasional.
- a. Strategi Pada Aspek Pendidikan : Melakukan pemantapan implementasi kurikulum berbasis kompetensi yang berstandar KKNi dengan berbasis *learning Outcome*, Melakukan peningkatan sistem informasi untuk layanan akademik pascasarjana, Melakukan pengembangan pendidikan kewirausahaan, Memiliki kuliah dengan kelas berbahasa Inggris dan meningkatkan *visiting lecture programme* dengan perguruan tinggi di luar negeri.
 - b. Strategi Pada Aspek Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat : Peningkatan nilai guna penelitian, Melakukan peningkatan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, Melakukan peningkatan kapasitas sumber daya untuk pengabdian pada masyarakat.
 - c. Strategi Pada Aspek Kemahasiswaan dan Alumni : Meningkatkan jiwa kewirausahaan mahasiswa, Meningkatkan daya saing lulusan.
 - d. Strategi Pada Aspek Kemahasiswaan dan Alumni : Meningkatkan kerjasama kegiatan ilmiah dengan Institusi dalam negeri dan luar negeri, Meningkatkan penyelenggaraan kegiatan internasional, Meningkatkan daya saing di tingkat Internasional.

1.2 Sosialisasi

Uraikan upaya penyebaran/sosialisasi visi, misi dan tujuan program studi serta pemahaman sivitas akademika (dosen dan mahasiswa) dan tenaga kependidikan.

Berbagai kegiatan konkrit telah dilakukan oleh Prodi MKn FH Unand untuk mensosialisasikan visi dan misi serta tujuan program studi kepada segenap civitas akademika (dosen dan mahasiswa), dan segenap tenaga kependidikan untuk mengetahui tingkat pemahaman. Upaya penyebaran atau sosialisasi tentang visi, misi, dan tujuan program studi ini dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sebagai berikut :

A. Sosialisasi Internal :

1. Rapat kerja dewan dosen; Rapat dewan dosen diselenggarakan dua kali dalam setahun, selalu menekankan agar seluruh program kerja yang dijalankan oleh setiap program studi selaras dengan visi, misi, tujuan dan sasaran dari masing – masing program studi.

2. Rapat Evaluasi : Rapat evaluasi terbagi atas dua, yaitu rapat evaluasi dosen, serta rapat evaluasi pengelola dengan tenaga kependidikan; Rapat evaluasi ini diselenggarakan setiap tahun. Rapat evaluasi dosen Prodi MKn FH Unand dilakukan dengan mengundang seluruh dosen pengajar akademisi dan praktisi, guna melakukan evaluasi terhadap proses belajar mengajar yang dilakukan telah sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran Prodi MKn FH Unand.
3. Pada saat orientasi mahasiswa baru; Pada masa orientasi, setiap mahasiswa baru di Prodi MKn FH Unand mendapatkan buku panduan akademik, diantaranya berisi visi, misi, tujuan dan sasaran Prodi MKn FH Unand.
4. Pembuatan leaflet dan pemasangan poster di tempat-tempat strategis di lingkungan kampus, seperti di ruang pengelola, papan pengumuman, dan ruang perkuliahan.

B. Media Sosialisasi :

1. Melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; Prodi MKn FH Unand melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan keilmuan Prodi MKn FH Unand, diantaranya ; sengketa tanah ulayat, pendaftaran tanah, dan hal – hal lain yang terkait dengan akta otentik yang ada kaitannya dengan kenotariatan.
2. Publikasi melalui :
 - a) Media cetak
 - b) Website fakultas ; Visi misi Prodi MKn FH Unand dapat diakses melalui laman :
<https://fhuk.unand.ac.id/index.php/program-studi/magister-s2/kenotariatan-mkn> .
 - c) Video profil : merupakan video profil fakultas hukum yang dapat diakses melalui laman <http://fhuk.unand.ac.id> .
 - d) Melakukan kunjungan ke beberapa daerah.

C. Tingkat Pemahaman stakeholders terhadap visi dan misi

Prodi MKn FH Unand melakukan survey dengan media elektronik kepada segenap stakeholders, dari keseluruhan 125 responden, maka dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Tingkat pemahaman dosen terhadap visi dan misi serta tujuan Prodi MKn FH Unand adalah 85% sangat baik, 10% baik dan 5% cukup baik.
2. Tingkat pemahaman mahasiswa terhadap visi dan misi serta tujuan Prodi MKn FH Unand adalah 80% sangat baik, 15% baik dan 5% cukup baik.
3. Tingkat pemahaman tenaga kependidikan terhadap visi dan misi serta tujuan Prodi MKn FH Unand adalah 87% sangat baik, 13% baik dan 10% cukup baik.



STANDAR 2

TATA PAMONG, KEPEMIMPINAN, SISTEM PENGELOLAAN, DAN PENJAMINAN MUTU

IIIA

Borang Akreditasi Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Andalas

2.1 Sistem Tata Pamong

Tata pamong program studi harus mencerminkan pelaksanaan *good university governance* dan mengakomodasi seluruh nilai, norma, struktur, peran, fungsi, dan aspirasi pemangku kepentingan program studi. Kepemimpinan program studi harus secara efektif memberi arah, motivasi dan inspirasi untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, mencapai tujuan dan sasaran melalui strategi yang dikembangkan

Tata pamong (*governance*) merupakan sistem untuk memelihara efektivitas peran para konstituen dalam pengembangan kebijakan, pengambilan keputusan, dan penyelenggaraan program studi. Tata pamong yang baik jelas terlihat dari lima kriteria yaitu kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab, dan adil.

Sistem tata pamong berjalan secara efektif melalui mekanisme yang disepakati bersama, serta dapat memelihara dan mengakomodasi semua unsur, fungsi, dan peran dalam program studi. Tata pamong didukung dengan budaya organisasi yang dicerminkan dengan ada dan tegaknya aturan, tatacara pemilihan pimpinan, etika dosen, etika mahasiswa, etika tenaga kependidikan, sistem penghargaan dan sanksi serta pedoman dan prosedur pelayanan (administrasi, perpustakaan, laboratorium, dan studio). Sistem tata pamong (*input*, proses, *output* dan *outcome* serta lingkungan eksternal yang menjamin terlaksananya tata pamong yang baik) harus diformulasikan, disosialisasikan, dilaksanakan, dipantau dan dievaluasi dengan peraturan dan prosedur yang jelas.

Jelaskan secara ringkas sistem dan pelaksanaan tata pamong di program studi untuk membangun sistem tata pamong yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan adil dalam mewujudkan visi, melaksanakan misi, mencapai tujuan dan melaksanakan strategi pencapaian sasaran.

Prodi MKn FH Unand sudah mempunyai tata pamong yang dapat menjamin terwujudnya visi dan terlaksananya misi serta tercapainya tujuan program studi. Untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan Prodi MKn FH Unand, digunakan strategi lima pilar tata pamong yaitu: kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan adil.

Prodi MKn FH Unand menyusun sistem tata pamong berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan organisasi satuan kerja, dengan memperhatikan:

1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas; dan
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas.

Dalam kaitannya dengan kebutuhan organisasi satuan kerja, proses penyusunan sistem tata pamong Prodi MKn FH Unand dilakukan berdasarkan pertimbangan dan masukan baik secara internal maupun secara eksternal antara lain hasil audit mutu internal (AMI) yang dilakukan oleh Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LPPPM) maupun hasil audit mutu eksternal yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT).

Mekanisme penyusunan sistem tata pamong Program Studi MKn FH Unand dilakukan secara bertingkat dengan melibatkan segenap stakeholders. Adapun strategi yang digunakan dalam menyusun tata pamong mengacu pada 5 (lima) pilar tata pamong yaitu :

1. Kredibel;

Penerapan pilar kredibilitas sebagai bagian dari sistem tata pamong diatur dalam berbagai peraturan, diantaranya ; Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 25 Tahun 2012 tentang Kode Etik Dosen Universitas Andalas, Peraturan Rektor Nomor 24 Tahun 2012 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tenaga Kependidikan Universitas Andalas, Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2016 tentang Peraturan Akademik Universitas Andalas, Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kode Etik Mahasiswa, serta berbagai peraturan kepegawaian lainnya yang berlaku pada Program Studi M.Kn FHUK Unand. Kredibilitas juga diwujudkan dalam rekrutmen SDM yang diseleksi dan dikembangkan untuk memenuhi SDM yang

berkualitas, meliputi kompetensi dan integritas personal.

2. Transparan;

Sikap transparansi tercermin dari adanya keterbukaan dari segenap unsur pimpinan. Hal ini dapat dilihat dari adanya media public complaint yang dilakukan satu kali dalam satu semester dalam bentuk dialog interaktif yang melibatkan mahasiswa. Hasil public complaint tersebut dibawa ke dalam rapat pimpinan untuk dievaluasi. Di samping itu penerapan pilar transparansi pada Program Studi MKn FHUK Unand juga dilaksanakan berkaitan dengan pelayanan akademik. Hal ini dapat dilihat mulai dari proses perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan atau pengendalian yang dapat diakses oleh pihak yang membutuhkan.

3. Akuntabel;

Penerapan nilai akuntabilitas dalam sistem tata pamong pada Prodi MKn FH Unand ditentukan berdasarkan Statuta Universitas Andalas, yang meliputi pengisian jabatan-jabatan pada Prodi MKn FH Unand, antara lain perihal persyaratan jabatan, mekanisme pemilihan, ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan kewenangan. Pelaksanaan pelayanan kegiatan akademik dan pengelolaan keuangan diselenggarakan dibawah pengawasan dan monitoring Gugus Kendali Mutu (GKM) yang ada pada Prodi MKn FH Unand. Hasil pengawasan dan monitoring GKM akan dievaluasi oleh Badan Penjaminan Mutu (BAPEM) Fakultas.

4. Bertanggungjawab;

Penyelenggaraan kegiatan akademik program studi dilaksanakan berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan oleh Pimpinan Fakultas dan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku dalam skala nasional dan peraturan internal yang ditetapkan oleh pimpinan Universitas, Fakultas dan Koordinator Program Studi. Dalam rapat kerja fakultas, Koordinator Program Studi akan menyampaikan laporan pada Pimpinan Fakultas, dan kemudian ditindaklanjuti dengan penyampaian evaluasi kinerja akademik secara berkala kepada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan tinggi yang dilakukan dibawah koordinasi Fakultas.

5. Adil;

Penerapan pilar keadilan dalam tata pamong pada Prodi MKn FH Unand dilakukan secara profesional, proporsional dan tanpa diskriminatif. Nilai keadilan diterapkan

dalam berbagai aspek, diantaranya dalam hal penugasan pengampu mata kuliah, penentuan jumlah mahasiswa yang dapat dibimbing dan diuji oleh dosen, dan penetapan jadwal kuliah. Pemberian penghargaan dan sanksi juga diterapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini juga diterapkan bagi mahasiswa yang tidak memenuhi peraturan akademik dan kode etik sebagai mahasiswa, maka penyelesaiannya akan didasarkan pada Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan dalam Peraturan Universitas.

Berdasarkan lima pilar tersebut, maka Prodi MKn FH Unand telah melaksanakan system tata pamong yang baik, dan sistem tata pamong yang diterapkan oleh Prodi MKn FH Unand merupakan salah satu upaya untuk mensinergikan perwujudan visi, pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran Prodi MKn FH Unand.

2.2 Kepemimpinan

Kepemimpinan efektif mengarahkan dan mempengaruhi perilaku semua unsur dalam program studi, mengikuti nilai, norma, etika, dan budaya organisasi yang disepakati bersama, serta mampu membuat keputusan yang tepat dan cepat.

Kepemimpinan mampu memprediksi masa depan, merumuskan dan mengartikulasi visi yang realistis, kredibel, serta mengkomunikasikan visi ke depan, yang menekankan pada keharmonisan hubungan manusia dan mampu menstimulasi secara intelektual dan arif bagi anggota untuk mewujudkan visi organisasi, serta mampu memberikan arahan, tujuan, peran, dan tugas kepada seluruh unsur dalam perguruan tinggi. Dalam menjalankan fungsi kepemimpinan dikenal kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik. Kepemimpinan operasional berkaitan dengan kemampuan menjabarkan visi, misi ke dalam kegiatan operasional program studi. Kepemimpinan organisasi berkaitan dengan pemahaman tata kerja antar unit dalam organisasi perguruan tinggi. Kepemimpinan publik berkaitan dengan kemampuan menjalin kerjasama dan menjadi rujukan bagi publik.

Jelaskan pola kepemimpinan dalam program studi, mencakup informasi tentang kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik.

Kepemimpinan pada Prodi MKn FH Unand dilaksanakan secara kolektif sebagai bagian dari kepemimpinan di FH Unand. Untuk terlaksananya kepemimpinan tersebut, dilaksanakan pola hubungan kerja yang bersifat hierarki dan Dekan bertindak sebagai pimpinan dan penanggung jawab utama fakultas yang bertanggung jawab kepada

pimpinan Universitas (Rektor). Untuk melaksanakan kepemimpinan ini maka dikembangkan pola kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik.

A. KEPEMIMPINAN OPERASIONAL

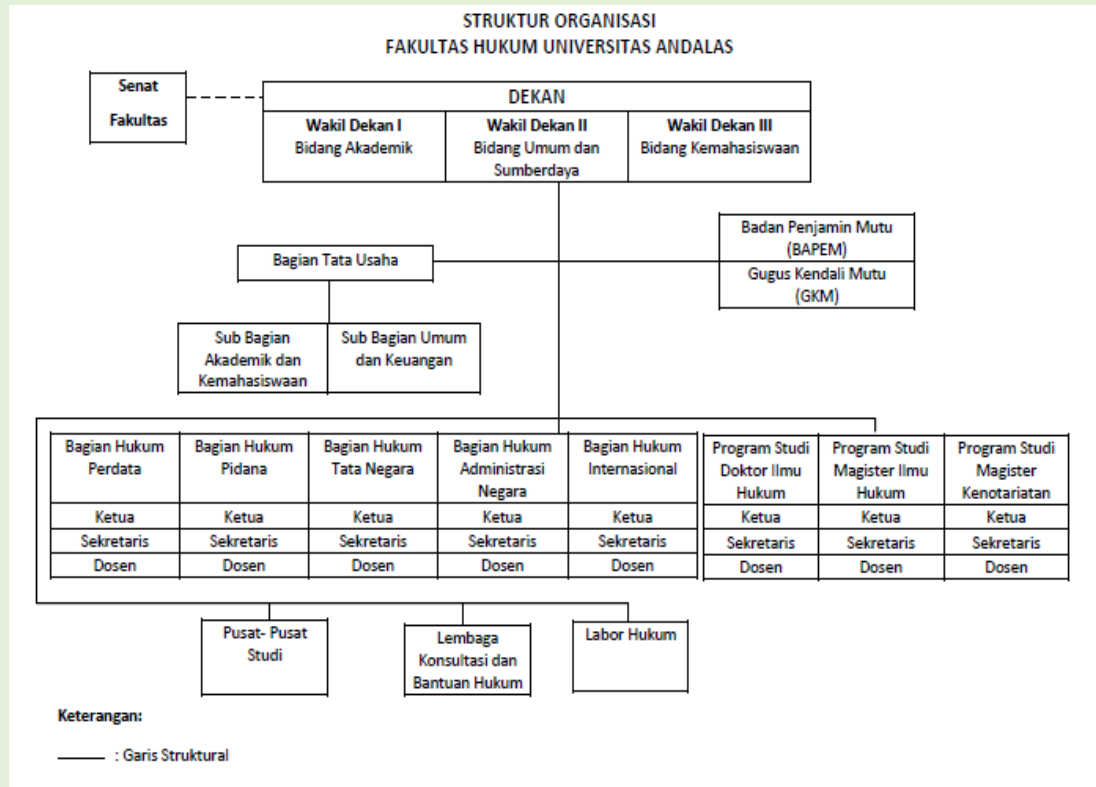
Penjabaran visi dan misi Prodi MKn FH Unand dituangkan secara operasional dalam bentuk tri dharma perguruan tinggi. Koordinator Program Studi berpedoman kepada Peraturan Rektor Unand Nomor 3 Tahun 2016 tentang Peraturan Akademik, Peraturan Rektor Unand Nomor 8 Tahun 2018 tentang Kurikulum Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas, dan Rencana Strategis FH Unand tahun 2014-2018 yang disusun dengan melibatkan seluruh komponen fakultas dan stakeholders terkait.

Kepemimpinan operasional ini diwujudkan dalam penjabaran visi, misi dan tujuan program studi, hal ini terlihat dari perencanaan pengembangan Prodi MKn FH Unand yang didasarkan pada tututan dan tantangan serta dinamika lembaga kenotariatan ke depan. Untuk itu perlu sinergisitas dalam pelaksanaan yang dituangkan dalam tridharma (pendidikan, penelitian, dan pengabdian). Untuk bidang pendidikan dan penelitian berada langsung di bawah ketua Program yang dibantu oleh sekretaris bidang pendidikan. Sedangkan untuk bidang pengabdian dibentuk tim dengan menunjuk ketua dan anggota yang didasarkan atas kompetensi dan tema yang diangkat didasarkan atas isu-isu hukum yang berkaitan dengan lembaga kenotariatan. Khusus untuk pelaksanaan pengabdian masyarakat melibatkan lembaga kemahasiswaan (Ikatan Mahasiswa Kenotariatan).

Namun demikian, ukuran keberhasilan dalam kepemimpinan operasional amat tergantung pada koordinasi pelaksanaan program. Suasana kerja yang kondusif antara Program Studi, dosen, staf administrasi dan mahasiswa akan dapat melahirkan proses pendidikan yang bermutu, efisien dan efektif. Selama ini, pengelolaan dan koordinasi pelaksanaan berbagai kegiatan pada Program Studi telah berjalan dengan baik melalui kerjasama dan koordinasi secara formal dan informal, baik melalui rapat dosen maupun dengan mahasiswa. Koordinasi ini mengacu kepada mekanisme yang telah diatur menurut uraian tugas sebagai substansi dari struktur organisasi Prodi MKn FH Unand.

B. KEPEMIMPINAN ORGANISASI

Bagan 2.2 : Struktur Organisasi Fakultas Hukum Universitas Andalas



Prodi MKn FH Unand berada pada tingkat Fakultas, namun dari segi kepemimpinan organisasi Prodi MKn FH Unand tetap bagian yang tidak terlepas dari program pasca sarjana yang menekan pada hubungan keharmonisan, sehingga mampu menstimulasi segala permasalahan secara intelektual dan bijaksana untuk mewujudkan visi organisasi.

Dekan merupakan sebutan jabatan yang memimpin organ Fakultas, yang mengkoordinasikan dan melaksanakan pendidikan ilmu hukum untuk semua jenjang pendidikan. Dalam melaksanakan tugas, Dekan menyelenggarakan fungsi:

1. Memimpin pelaksanaan dan pengembangan pendidikan di lingkungan Fakultas;
2. Memimpin pelaksanaan penelitian untuk pengembangan ilmu hukum;
3. Memimpin pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
4. Memimpin pelaksanaan pembinaan civitas akademika; dan
5. Memimpin pelaksanaan urusan tata usaha.

Pelaksana penyelenggaraan pendidikan untuk jenjang pendidikan Program Magister Kenotariatan akan langsung dikelola oleh Pimpinan Program Studi, yang melaksanakan kegiatan berdasarkan Misi yang telah ditetapkan bersama. Sekretaris Prodi bertanggung jawab pada Koordinator Prodi, dan Koordinator Prodi bertanggung jawab pada Dekan.

C. KEPEMIMPINAN PUBLIK

Berkaitan dengan kepemimpinan publik, Prodi MKn FH Unand merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem kepemimpinan pada tingkat Universitas, Fakultas, dan program studi. Diharapkan dengan pola kepemimpinan seperti ini mampu menjalin hubungan kerja sama dengan instansi terkait, *stakeholder*, dan alumni secara berkelanjutan.

Dekan Fakultas Hukum Unand menjabat sebagai Pengurus Badan Kerjasama (BKS) Dekan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) se Indonesia periode 2015 sampai sekarang. Jabatan ini memberikan pengaruh positif bagi pengembangan kerjasama FH Unand dengan Fakultas Hukum PTN lainnya seperti Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia dan Universitas Sumatera Utara.

KaProdi MKn FH Unand juga terlibat dalam BKS Kenotariatan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) seluruh Indonesia. KaProdi MKn FH Unand juga menjabat sebagai Satuan Pengawas Internal (SPI) Universitas Andalas. Keterlibatan KaProdi dalam SPI Unand memberikan pengaruh positif dalam pengelolaan program studi. Sesuai dengan Pasal 22 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas, disebutkan bahwa Satuan Pengawas Internal merupakan organ universitas yang menjalankan fungsi pengawasan internal bidang non akademik. Anggota SPI mempunyai kompetensi dalam bidang audit yang berkaitan dengan komposisi keahlian di bidang akuntansi atau keuangan, manajemen SDM, manajemen aset, hukum dan ketatalaksanaan atau administrasi. mengingat bidang – bidang tersebut merupakan hal yang penting dalam pengelolaan perguruan tinggi, sehingga pemahaman KaProdi mengenai internal audit akan mampu mengidentifikasi dan mengukur secara objektif mengenai keselarasan antara pelaksanaan aktivitas dan rencana, kebijakan, berbagai peraturan, serta sistem pencatatan dan pelaporan.

Sekretaris Prodi MKn FH Unand juga menjabat sebagai Bendahara Umum pada Pengurus Pusat Asosiasi Dosen Hukum Acara Perdata (ADHAPER) PTN-PTS se

Indonesia. Hukum Acara Perdata adalah keilmuan yang berhubungan erat dengan ilmu kenotariatan, yaitu perihal akta otentik, yang berkedudukan sebagai alat bukti pada hukum acara perdata. Keilmuan yang diperoleh pada kegiatan yang diadakan oleh asosiasi ini akan menjadi salah satu bahan masukan dan perbaikan bagi penyempurnaan kurikulum di Prodi MKn FH Unand. Sebagai Pengurus Pusat sebuah asosiasi yang keanggotaannya terdiri dari berbagai fakultas hukum PTN dan PTS se Indonesia, memberikan akses untuk melakukan kerjasama kegiatan akademik dengan FH PTN ataupun PTS seperti kerjasama dalam hal Kuliah Umum, Seminar ataupun Konferensi dengan menghadirkan Dosen-Dosen dari berbagai PTN dan PTS, yang memiliki keilmuan yang relevan dengan ilmu kenotariatan sebagai narasumber.

2.3 Sistem Pengelolaan

Sistem pengelolaan fungsional dan operasional program studi mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengembangan staf, pengawasan, pengarahan, representasi, dan penganggaran.

Jelaskan pelaksanaan sistem pengelolaan program studi serta dokumen pendukungnya.

Sistem pengelolaan fungsional dan operasional pada Program Studi MKn FH Unand dilaksanakan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mencakup: perencanaan, pengorganisasian, pengembangan staf, pengawasan, pengarahan, representasi dan penganggaran.

A. PERENCANAAN. Khusus mengenai Rencana Operasional Program Studi MKn FH Unand menjadi bagian dari program kerja tahunan fakultas. Seluruh program kerja dan anggaran tahunan disusun melalui Rapat Kerja dengan melibatkan semua unsur dan bagian serta program studi yang berada di bawah fakultas. Tahapan awal yang dilakukan adalah paparan rencana kegiatan yang berbasis kinerja, rencana pengadaan dan anggaran tahunan guna sinkronisasi kebutuhan antar program studi. dari masing–masing program studi. Perencanaan dan pengembangan program kerja juga didasarkan pada Rencana Strategis yang telah disetujui Senat Fakultas, serta Rencana Operasional yang ditetapkan dalam Rapat Kerja yang diadakan setiap tahun.

B. PENGORGANISASIAN. Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Universitas dan Fakultas, maka dilakukan pengorganisasian sebagai suatu sistem pengaturan sumber daya yang diterapkan di Prodi MKn FH Unand. Sistem pengorganisasian sumber daya ini dilaksanakan dengan mendeskripsikan pembagian pekerjaan sesuai dengan struktur organisasi pada Prodi MKn FH Unand. Bentuk pengorganisasian ini telah dilaksanakan oleh Prodi MKn FH Unand dalam bentuk kegiatan sebagai berikut :

1. Pengorganisasian dosen sesuai dengan kompetensi dan keahlian dalam pendistribusian mata kuliah. Pembagian mata kuliah ini dilakukan pada setiap awal semester.
2. Pengorganisasian dosen berdasarkan kompetensi dan keahlian untuk pendistribusian sebagai pembimbing dan penguji tesis.
3. Menjamin kualitas proses belajar mengajar, penelitian dan pengabdian dosen dengan peningkatan peran Badan Penjaminan Mutu Fakultas.

C. PENGEMBANGAN STAF. Pola pengembangan staf yang dilakukan oleh Prodi MKn FH Unand dilakukan dengan mekanisme holistik, yang dimulai dari perencanaan, pola penerimaan staf, tata cara penempatan, serta pola peningkatan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan, yang dilakukan dengan cara :

1. Evaluasi komposisi dosen dan tenaga kependidikan yang ada dengan kebutuhan yang diperlukan.
2. Penerimaan dosen dan tenaga kependidikan berdasarkan tata cara penerimaan dosen dan tenaga kependidikan untuk pegawai negeri sipil ataupun non pegawai negeri sipil.
3. Penempatan dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan evaluasi dan analisis yang telah dilakukan pada point 1, yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor.
4. Peningkatan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan dilakukan dengan beberapa pola. Khusus untuk Dosen, maka diwajibkan untuk mengikuti Pekerti dan AA (*Applied Approach*) sebagai bentuk pelatihan dasar yang diberikan kepada setiap dosen untuk meningkatkan kemampuan mengajar dengan pola-pola pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan mata kuliah. Pelaksanaan pelatihan dasar ini dilakukan dengan koordinasi pada pihak Universitas. Dosen juga diberikan motivasi untuk dapat melakukan

publikasi ilmiah, dan akan diberikan insentif jika diterbitkan dalam bentuk buku atau diterima pada jurnal internasional bereputasi. Khusus untuk tenaga kependidikan, diberikan pelatihan berupa pelatihan pelayanan, pelatihan peningkatan kemampuan dalam bidang teknologi informasi dan kemampuan berbahasa inggris, serta kesempatan untuk melanjutkan studi.

D. PENGAWASAN. Pola pengawasan yang baik sangat diperlukan agar program yang telah disusun dapat berjalan dengan baik. Hal ini dilakukan dengan pola pengamatan dan evaluasi yang berkelanjutan pada rapat, baik yang sifatnya koordinasi, rapat pimpinan fakultas dan rapat evaluasi. Prodi MKn FH Unand melakukan pengamatan dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja yang telah ditetapkan serta pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. KaProdi sebagai pimpinan prodi melakukan pengawasan dengan beberapa tindakan berikut :

1. Melakukan pengamatan terlaksananya program kerja yang telah ditetapkan. Hasil pengamatan ini akan disampaikan pada pimpinan fakultas dan menjadi bahan evaluasi pada rapat kerja tahunan.
2. Menerima laporan secara berkala mengenai aktivitas proses belajar mengajar, kehadiran dosen, kesesuaian materi dengan RPKPS, evaluasi dosen oleh mahasiswa dalam suatu form yang dipersiapkan pada akhir perkuliahan, ketepatan batas waktu pengumpulan nilai, serta pengawasan terhadap pelaksanaan bimbingan tesis, sidang tesis serta tingkat kelulusan mahasiswa.

E. PENGARAHAN. Guna memastikan program kerja yang telah ditetapkan bersama pada setiap tahun anggaran, maka perlu dilakukan pengarahan untuk memberikan pedoman kepada dosen dan tenaga kependidikan. Pengarahan ini dilakukan dalam bentuk :

1. Penyampaian arahan yang jelas dan detail oleh Koordinator Prodi MKn FH Unand mengenai tugas pokok dan fungsi dosen dan tenaga kependidikan. Kegiatan ini dilakukan pada rapat kerja tahunan.
2. Pola komunikasi yang baik dan efektif diantara pimpinan, dosen, dan tenaga kependidikan sehingga dapat menciptakan hubungan yang harmonis, suasana kerja yang kondusif dan menjadikan semangat untuk produktif dalam bekerja.

F. REPRESENTASI. Dalam hal representasi, pimpinan fakultas, pimpinan prodi, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa mempunyai representasi guna pengambilan kebijakan yang membutuhkan masukan bersama agar pengelolaan program studi dapat berjalan dengan baik dan efektif.

G. PENGANGGARAN. Pada rapat kerja tahunan dilakukan penganggaran berdasarkan budget sesuai dengan usulan rencana kegiatan yang telah disusun. Dengan pola ini seluruh budget yang dianggarkan akan dapat digunakan secara efektif.

2.4 Penjaminan Mutu

Jelaskan kebijakan, sistem, dan pelaksanaan penjaminan mutu pada program studi, termasuk penjaminan mutu dari badan akreditasi selain BAN-PT.

Universitas Andalas menerapkan penjaminan mutu akademik yang berjenjang. Penjaminan Mutu pada Prodi MKn FH Unand terintegrasi dengan penjaminan mutu yang dilakukan pada tingkat Universitas. Penjaminan mutu dilakukan dengan adanya kebijakan evaluasi berkala. Penjaminan Mutu Prodi MKn FH Unand dilakukan oleh Gugus Kendali Mutu (GKM) yang ada pada Prodi MKn FH Unand. Hasil pengawasan dan monitoring GKM akan dievaluasi oleh Badan Penjaminan Mutu (BAPEM) Fakultas, kemudian ditindaklanjuti oleh BAPEM Universitas, serta terakreditasi oleh BAN-PT.

A. KEBIJAKAN PENJAMINAN MUTU.

Keberadaan kebijakan ini dituangkan dalam bentuk Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Program Studi Pascasarjana Monodisiplin dan Oligodisiplin maka berdasarkan Pedoman Penyelenggaraan Program Studi Pascasarjana Monodisiplin dan Oligodisiplin tanggung jawab Penjaminan Mutu melalui Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Andalas. Terkait dengan penjaminan mutu, lembaga ini menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan;
2. Pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan;
3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengembangan dan penjaminan mutu pendidikan.

Kegiatan penjaminan mutu ini dilakukan secara berkelanjutan melalui rapat

pimpinan, rapat kerja dan rapat akademika yang dilaksanakan setiap awal perkuliahan dengan cara mengkaji dan mengevaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan dan hasil kegiatan akademika. Rapat ini sendiri dihadiri oleh Dekan Fakultas, ketua Program, dosen tetap dan dosen tidak tetap (luar biasa) serta staf administrasi.

Program penjaminan mutu yang dilakukan oleh Program Studi MKn FH Unand melibatkan berbagai komponen yang mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Mengevaluasi dan merevisi struktur serta isi kurikulum dengan visi, misi dan tujuan program studi serta tuntutan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat yang berkepentingan (*stakeholder*);
2. Perbaikan dan penyesuaian prosedur implementasi kurikulum berupa pengembangan pedoman proses pembelajaran, penyusunan program pembelajaran, silabus, SAP dan sistem evaluasi, serta melakukan praktek (magang);
3. Melakukan program pelacakan lulusan (*tracer study*) untuk mengetahui tuntutan dan kepuasan pihak yang berkepentingan serta keluhan para lulusan;
4. Melakukan kerjasama dengan asosiasi profesi terkait, seperti Ikatan Notaris Indonesia (INI), Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT), dan lain sebagainya.
5. Melakukan kerjasama dengan lembaga atau kementerian terkait, seperti kerjasama dengan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah dengan Universitas Andalas Nomor 02/SKB/DEP.I/2013 dan Nomor 1104/XIII/E/UNAND/2010 Tentang Peningkatan Kompetensi Calon Notaris.

Mengingat pendidikan pada Prodi MKn FH Unand merupakan pendidikan "semi profesional" maka harus dilakukan evaluasi terhadap kurikulum secara berkala, sehingga sejalan dengan kebutuhan para pengguna jasa (*stakeholder*) kenotariatan. Untuk itu perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Peninjauan terhadap kurikulum yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 2 tahun sekali;
2. Melakukan evaluasi terhadap Proses Belajar Mengajar (PBM) melalui mekanisme rapat akademik setiap awal semester;
3. Perbaikan yang bersifat operasional dilakukan segera sesuai keperluan teknis.

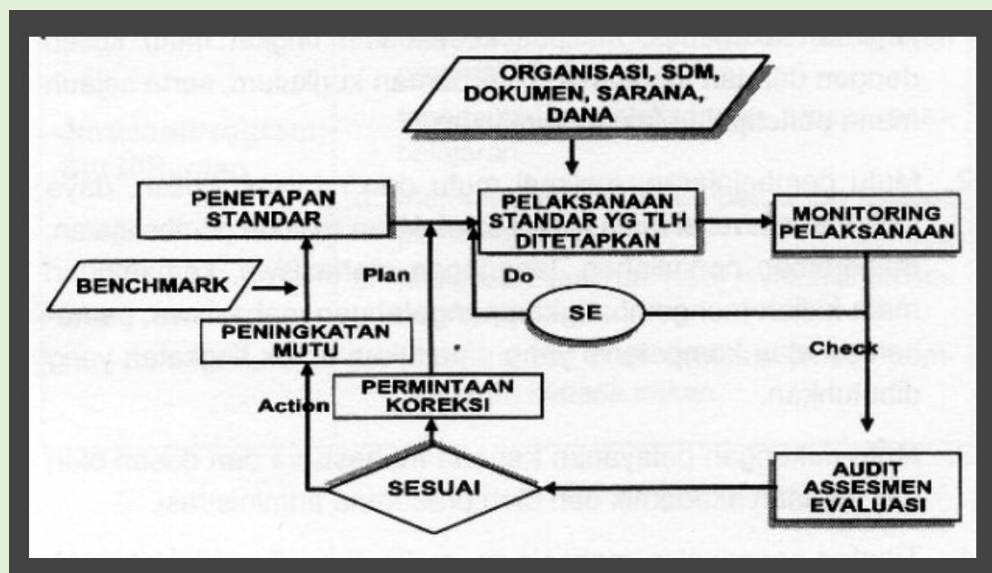
Pengkajian lainnya yang direncanakan dalam penjaminan mutu adalah pengkajian terhadap mutu lulusan program studi, penilaian terhadap lulusan Prodi MKn FH Unand yang telah membuka praktek.

Pada sisi lain, dalam pengendalian mutu Prodi MKn FH Unand selalu melakukan studi banding dengan Program Studi MKn Perguruan Tinggi Negeri yang terhimpun dalam Badan Kerjasama (BKS) PTN Program MKn yang berjumlah sebanyak 11 Program MKn. Selain itu juga melakukan evaluasi mutu lulusan dengan bekerjasama dengan Pengurus Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT).

B. SISTEM DOKUMENTASI

Sistem penjaminan mutu Universitas Andalas dilaksanakan dengan pendekatan PDCA (*Plan-Do-Check-Action* atau *Rencanakan, Laksanakan, Cek dan Tindakan Perbaikan*). Gambar berikut memperlihatkan siklus penjaminan mutu Universitas Andalas berdasarkan PDCA. Sebagaimana yang tercantum dalam laman <http://bapem.unand.ac.id/pspm-bab-iv.html>, maka siklus penjaminan mutu di Universitas Andalas diilustrasikan dengan skema berikut :

Bagan 2.4 : Siklus Implementasi Penjaminan Mutu Universitas Andalas



Siklus implementasi sistem penjaminan mutu dimulai dengan membuat perencanaan mutu meliputi penetapan standar yang menjadi acuan dalam melaksanakan kegiatan akademis (**Plan**). Setelah standar – standar ditetapkan, maka standar tersebut dilaksanakan dalam suatu periode waktu tertentu (**Do**).

Kemudian dilakukan pengecekan (**Check**) untuk mengetahui apakah pelaksanaan telah sesuai atau belum dengan melakukan audit atau evaluasi. Apabila pelaksanaan belum sesuai dengan yang direncanakan, maka dilakukan tindakan koreksi (**Action**) untuk memastikan hal yang tidak sesuai menjadi sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Siklus ini dilakukan secara terus menerus.

C. TINDAK LANJUT TERHADAP LAPORAN PELAKSANAAN PENJAMINAN MUTU.

Dilakukan melalui tahapan *Plan, Do, Check, Action* (PDCA), yaitu :

1. **Perencanaan Mutu dan Dokumentasi.** Perencanaan mutu meliputi penetapan kebijakan mutu dengan membuat kebijakan akademik, standar akademik dan prosedur untuk mencapai standar yang telah ditetapkan. Perencanaan tersebut dituangkan dalam dokumen-dokumen akademis dan dokumen mutu. Dokumen yang perlu dipersiapkan dapat diuraikan pada tabel berikut :

TINGKAT	DOKUMEN YANG DIPERSIAPKAN	SATUAN KERJA	PENANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN SISTEM PENJAMINAN MUTU
Universitas	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan Akademik Universitas • Standar Akademik Universitas • Peraturan Akademik Universitas • Manual Mutu Akademik Universitas • Manual Prosedur Akademik Universitas 	Badan Penjamin Mutu (BAPEM) Universitas	<ul style="list-style-type: none"> • Rektor • Ketua BAPEM Universitas
Fakultas / Pasca	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan Akademik Fakultas 	Badan Penjamin	<ul style="list-style-type: none"> • Dekan/ Direktur Pascasarjana

sarjana	<ul style="list-style-type: none"> • Standar Akademik Fakultas • Peraturan Akademik Fakultas • Manual Mutu Akademik Fakultas • Manual Prosedur Akademik Fakultas 	Mutu (BAPEM) Fakultas	<ul style="list-style-type: none"> • Ketua BAPEM Fakultas/ Pascasarjana
Jurusan/ Program Studi/ Bagian	<ul style="list-style-type: none"> • Spesifikasi Program Studi • Manual Prosedur Program Studi • Instruksi Kerja 	<ul style="list-style-type: none"> • Jurusan/ Prodi/ Bagian • Gugus Kendali Mutu (GKM) 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketua Jurusan/ Prodi/ Bagian • Ketua GKM

Berikut ini pengertian masing – masing dokumen :

- a. **Kebijakan Akademik Universitas Andalas** adalah konsepsi Universitas Andalas yang menyeluruh untuk mengelola dan mengembangkan tatanan perangkat keras, perangkat lunak dan sumberdaya manusia yang berkualitas.
- b. **Kebijakan Akademik Fakultas** adalah konsepsi sebuah fakultas yang menyeluruh untuk mengelola dan mengembangkan tatanan perangkat keras, perangkat lunak dan sumberdaya manusia yang berkualitas. Konsepsi tersebut mengacu pada konsepsi Universitas Andalas, tetapi boleh ditambah.
- c. **Standar Akademik Universitas Andalas** adalah jabaran dari Kebijakan Akademik Universitas Andalas yang berisikan butir-butir mutu yang menjadi acuan dalam menyusun rencana, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan akademik.
- d. **Standar Akademik Fakultas** adalah jabaran dari Kebijakan Akademik Fakultas dan berisikan butir-butir mutu yang menjadi acuan dalam menyusun rencana, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan akademik. Butir-butir tersebut mengacu kepada butir-butir mutu Universitas Andalas, tetapi boleh ditambah.
- e. **Manual Mutu Akademik Universitas** adalah sebuah dokumen yang berisikan prinsip tatacara pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal

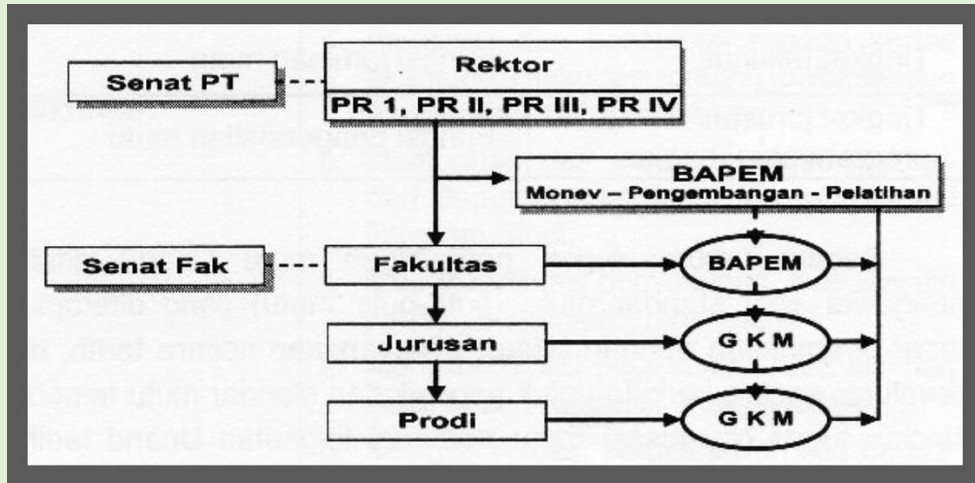
Unand.

- f. **Manual Mutu Akademik Fakultas** adalah sebuah dokumen yang berisikan prinsip tatacara pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal pada fakultas. Manual Mutu Akademik Fakultas tersebut mengacu kepada Manual Mutu Akademik Universitas Andalas, tetapi boleh ditambah.
 - g. **Manual Prosedur Akademik Universitas** merupakan dokumen yang bertalian erat dengan dokumen Manual Prosedur Universitas. Dokumen ini berisikan pedoman teknis Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal Unand.
 - h. **Manual Prosedur Akademik Fakultas** merupakan dokumen yang bertalian erat dengan dokumen Manual Prosedur Fakultas. Dokumen ini berisikan pedoman teknis Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal di fakultas.
 - i. **Spesifikasi Program Studi** adalah dokumen yang berisikan ciri khas sebuah program studi yang membedakan dengan program studi yang lain.
 - j. **Manual Prosedur (MP) Program Studi/Bagian** adalah Standar Operating Procedure (SOP) untuk mencapai standar mutu yang telah ditetapkan. Dokumen ini berisikan prosedur pelaksanaan kegiatan.
 - k. **Instruksi Kerja** berisikan tatacara teknis melaksanakan atau melakukan sesuatu
2. **Pelaksanaan.** Seluruh proses penjaminan mutu dilaksanakan sesuai dengan Manual Prosedur (MP) yang didasarkan pada standar mutu. Koordinator Prodi bertanggung jawab untuk mengendalikan seluruh proses kegiatan akademik berdasarkan MP yang telah dibuat, termasuk memotivasi dosen, tenaga penunjang pendidikan dan mahasiswa agar menjalankan peran masing-masing sesuai MP. GKM membantu pengendalian proses dengan memberikan masukan dan bantuan. Pada tahap pelaksanaan ini, berbagai borang, instrumen monitoring dan evaluasi, dan check list disiapkan sesuai MP dan diisi oleh komponen terkait

Untuk membantu pelaksanaan penjaminan mutu maka dibentuk Badan Penjaminan Mutu (BAPEM) pada tingkat universitas dan fakultas. BAPEM Universitas membantu pimpinan universitas sebagai penanggungjawab penjaminan mutu di tingkat universitas. BAPEM Fakultas membantu pimpinan fakultas sebagai penanggungjawab penjaminan mutu di tingkat fakultas. Pada tingkat jurusan/program studi/bagian dibentuk Gugus Kendali Mutu (GKM) untuk

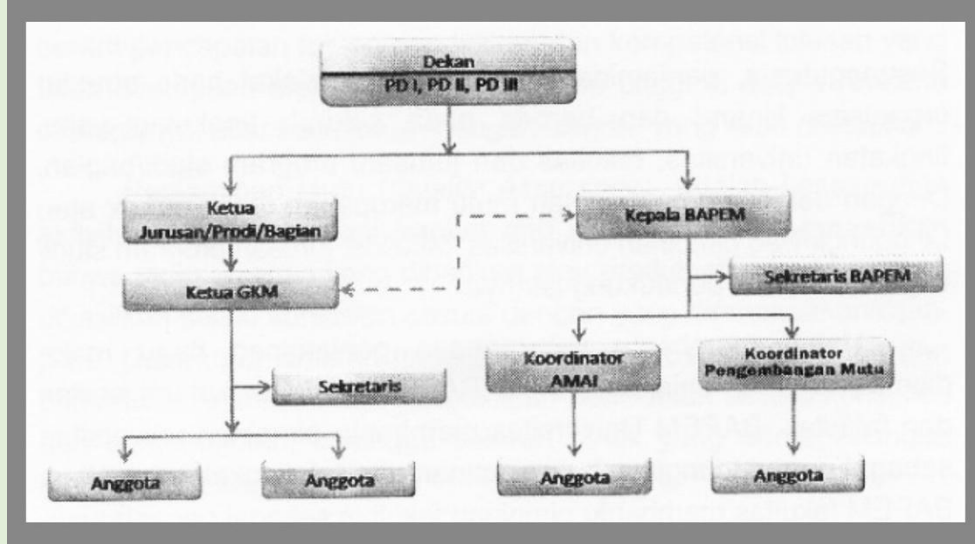
membantu pimpinan jurusan/program studi/bagian dalam mengimplementasikan penjaminan mutu.

Gambar 1 :
Struktur BAPEM di Universitas Andalas



Struktur Organisasi BAPEM di tingkat fakultas dan GKM di tingkat program jurusan/program studi/bagian adalah seperti gambar berikut :

Gambar 2 :
Struktur BAPEM di Fakultas dan GKM di Jurusan/Program Studi/Bagian



Setiap organisasi mutu di atas menekankan fungsi tiap tingkatan organisasi mutu yang berbeda, yaitu :

Tingkat Universitas	Fungsi Manajemen Mutu Terpadu
Tingkat Fakultas	Fungsi Jaminan Mutu
Tingkat Jurusan / Program Studi / Bagian	Fungsi Pengendalian Mutu

Secara umum tugas penjaminan mutu Unand adalah mengawal agar standar mutu (butir-butir mutu) yang ditetapkan dapat dirumuskan dengan benar, dilaksanakan secara tertib, dan dievaluasi secara berkala untuk peningkatan standar mutu tersebut. Rincian tugas organisasi mutu berbagai tingkatan di Unand terlihat dalam matriks berikut.

Matriks 1. Tugas Organisasi Mutu pada Berbagai Tingkatan di Unand

TINGKAT	TUGAS
Universitas	<ul style="list-style-type: none"> a. Merencanakan dan melaksanakan sistem penjaminan mutu akademik secara keseluruhan di Universitas Andalas; b. Membuat perangkat yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik; c. Memonitor pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik; d. Melakukan audit dan evaluasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik; e. Melaporkan secara berkala pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik di Universitas Andalas.
Fakultas	<ul style="list-style-type: none"> a. Menjabarkan Standar Akademik Unand ke dalam Standar Akademik Fakultas; b. Menjabarkan Manual Mutu Akademik Universitas ke dalam Manual Mutu Fakultas; c. Sosialisasi sistem penjaminan mutu ke semua sivitas akademika di fakultas yang bersangkutan; d. Pelatihan dan konsultasi kepada sivitas akademika fakultas tentang pelaksanaan penjaminan mutu; e. Membahas dan menindaklanjuti laporan dari Gugus Kendali Mutu Jurusan/Program Studi/Bagian; f. Mengkoordinasikan penyusunan evaluasi diri jurusan/program studi/bagian; g. Mengkoordinasi pelaksanaan evaluasi dan Audit Mutu Akademik Internal (AMAI); h. Mengkoordinasi perbaikan proses belajar mengajar; i. Mengirim hasil evaluasi diri jurusan/program studi/bagian ke BAPEM Universitas; j. Membantu kebijakan fakultas dalam merumuskan

	kebijakan dan standar akademik fakultas.
Jurusan/ Program Studi / Bagian	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan dan mengendalikan penjaminan mutu; b. Menyusun dan menyempurnakan Spesifikasi Program Studi, Manual Prosedur dan Instruksi Kerja yang relevan dengan program studi; c. Mengevaluasi pelaksanaan proses pembelajaran; d. Merumuskan tindakan perbaikan proses pembelajaran; e. Menyusun laporan hasil evaluasi proses pembelajaran; f. Menyerahkan hasil evaluasi proses pembelajaran kepada dekan.

3. Monitoring dan Evaluasi (Monev) Internal. Pelaksanaan perencanaan mutu yang telah ditetapkan harus dimonitor dan dievaluasi (terdiri dari audit, asesmen dan evaluasi) secara berkala (pada tahap awal ini minimal setiap satu tahun) untuk mengetahui kesesuaian antara pelaksanaan dengan perencanaan dan untuk mengetahui penyebab-penyebab ketidaksesuaian pelaksanaan dengan perencanaan. Audit, asesmen dan evaluasi mutu akademis untuk standar mutu yang ditetapkan sendiri disebut sebagai Monitoring dan evaluasi internal (Monevin) atau Audit Mutu Akademik Internal (AMAI).

Audit Mutu Akademik Internal. Dilakukan oleh auditor yang terlatih dan dikelola oleh Koordinator Program AMAI (KPAMAI). Di Universitas Andalas KPAMAI pada tahap awal ini terpusat pada tingkat Universitas dan berada di bawah BAPEM Universitas. Pimpinan fakultas dan program studi/bagian harus meminta KPAMAI untuk mengaudit program studi. KPAMAI kemudian menunjuk sebuah Tim AMAI terdiri dari beberapa orang auditor untuk melaksanakan tugas audit sebuah unit atau program studi pada rentang waktu tertentu. Untuk mewujudkan obyektivitas, pada dasarnya, audit unit atau program studi/bagian tidak dilakukan oleh auditor yang berasal dari unit/program studi yang sama dengan asal auditor, melainkan akan dilakukan secara silang oleh auditor yang berasal dari latar belakang akademis yang agak bersamaan tetapi berasal dari program studi yang berbeda.

4. Tindak Lanjut (Action). Laporan audit KPAMAI diserahkan kepada pimpinan fakultas atau program studi untuk ditindaklanjuti apabila ditemukan Ketidakesuaian (KTS). Ketidakesuaian adalah temuan auditor terhadap pelaksanaan yang tidak sesuai dengan yang direncanakan dan KTS tersebut

digolongkan berdampak terhadap penjaminan mutu. Laporan auditor memuat analisis penyebab-penyebab terjadinya KTS. Pimpinan fakultas atau program studi harus mencari cara untuk memecahkan KTS dengan melakukan workshop atau konsultasi dengan BAPEM atau Gugus Kendali Mutu. Kemudian, pimpinan melaksanakan rekomendasi yang dihasilkan dari kegiatan tersebut (action).

D. AKREDITASI EKSTERNAL

Pelaksanaan akreditasi eksternal dalam penjaminan mutu terakhir dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Saat ini Prodi MKn FH Unand telah terakreditasi B.

2.5 Umpan Balik

Apakah program studi telah melakukan kajian tentang proses pembelajaran melalui umpan balik dari dosen, mahasiswa, alumni, dan pengguna lulusan mengenai harapan dan persepsi mereka? Jika Ya, jelaskan isi umpan balik dan tindak lanjutnya dalam tabel berikut:

Umpan Balik dari	Isi Umpan Balik	Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)
Dosen	Perlu dilaksanakan penyesuaian dan pengembangan kurikulum yang disesuaikan dengan dinamika serta tuntutan keilmuan, baik secara teoritis maupun praktis.	Telah dilaksanakan lokakarya pengembangan kurikulum di Prodi MKn FH Unand dengan melibatkan segenap stakeholder, yaitu Dosen, Mahasiswa, Tenaga Kependidikan, Alumni dan Instansi dan Organisasi Profesi yang terkait dengan penyelenggaraan Prodi MKn. Perubahan dan pembaharuan kurikulum ini dituangkan dalam Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 8 Tahun 2018 tentang Kurikulum Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
	Perlu melibatkan mahasiswa di dalam kegiatan-kegiatan penelitian, pengabdian masyarakat dalam meningkatkan atmosfer	Mahasiswa telah dilibatkan dan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen dalam rangka tri dharma perguruan tinggi.

	akademik, khususnya di Prodi MKn.	
	Perlu dilakukan pengembangan pendidikan hukum yang dapat meningkatkan wawasan keilmuan mahasiswa.	Telah dilaksanakan pengembangan pendidikan hukum yang dapat meningkatkan wawasan keilmuan mahasiswa dengan mengadakan Focus Group Discussion, Seminar, serta Pendidikan dan Pelatihan yang berkaitan dengan ilmu kenotariatan.
	Perlu melibatkan praktisi hukum, khususnya Notaris dan PPAT dalam meningkatkan pemahaman praktek kenotariatan dan kePPAT-an	Telah melaksanakan kegiatan dengan memanfaatkan labor akta untuk menganalisis kasus yang terkait dengan kenotariatan dan kePPAT-an.
	Perlu menyusun modul pada setiap mata kuliah sebagai kerangka acuan bagi mahasiswa dalam perkuliahan.	Telah disusun RPS/ <i>hand out</i> setiap mata kuliah yang juga dapat diakses melalui web https://fhuk.unand.ac.id .
	Perlu penyediaan sarana internet dan komputer guna menunjang proses belajar mahasiswa pada Prodi MKn.	Telah tersedia jaringan internet yang dapat diakses mahasiswa serta ruangan komputer (Labor Akta).
	Perlu adanya tindakan pencegahan dan penanggulangan plagiasi, baik terhadap tugas – tugas mahasiswa maupun karya tulis dalam bentuk tesis.	Telah dibentuk tim khusus untuk melakukan penelusuran dengan menggunakan software TURNITIN, guna menentukan keaslian atau originalitas tesis mahasiswa.
	Perlu menjalin kerjasama, baik dengan instansi pemerintah maupun organisasi profesi.	Telah terbentuk kerjasama dengan instansi pemerintah dan organisasi profesi, antara lain : Kementerian Koperasi dan UKM, Kejaksaan Agung, Ikatan Notaris Indonesia (INI).
Mahasiswa	Perlu melakukan evaluasi setiap akhir semester terkait proses belajar mengajar, yang meliputi Kompetensi	Telah dilakukan evaluasi terhdap proses pengajaran guna meningkatkan kualitas pelayanan dan pengajaran dengan

	Pedagogik, Kompetensi Profesional, Kompetensi Kepribadian dan Kompetensi Sosial.	memberikan Lembaran Penilaian Dosen kepada mahasiswa di setiap mata kuliah pada akhir semester.
Alumni	Perlu dilakukan kerjasama secara lebih intensif antara FH Unand dengan forum alumni Notariat Unand dengan pembentukan Ikatan Alumni Notariat Unand.	Telah dibentuk Ikatan Alumni Notariat (IKANO) Unand dan menindaklanjuti setiap saran dan masukan yang disampaikan oleh alumni sebagai pertimbangan dalam evaluasi sistem dan metode pembelajaran serta pengembangan kurikulum Prodi MKn.
Pengguna lulusan	Dilakukan evaluasi melalui wawancara mengenai kemampuan lulusan dalam mengaplikasikan ilmu dan kecakapan dalam bekerja.	Saran dan masukan yang disampaikan oleh alumni sebagai pertimbangan dalam evaluasi sistem dan metode pembelajaran serta pengembangan kurikulum Prodi MKn.

2.6 Keberlanjutan

Jelaskan upaya untuk menjamin keberlanjutan (*sustainability*) program studi ini, khususnya dalam hal:

Upaya untuk menjamin keberlanjutan program studi yang dilakukan oleh Prodi MKn FH Unand dilakukan dengan upaya sebagai berikut :

A. UPAYA PENINGKATAN ANIMO CALON MAHASISWA

Memberikan informasi tentang Prodi MKn FH Unand, baik kepada lulusan sarjana hukum maupun kepada mahasiswa FH yang masih aktif terutama mahasiswa tahun terakhir yang tinggal menyelesaikan skripsi melalui cara – cara sebagai berikut :

1. Informasi melalui brosur, leaflet yang dikirim ke seluruh fakultas hukum baik yang ada di Sumatera Barat maupun di luar provinsi Sumatera Barat, terutama provinsi Riau, Kepulauan Riau dan beberapa daerah di provinsi Jambi.
2. Melalui surat kabar lokal dan nasional, seperti Padang Ekspres, Singgalang.
3. Melalui media internet.website
4. Membuat spanduk dan baliho di pusat – pusat kota / keramaian.
5. Kunjungan ke beberapa daerah yang potensial untuk merekrut calon MKn, terutama Pekanbaru dan Batam.

B. UPAYA PENINGKATAN MUTU MANAJEMEN

1. Melakukan evaluasi terhadap PBM pada semester yang lalu melalui Rapat Majelis Dosen sebelum memasuki awal semester. Rapat Majelis Dosen diselenggarakan dalam 2 (dua) bentuk, yaitu Rapat Majelis Dosen Internal (Dosen Tetap) dan Rapat Dosen Luar Biasa (Dosen Praktisi).
2. Melakukan evaluasi dan tindakan perbaikan terhadap kendala ataupun permasalahan dalam pelaksanaan proses belajar mengajar ataupun proses administrasi.
3. Melakukan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, baik tenaga dosen ataupun tenaga kependidikan untuk meningkatkan pelaksanaan akademik dan proses administrasi.
4. Melakukan Evaluasi dan perbaikan secara rutin terhadap proses akademik diantaranya melalui pola komunikasi dengan mahasiswa secara, baik secara langsung maupun secara terstruktur untuk mendapatkan masukan.
5. Pelaksanaan AMI (Audit Mutu Internal) secara berkala.

C. UPAYA PENINGKATAN MUTU LULUSAN

1. Melakukan sistem rekrutmen terhadap calon mahasiswa secara lebih selektif, dengan mempertimbangkan faktor – faktor sebagai berikut ; Asal Perguruan Tinggi, Indeks Prestasi Mahasiswa, Akreditasi Perguruan Tinggi dan Skor hasil ujian (Tes Keilmuan, TPA dan Toefl).
2. Memperbaiki system pelayanan akademik.
3. Meningkatkan kualitas SDM Dosen, dengan melakukan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, seminar dan konferensi skala nasional dan internasional.
4. Melaksanakan kuliah umum dan seminar khususnya bagi mahasiswa baru untuk meningkatkan wawasan dan keilmuan mahasiswa.
5. Menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung proses belajar mengajar dan sarana informasi, seperti Ruang kelas yang proposional dengan jumlah mahasiswa, Labor Akta, Pustaka yang nyaman rapi dan dilengkapi dengan internet. Setiap ruang kelas dilengkapi juga dilengkapi dengan AC dan LCD Projector.
6. Melakukan uji plagiasi ketika mahasiswa akan mengajukan seminar proposal ataupun Ujian Akhir Tesis.

D. UPAYA PELAKSANAAN DAN HASIL KERJASAMA KEMITRAAN

Prodi MKn FH Unand telah melakukan kerjasama dan kemitraan dengan instansi dalam dan luar negeri yang dilakukan sebagai upaya untuk peningkatan dalam pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi. Kerjasama dalam tiga tahun terakhir ini diantaranya :

1. Kerjasama Dalam Negeri :

- a. Nota Kesepahaman dengan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman Nomor 1906a/UN16.04.D/PP/2018.
- b. Kerjasama dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat, yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Nomor 1459/UN1604.D/KS/2018 tentang Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- c. Kerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Nomor 625/UN16.04.D/KS/2018 tentang Kerjasama di Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- d. Kerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Nomor : 6/PKS/FH/UI/2018 tentang Program Pertukaran Mahasiswa.
- e. Kerjasama dengan Badan Keamanan Laut, yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman Nomor 6418/UN16.R/KS/2018 tentang Kerjasama Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- f. Kerjasama dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Nomor 2123a/UN16.04.D/KS/2017 tentang Pendidikan dan Pelatihan Notaris Pembuat Akta Koperasi.
- g. Kerjasama dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Pertukaran Literasi dan Publikasi Antara Perpustakaan.
- h. Kerjasama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat, yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman Nomor 496a/UN.16.4/KS/2016 tentang Labor Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

- i. Kerjasama dengan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi,) yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Nomor 034/PERADI-PKJS PKPA/I/16 tentang Pelaksanaan PKPA.
- j. Kerjasama dengan Himpunan Konsultan Pasar Modal, yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman Nomor 1744/UN16.4/KS/ 2016 tentang Pelatihan Konsultan Hukum Pasar Modal.
- k. Kerjasama dengan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Nomor 1721/UN/16/PP/2015 tentang Kegiatan Pengelolaan, Layanan Konsultasi Perkara Konstitusi dan Persidangan Jarak Jauh Melalui Video Conference.

2. Kerjasama Luar Negeri

- a. Kerjasama dengan Utrecht Universiteit, dalam bidang penelitian, publikasi dan pengembangan akademis, terhitung 1 Mei 2015 hingga 1 Mei 2020.
- b. Kerjasama dengan Waseda University terhitung 26 Juli 2018 dalam bidang kerjasama dalam bidang penelitian dan pengembangan pada bidang Hukum Agraria.
- c. Kerjasama dengan William and Marry Law School, dalam peningkatan akademik, pengajaran , pelatihan dan kerjasama akademik lainnya, terhitung 4 September 2018 hingga 4 September 2023.
- d. Kerjasama dengan Georgetown Law School, Washington DC, terhitung 2018 hingga 2023 dalam bidang peningkatan akademik, pengajaran, pelatihan dan kerjasama akademik lainnya.

E. UPAYA DAN PRESTASI MEMPEROLEH DANA DARI SUMBER SELAIN MAHASISWA

Perolehan sumber dana untuk mendukung kegiatan serta keberlanjutan dari program studi dilakukan berbagai upaya sebagai berikut :

1. Meningkatkan kerjasama dalam bidang akademik dengan berbagai lembaga, antara lain : Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Koperasi dan UKM, Ikatan Notaris Indonesia (INI), Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT).
2. Memperoleh hibah penelitian, baik yang bersumber dari DIPA Unand maupun dari Kemenristek Dikti dan berbagai lembaga negara dan kementerian lain.



STANDAR 3 KEMAHASISWAAN DAN LULUSAN

IIIA

Borang Akreditasi Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Andalas

3.1 Sistem Rekrutmen Mahasiswa Baru

Sistem rekrutmen mahasiswa baru mencakup: Kebijakan rekrutmen calon mahasiswa baru, kriteria seleksi mahasiswa baru, sistem pengambilan keputusan, dan prosedur penerimaan mahasiswa baru.

Jelaskan sistem rekrutmen mahasiswa baru yang diterapkan pada program studi ini.

A. KEBIJAKAN REKRUTMEN CALON MAHASISWA BARU.

Rekrutmen atau penjangkaran mahasiswa baru Program Studi MKn FH Unand diadakan setiap tahun, yaitu pada semester ganjil. Adapun terkait jadwal rekrutmen atau penjangkaran mahasiswa baru Program Studi MKn FH Unand dapat dilihat di website :

<http://fhuk.unand.ac.id/index.php/program-studi/magister-s2/kenotariatan-mkn> .

Sistem rekrutmen mahasiswa baru pada Prodi MKn FH Unand mengacu pada sistem rekrutmen Program Magister Universitas Andalas yang ditetapkan dengan Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 3 Tahun 2016 tentang Peraturan Akademik Universitas Andalas. Buku panduan disusun berdasarkan Peraturan Rektor tersebut, yang isinya antara lain memuat tentang Rekrutmen Mahasiswa, Pedoman Pendaftaran (baik untuk mahasiswa baru maupun registrasi ulang), Mata Kuliah, Peraturan tentang Kurikulum dan lain sebagainya. Buku panduan ini setiap tahun dievaluasi didasarkan pada kebijakan berkaitan dengan pengelolaan Prodi MKn FH Unand.

B. KRITERIA SELEKSI MAHASISWA BARU.

Prodi MKn FH Unand menentukan beberapa persyaratan yang dapat dianggap sebagai bentuk keketatan persyaratan dalam penerimaan mahasiswa Prodi MKn FH Unand yaitu :

1. Memiliki ijazah Sarjana Hukum, dan menyerahkan 2 (dua) lembar foto copy ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisir dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 dan akreditasi minimal B;

2. Menyerahkan bukti pembayaran biaya pendaftaran atau seleksi;
3. Surat rekomendasi dari 2 orang yang mengetahui kemampuan akademik calon mahasiswa;
4. Surat keterangan kesanggupan biaya (bermaterai, 2 lembar);
5. Surat keterangan sehat dari dokter (2 lembar);
6. Salinan TOEFL Internasional/UPT Bahasa UNAND skor minimal 500 dan skor Tes Potensi Akademik (TPA) minimal 500 (Standar Bappenas / Puspendik / Litbang / Diknas/TPA UNAND), 2 lembar;
7. Pendaftar yang belum memenuhi syarat TOEFL melampirkan pernyataan kesediaan untuk memenuhinya selama proses pendidikan (bermaterai) 1 lembar;
8. Menyerahkan pas photo terbaru 4x6 masing-masing sebanyak 3 lembar;

C. SISTEM PENGAMBILAN KEPUTUSAN.

Penentuan kelulusan ditentukan berdasarkan seleksi administratif dan hasil ujian tertulis.

Seleksi administrasi, berkaitan dengan kelengkapan syarat-syarat administrasi yang harus dipenuhi, antara lain, ijazah asli dan fotocopy yang telah dilegalisir, transkrip nilai asli dan fotocopy yang telah dilegalisir, surat rekomendasi dari dua orang yang mengetahui kemampuan akademik calon mahasiswa, surat keterangan kesanggupan biaya, surat keterangan sehat, salinan TOEFL dan TPA, serta pas photo. Bagi Mahasiswa yang memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi, maka dapat mengikuti ujian selanjutnya yaitu ujian tertulis.

Ujian tertulis. Sebelum ujian tertulis dilaksanakan, Dekan menetapkan Dosen pembuat naskah soal, meliputi pengetahuan dan penguasaan materi di bidang Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Hukum Perjanjian dan Hukum Agraria. Semua soal ujian dibuat dalam bentuk essay dan analisa kasus.

Pengambilan keputusan. Hasil ujian tertulis yang telah dinilai oleh Dosen pembuat naskah soal, dibawa dalam rapat penentuan kelulusan mahasiswa baru yang dipimpin oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Koordinator dan Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan serta Dosen pembuat naskah soal. Penilaian kelulusan diurut berdasarkan ranking serta kuota yang telah ditetapkan. Hasil penerimaan mahasiswa baru ditetapkan dengan Keputusan Rektor, dan diumumkan pada website fakultas <http://fhuk.unand.ac.id> .

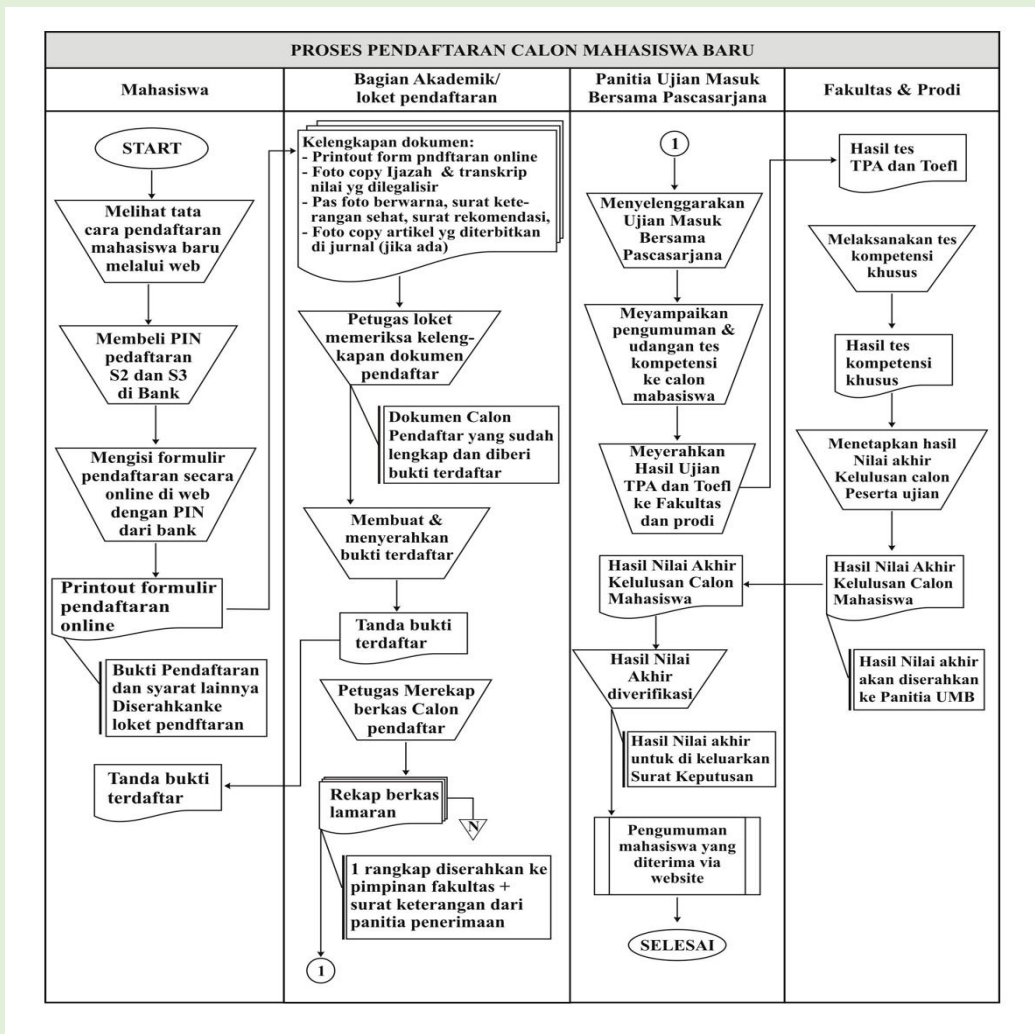
D. PROSEDUR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

1. Calon pendaftar melihat informasi pendaftaran mahasiswa baru PPs melalui website <http://pmb.unand.ac.id/> surat kabar lokal.
2. Calon pendaftar membeli PIN pendaftaran di kantor cabang Bank Syariah mandiri untuk mendapatkan username dan password pengisian formulir pendaftaran ujian masuk Pascasarjana Universitas Andalas secara online melalui website <http://umb.unand.ac.id>.
3. Calon pendaftar mengisi dan mengupload berkas pendaftaran sesuai menu yang ada saat menginput data pada formulir pendaftaran online di <http://umb.unand.ac.id> dan mencetak kartu peserta ujian.
4. Calon pendaftar menyerahkan langsung/mengirim berkas pendaftaran kepada sekretariat penerimaan mahasiswa baru Program Pascasarjana Universitas Andalas. Berkas yang diserahkan adalah sebagai berikut :
 - a. Fotokopi Ijazah dan transkrip nilai S1 yang telah dilegalisir (rangkap 2) untuk calon pendaftar program S2 dan Ijazah S1 dan S2 untuk pendaftar program S3.
 - b. Pas foto berwarna ukuran 4x6 dan 3x4 masing-masing 3 (tiga) buah.
 - c. Surat keterangan kesehatan dari dokter.
 - d. Rekomendasi kelayakan calon pendaftar dari 2 orang rekomendasi untuk program S2 dan 3 orang rekomendasi untuk program S3 dengan menggunakan formulir yang dapat diunduh melalui website <http://pmb.unand.ac.id>
 - e. Khusus untuk calon pendaftar program S3 menyerahkan kesediaan calon promotor.
 - f. Rancangan proposal penelitian bagi pelamar program S3 (bagi pelamar by research harus menyerahkan proposal yang telah disetujui oleh salah seorang calon promotor).
 - g. Foto copy artikel yang diterbitkan di jurnal untuk pertimbangan (boleh tidak ada bagi pelamar program S2 dan program S3 yang bukan jalur *by research*).
5. Petugas loket pendaftaran menerima berkas lamaran calon pendaftar mahasiswa baru dalam satu bundle (rangkap 2) dengan menyerahkan bukti tanda terima berkas kepada calon pendaftar.
6. Petugas pendaftaran merekap berkas lamaran dan menyerahkan satu rangkap bundle ke pimpinan Fakultas dengan surat pengantar dari Ketua Panitia Ujian

Masuk Bersama (UMB) Pascasarjana Universitas Andalas, dan satu rangkap lainnya dijadikan sebagai arsip di bagian akademik Program Pascasarjana Unand.

7. Panitia UMB Pascasarjana mengumumkan jadwal dan lokasi tes tertulis sedangkan jadwal tes kompetensi umum dan khusus disampaikan oleh Fakultas pada website <http://pmb.unand.ac.id>.
8. Calon mendaftar mengikuti tes tertulis meliputi test TPA dan test Toefl dan dilanjutkan dengan tes kompetensi umum dan khusus oleh Fakultas (sesuai jadwal yang telah diumumkan).
9. Panitia UMB menyerahkan hasil tes TPA dan Toefl calon mahasiswa ke masing-masing Fakultas untuk diakumulasikan dengan nilai tes kompetensi umum dari fakultas.
10. Fakultas menyerahkan nilai akhir seleksi ke panitia UMB dengan surat pengantar yang ditujukan kepada Ketua panitia UMB.
11. Panitia UMB memproses dan menetapkan hasil seleksi untuk diverifikasi dan diumumkan dalam bentuk Surat Keputusan Rektor melalui website: www.unand.ac.id.

Skema 3.1.a Prosedur Penerimaan Mahasiswa Baru



Skema pendaftaran mahasiswa baru diatas dapat dilihat pada laman :

<https://pasca.unand.ac.id/id/akademik/dokumen-akademik/sop>

Sebagai salah satu contoh, berikut Prosedur Pendaftaran Mahasiswa Baru Program Pascasarjana Universitas Andalas Tahun Akademik 2017/2018 yang ditampilkan pada laman <http://pmb.unand.ac.id> atau pada link <https://pasca.unand.ac.id/id/pendaftaran/pengumuman>

Prosedur Pendaftaran :

1. Calon mahasiswa melakukan pembelian PIN Pendaftaran *online* melalui Bank Syariah Mandiri (BSM) untuk mendapatkan *username* dan *password* dengan membayar uang pendaftaran sebesar Rp. 500.000
2. Calon mahasiswa melakukan pendaftaran secara online melalui link portal : <http://umb.pasca.unand.ac.id>
3. Berkas Pendaftaran diupload/unggah pada <http://umb.pasca.unand.ac.id> dan membawa berkas asli pendaftaran tersebut pada saat ujian wawancara
4. Calon Mahasiswa Mendapatkan Kartu Peserta Ujian Tes TPA, TOEFL dan Wawancara
5. Calon mahasiswa melaksanakan ujian seleksi masuk Pascasarjana Unand pada tanggal 6 Mei 2016.
6. Calon Mahasiswa ikut seleksi Ujian Wawancara/Ujian Kompetensi pada tanggal 6-7 Mei 2017 di Fakultas dan Program Studi masing-masing, dengan membawa kelengkapan berkas pendaftaran dan sertakan dengan dokumen aslinya.
7. Panitia mengumumkan hasil kelulusan ujian seleksi penerimaan mahasiswa baru Pascasarjana TA 2017 pada tanggal 19 Mei 2017
8. Calon mahasiswa yang telah lulus ujian seleksi melakukan pendaftaran registrasi dan pembayaran uang SPP pada tanggal 22 Mei s.d 7 Juli 2017
9. Awal perkuliahan pada tanggal 7 Agustus 2017

Gambar 3.1.b : Pengumuman Penerimaan Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2017/2018 pada laman <http://pasca.unand.ac.id>


**PANITIA UJIAN MASUK BERSAMA
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS**


PENERIMAAN MAHASISWA BARU TAHUN AKADEMIK 2017/2018

PROGRAM STUDI MAGISTER (S2)

NO	PROGRAM STUDI	NO	PROGRAM STUDI
1.	Pembangunan Wilayah dan Pedesaan	20.	Sosiologi
2.	Ilmu Lingkungan	21.	Ilmu Komunikasi
3.	Pengelolaan Terpadu Sumberdaya Alam	22.	Ilmu Politik
4.	Pembangunan Perumahan dan Pemukiman	23.	Antropologi
5.	Ilmu Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan	24.	Administrasi Publik
6.	Bioteknologi	25.	Teknik Sipil
7.	Kimia	26.	Teknik Elektro
8.	Biologi	27.	Teknik Mesin
9.	Matematika	28.	Teknik Industri
10.	Fisika	29.	Teknik Lingkungan
11.	Ilmu Biomedik	30.	Teknologi Industri Pertanian
12.	Kesehatan Masyarakat	31.	Teknik Pertanian
13.	Ilmu Kebidanan	32.	Ilmu Peternakan
14.	Agronomi	33.	Farmasi
15.	Ilmu Hama dan Penyakit Tumbuhan	34.	Ilmu Hukum
16.	Ilmu Ekonomi Pertanian	35.	Kenotariatan
17.	Ilmu Tanah	36.	Ilmu Keperawatan
18.	Perencanaan Pembangunan	37.	Linguistik
19.	Akuntansi	38.	Ilmu Sejarah
		39.	Sastra

PROGRAM STUDI DOKTOR (S3)

NO	PROGRAM STUDI
1.	Ilmu Pertanian
2.	Studi Pembangunan
3.	Ilmu Biomedik
4.	Ilmu Ekonomi
5.	Ilmu Hukum
6.	Ilmu Kimia
7.	Ilmu Peternakan
8.	Kesehatan Masyarakat
9.	Biologi
10.	Teknik Mesin

Jadwal Pendaftaran :
Pembelian PIN dan Pendaftaran *online* tanggal : 6 Maret s/d 28 April 2017

Persyaratan Umum :
IPK Minimum 2,75 atau < 2,75 jika memiliki pengalaman kerja diatas 5 tahun untuk calon pendaftar S2.

Persyaratan dan Kelengkapan Berkas yang diserahkan :

- Foto copy ijazah dan transkrip nilai S1 (Ijazah Sarjana) yang dilegalisir untuk calon pendaftar S2.
- Foto copy ijazah dan transkrip nilai S1, S2 yang dilegalisir untuk calon pendaftar S3.
- Pas photo warna 4 x 6 sebanyak 3 lembar.
- Surat keterangan kesehatan dari dokter.
- Formulir pendaftaran, dapat di download melalui website : <http://pmb.unand.ac.id>.
- Rancangan Penulisan ide penelitian untuk calon pendaftar S3 (minimal 1000 kata).
- Surat kesediaan dari calon promotor/ pembimbing untuk calon pendaftar S3 (lihat website: <http://pasca.unand.ac.id>).

8. Melampirkan Bukti Pendaftaran *online* calon pendaftar Beasiswa Unggulan Dosen Indonesia Dalam Negeri (BUDI-DN).

9. Surat rekomendasi akademis dari dua orang untuk calon pendaftar S2 dan tiga orang untuk calon pendaftar S3 yang relevan.

10. Melampirkan Bukti pembelian PIN pendaftaran.

11. Khusus Program Studi Magister Ilmu Kebidanan pelamar yang diterima adalah tenaga dosen PTN/PTS dengan melampirkan juga persyaratan sebagai berikut;

- Surat keterangan sebagai tenaga dosen dari instansi pelamar, dan
- Surat izin belajar dari atasan pelamar.

Persyaratan dan Kelengkapan berkas dibawa pada saat ujian Wawancara/ujian Kompetensi dan juga disertakan dengan aslinya.

Prosedur Pendaftaran :

- Melakukan Pembelian PIN pendaftaran pada Bank Syariah Mandiri (BSM) untuk mendapatkan **username** dan **password**, dengan membayar uang pendaftaran sebesar: Rp. 500.000,-
- Melakukan pendaftaran dan pengisian formulir secara online melalui website; <http://umb.pasca.unand.ac.id>.

Jadwal Ujian Seleksi:

- Ujian TPA, TOEFL ; tanggal: 6 Mei 2017.
 - Sesi 1 jam: 08.00 - 10.00 wib, b. Sesi 2 jam: 10.30 - 12.30 Wib,
- Ujian Kompetensi/Wawancara; tanggal: 7 Mei 2017.

TANGGAL PENTING

- Pembelian PIN dan Pendaftaran *Online* : 6 Maret s/d 28 April 2017
- Ujian TPA, TOEFL: 6 Mei 2017
- Ujian Kompetensi/Wawancara: 6 - 7 Mei 2017
- Pengumuman Kelulusan : 19 Mei 2017
- Registrasi Ulang: 22 Mei s/d 7 Juli 2017
- Awal Perkuliahan: 7 Agustus 2017

INFORMASI LEBIH LANJUT →

- Melalui website : <http://pmb.unand.ac.id>; atau <http://pasca.unand.ac.id>
- Akademik Program Pascasarjana Kampus Limau Manis Padang, Telp 0751-71686, Fax 0751-71691
- Kontak Person: (a). Yelna Derjunita; HP. +62 852 74645435; (b) Ritta Yenni Arief; HP. +62 8126628648

Rektor
Universitas Andalas
Dito
Prof. Dr. Tafdil Husni, SE, MBA
NIP. 196211201987021002



Ketua Panitia
Dito
Prof. Dr. Syukri Arief, M.Eng
NIP. 196609181991031005

Terhitung Tahun Akademik 2018 - 2019, terdapat pembaharuan pada Sistem Pendaftaran Mahasiswa Baru Program Pascasarjana Universitas Andalas, yang mana calon pendaftar tidak lagi menyerahkan secara langsung/mengirim berkas pendaftaran kepada sekretariat penerimaan mahasiswa baru Program Pascasarjana Universitas Andalas, akan tetapi **seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas harus diupload secara online.**

Berikut Pendaftaran Mahasiswa Baru Pascasarjana Universitas Andalas, terhitung Tahun Akademik 2018 – 2019, yang dapat dilihat pada laman :

<http://pasca.unand.ac.id/id/pendaftaran/pengumuman>

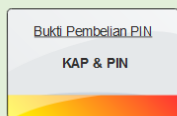
Penerimaan Mahasiswa Baru Pascasarjana Universitas Andalas Tahun 2018/2019

Akreditasi Institusi BAN-PT A
No. 039/SK/IBAN-PT/Akred/PT/2014

Gelombang III :

- Pendaftaran : 8 Juli - 2 Agustus 2018
- Ujian TPA dan TOEFL : 4 Agustus 2018
- Ujian Wawancara : 4 Agustus - 5 Agustus 2018
- Pengumuman Lulus : 8 Agustus 2018
- Pendaftaran Ulang : 9 Agustus - 10 Agustus 2018

INFO LEBIH LANJUT : pasca.unand.ac.id
pmb.unand.ac.id



Klik Tombol Cetak KAP untuk mendapatkan KAP & PIN

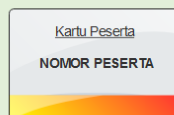


Membayar biaya pendaftaran sebesar nominal & pada bank yang tertera pada Bukti Pembelian PIN

ALUR PENDAFARAN MAHASISWA BARU - UNIVERSITAS ANDALAS
<http://pendaftaran.pmb.unand.ac.id>



Peserta Seleksi



Cetak **Kartu Peserta** sebagai tanda bukti peserta seleksi



Gunakan KAP & PIN untuk melakukan **Pengisian Borang Pendaftaran** di <http://pendaftaran.pmb.unand.ac.id>

PROSEDUR PENDAFTARAN :

1. Melakukan Registrasi awal pada <http://pendaftaran.pmb.unand.ac.id> kemudian klik **Pembelian PIN** untuk memperoleh **KAP** dan **PIN**
2. Melakukan Pembayaran pada Bank Syariah Mandiri sebesar Rp. 500.000,- untuk aktivasi **KAP** dan **PIN**
3. Melakukan pendaftaran dan pengisian formulir pendaftaran secara online melalui website : <http://pendaftaran.pmb.unand.ac.id> untuk mendapatkan kartu peserta.

PERSYARATAN UMUM :

IPK Minimum 2,75 atau <2,75 jika memiliki pengalaman kerja

Persyaratan dan Kelengkapan Berkas **yang di upload** :

1. Foto copy ijazah dan transkrip nilai S1 (Ijazah Sarjana) yang dilegalisir untuk calon pendaftar S2 (Magister)
2. Foto copy ijazah dan transkrip nilai S1,S2 yang dilegalisir untuk calon pendaftar S3 (Doktor)
3. Pas photo 4x6 sebanyak 3 lembar
4. Surat keterangan sehat dari dokter
5. Formulir pendaftaran, **dapat didownload di berkas attachment dibawah postingan ini**
6. Rancangan penulisan ide penelitian untuk calon pendaftar S3 (minimal 1000 kata)
7. Surat kesediaan dari calon promotor/ pembimbing untuk calon pendaftar S3 (**Download pada berkas attachment postingan ini**)
8. Informasi beasiswa Kemenristekdikti yang dapat dilihat di <http://beasiswa.ristekdikti.go.id/bppdn>
9. Surat rekomendasi akademis dari dua orang untuk calon pendaftar S2 dan tiga orang untuk calon pendaftar S3 yang relevan
10. Melampirkan bukti pembelian PIN pendaftaran
11. Khusus Program Studi Magister Kebidanan, pelamar yang diterima adalah tenaga dosen (PTN/PTS) yang tamatan Strata 1 (S1) dengan melampirkan juga persyaratan sebagai berikut :
 - a. Surat Keterangan sebagai tenaga dosen dari instansi pelamar, dan
 - b. Surat izin belajar dari atasan pelamar

3.2 Profil Mahasiswa dan Lulusan

3.2.1 Tuliskan data seluruh mahasiswa dan lulusannya dalam lima tahun terakhir dengan mengikuti format tabel berikut:

Tahun Akademik	Daya Tampung	Jumlah Calon Mahasiswa		Jumlah Mahasiswa Baru		Jumlah Total Mahasiswa		Jumlah Lulusan		IPK ⁽³⁾ Lulusan Mahasiswa Bukan Transfer			Jumlah Mahasiswa WNA
		Ikut Seleksi	Lulus Seleksi	Bukan Transfer	Transfer ⁽²⁾	Bukan Transfer	Transfer ⁽²⁾	Bukan Transfer	Transfer ⁽²⁾	Min	Rata2	Mak	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
TS-4	150	142	103	102	3	282	3	21	0	3,15	3,36	3,60	0
TS-3	132	168	132	130	0	391	0	86	0	3,00	3,40	3,79	0
TS-2	145	227	143	135	0	440	0	106	0	3,04	3,41	3,74	0
TS-1	130	181	121	118	1	452	0	86	0	3,08	3,41	3,79	0
TS	145	191	144	137	0	503	0	130	0	3,16	3,41	3,93	0
Jumlah	702	909	643	622	4	2068	3	429	0				
Rata-rata IPK untuk lulusan tiga tahun terakhir = 3,4055478 Dihitung dengan rumus : $(A1 \times B1 + A2 \times B2 + A3 \times B3) / (A1 + A2 + A3)$													
Rata-rata lama studi untuk lulusan tiga tahun terakhir = 2 tahun													

Catatan:

⁽¹⁾TS: Tahun akademik penuh terakhir saat pengisian borang

⁽²⁾Mahasiswa **transfer** adalah mahasiswa yang masuk ke program studi dengan mentransfer matakuliah yang telah diperolehnya dari PS lain, baik dari dalam PT maupun luar PT.

⁽³⁾Min: IPK Minimum; Rata2:IPK Rata-rata; Mak:IPK Maksimum

3.2.2 Sebutkan pencapaian prestasi/reputasi mahasiswa dalam tiga tahun terakhir di bidang akademik (misalnya prestasi dalam penelitian dan lomba karya ilmiah).

No.	Nama Mahasiswa	Jenis Prestasi	Kegiatan, Waktu, dan Tempat	Tingkat (Lokal, Wilayah, Nasional, atau Internasional)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Yulia Risa	Presenter at The 1 st Annual Conference On Economics, Business, Accounting, and Social Sciences (ACEBASS) "Sustainability Development In Achieving Economic Independence" Kerjasama Universitas Dharma Andalas dan Universitas Selangor	2017, Universitas Dharma Andala	Internasional
2.	Andre Aulia Rahman	Penyaji pada Konferensi Nasional Hukum Tata Negara IV, judul makalah : Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Investasi Dalam Mengejewantahkan Demokrasi Ekonomi Pancasila	2017, Jember	Nasional

1.2.3 Tuliskan data jumlah mahasiswa pada lima tahun terakhir dengan mengikuti format tabel berikut:

Tahun Masuk	Jumlah Mahasiswa Bukan Transfer per Angkatan pada Tahun					Jumlah Lulusan s.d. TS (dari Mahasiswa Bukan Transfer)
	TS-4 2013-2014	TS-3 2014-2015	TS-2 2015-2016	TS-1 2016-2017	TS 2017-2018	TS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
TS-4	(a)= 102	102	55	35	(b)= 17	(c)= 85
TS-3		128	128	74	31	97
TS-2			135	135	89	46
TS-1				(d)= 118	(e) = 118	(f) = 46
TS					137	

Catatan : Huruf-huruf a, b, c, d dan e harus tetap tercantum pada tabel di atas.

Tahun Sekarang (TS) 2017

3.3 Evaluasi Lulusan

3.3.1 Evaluasi kinerja lulusan oleh pihak pengguna lulusan

Adakah studi pelacakan (*tracer study*) untuk mendapatkan hasil evaluasi kinerja lulusan dengan pihak pengguna?

- Tidak ada
 Ada

Jika ada, uraikan metode, proses dan mekanisme kegiatan studi pelacakan tersebut. Jelaskan pula bentuk tindak lanjut dari hasil kegiatan ini.

METODE STUDI PELACAKAN (TRACER STUDY)

Prodi MKn FH Unand melakukan *tracer study* setiap tahun dengan menggunakan metode survey melalui media sosial, wawancara langsung (tatap muka, temu alumni) dan tidak langsung (sms, telepon, email) terhadap lulusan tiga tahun terakhir.

PROSES DAN MEKANISME PELACAKAN LULUSAN

Tahapan proses dan mekanisme pelacakan lulusan sebagai berikut :

1. Penetapan Tim *Tracer Study*.
2. Penyusunan kuisisioner pelacakan lulusan.
3. Penyebaran kuisisioner kepada alumni.
4. Pengumpulan kuisisioner.
5. Pengolahan data dan penyusunan laporan hasil pelacakan lulusan.

6. Mulai Januari 2016, penelusuran alumni FH Unand dilakukan dengan menggunakan metode berbasis daring, yaitu pengisian data yang dilakukan melalui pengisian *form* dalam format *Docs*, yang dapat dikirimkan melalui email ataupun menggunakan aplikasi *WhatsApp* dengan link <http://bit.ly/PendataanAlumniFHUA> .

TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI

Hasil evaluasi kegiatan *Tracer Study* digunakan oleh Prodi MKn untuk :

1. Perbaikan proses belajar mengajar (PBM) dan pengembangan dan perubahan kurikulum.
2. Penggalangan dana dan peningkatan sarana serta prasarana.
3. Informasi pekerjaan
4. Membangun jejaring

Dari hasil evaluasi kinerja lulusan menunjukkan bahwa para alumni memperoleh tanggapan yang positif dari instansi mereka magang atau bekerja. Namun demikian masukan dari pengguna lulusan tetap ada dalam upaya menyiapkan lulusan yang kompetitif dan sesuai dengan kebutuhan para pengguna lulusan.

Tindak lanjut dari data dan hasil evaluasi yang telah dilakukan Prodi, selanjutnya akan dikelola oleh lembaga otonom di Fakultas Hukum Universitas Andalas, yaitu *The Center for International and Alumni Relation* (CIAR) yang dibentuk melalui Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas Nomor 483a/XIII/D/F.Huk-Unand/2016. Profil lengkap lembaga CIAR dapat dilihat pada laman <http://ciar.fhuk.unand.ac.id> .

3.3.2 Hasil studi pelacakan dirangkum dalam tabel berikut:

Nyatakan angka persentasenya(*) pada kolom yang sesuai. Jumlah responden (pengguna) = 40

No.	Jenis Kemampuan	Tanggapan Pihak Pengguna				Pemanfaatan Hasil Pelacakan
		Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	
		(%)	(%)	(%)	(%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Integritas (Etika dan Moral)	72,00	28,00	-	-	Hasil pelacakan terkait integritas lulusan menyatakan 72 % lulusan Prodi MKn mempunyai integritas yang sangat baik. Upaya peningkatan integritas lulusan tetap selalu dilakukan sesuai dengan tujuan Prodi MKn yang diantaranya adalah menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religious. Peningkatan integritas juga dilakukan untuk pengembangan kurikulum pada Prodi MKn.
2	Keahlian Berdasarkan Bidang ilmu (Profesionalisme)	71,00	39,00	-	-	Hasil pelacakan terkait keahlian berdasarkan bidang ilmu (profesionalisme) digunakan untuk melakukan peningkatan materi bidang keahlian yang terkait dengan akta kenotariatan pada kurikulum Prodi MKn. Berdasarkan hasil ini juga akan ditingkatkan keterlibatan mahasiswa dalam penelitian yang dilakukan oleh Dosen.
3	Keluasan Wawasan Antar	59,00	41,00		-	Hasil pelacakan terkait keluasan wawasan antar

	Disiplin ilmu				-	disiplin ilmu digunakan sebagai pedoman untuk melakukan peningkatan meningkatkan wawasan melalui kegiatan kuliah umum, seminar, konferensi berdasarkan kerjasama yang telah dilakukan dengan berbagai Instansi pemerintah, ataupun himpunan profesi seperti INI dan IPPAT.
4	Kepemimpinan	61,00	39,00		-	Hasil pelacakan terkait kepemimpinan dinyatakan 71% sangat baik. Hasil ini digunakan untuk meningkatkan jiwa kepemimpinan mahasiswa dan lulusan Prodi MKN FH Unand dengan pelatihan – pelatihan kepemimpinan, menjadi narasumber pada kegiatan seminar, dan menggunakan forum alumni yang terdapat pada fakultas untuk memfasilitasi kegiatan magang calon Notaris lulusan Prodi MKn FH Unand.
5	Kerjasama Dalam Tim	68,00	20,00	2,00%	-	Hasil pelacakan terkait kerjasama dalam tim menyatakan 68 % sangat baik. Hasil ini digunakan untuk meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam berbagai kegiatan akademis dengan terlibat sebagai panitia pada Kuliah Umum, Seminar, Pelatihan ataupun Konferensi yang diselenggarakan oleh Prodi MKn. Peningkatan kemampuan mahasiswa

						dalam bidang kerjasama juga dilakukan dengan keaktifan mahasiswa dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan, yaitu Ikatan Mahasiswa Kenotariatan (IMK) Prodi MKn FH Unand.
6	Bahasa Asing	25,00	45,00	30,00	-	Hasil pelacakan dari terkait kemampuan lulusan dalam bahasa asing 25% yang menyatakan sangat baik. Hasil ini digunakan oleh Prodi MKn untuk melakukan peningkatan kemampuan bahasa asing mahasiswa, terutama bahasa Inggris. Mahasiswa diberikan arahan untuk aktif menulis pada jurnal internasional. FH Unand juga menetapkan skor TOEFL minimal 500 sebagai syarat pendaftaran calon mahasiswa dan syarat untuk mengikuti Ujian Akhir, sebagai motivasi bagi mahasiswa untuk selalu meningkatkan kemampuannya dalam bidang bahasa Inggris.
7	Komunikasi	62,00	28,00	10,00	-	Hasil pelacakan terkait kemampuan komunikasi menyatakan 62% sangat baik. Hasil ini digunakan untuk meningkatkan kemampuan <i>soft skill</i> mahasiswa dan lulusan dalam melakukan komunikasi pada forum – forum ilmiah. Hasil ini juga digunakan untuk mengembangkan metode pembelajaran yang

						digunakan dalam PBM. Melatih mahasiswa membuat makalan untuk dipresentasikan serta komunikasi yang interaktif antara mahasiswa dan dosen.
8	Penggunaan Teknologi Informasi	42,00	52,00	6,00	-	Hasil pelacakan terkait kemampuan lulusan dalam penggunaan teknologi informasi menyatakan 42% mempunyai kemampuan sangat baik. Hasil ini digunakan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menggunakan sistem informasi, baik sistem informasi yang dimiliki Fakultas dalam penyelenggaraan kegiatan akademik, maupun sistem informasi yang terkait dengan bidang kenotariatan seperti sistem informasi dan teknologi Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum atau SABH), yaitu layanan pengesahan akta perseroan secara daring (<i>online</i>) yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
9	Pengembangan Diri	33,00	67,00	-	-	Hasil pelacakan terkait kemampuan pengembangan diri lulusan menyatakan 33% sangat baik. Hasil ini

						digunakan untuk meningkatkan keaktifan mahasiswa dalam kegiatan akademik dan kegiatan kemahasiswaan. Kegiatan akademik akan meningkatkan pengembangan keilmuan mahasiswa dan kegiatan kemahasiswaan akan meningkatkan kemampuan <i>leadership</i> dan kemampuan manajerial organisasi.
Total		(a)=493	(b)=359	(c)= 48	(d)= 0	

Catatan : Sediakan dokumen pendukung pada saat asesmen lapangan

(*) persentase tanggapan pihak pengguna pada peringkat = [(jumlah tanggapan pada peringkat) : (jumlah tanggapan yang ada)] x 100

1.3.2.1 Pendapat Pengguna Lulusan (*Employer*) Terhadap Kualitas Alumni

A. METODE

Guna mendapatkan pendapat pengguna lulusan terhadap kualitas alumni dilakukan dengan metode sebagai berikut :

1. Komunikasi melalui telepon atau mendatangi langsung pengguna lulusan yang berdomisili di kota Padang
2. Berdasarkan data yang diperoleh melalui *tracer study*, Pengelola Prodi menindaklanjuti dengan mengirimkan questioner melalui surat dan surat elektronik (*e-mail*) kepada pengguna lulusan
3. Pengelola Prodi juga mengirimkan *form* kepada pengguna lulusan. Melalui aplikasi *docs* yang dikirimkan melalui aplikasi *WhatsApp*.

B. PROSES DAN MEKANISME

Pengguna lulusan dapat memberikan penilaian melalui mekanisme sistem *daring* (*online*) melalui Form isian dalam bentuk *Docs* yang dikirimkan. Hasil yang diterima oleh Prodi menjadi bahan evaluasi dan kajian guna peningkatan kualitas lulusan.

Penelusuran data alumni dan pengguna lulusan diserahkan kepada lembaga otonom FH Unand yaitu *The Center for International and Alumni Relation* (CIAR) yang dibentuk

melalui Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Unand No. 483a/XIII/D/F.Huk-Unand/2016. Dalam menjalankan kegiatan, CIAR berkoordinasi dengan Ikatan Keluarga Alumni Fakultas Hukum Unand. Profil lengkap lembaga CIAR dapat dilihat pada laman <http://ciar.fhuk.unand.ac.id>.

3.3.2.2. Pemanfaatan Hasil Pelacakan Untuk Perbaikan

Data yang telah diperoleh dari *track study* akan ditindaklanjuti untuk diolah dan dianalisis. Hasil analisis tersebut akan digunakan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan : proses pembelajaran, penggalangan dana, informasi pekerjaan dan membangun jejaring. Masing – masing aspek akan diuraikan sebagai berikut :

A. PROSES PEMBELAJARAN

Penggunaan data hasil pelacakan untuk peningkatan proses pembelajaran didasarkan pada aspek – aspek penilaian pada hasil pelacakan yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Integritas Lulusan

Berdasarkan hasil pelacakan, lulusan Prodi MKn FH Unand memiliki integritas sangat baik mencapai 72%. Namun demikian tetap melakukan peningkatan integritas mahasiswa sesuai dengan salah satu tujuan Prodi MKn yaitu menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Nilai – nilai kejujuran harus menjadi landasan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan akademis, baik pada saat ujian maupun pembuatan tugas akhir dengan menghindari plagiat.

2. Keahlian Berdasarkan Bidang Ilmu dan Keahlian Wawasan Antar Disiplin Ilmu

Berdasarkan hasil pelacakan, lulusan Prodi MKn FH Unand memiliki keahlian berdasarkan bidang ilmu kategori sangat baik mencapai 71%. Lulusan Prodi MKn Fh Unand memiliki keahlian wawasan antar disiplin ilmu kategori sangat baik mencapai 59%. Prodi MKn melakukan peningkatan kemampuan mahasiswa agar dapat mewujudkan visi Prodi MKn, yaitu "Menjadi program pendidikan Magister Kenotariatan terkemuka dan bermartabat serta mampu bersaing pada tingkat

nasional dan regional”. Dalam mewujudkan visi dengan mempertimbangkan penilaian dari hasil pelacakan, maka Prodi MKn meningkatkan penyelenggaraan kegiatan akademis seperti Kuliah Umum dengan menghadirkan Praktisi dan Akdemisi, Seminar, Pelatihan di bidang kenotariatan, mendorong mahasiswa untuk aktif membuat artikel pada jurnal, serta melibatkan mahasiswa dalam penelitian dosen.

3. Kepemimpinan

Berdasarkan hasil pelacakan, lulusan Prodi MKn FH Unand memiliki keahlian berdasarkan bidang ilmu kategori sangat baik mencapai 71%. Berdasarkan hasil ini, Prodi MKn berupaya meningkatkan.

4. Kerjasama Dalam Tim

Berdasarkan hasil pelacakan, lulusan Prodi MKn FH Unand memiliki keahlian berdasarkan bidang ilmu kategori sangat baik mencapai 68%. hasil pelacakan ini ditindaklanjuti dengan peningkatan diskusi – diskusi kelompok pada perkuliahan, penerapan metode pembelajaran SCL (*Student Centered Learning*), melibatkan mahasiswa dalam penelitian.

5. Keahlian Bahasa Inggris

Berdasarkan hasil pelacakan, lulusan Prodi MKn FH Unand memiliki keahlian berdasarkan Bahasa Inggris yang baik, dan harus ditingkatkan menjadi sangat baik. Hal ini menjadi bahan evaluasi dengan menetapkan syarat pendaftaran calon mahasiswa dan syarat kelulusan memenuhi standar TOEFL minimal 500.

6. Keahlian Komunikasi

Hasil pelacakan terkait kemampuan komunikasi menyatakan 62% sangat baik. Hasil ini digunakan untuk meningkatkan kemampuan *soft skill* mahasiswa dan lulusan dalam melakukan komunikasi pada forum – forum ilmiah. Hasil ini juga digunakan untuk mengembangkan metode pembelajaran yang digunakan dalam PBM. Melatih mahasiswa membuat makalan untuk dipresentasikan serta komunikasi yang interaktif antara mahasiswa dan dosen.

7. Keahlian Penggunaan Teknologi Informasi

Hasil pelacakan terkait kemampuan lulusan dalam penggunaan teknologi informasi menyatakan 42% mempunyai kemampuan sangat baik. Hasil ini digunakan untuk

meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menggunakan sistem informasi, baik sistem informasi yang dimiliki Fakultas dalam penyelenggaraan kegiatan akademik, maupun sistem informasi yang terkait dengan bidang kenotariatan seperti sistem informasi dan teknologi Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum atau SABH), yaitu layanan pengesahan akta perseroan secara daring (*online*) yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

8. Keahlian Pengembangan Diri

Hasil pelacakan terkait kemampuan pengembangan diri lulusan menyatakan 33% sangat baik. Hasil ini digunakan untuk meningkatkan keaktifan mahasiswa dalam kegiatan akademik dan kegiatan kemahasiswaan. Kegiatan akademik akan meningkatkan pengembangan keilmuan mahasiswa dan kegiatan kemahasiswaan akan meningkatkan kemampuan *leadership* dan kemampuan manajerial organisasi.

B. PENGGALANGAN DANA

Berdasarkan hasil pelacakan yang dilakukan, diperoleh data alumni dan penyebaran lokasi. Hal ini digunakan untuk penggalangan dana, yaitu menghimpun sumbangan alumni bagi kemajuan Prodi MKn FH Unand. Sumbangan dana ini digunakan untuk perbaikan atau pembangunan infrastruktur ataupun membantu pembiayaan kegiatan non akademik.

C. INFORMASI PEKERJAAN

Berdasarkan hasil pelacakan yang dilakukan, data alumni dan penyebaran lokasi yang diperoleh, digunakan sebagai sumber informasi bagi lulusan untuk mendapatkan informasi pekerjaan atau tempat magang.

D. MEMBANGUN JEJARING

Dengan adanya data alumni yang tersusun secara sistematis dan komprehensif, maka Prodi MKn memiliki jejaring alumni yang baik. Pembangunan jejaring ini juga menggunakan sarana media sosial untuk memudahkan komunikasi antar alumni, seperti melalui Facebook, Twitter, Whtasapp dengan menggunakan akun atas nama alumni.

3.4 Himpunan Alumni

Jelaskan apakah lulusan program studi memiliki himpunan alumni. Jika memiliki, jelaskan jenis partisipasi (sumbangan dana, fasilitas, masukan untuk perbaikan proses pembelajaran, pengembangan jejaring) dan hasil kegiatan dari himpunan alumni untuk kemajuan program studi.

Alumni Universitas Andalas terhimpun dalam suatu wadah Ikatan Alumni (IKA) yang memiliki struktur kepengurusan IKA Unand, fasilitas, dan kegiatan yang dapat dilihat pada web <http://web.ikaunand.org>. Di tingkat fakultas, terdapat Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Andalas (IKA FH Unand). Khusus untuk Prodi MKn Unand terhimpun dalam wadah Ikatan Alumni Magister Kenotariatan (IKANOT Unand). IKA Unand, IKA FH Unand dan IKANOT Unand mempunyai peran yang besar dalam memberikan kontribusi, antara lain:

1. SUMBANGAN DANA

Sumbangan pendanaan untuk beasiswa, baik atas nama pribadi, angkatan maupun kepengurusan alumni dijabarkan dalam tabel berikut :

No.	Tahun	Nominal	Peruntukan
1	2015	<ul style="list-style-type: none">Rp 3.397.362,00	International Seminar oleh Prof. Dr. Jan Pieter Pronk mengenai The Death Penalty and Human Rights
2	2016	<ul style="list-style-type: none">Rp 1.750.500,00Rp 5.000.000,00Rp 3.000.000,00	<ul style="list-style-type: none">Seminar Hukum Perminyakan oleh Benny Andre KusumaBeasiswa Penulisan Alumni (91 Scholarships)Beasiswa Penulisan Tugas Akhir (Veri Junaidi Scholarship)
3	2017	<ul style="list-style-type: none">Rp 6.611.000,00Rp 10.000.000,00Rp. 5.000.000,00	<ul style="list-style-type: none">Seminar PPATK ('91 Back To Campus)Konferensi Nasional Hukum Internasional dan Workshop Hukum Laut.Beasiswa penulisan skripsi (Veri Junaidi schoolarshi)

Total dana yang diberikan adalah sebesar Rp. 34.758.862,00

1. SUMBANGAN FASILITAS

No.	Bentuk Fasilitas	Tahun Perolehan	Jumlah
1.	Perbaikan bangunan mushalla	2014	Rp. 10.000.000,00
2.	Sumbangan AC 2 Unit	2017	Rp. 11.000.000,00
3.	Buku - Buku	Mar 2017	Rp. 589.000,00
4.	Lemari Kabinet	Mar 2017	Rp. 1.700.000,00
5.	Karpet	Mar 2017	Rp. 530.000,00
6.	Kursi Untuk Perpustakaan	Mar 2017	Rp. 1.235.000,00
7.	Bangunan Musholla Al - Hakim	Des 2017	Rp. 425.000.000,00
8.	Bangunan Pedestrian	Des 2017	Rp. 27.000.000,00
9.	Bangunan <i>Wall Climbing</i>	Des 2017	Rp. 135.000.000,00

Total dana yang diberikan adalah sebesar **Rp. 601.054.500,00**

3. MASUKAN UNTUK PERBAIKAN PROSES PEMBELAJARAN

Masukan alumni untuk perbaikan proses pembelajaran pada Prodi MKn FH Unand antara lain :

- a. Penggunaan media teknologi komputer khusus mata kuliah Teknik Pembuatan Akta (TPA).
- b. Khusus untuk mata kuliah TPA, selain diberikan di kelas, juga diikuti dengan memberikan pengenalan dan pemahaman secara langsung ke kantor notaris.
- c. Melakukan pembaharuan terhadap bahan ajar untuk mata kuliah yang terkait dengan praktek notaris dan ke PPAT-an.

Kontribusi alumni dalam kegiatan akademik dapat dilihat secara detil dalam tabel berikut ini.

No	Tahun Kegiatan	Rincian Kegiatan	Alumni / Instansi yang terlibat
1	2015	Seminar nasional mengenai Hukuman Mati dengan menghadirkan Nara Sumber dari Belanda.	PUSAKO, CIAR, Tahir Foundation
2	2016	<ul style="list-style-type: none"> • Kuliah umum yang disampaikan oleh Alumni di bidang Hukum perminyakan • Seminar yang disampaikan oleh Alumni mengenai prospek kerja /profesi di bidang hukum. • Kuliah Umum mengenai Hukum Humaniter Internasional. • Kuliah Umum mengenai Hukum Perjanjian Internasional • Workshop: Current issues on Legal Research Method 	<ul style="list-style-type: none"> • Benny Andre Kusuma (PT. Pertamina Tbk - Jakarta) • Adityawarman - Kejaksaan • Ali Arben – Notaris • Benny AK - PT. Pertamina – Jakarta • Rina Rusman - ICRC Jakarta Office • Ferry Adamhar - Kementerian Luar Negeri
3	2017	<ul style="list-style-type: none"> • Kuliah umum yang disampaikan oleh Alumni mengenai Pencegahan Tindak Kejahatan TPPU • Workshop mengenai Pembuatan Kontrak Bidang Perminyakan. • Kuliah umum mengenai Diplomasi Luar Negeri dalam Hubungan Internasional. • Seminar Nasional mengenai Penggunaan Senjata dalam Perang di Laut. • Workshop kurikulum Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Laut • Beasiswa Penulisan Skripsi • Disseminasi Hukum 	<ul style="list-style-type: none"> • Fithriadi - PPAK Jakarta • Benny Andre Kusuma • Masni Eriza - Kemenlu • Rina Rusman - ICRC • Rina Rusman - ICRC • Veri Junaedi –

		Humaniter Internasional • Pengantar Legal English/Bahasa Inggris Hukum	• Susi Liza Febriani - Kemenkumham
--	--	---	---------------------------------------

4. PENGEMBANGAN JEJARING

Dalam pengembangan jejaring yang dilakukan alumni adalah :

- a. Melakukan pertemuan alumni setiap tahun ataupun reuni akbar yang diadakan oleh IKA Unand maupun IKA FH Unand yang di informasi kan melalui website: <http://alumniunand.com/> dan <http://ciar.fhuk.unand.ac.id/> Reuni diadakan untuk menjalin silaturahmi alumni serta memperkuat networking.
- b. Berkontribusi sebagai dosen tamu atau narasumber dalam kegiatan-kegiatan akademik, khususnya di Prodi MKn FH Unand.
- c. Menyediakan tempat magang bagi alumni Prodi MKn Unand.
- d. Memberikan informasi lowongan pekerjaan, terutama di instansi tempat alumni itu bekerja.



STANDAR 4 SUMBER DAYA MANUSIA

IIIA

Borang Akreditasi Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Andalas

4.1 Sistem Rekrutmen, Pembinaan, dan Pengembangan

Jelaskan sistem rekrutmen (termasuk persyaratan akademik dan pengalaman), penempatan, pembinaan, pengembangan dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan untuk menjamin mutu penyelenggaraan program akademik.

Dalam proses rekrutmen dan pelaksanaan pembinaan serta pengembangan SDM untuk menjamin mutu penyelenggaraan program akademik pada Prodi MKn FH Unand dapat diuraikan dengan rincian sebagai berikut :

A. SISTEM REKRUTMEN, PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN DOSEN.

Sistem rekrutmen dosen di FH Unand didasarkan pada ketentuan yang telah ditetapkan di tingkat Nasional, Universitas dan Fakultas Hukum Unand, antara lain Peraturan Perundang-undangan tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri yang termuat dalam :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas
7. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
8. Surat Edaran Sekjen Kemdiknas No. 71269/A4/KP/2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan CPNS
9. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 3 Tahun 2016 tentang Peraturan

Akademik universitas Andalas

Pasal 26 Ayat (8) Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi menyebutkan bahwa Dosen program magister dan program magister terapan harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNi. Persyaratan sebagai dosen pada program Magister yang wajib dipenuhi adalah memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani. Selain itu harus mempunyai kemampuan melaksanakan pengajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan magister.

1. Sistem Rekrutmen Dosen

Kebutuhan dosen pada program studi dikarenakan pengembangan penyelenggaraan pendidikan, ataupun karena adanya dosen yang telah memasuki masa pensiun (purna bakti). Rekrutmen didasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan seleksi diumumkan secara terbuka untuk Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan formasi yang telah ditetapkan. Seleksi dilakukan dalam beberapa tahapan test kemampuan dan wawancara

Program studi melakukan evaluasi kebutuhan dosen dan menyampaikan hasil evaluasi tersebut kepada Dekan untuk dibahas dalam Rapat Senat Fakultas. Hasil pembahasan Rapat Senat Fakultas dijadikan prioritas di dalam program kerja tentang kebutuhan sumber daya manusia (SDM), untuk disampaikan kepada Rektor. Pimpinan Universitas akan menyampaikan informasi tentang kebutuhan formasi kepada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kementerian PAN). Hasil kajian Kementerian tersebut akan disampaikan kepada Universitas untuk selanjutnya diumumkan tentang rekrutmen tenaga Dosen di dalam website :

<http://www.unand.ac.id/id/berita-peristiwa/berita/item/2754-pengumuman-seleksi-cpns-universitas-andalas-tahun-2018.html> dan media surat kabar lokal dan nasional.

Tahapan selanjutnya, peserta yang akan mengikuti seleksi mengirimkan berkas lamaran secara online ke Kemenristek Dikti, dan selanjutnya Kemenristek Dikti mengumumkan daftar peserta yang lulus seleksi administrasi untuk segera mengirimkan berkas berupa *hardcopy* ke Kemenristek Dikti. Selanjutnya Kemenristek Dikti mengumumkan jadwal Ujian Tes Kemampuan Dasar (TKD) bagi peserta yang lolos seleksi administrasi tersebut. Peserta yang lulus Ujian TKD, berhak untuk mengikuti tahapan ujian selanjutnya, yaitu Psikotest yang dilakukan oleh Psikologi Unand. Peserta yang lulus Psikotest berhak untuk mengikuti tahapan ujian selanjutnya yaitu Ujian Tes Kemampuan Bidang (TKB) yang diselenggarakan oleh Fakultas. Ujian TKB diselenggarakan dalam beberapa tahapan yaitu ujian tertulis, wawancara dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, serta Tes Kemampuan Mengajar. Hasil seleksi diumumkan melalui pengumuman yang ditaruh di laman <http://www.unand.ac.id/berita-peristiwa/berita/item/2305-hasil-akhir-cpns-unand-2017.html>

Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 98 Ayat (5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas, persyaratan pendaftaran cpns dosen Unand adalah sebagai berikut :

a. Persyaratan Umum

- 1) Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan republik Indonesia.
- 2) Sehat Jasmani dan Rohani.
- 3) Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya.
- 4) Berkelakuan baik dan tidak pernah dipenjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- 5) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- 6) Tidak berkedudukan sebagai CPNS atau PNS.
- 7) Berusia paling tinggi 35 tahun pada saat pelamaran.
- 8) Tidak sedang menempuh pendidikan dan/atau pelatihan, dengan memperoleh beasiswa dengan perjanjian ikatan dinas/wajib kerja dengan institusi / lembaga / perusahaan / perguruan tinggi.

- 9) Tidak sedang menjalani ikatan dinas / wajib kerja dengan institusi / lembaga / perusahaan / perguruan tinggi.
- 10) Tidak terafiliasi pada ideologi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila.
- 11) Memiliki kualifikasi dan kompetensi sebagai dosen dengan rekomendasi Fakultas melalui pertimbangan Senat Fakultas;
- 12) Mempunyai moral dan integritas yang tinggi;
- 13) Memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara.

b. Persyaratan Khusus

- 1) Memiliki kualifikasi akademik minimum lulusan Program Magister (S2) atau yang setara yang diperoleh dari Perguruan Tinggi Nasional yang telah terakreditasi oleh BAN-PT, atau Perguruan Tinggi Internasional yang diakui oleh Kemenristek dan Dikti.
- 2) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) pada untuk kualifikasi jenjang Pendidikan: Doktor (S3) adalah ≥ 3.50 (tiga koma lima nol) dan untuk Magister (S2) adalah ≥ 3.00 (tiga koma nol nol) dengan skala 4,00 (empat koma nol nol), yang dibuktikan dengan menyerahkan transkrip nilai yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (minimal Dekan).
- 3) Syarat IPK saat pada pendidikan jenjang Sarjana (S1) ≥ 3.00
- 4) Persyaratan khusus untuk Calon Dosen matakuliah keprofesian atau keahlian kenotariatan, dosen pengasuhnya diambil dari kalangan profesional yang berpendidikan minimal Magister Kenotariatan. Penunjukan dosen dari kalangan profesional didasarkan atas rekomendasi dari Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia (Pengwil INI) Sumatera Barat dan pertimbangan Pengelola Program Studi.

Syarat – syarat yang ditetapkan diatas selaras dengan ketentuan Standar Dosen Universitas Andalas yang diatur dalam Pasal 58 hingga Pasal 61 Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 3 Tahun 2016 tentang Peraturan Akademik Universitas Andalas , diantaranya menyebutkan :

- a. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- b. Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang

harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.

- c. Dosen program magister atau program magister terapan harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI)

2. Penempatan Dosen

Setelah proses rekrutmen selesai, dosen akan ditempatkan di Fakultas Hukum berdasarkan Surat Penugasan dari Rektor Unand. Kemudian Dekan akan menempatkan dosen tersebut sesuai dengan kebutuhan prodi berdasarkan kualifikasi keilmuan yang dimiliki, termasuk pada Prodi MKn FH Unand.

3. Pembinaan Dosen

Sistem pembinaan dosen didasari atas Tugas, Pokok dan Fungsi (Tupoksi), yang tahapan pembinaannya meliputi :

- a. Pada saat diterima sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), dosen yang bersangkutan menerima pengarahan dari Pimpinan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Tupoksi nya sebagai Dosen FH Unand.
- b. Jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan – ketentuan kepegawaian, maka pihak kepegawaian akan melaporkan kepada Pimpinan Fakultas.
- c. Pelanggaran yang dilaporkan oleh pihak kepegawaian akan diproses oleh Pimpinan Fakultas, dan jika dipandang perlu, Pimpinan Fakultas akan membentuk Tim Khusus untuk memeriksa dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh dosen yang bersangkutan.
- d. Pimpinan Fakultas akan memanggil dosen yang bersangkutan guna meminta klarifikasi permasalahan dan mencari solusinya.
- e. Pembinaan dosen diputuskan oleh Pimpinan Fakultas berdasarkan peraturan yang berlaku.

4. Pengembangan Dosen

Pengembangan tenaga dosen dilakukan dalam rangka peningkatan kemampuan dan profesionalisme agar dapat meningkatkan mutu hasil lulusan serta

penyelenggaraan proses belajar mengajar. Hal ini sejalan dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Dalam konsideran menimbang huruf b menyatakan Pendidikan Tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menetapkan nilai humaniora serta pembudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan.

Pengembangan sebagaimana yang dimaksud diatas diarahkan pada peningkatan kualitas pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan formal, penelitian ilmiah, seminar nasional maupun internasional, pelatihan atau lokakarya tentang penyusunan proposal penelitian yang kompetitif serta penulisan buku ajar. Hal ini dibuktikan dalam 3 (tiga) tahun terakhir FH Unand telah menghasilkan 15 orang lulusan Doktor Ilmu Hukum yang dibutuhkan oleh Prodi MKn sebagai staf pengajar. Hingga saat ini FH Unand telah memiliki 38 orang Dosen dengan kualifikasi Doktor, 8 orang Dosen dengan kualifikasi Profesor, dan sebanyak 24 orang Dosen sedang menempuh pendidikan Doktor di berbagai institusi diantaranya di Universitas Padjadjaran, Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Brawijaya, Universitas Sriwijaya dan Universitas Andalas. Sehingga diperkirakan 4 (empat) tahun ke depan presentase dosen FH Unand dengan kualifikasi Doktor sudah melebihi 75%.

Upaya pengembangan dosen dilakukan untuk tercapainya visi, misi dan tujuan prodi MKn pada khususnya dan FH Unand pada umumnya. Di samping itu, untuk meningkatkan keilmuan dan keahlian, diberikan kesempatan bagi Dosen untuk ikut serta dalam Asosiasi Profesi sesuai dengan bidang keilmuan dosen yang bersangkutan.

5. Pemberhentian Dosen

Mekanisme pemberhentian Dosen berpedoman kepada ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu :

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); dan
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 164).
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013.
- g. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 25 Tahun 2012 tentang Kode Etik Dosen Universitas Andalas
- h. Dan peraturan-peraturan lain yang terkait dengan ASN

B. SISTEM REKRUTMEN, PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN TENAGA KEPENDIDIKAN.

1. Sistem Rekrutmen Tenaga Kependidikan

Sistem rekrutmen tenaga kependidikan dibedakan antara Tenaga Kependidikan PNS dan Tenaga Kependidikan Non-PNS (kontrak). Rekrutmen Tenaga Kependidikan PNS didasarkan pada ketentuan penerimaan CPNS yang diumumkan melalui web unand di <http://www.unand.ac.id/id/berita-peristiwa/berita/item/2754-pengumuman-seleksi-cpns-universitas-andalas-tahun-2018.html> . Khusus rekrutmen Tenaga Kependidikan Non-PNS dilakukan

oleh Unand berdasarkan kebutuhan diajukan oleh Fakultas Hukum, yang selanjutnya diumumkan melalui web Unand, dan seleksi dilakukan dalam 2 tahapan. Tahapan pertama peserta seleksi mengikuti Psikotest dan dilanjutkan wawancara yang diselenggarakan oleh Psikologi Unand. Peserta yang lulus seleksi tahap pertama, berhak untuk mengikuti seleksi selanjutnya yaitu Wawancara Akhir yang diselenggarakan oleh FH Unand.

Tenaga Kependidikan yang diterima harus memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan di dalam Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 3 Tahun 2016 tentang Peraturan Akademik Universitas Andalas yakni :

- a. Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.
- b. Tenaga kependidikan dikecualikan bagi tenaga administrasi
- c. Tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat
- d. Tenaga Kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai bidang tugas dan keahliannya.

2. Penempatan Tenaga Kependidikan

Dalam hal penempatan tenaga kependidikan disesuaikan dengan kualifikasi Tenaga Kependidikan PNS dan Non PNS. Tenaga Kependidikan PNS, maka penempatannya berdasarkan kebutuhan dan kualifikasi keahlian. Untuk Tenaga Kependidikan Non PNS, maka penempatannya ditetapkan melalui Keputusan Rektor Universitas Andalas.

3. Pembinaan Tenaga Kependidikan

Sistem pembinaan Tenaga Kependidikan didasari atas Tugas, Pokok dan Fungsi (Tupoksi), yang tahapan pembinaannya meliputi :

- a. Pada saat diterima sebagai Tenaga Kependidikan, yang bersangkutan menerima pengarahan dari Pimpinan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Tupoksi nya sebagai Tenaga Kependidikan FH Unand.
- b. Jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan – ketentuan kepegawaian, maka pihak kepegawaian akan melaporkan kepada Pimpinan Fakultas.
- c. Pelanggaran yang dilaporkan oleh pihak kepegawaian akan diproses oleh

Pimpinan Fakultas, dan jika dipandang perlu, Pimpinan Fakultas akan membentuk Tim Khusus untuk memeriksa dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh dosen yang bersangkutan.

- d. Pimpinan Fakultas akan memanggil dosen yang bersangkutan guna meminta klarifikasi permasalahan dan mencari solusinya.
- e. Pembinaan Tenaga Kependidikan diputuskan oleh Pimpinan Fakultas berdasarkan peraturan yang berlaku.

4. Pengembangan Tenaga Kependidikan

Pengembangan Tenaga Kependidikan dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas dan *soft skill* untuk mewujudkan pelayanan prima. Pelatihan yang terkait dengan kemampuan sistem teknologi informasi atau pengoperasian komputer juga diadakan bagi Tenaga Kependidikan FH Unand. Selain dari hal yang tersebut di atas, Tenaga Kependidikan juga dibekali dengan Pelatihan Bahasa Inggris yang diadakan oleh Pusat Bahasa di Universitas Andalas.

Peningkatan kualitas tenaga kependidikan sebagai upaya untuk terciptanya tenaga yang profesional yang dapat memberikan pelayanan maksimal kepada segenap stakeholder, terutama dosen dan mahasiswa. Satu hal yang menjadi keharusan untuk pengembangan disiplin Tenaga Kependidikan adalah kehadirannya dimonitor melalui absensi scan wajah 3x sehari, yaitu pada jam masuk, jam selesai istirahat dan jam pulang. Kehadiran tersebut akan dievaluasi setiap bulannya. Selain itu Tenaga Kependidikan diwajibkan membuat Sasaran Kerja Pegawai (SKP) serta dilakukan penilaian capaian kinerja berupa rekam jejak Tenaga Kependidikan yang bersangkutan.

5. Pemberhentian Tenaga Kependidikan

Proses Pemberhentian Tenaga Kependidikan PNS mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan :

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); dan
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 164).
 - d. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 24 Tahun 2012 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tenaga Kependidikan Universitas Andalas,
 - e. Dan peraturan-peraturan lain yang terkait dengan ASN

Proses pemberhentian Tenaga Kependidikan Non-PNS mengacu kepada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengangkatan, Pelaksanaan Tugas, dan Pemberhentian Tenaga Non PNS di Lingkungan Universitas Andalas. Tenaga Non PNS dapat diberhentikan dengan hormat dan dengan tidak hormat. Tenaga Non PNS dapat diberhentikan dengan hormat yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor, apabila :

- a. Atas permintaan sendiri
- b. Tidak sehat jasmani dan rohani
- c. Diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil
- d. Meninggal Dunia
- e. Karena Kebutuhan Organisasi
- f. Mencapai batas usia pensiun.

Bagi Tenaga Non PNS yang diberhentikan dengan Tidak Hormat ditetapkan dengan Keputusan Rektor, dan di dalamnya disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan. Keputusan Rektor ini ditetapkan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dari pimpinan fakultas.

C. KONSISTENSI PELAKSANAAN

Seluruh rangkaian sistem yang diuraikan diatas, meliputi sistem rekrutmen, penempatan, pembinaan, pengembangan dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan di Prodi MKn FH Unand telah dijalankan secara konsisten berdasarkan peraturan – peraturan sebagaimana yang dijelaskan pada uraian diatas.

4.2 Monitoring dan Evaluasi

Jelaskan sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja akademik dosen dan kinerja tenaga kependidikan.

1.2.1 Pedoman Tertulis Tentang Sistem Monitoring Dan Evaluasi Serta Rekam Jejak Kinerja Dosen Dan Tenaga Kependidikan

A. MONITORING DAN EVALUASI SERTA REKAM JEJAK KINERJA DOSEN

Kegiatan monitoring dan evaluasi Dosen di Unand dilakukan secara bertingkat. **Pada tingkat Universitas**, monitoring dan evaluasi kegiatan dosen didasarkan pada pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu bidang pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Universitas Andalas melalui Tim Audit Mutu Internal (AMI) melakukan audit mutu internal untuk memastikan seluruh kegiatan dan pelayanan yang berkaitan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi telah berjalan dengan baik.

Pada tingkat Fakultas, FH Unand memiliki Badan Penjamin Mutu (BAPEM) Fakultas yang antara lain bertugas mensosialisasikan sistem penjaminan mutu kepada civitas akademika, dan mengkoordinasikan hasil evaluasi pembelajaran dengan Gugus Kendali Mutu (GKM).

Keharusan Dosen lulus sertifikasi. Sertifikasi Dosen pada dasarnya merupakan proses pemberian sertifikasi pendidik untuk dosen atau tunjangan profesi. Berdasarkan Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2017 tentang Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor, dan Permenristekdikti Nomor 51 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen. Hal ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen, yang menyatakan: “Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi pendidik, sehat jasmani dan rohani dan memenuhi

kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.”

Berdasarkan Pasal 53 hingga Pasal 56 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, mengatur tentang Pembayaran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan yang menyatakan bahwa Tunjangan profesi diberikan dan dihitung mulai bulan Januari tahun berikutnya setelah memperoleh sertifikat pendidik serta yang bersangkutan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tunjangan kehormatan diberikan dan dihitung mulai bulan Januari tahun berikutnya setelah memperoleh SK Jabatan Guru Besar serta yang bersangkutan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. MONITORING DAN EVALUASI SERTA REKAM JEJAK KINERJA TENAGA KEPENDIDIKAN

Monitoring dan evaluasi Tenaga Kependidikan didasarkan pada tingkat kedisiplinan dalam hal kehadiran serta pelaksanaan pekerjaan. Sebagai pegawai, Tenaga Kependidikan diwajibkan untuk menentukan SKP, dan penilaian kinerja berdasarkan SKP tersebut akan dinilai oleh atasan langsung setiap tahun.

Tenaga kependidikan juga dimonitoring dan dievaluasi berdasarkan kehadiran dan pelaksanaan pekerjaan sehari-hari. Hal ini menyangkut administrasi, pembelajaran dan keaktifan dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh atasan langsung dari masing-masing tenaga kependidikan secara berjenjang. Mekanisme monitoring dan evaluasi kinerja tenaga kependidikan akan dilakukan oleh setiap pimpinan sub bagian yang akan dipertanggungjawabkan secara berjenjang kepada Kepala Tata Usaha (KTU) dan Wakil Dekan II. Evaluasi ini dibutuhkan guna dapat dilaksanakannya pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan melalui mekanisme melanjutkan studi, mengikuti pelatihan sesuai dengan kualifikasi maupun rotasi dilingkungan Universitas Andalas.

4.2.2 Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Kinerja Dosen di Bidang Pendidikan, Penelitian, Pelayanan / Pengabdian Kepada Masyarakat

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja dosen dilakukan terhadap kegiatan dosen dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu bidang pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, berdasarkan Pedoman Penilaian Kinerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tri Dharma perguruan Tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.

Berdasarkan Bab III Buku Pedoman Penilaian dan Evaluasi Beban Kinerja Dosen Untuk Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi tentang Prinsip Evaluasi Tugas Utama Dosen, menyatakan Prinsip Penetapan Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi adalah sebagai berikut :

1. Berbasis evaluasi diri.
2. Saling asah, asih dan asuh.
3. Meningkatkan profesionalisme dosen.
4. Meningkatkan atmosfer akademik.
5. Mendorong kemandirian perguruan tinggi

Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dimulai oleh dosen dengan membuat evaluasi diri terkait semua kegiatan yang dilaksanakan baik pada bidang :

1. Pendidikan dan pengajaran.
2. Penelitian dan pengembangan karya ilmiah.
3. Pengabdian kepada masyarakat, maupun
4. Kegiatan penunjang lainnya.

Secara berkala, FH Unand melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi oleh dosen setiap semester melalui pengisian Laporan Kinerja Dosen (LKD). LKD ini akan dievaluasi oleh sebuah struktur kelembagaan yang ada dan melekat pada Universitas Andalas, yaitu Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LPPPM) Universitas Andalas. Evaluasi yang dilakukan oleh LPPPM dibantu oleh 2 (dua) orang asesor ; satu asesor berasal dari bagian masing – masing, dan satu asesor lainnya berasal dari bagian lain. Asesor ini mempunyai tugas untuk melakukan evaluasi dan melakukan verifikasi atas Beban Kinerja Dosen yang telah diinputkan secara online.

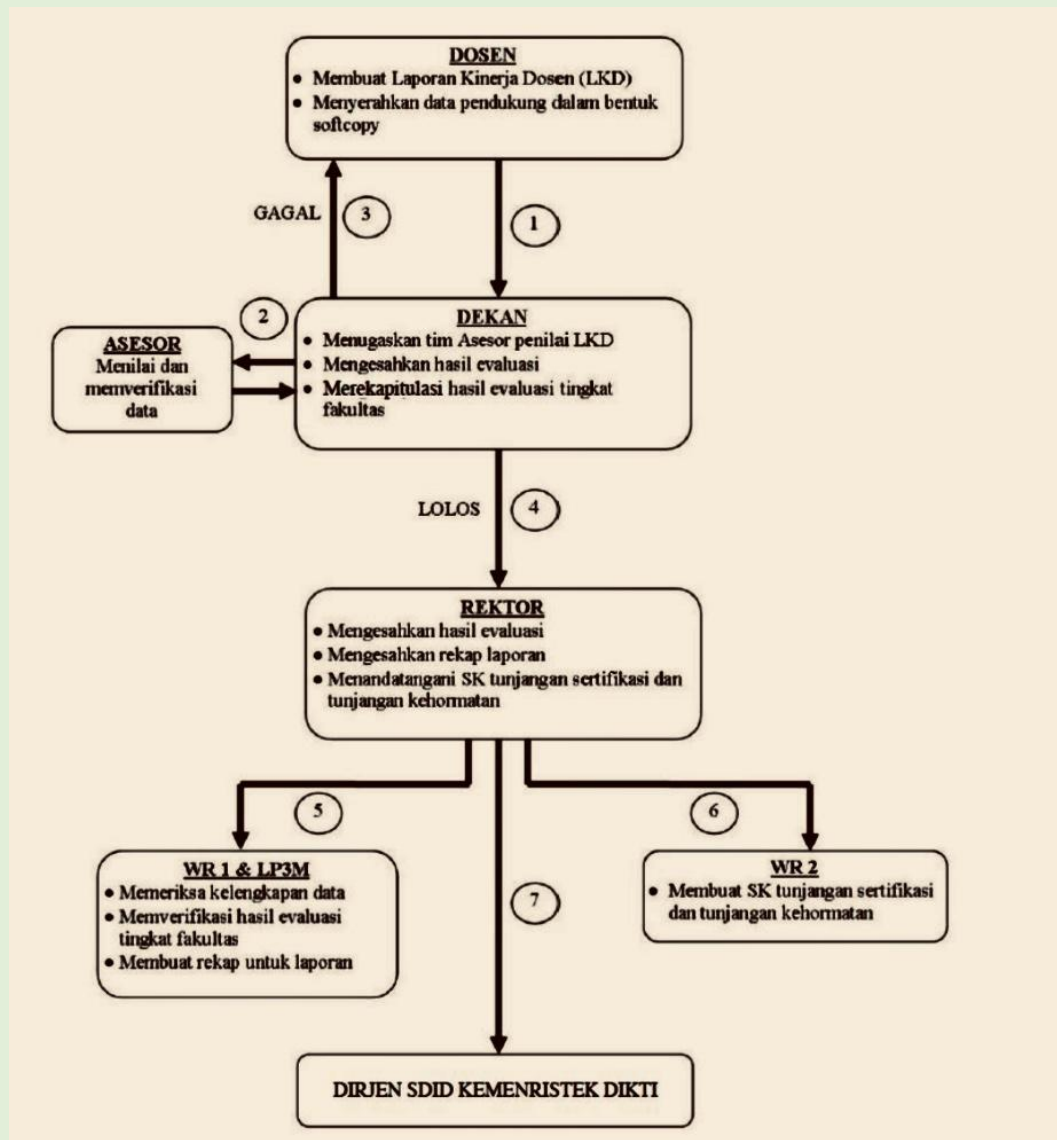
Proses evaluasi pelaksanaan tridharma ini dimulai dengan tahapan Dosen membuat evaluasi diri terhadap seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan selama 2 (dua) semester (semester ganjil dan genap) per tahun, yang berkaitan dengan bidang :

1. Pendidikan dan pengajaran
2. Penelitian dan pengembangan suatu karya ilmiah.
3. Pengabdian kepada masyarakat.
4. Kegiatan penunjang lainnya.

Seluruh data yang telah diinputkan secara online juga dilengkapi dengan bukti dukung, dan kemudian diserahkan pada asesor untuk dilakukan penilaian dan verifikasi. Untuk per tahun 2018 ke depan, proses LKD Dosen Universitas Andalas akan dilakukan berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 1920/XIII/A/UNAND-2018 tentang Pedoman Beban Kerja Dosen, Evaluasi dan Rubrik Pelaksanaan Tri dharma Perguruan Tinggi Universitas Andalas. Prosedur evaluasi BKD dan pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi pada Universitas Andalas yang berlaku saat ini akan diuraikan pada bagan sebagai berikut :

Bagan 4.2

Prosedur Evaluasi Laporan Kinerja Dosen Dan Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Pada Universitas Andalas



Gambar diatas diuraikan sebagai berikut :

1. Dosen membuat laporan kinerja secara periodic secara online. Laporan kinerja ini memuat semua aktivitas tri dharma perguruan tinggi yang telah dilakukan dosen, meliputi dharma pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta aktivitas penunjang lainnya. Laporan dilengkapi dengan bukti pendukung yang harus diunggah ke halaman website Universitas Andalas. Asesor berjumlah dua orang dan ditugaskan oleh Dekan untuk menilai ketercapaian prestasi sks, dan memverifikasi kesesuaian dokumen pendukung dengan aktivitas tridharma perguruan tinggi yang telah dilakukan.

2. Apabila telah memenuhi syarat dan bukti pendukung sesuai dengan laporan yang dibuat, maka laporan kinerja dianggap lolos. Kedua Asesor harus mengklik M pada laman website.
3. Apabila asesor menyatakan :
 - a. Ketercapaian kinerja dosen tidak atau belum memenuhi syarat;
 - b. Bukti pendukung tidak sesuai dengan aktivitas yang dilaporkan;Maka laporan dikembalikan kepada dosen yang bersangkutan untuk diperbaiki.
4. Dalam hal terjadi selisih pendapat antara asesor satu dengan asesor lainnya, maka pemimpin perguruan tinggi melalui Ketua LPPPM dapat menunjuk asesor ketiga.
5. Dekan mengkompilasi semua laporan kinerja dosen yang menjadi tanggung jawabnya. Dekan bertanggung jawab dan berwenang untuk memverifikasi kebenaran laporan yang telah dikoreksi oleh asesor. Hasil kompilasi di tingkat fakultas ini kemudian diserahkan pada Rektor untuk dibuat rekap di tingkat Universitas.
6. Rektor menugaskan Wakil Rektor (WR) 1 dan LPPPM untuk memeriksa kelengkapan data dan memverifikasi hasil evaluasi tingkat fakultas serta membuat rekap pada tingkat universitas.
7. Berdasarkan hasil evaluasi tingkat universitas oleh WR 1 dan LPPPM, maka Rektor menugaskan WR 2 membuat SK Tunjangan Sertifikasi dan SK Tunjangan Kehormatan Guru Besar.
8. Rektor mengesahkan hasil evaluasi dan rekap laporan untuk diserahkan atau dikirim langsung kepada Dirjen SDID Kemenristekdikti setiap tahun. Laporan yang dikirim dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*. Kemudian Rektor menandatangani SK Tunjangan Sertifikasi dan Tunjangan Kehormatan Guru Besar.
9. Penerbitan SK unjangan Sertifikasi dan Tunjangan Kehormatan Guru Besar, dilakukan jika BKD satu tahun sebelumnya memenuhi syarat.

Sebagai pegawai, Dosen juga wajib menentukan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), yang akan dinilai atau diukur setiap tahun oleh pimpinan. Sebagai PNS, monitoring dan evaluasi juga dilakukan oleh atasan langsung terhadap terhadap dosen melalui Daftar Penilaian Pelaksanaan Pegawai (DP3).

Prodi juga melibatkan mahasiswa untuk menyampaikan penilaiannya terhadap proses belajar mengajar yang dilakukan dosen di kelas, dengan memberikan

lembaran kuesioner pada tatap muka terakhir di setiap mata kuliah, sehingga setiap mahasiswa data menyampaikan saran dan keluhannya. Hasil kuesioner mahasiswa ini akan menjadi bahan kajian evaluasi bagi Prodi untuk melaksanakan kegiatan PBM di semester selanjutnya.

4.3 Dosen Tetap

Dosen tetap dalam borang akreditasi BAN-PT adalah dosen yang diangkat dan ditempatkan sebagai tenaga tetap pada PT yang bersangkutan; termasuk dosen penugasan Kopertis, dan dosen yayasan pada PTS dalam bidang yang relevan dengan keahlian bidang studinya. Seorang dosen hanya dapat menjadi dosen tetap pada satu perguruan tinggi, dan mempunyai penugasan kerja 36 jam/minggu.

4.3.1 Data dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang PS:

No	Nama Dosen Tetap	NIDN**	Tgl. Lahir	Jabatan Akademik	Gelar Akademik	Pendidikan S2, S2, S3 dan Asal PT	Bidang Keahlian untuk Setiap Jenjang Pendidikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Yulia Mirwati ***	0029075803	29-07-1958	Guru Besar	Prof. Dr. SH., CN., MH.,	S1 Unand	Ilmu Hukum (Hukum Perdata)
						Sp1 USU	Kenotariatan
						S2 USU	Ilmu Hukum
						S3 USU	Ilmu Hukum
2	Elwi Danil ***	0025066002	25-06-1960	Guru Besar	Prof. Dr. SH., MH.	S1 Unand	Ilmu Hukum (Hukum Pidana)
						S2 UI	Ilmu Hukum
						S3 UI	Ilmu Hukum
3	Yuliandri ***	0018076201	18-07-1962	Guru Besar	Prof. Dr. SH., MH.	S1 Unand	Ilmu Hukum (Hukum Tata Negara)
						S2 Unpad	Ilmu Hukum
						S3 Unair	Ilmu Hukum
4	Yaswirman ***	0001085705	01-08-1957	Guru Besar	Prof. Dr. MA.	S1 IAIN Imam Bonjol Padang	Syariah
						S2 IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta	Syariah

						S3 IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta	Syariah
5	Saldi Isra ***	0020086804	20-08-1968	Guru Besar	Prof. Dr. SH., MPA.	S1 Unand	Ilmu Hukum (Hukum Tata Negara)
						S2 University Malaya Malaysia	Administrasi Publik
						S3 UGM	Ilmu Hukum
6	Ismansyah ***	0010105905	10-10-1959	Guru Besar	Prof. Dr. SH., M.Hum.	S1 Unand	Ilmu Hukum (Hukum Pidana)
						S2 Undip	Ilmu Hukum
						S3 Undip	Ilmu Hukum
7	Zainul Daulay ***	0022115904	22-11-1959	Lektor Kepala	Prof. Dr. SH., M.Hum.	S1 Unand	Ilmu Hukum (Hukum Internasional)
						S2 Unpad	Ilmu Hukum
						S3 Unhas	Ilmu Hukum
8	Busyra Azheri ***	0018116901	18-11-1969	Lektor Kepala	Dr. SH., M.Hum.	S1 Unand	Ilmu Hukum (Hukum Perdata)
						S2 Unibraw	Ilmu Hukum
						S3 Unibraw	Ilmu Hukum
9	Yulfasni ***	0007115801	07-11-1958	Lektor	Dr. SH., MH.	S1 Unand	Ilmu Hukum (Hukum Perdata)
						S2 UI	Ilmu Hukum
						S3 UI	Ilmu Hukum
10	Azmi Fendri ***	0010057510	10-05-1975	Lektor	Dr. SH., MKn.	S1 Unand	Ilmu Hukum
						S2 Undip	Notariat
						S3 Unibraw	Ilmu Hukum
11	Dahlil Marjon ***	0020045905	20-04-1959	Lektor Kepala	Dr. SH., M.Hum.	S1 Unand	Ilmu Hukum (hukum Perdata)
						S2 Unibraw	Ilmu Hukum
						S3 Unibraw	Ilmu Hukum
12	Yuslim ***	0006075701	06-07-1957	Lektor Kepala	Dr. SH. MH.	S1 Unand	Ilmu Hukum
						S1 Unand	Ilmu Hukum
						S1 Unand	Ilmu Hukum
13	Rembrandt ***	0022026402	22-02-1964	Lektor Kepala	Dr. SH. M.Pd	S1 Unand	Ilmu Hukum
						S2 UNP	Ilmu Pendidikan
						S3 Unand	Ilmu Hukum

14	Jean Elvard ***	0019116103	19-11-1961	Lektor Kepala	Dr. SH. MH	S1 Unand	Ilmu Hukum
						S2 Unpad	Ilmu Hukum
						S3 Unpad	Ilmu Hukum
15	Zefrizal Nurdin ***	0017095704	17-09-1957	Lektor Kepala	Dr. SH. MH	S1 UGM	Ilmu Hukum
						S2 Undip	Ilmu Hukum
						S3 Unand	Ilmu Hukum
16	Yussy A. Mannas ***	0018028401	18-02-1984	Asisten Ahli	Dr. SH. MH	S1 Unand	Ilmu Hukum
						S2 Unpad	Ilmu Hukum
						S3 Unpad	Ilmu Hukum

Penjelasan Tabel :

Dosen tetap pada Prodi MKn FH Unand dengan jabatan **Guru Besar berjumlah 7 (tujuh) orang**, dan dosen tetap yang bergelar **Doktor berjumlah 16 (enam belas) orang**.

Keterangan:

- (1) Dosen yang telah memperoleh sertifikat dosen agar diberi tanda (***) dan fotokopi sertifikatnya agar dilampirkan.
- (2) NIDN : Nomor Induk Dosen Nasional
- (3) Lampirkan fotokopi ijazah S2 dan S3

4.3.2 Aktivitas dosen tetap dinyatakan dalam SKS rata-rata per semester pada satu tahun akademik terakhir, diisi dengan perhitungan sesuai SK Dirjen Dikti no. 48 tahun 1983 (12 SKS setara dengan 36 jam kerja per minggu)

No	Nama Dosen Tetap	SKS Pengajaran pada			SKS Penelitian	SKS Pengabdian kepada Masyarakat	SKS Manajemen**		Jumlah SKS
		PS Sendiri	PS Lain PT Sendiri	PT Lain			PT Sendiri	PT Lain	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Prof. Dr. Yulia Mirwati, SH, CN, MH	4	2	0	3	2	0	0	11
2	Prof. Dr. Elwi Danil, SH, MH	6	2	0	3	2	0	0	13
3	Prof. Dr. Yuliandri, SH, MH.	6	2	0	3	2	6	0	19

4	Prof. Dr. Zainul Daulay, SH, MH	2	2	0	3	2	10	0	19
5	Prof. Dr. Ismansyah, SH, MH.	4	2	0	3	2	0	0	11
6	Prof. Dr. Yaswirman, MA.	4	2	0	3	2	6	0	17
7	Prof. Dr. Saldi Isra, SH, MPA	4	2	0	3	2	0	0	11
8	Dr. Yuslim, SH, MH	4	2	0	3	2	0	0	11
9	Dr. Zefrizal Nurdin, SH, MH	4	2	0	3	2	0	0	11
10	Dr. Busyra Azheri, SH, Mh	4	2	0	3	2	10	0	21
11	Dr. Dahlil Marjon, SH, MH.	2	2	0	3	2	0	0	9
12	Dr. Rembrandt, SH, MPd	2	2	0	3	2	4	0	4
13	Dr. Azmi Fendri, SH, MKn	6	2	0	3	2	6	0	6
14	Dr. Yulfasni, SH, MH.	2	2	0	3	2	0	0	9
15	Dr. Jean Elfardi, SH, MH	2	2	0	3	1	0	0	8
16	Dr. Yussy A. Mannas, SH, MH.	2	2	0	3	2	3	0	12
Jumlah		58	32	0	48	31	45	0	192
Rata-rata*		3,63	2,00	0,00	3,00	1,94	2,81	0,00	12,00

Catatan:

SKS pengajaran sama dengan SKS mata kuliah yang diajarkan. Bila dosen mengajar kelas paralel, maka beban SKS pengajaran untuk satu tambahan kelas paralel adalah 1/2 kali SKS mata kuliah.

* rata-rata adalah jumlah SKS dibagi dengan jumlah dosen tetap.

** SKS manajemen dihitung sbb :

Beban kerja manajemen untuk jabatan-jabatan ini adalah sbb.

- rektor/direktur politeknik 12 SKS
- pembantu rektor/dekan/ketua sekolah tinggi/direktur akademi 10 SKS
- ketua lembaga/kepala UPT 8 SKS
- pembantu dekan/ketua jurusan/kepala pusat/ketua senat akademik/ketua senat fakultas 6 SKS
- sekretaris jurusan/sekretaris pusat/sekretaris senat akademik/sekretaris senat universitas/ sekretaris senat fakultas/ kepala lab. atau studio/kepala balai/ketua PS 4 SKS
- sekretaris PS 3 SKS

Bagi PT yang memiliki struktur organisasi yang berbeda, beban kerja manajemen untuk jabatan baru disamakan dengan beban kerja jabatan yang setara.

4.4 Dosen Tidak Tetap

No.	Nama Dosen Tidak Tetap ⁽¹⁾	NIDN ⁽²⁾	Tgl. Lahir	Jabatan Akademik	Gelar Akademik	Pendidikan S1, S2, S3 dan Asal PT ⁽³⁾	Bidang Keahlian untuk Setiap Jenjang Pendidikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Wira Fransiska	-	Sawahlunto/ 21 Sept 1965	-	Not. Dr., SH., M.Kn.	S1 Universitas Andalas S2 Universitas Padjadjaran S3 Universitas Padjadjaran	Kenotariatan
2.	Betrix Benni	-	Padang / 22 Sept 1970	-	Not.,Dr. SH, M.Pd, MKn.	S1 Universitas Andalas S2 Universitas Negeri Padang S2 Universitas Andalas S3 Universitas Andalas	Kenotariatan dan Pejabat Lelang
3.	Alexander	-	Padang / 28 Sept 1964	-	Not.,SH, MKn	S1 Universitas Andalas S2 Universitas Andalas	Kenotariatan

4.	Dasman	-	Lintau / 11 Maret 1954	-	Not., SH., M.Kn.	S1 Universitas Muhammadiyah Bukittinggi	Kenotariatan
						S2 Universitas Gadjah Mada	
5.	Muhamma d Ishaq	-	Bukittinggi / 5 Sept 1973	-	Not.,SH, MKn	S1 Universitas Andalas	Kenotariatan
						S2 Universitas Andalas	
6.	Pasnelyza Karani	-	Solok / 10 April 1971	-	Not.,SH, MKn	S1 Universitas Andalas	Kenotariatan
						S2 Universitas Diponegoro	
7.	Helsi Yasin,	-	Padang / 11 Agustus 1965	-	Not., SH., M.Kn.	S1 Universitas Andalas	Kenotariatan
						S2 Universitas Indonesia	
8.	Ressa R. Mannas	-	Padang / 31 Desember 1977	-	Not SH., MH., MKn	S1 Universitas Andalas	Kenotariatan
						S2 Universitas Andalas	
						S2 Universitas Padjadjaran	
9..	Leny Agustan	-	Pariaman/ 9 Juni 1980	-	Not. SH., MH.	S1 Universitas Andalas	Kenotariatan
						S2 Universitas Padjadjaran	
10.	Harry Merdeka Samik Ibrahim	-	Padang / 17 Agustus 1986	-	Not., SH., M.Kn.	S1 Universitas Padjadjaran	Kenotariatan
						S2 Universitas Padjadjaran	
11.	Syukriah HG	-	Payakumbuh/ 19 April 1970	-	Not., SH., M.Hum	S1 Universitas Andalas	Kenotariatan
						S2 Universitas Gadjah Mada	
12.	Indra Jaya	-	Lintau / 13 Januari 1969	-	Not., SH., M.Kn.	S1 Universitas Ekasakti	Kenotariatan
						S2 Universitas Andalas	

Keterangan:

- (1) Dosen yang telah memperoleh sertifikat dosen agar diberi tanda (***) dan fotokopi sertifikatnya agar dilampirkan.
- (2) NIDN : Nomor Induk Dosen Nasional
- (3) Lampirkan fotokopi ijazah S2 dan S3.

4.5 Upaya Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam tiga tahun terakhir

4.5.1 Peningkatan kemampuan dosen tetap melalui program tugas belajar dalam bidang yang sesuai dengan bidang PS

No.	Nama Dosen	Jenjang Pendidikan Lanjut	Bidang Studi	Perguruan Tinggi	Negara	Tahun Mulai Studi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
-	-	-	-	-	-	-

Penjelasan Tabel :

Seluruh dosen tetap pada Prodi MKn FH Unand telah berkualifikasi Doktor (S3), sehingga tidak ada dosen tetap yang sedang menempuh tugas belajar.

4.5.2 Kegiatan tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, pembicara tamu, dsb, dari luar PT sendiri (tidak termasuk dosen tidak tetap)

No.	Nama Tenaga Ahli/Pakar	Nama dan Judul Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Prof. Dr. Irwansyah, SH, MH	Pelatihan dan Penulisan Jurnal Ilmiah	2016
2.	Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH, MH	Kuliah Umum	2017
3.	Prof. Dr. Edmun Makarim, SH, MH	Pelatihan dan Penulisan Kepustakaan melalui Internet	2017
4.	Arry Supratno, SH, MH	Kuliah Umum "Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Menjalan Jabatan."	2017
5.	Kepala KPP Pratama Padang Satu.	Seminar Nasional "Tax Amnesty	2016
6.	Dr. Freddy Haris, SH, MH	Seminar Nasional "Quo Vadis Pendidikan Kenotariatan dan Profesi Notaris."	29 November 2017
7.	Yualita Widyadhari, SH, MKn	Kuliah Umum "Profesionalisme Notaris Dalam Memberikan Kepastin Hukum Kepada Masyarakat."	31 Agustus 2018

8.	Salekan, SH, MM	Pendidikan dan Pelatihan Notaris Pembuat Akta Koperasi	20 September 2018
----	-----------------	---	-------------------

4.5.3 Keikutsertaan dosen tetap dalam kegiatan seminar ilmiah/lokakarya/ penataran/ workshop/ pagelaran/ pameran/peragaan yang melibatkan pakar/ahli dari luar PT

No	Nama Dosen	Jenis Kegiatan*	Tempat	Waktu	Sebagai	
					Penyaji	Peserta
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Prof. Dr. Yulia Mirwati, SH, CN, MH	Center for International Law Studies Conference	Padang	2016	√	
2.	Prof. Dr. Yulia Mirwati, SH, CN, MH	The First International Conference on National Integrity System and The Gobal Anti-Corruption Perspective (NISAC)	Makasar	2016	√	
3.	Prof. Dr. Yulia Mirwati, SH, CN, MH	FGD Kementerian Agama RI dan LPPM	Padang	2016	√	
4.	Prof. Dr. Yulia Mirwati, SH, CN, MH	Kuala Lumpur International Business, Economics and Law Conference (KLIBEL)	Selangor Malaysia	2017	√	
5.	Prof. Dr. Yulia Mirwati, SH, CN, MH	Asia International Multidisciplinary Conference	Johor Baru Malaysia	2017	√	
6.	Prof. Dr. Yulia Mirwati, SH, CN, MH	Seminar Nasional Hukum Adat	Bali	2018	√	
7.	Prof. Dr. Yulia Mirwati, SH, CN, MH	ZAWFI Conference Malaysia	Malaysia	2018	√	
8.	Prof. Dr. Elwi Danil, SH, MH	Sinerjitas Aparat Penegak Hukum Guna Efektivitas Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Padang	2015	√	

9.	Prof. Dr. Elwi Danil, SH, MH	FGD RUU KUHP, Kemenkum dan HAM RI Prospek Pengaturan Hukum Pidana Adat dalam RUU KUHP dan Implikasinya terhadap Asas Legalitas	Padang	2016	√	
10	Prof. Dr. Elwi Danil, SH, MH	Seminar Nasional Urgensi Perubahan UU KPK: Aspek Kelembagaan, Tugas, Wewenang dan Pengawasan badan keahlian DPR RI	Jakarta	2017	√	
11	Prof. Dr. Elwi Danil, SH, MH	Diskusi Publik Eksaminasi Putusan Mahkamah Agung RI: Anotasi Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1628/Pid.sus/2016	Padang	2017	√	
12	Prof. Dr. Elwi Danil, SH, MH	Seminar Eksaminasi Putusan Praperadilan No 97/Pid.Prap/PN.Jkt.Sel	Padang	2017	√	
13	Prof. Dr. Elwi Danil, SH, MH	FGD Arah Pembangunan Hukum Indonesia, Penguatan Budaya Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Hukum Indonesia	Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta	2017	√	
14	Prof. Dr. Elwi Danil, SH, MH	Temu Pakar Hukum Pidana tentang beberapa isu dalam RUU KUHP diselenggarakan oleh BPHN- Kemenkumham	Jakarta	2017	√	
15	Prof. Dr. Elwi Danil, SH, MH	Diskusi Panel Penanganan Perkara Korupsi oleh KPK: Proses Pembuktian Perkara Korupsi Oleh KPK Pada Tahap Pra-Ajudikasi	Bali	2017	√	

16	Prof. Dr. Elwi Danil, SH, MH	Diskusi terhadap Draft RUU Tentang penyadapan yang diselenggarakan oleh Pusat Perancangan UU Badan Keahlian DPR RI	Jakarta	2018	√	
17	Prof. Dr. Elwi Danil, SH, MH	Simposium Nasional Revitalisasi Hukum Pidana Adat dan Kriminologi Kontemporer, diselenggarakan oleh Fh Unand dan MAHUPIKI	Padang	2018	√	
18	Prof. Dr. Elwi Danil, SH, MH	FGD Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, diselenggarakan Oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Jakarta	2018	√	
19	Prof. Dr. Yuliandri, SH, MH.	Nara Sumber tentang Konstitusi dan Konstitusionalisme, yang disampaikan dalam Pelatihan Calon Hakim di Lingkungan Mahkamah Agung, yang dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI	Cisarua Bogor	2018	√	
20	Prof. Dr. Yuliandri, SH, MH.	Nara Sumber dalam Diskusi Publik, dengan Tema: Implikasi Kodifikasi Terhadap Kejahatan Luar Biasa dan Terorganisir dalam RKUHP, yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK)	Padang	2018	√	
21	Prof. Dr. Yuliandri, SH, MH.	Nara Sumber dalam Simposium Nasional dengan Tema: Institusionalisasi Pancasila dalam Pembentukan dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Badan Keahlian DPR- RI	Jakarta	2018	√	

22	Prof. Dr. Yuliandri, SH, MH.	Nara Sumber dalam Pra Simposium dengan Tema: Institusional Pancasila dalam Pembentukan dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh: Pusat Perancangan Undang Undang Badan Keahlian DPR- RI	Tangerang	2018	√	
23	Prof. Dr. Yuliandri, SH, MH.	Kedudukan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dalam Sistem Perundang- undangan Indonesia, Materi sebagai Nara Sumber yang disampaikan dalam FGD tentang Peraturan Perundang-undang di OJK dalam Kaitannya dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan.	Jakarta	2018	√	
24	Prof. Dr. Yuliandri, SH, MH.	Nara Sumber dalam diskusi Penyusunan Peraturan KPK, tentang Gratifikasi	Jakarta	2018	√	
25	Prof. Dr. Yuliandri, SH, MH.	Peran DPR Dalam Pengikatan Diri Negara Terhadap Perjanjian Internasional, Makalah sebagai Nara Sumber yang Disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD)	LPHI FHUI	2018	√	
26	Prof. Dr. Zainul Daulay, SH, MH	Simposium Nasional dalam rangka konsultasi tentang Sumber Daya Genetika, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (SDGPTEBT).	Bandung	2015	√	
27	Prof. Dr. Zainul Daulay, SH, MH	7th Regional Asia-Pacific University Community Engagement Network (APUCEN) Council Meeting	Australia	2015	√	

28	Prof. Dr. Zainul Daulay, SH, MH	Sosialisasi dan Jaring Masukan Perkembangan Perundingan IGC-GRTKF dengan Tema "Perpanjangan Mandat Inter-Governmental Committee On Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore (IGC-GRTKF) untuk periode 2016/2017	Jakarta	2016	√	
29	Prof. Dr. Zainul Daulay, SH, MH	Seminar Nasional Kebijakan Penerbangan dan Antariksa III-2018	Surabaya	2018	√	
30	Prof. Dr. Ismansyah, SH, MH.	Diskusi Terbatas dengan Jajaran Kejaksaan Tinggi se Sumatera Barat	Bukittinggi	2015	√	
31	Prof. Dr. Ismansyah, SH, MH.	Seminar Dalam Menyikapi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015	Padang	2015	√	
32	Prof. Dr. Ismansyah, SH, MH.	Rapat Koordinasi dan Peningkatan Kapasitas Pwnyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPPNS) Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bali	2015	√	
33	Prof. Dr. Ismansyah, SH, MH.	Seminar dengan tema Perbuatan Melawan Hukum dan Sifat Melawan Hukum Dalam Hukum Pidana Berkaitan dengan Tanggung Jawab Jabatan	Bukittinggi	2016	√	
34	Prof. Dr. Ismansyah, SH, MH.	Seminar Penegakan Hukum Tindakan Penghinaan Terhadap Pengadilan (<i>Contempt of Court</i>)	Polresta Padang	2017	√	
35	Prof. Dr. Ismansyah, SH, MH.	Kuliah Umum Anatomi Crime dan Logical Frame Dalam Mengungkap Kasus Lingkungan Hidup	Universitas Riau	2017	√	
36	Prof. Dr. Ismansyah, SH, MH.	Simposium Nasional Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi V Kerjasama FH Unand dan MAHUPIKI	Padang	2018	√	

37	Prof. Dr. Yaswirman, MA.	Kuliah Tamu pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada IAIN Bukittinggi	Bukittinggi	2015	√	
38	Prof. Dr. Yaswirman, MA.	Revitalisasi Fungsi/Peran MKU dan Pembentukan Forum MKU Seluruh Indonesia,” LPPMP, Uinversitas Riau	Pekanbaru	2016	√	
39	Prof. Dr. Yaswirman, MA.	Seminar Nasional Ijtima` Sanawy Dewan Pengawas Syari`ah, Dewan Syariah Nasional MUI Pusat	Jakarta	2017	√	
40	Prof. Dr. Yaswirman, MA.	Workshop Pra Ijtima` Sanawi Dewan Pwengawas Syariah, Dewan Syariah Nasional MUI Pusat	Jakarta	2016	√	
41	Prof. Dr. Yaswirman, MA.	Workshop Sertifikasi Dewan Pengawas Syariah, Dewan Syariah Nasional MUI Pusat	Jakarta	2015	√	
42	Prof. Dr. Yaswirman, MA.	Workshop Pra Ijtima` Sanawi (Annual Meeting) untuk Peningkatan Kompetensi Dewan Pengawas Syariah, Dewan Syariah Nasional MUI Pusat	Jakarta	2017	√	
43	Prof. Dr. Yaswirman, MA.	Konferensi Nasional Asosiasi Hukum Acara Perdata, Topik: <i>Problematika Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia</i>	Palu	2016	√	
44	Prof. Dr. Yaswirman, MA.	The 2nd International Conference on Islamic Law in Indonesia: <i>Collectivism Economics: Between Local Wisdom And Islam Spiritual Value</i>	Padang	2017	√	
45	Prof. Dr. Yaswirman, MA.	Konferensi Nasional Asosiasi Hukum Acara Perdata, Topik Upaya Hukum Terhadap Putusan	Jember	2017	√	
46	Prof. Dr. Saldi Isra, SH, MPA	Konferensi Internasional, Kerjasama Maxplanc Foundation, Curtin University, UGM dan Univ Andalas,	Perth	29-31 Maret 2017	√	
47	Prof. Dr. Saldi Isra, SH, MPA	Pelatihan Legal Drafting, Fakultas Hukum Univ Tarumanegara	Jakarta	2017	√	

48	Prof. Dr. Saldi Isra, SH, MPA	Seminar Demokrasi Presidensial di Indonesia, diadakan oleh Centre for Policy Studies & Strategy Advocacy	Jakarta	2015	√	
49	Prof. Dr. Saldi Isra, SH, MPA	Konferensi Gerakan Antikorupsi	Depok	2015	√	
50	Prof. Dr. Saldi Isra, SH, MPA	Konferensi Pemikiran Tokoh Hukum Soepomo dan Muhammad Yamin	Bandung	30 Okt 2015	√	
51	Dr. Zefrizal Nurdin, SH, MH	Seminar Provinsi BKPMD Pengaturan Tanah Ulayat untuk Investasi	Solok	2015	√	
52	Dr. Zefrizal Nurdin, SH, MH	Seminar Internasional Hukum Islam	Padang	2017	√	
53	Dr. Zefrizal Nurdin, SH, MH	Seminar Provinsi BKPMD "Strategi Pemanfaatan Tanah Ulayat Untuk Penanaman Modal Menurut Peraturan Gubernur Sumbar No. 21 Tahun 2012."	Payakumbuh	2018	√	
54	Dr. Busyra Azheri, SH, MH	Pembahasan RUU Bank Sentral	Palembang	26-27 Agustus 2015	√	
55	Dr. Busyra Azheri, SH, MH	In-House Training Kanwil Hukum dan HAM RI Sumatera Barat tentang Peluang dan Tantangan Notaris	Padang	24 Maret 2015	√	
56	Dr. Busyra Azheri, SH, MH	In-House Training Kanwil Hukum dan HAM RI Sumatera Barat tentang E-Notaris Peluang dan Tantangan Bagi Notaris	Padang	30 September 2015	√	
57	Dr. Busyra Azheri, SH, MH	In-house Training para Komisioner BPSK pada Disperindagkop Provinsi Sumatera Barat.	Padang	28 September 2015	√	

58	Dr. Busyra Azheri, SH, MH	Pelatihan dan Perancangan Kontrak Tingkat Dasar	Padang	Dese mber 2015	√	
59	Dr. Busyra Azheri, SH, MH	Kongres Nasional Sosiologi V, APSSI kerjasama dengan FISIP Unand, Perilaku Pengusaha Yang Mengabaikan Hak Masyarakat (Kajian Terhadap Implemetasi <i>Corporate Social responsibility</i>)	Padang	18-19 Juni 2016	√	
60	Dr. Busyra Azheri, SH, MH	Lokakarya <i>Corporate Social responsibility</i> , DPRD Kabupaten Agam	Agam	Agust us 2016	√	
61	Dr. Busyra Azheri, SH, MH	Seminar Nasional FISIP Unand dengan judul Kewenangan Pemerintah Desa dalam Pendirian BUM Des, Padang	Padang	Septe mber 2016	√	
62	Dr. Busyra Azheri, SH, MH	Seminar nasional tentang Tanggung Jawab LPS terhadap Likuidasi Bank, Kerjasama FHUA dengan IKHPM Pusat	Padang	Nove mber 2016	√	
63	Dr. Busyra Azheri, SH, MH	Seminar nasional tentang Tanggung Jawab LPS terhadap Likuidasi Bank, Kerjasama FHUA dengan IKHPM Pusat	Padang	21 Nove mber 2016	√	
64	Dr. Busyra Azheri, SH, MH	Seminar Nasional tentang Peluang dan Tantangan Notaris di Era Globalisasi, Pengwil INI Sumbar	Padang	12 Dese mber 2016	√	
65	Dr. Busyra Azheri, SH, MH	Konfrensi Intenasional Hukum Islam ke II, kerjasama Fakultas Hukum Universitas Andalas dengan ADHI dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia	Padang	7-8 Nove mber 2017	√	
66	Dr. Busyra Azheri, SH, MH	Seminar Nasional tetang Revitalisasi Balai Harta Peninggalan Pasca Disahkannya UU Kepailitan	Padang	17 Mei 2018	√	

67	Dr. Busyra Azheri, SH, MH	Pendidikan dan Pelatihan Notaris Pembuat Akta Koperasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Koperasi dan UMKM RI dengan Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas	Padang	20 September 2018	√	
68	Dr. Busyra Azheri, SH, MH	International Conference on Indonesia Legal Studies Contemporary Issues on Indonesia Legal Studies in the Global	Padang	24 Juli 2018		√
69	Dr. Rembrandt, SH, MPd	<i>Workshop on Pictorial Health Warning and Tobacco Industry Interference in Indonesia</i>	Bandung	18 – 21 Nov 2014		√
70	Dr. Rembrandt, SH, MPd	<i>The 1st Indonesian Conference on Tobacco or Health 2014</i>	Bandung	29 – 31 Mei 2014		√
71	Dr. Rembrandt, SH, MPd	Seminar Internasional “Konservasi Sumber Daya Air Dalam Rangka Ketersediaan dan Keberlangsungan Sumber Air Baku Bagi PDAM	Padang	28 Des 2015	√	
72	Dr. Rembrandt, SH, MPd	Work shop "On Enforcement of PHW"	Padang	2 -13 Feb 2015		√
73	Dr. Azmi Fendri, SH, MKn	Pelatihan PKPA “Perancangan dan Analisis Kontrak”, Sabtu tanggal 5 September 2015 di Hotel Bumi Minang.	Hotel Bumi Minang, Padang	5 Sept 2015	√	
74	Dr. Azmi Fendri, SH, MKn	Seminar di Kantor Kementerian Hukum dan Ham	Padang	Sept 2016	√	
75	Dr. Azmi Fendri, SH, MKn	Pelatihan PKPA “Perancangan dan Analisis Kontrak	Padang	12 Nov 2016	√	
76	Dr. Azmi Fendri, SH, MKn	Pelatihan PKPA “Perancangan dan Analisis Kontrak	Padang	1 Sept 2017	√	

77	Dr. Jean Elfardi, SH, MH	Seminar Keamanan Laut “ Peranan Keamanan Laut dalam Penegakan Hukum Laut Kerjasama Fakultas Hukum dengan BAKAMLA Pusat	Padang	7 Mei 2018	√	
78	Dr. Jean Elfardi, SH, MH	FGD Kementerian Luar Negeri Tentang Sosialisasi Perubahan UU No 24 Tahun 2000,	Padang	9 Feb 2016	√	
79	Dr. Jean Elfardi, SH, MH	Simposium Nasional III Kalster Riset Hukum Dan Civil Society	Padang	20 Nov 2017	√	
80	Dr. Jean Elfardi, SH, MH	Seminar Nasional Kerjasama FH Unand dengan BAKAMLA RI	Padang	Juni 2018	√	
81	Dr. Jean Elfardi, SH, MH	Bimbingan Teknis Pengamanan Akses Pasar Produk Ekspor Indonesia di Negara Mitra Dagang, Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Andalas dengan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia	Padang	6 Sept 2018	√	
82	Dr. Jean Elfardi, SH, MH	Lembaga Pengkajian Hukum Internasional (CILS) Malang, Jawa Timur,	Malang	Oktob er 2018	√	
83	Dr. Yussy Adelina Mannas, SH, MH.	Diskusi Ilmiah Terbatas “Penemuan Hukum Formil Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata”.	Denpasar	12 Maret 2015	√	
84	Dr. Yussy Adelina Mannas, SH, MH.	Kongres Nasional III Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia “Penguatan Hukum Kesehatan Sebagai Cabang Keilmuan Ilmu Hukum Yang Adil Dan Bermartabat.”	Semarang	20-22 Agt 2015		√
85	Dr. Yussy Adelina Mannas, SH, MH.	Konferensi Nasional Hukum Acara Perdata II “Hukum Acara Perdata Nasional Dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi”.	Surabaya	25-28 Agt 2015	√	
86	Dr. Yussy Adelina Mannas, SH, MH.	Seminar Nasional Hukum Acara Perdata “Pembuktian Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Pengadilan.”	Bandung	27 April 2016		√

87	Dr. Yussy Adelina Mannas, SH, MH.	The First Asia-Pacific Research in Social Sciences and Humanities	Depok	7-9 Nov 2016	√	
88	Dr. Yussy Adelina Mannas, SH, MH.	Capacity Building Dosen Hukum Kesehatan	Jakarta	25-26 Sept 2017		√
89	Dr. Yussy Adelina Mannas, SH, MH.	Konferensi Nasional IV Asosiasi Dosen Hukum Acara Perdata “Menggagas Unifikasi Hukum Acara Perdata Nasional.”	Palu	12-14 Sept 2017	√	
90	Dr. Yussy Adelina Mannas, SH, MH.	Konferensi Nasional Hukum Perdata IV “Mencari Model Pembaharuan Hukum Perikatan : Penormaan Prinsip dan Langkah Legislasi	Palembang	9-11 Okt 2017		√
91	Dr. Yussy Adelina Mannas, SH, MH.	Recharging Teaching Method Dosen Senior “One Day Pre-Conference Workshop On : Outcome Based Education (OBE)	Padang	28 Agt 2017		√
92	Dr. Yussy Adelina Mannas, SH, MH.	The 2 nd International Conference On Islamic Law in Indonesia “Management of Ummah for Country Develompment”	Padang	7 Nov 2017		√
93	Dr. Yussy Adelina Mannas, SH, MH.	Small Group Discussion “Teknik Penulisan artikel Untuk Jurnal Internasional”	Padang	8 Nov 2017		√
94	Dr. Yussy Adelina Mannas, SH, MH.	Lokakarya Pengembangan Kurikulum Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas	Padang	24 -25 Nov 2017		√
95	Dr. Yussy Adelina Mannas, SH, MH.	Kuliah Umum “Profesionalisme Notaris Dalam Memberikan Kepastian Hukum Kepada Masyarakat”	Padang	31 Agt 2018		√
96	Dr. Yussy Adelina Mannas, SH, MH.	Lokakarya Penyusunan RPS Mata Kuliah Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas	Padang	28 April 2018		√

97	Dr. Yussy Adelina Mannas, SH, MH.	Pendidikan dan Pelatihan Notaris Pembuat Akta Koperasi	Padang	20 Sept 2018		√
98	Dr. Yussy Adelina Mannas, SH, MH.	Focus Group Discussion “Harmonisasi RUU Hukum Acara Perdata”	Surabaya	12-13 Okt 2018	√	
99	Dr. Yussy Adelina Mannas, SH, MH.	Focus Group Discussion “Arah dan Strategi Penyempurnaan Hukum Acara Perdata”	Jakarta	5 Nov 2018	√	
TOTAL					84	15

* Jenis kegiatan : Seminar ilmiah, Lokakarya, Penataran/Pelatihan, *Workshop*, Pagelaran, Pameran, Peragaan dll

Penjelasan Tabel :

Dari seluruh dosen tetap yang mengikuti kegiatan ilmiah pada data table diatas, maka yang sebagai **Penyaji berjumlah 84** (delapan puluh empat), dan sebagai **Peserta berjumlah 15** (lima belas).

4.5.4 Pengalaman dosen tetap sebagai:

4.5.4.1 Pakar/konsultan/staf ahli/nara sumber

No.	Nama Dosen	Nama Lembaga	Waktu	Tingkat (Lokal, Nasional, Internasional)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Prof. Dr. Yuliandri, SH, MH.	a. Nara Sumber pada penyusunan Modul Pelatihan Penyusunan Peraturan Perundang- undangan, Pusat Pendidikan dan Latihan Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta,	29 November 2016	Nasional
		b. Nara Sumber pada Bimbingan dan Teknis dalam Kegiatan Sistem Penjaminan Mutu dan Akreditasi Nasional Perguruan	BAN-PT, Banda Aceh, 2016	Nasional
		c. Nara Sumber dalam Evaluasi Pelaksanaan Pemilihan Gubernur	2015	Nasional

		Sumatera Barat, Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sumatera Barat, Padang		
		d. Penyusun Anotasi dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), Jakarta.	2015	Nasional
		e. Nara Sumber, dalam Konferensi Hukum Tata Negara, Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas.	2014	Nasional
		f. Nara Sumber dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Perkara Konstitusi (Setjen MKRI), Jakarta, Oktober 2014;	November 2014	Nasional
		g. Juri Anugerah Konstitusi bagi Guru-guru Pendidikan Kewarganegaraan Tingkat Nasional, yang diselenggarakan atas kerjasama antara Setjen MK RI dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, dan Kementerian Agama RI.	2014	Nasional
		h. Nara Sumber dalam Penyusunan Grand Design Peningkatan Hak Konstitusional Warga Negara, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, Puncak Bogor, November 2014.	2014	Nasional
		i. Nara Sumber, dalam Diskusi terbatas LHKPN yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, 27 Agustus 2014 di Jakarta.	2014	Nasional
		j. Juri dalam Kompetisi Debat Konstitusi Debat Mahasiswa Tingkat Nasional, Sekretariat Jenderal MKRI, Puncak Bogor, Juli 2014.	2014	Nasional
		k. Nara Sumber dalam Raker DPD RI dan Wartawan Parlemen, dengan Tema: Mengadopsi Proses Legislasi Model Tripartit (DPR, DPD dan Presiden) dalam Revisi UU MD3, Sekretariat Jenderal DPR RI, Bukittinggi, 23 Mei 2014	2014	Nasional
		l. Nara Sumber dalam Pendidikan dan Latihan (Diklat) Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Umum, bagi Partai	2014	Nasional

		Politik Peserta Pemilihan Umum 2014, Jakarta, Februari 2014		
2.	Prof. Dr. Zainul Daulay, SH, MH	a. Direktorat Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri RI (Narasumber pada Simposium Nasional dalam rangka Konsultasi tentang Sumber Daya Genetika, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (SDGPTEBT), Bandung.	2015	Nasional
		b. APUCEN Council Meeting (Narasumber Pada 7th Regional Asia-Pacific University Community Engagement Network, Gold Coast, Australia)	2015	Internasional
		c. Direktorat Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri RI (Narasumber pada Sosialisasi dan Jaring Masukan Perkembangan Perundingan IGC GRTKF dengan tema : "Perpanjangan Mandat Inter-Governmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore (IGC GRTKF) untuk periode 2016/2017, Jakarta	2016	Nasional
		d. LAPAN bekerjasama dengan UNAIR (Narasumber pada Seminar Nasional Kebijakan Penerbangan dan Antariksa III- dengan topik makalah : "Perkembangan Hukum Antariksa Internasional dan Implementasi Serta Aplikasinya", 2018, Surabaya	2018	Nasional
3.	Prof. Dr. Yulia Mirwati, SH, CN, MH	a. Saksi Ahli dalam perkara tindak pidana korupsi dalam pengadaan tanah Kampus III IAIN Imam Bonjol Padang, dengan Surat Tugas Nomor 963/UN16.04.D/PP/2016	2016	Lokal
		b. Keterangan ahli dalam perkara hukum kontrak pengadaan barang, dengan Surat Tugas Nomor 1682/UN16.04.D/PP/2016	2016	Lokal
		a. Perkara dugaan tindak pidana dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menggadaikan atau menyewakan	2017	Nasional

4.	Prof. Dr. Elwi Danil, SH, MH	sebidang tanah sengan hak milik, sedangkan ia tahu bahwa orang lain berhak atas tanah tersebut, sebgaiman dimaksud dalam Pasal 385 ke 1e, ke 4e KUHP, pada Polres Padang Pariaman		
		b. Ahli Hukum Pidana dalam sidang Praperadilan di Pengadilan Negeri Medan Nomor : 03/Pid.Pra/2017/PN.MDN dan Nomor : 04/Pid.Pra/2017/PN.MDN	2017	Nasional
		c. Ahli Hukum Pidana untuk memberikan keterangan dalam perkara Nomor : 474/PID.SUS/2017/PN.KWG	2017	Nasional
		d. Sidang Praperadilan dari ASMI.B.Dipl.ATP.M.M	2017	Nasional
		e. Perkara tindak Pidana Korupsi bertempat di Pengadilan Tipikor Padang	2016	Lokal
		f. Perkara dugaan tindak pidana korupsi Penyimpangan dana PKBL pada PT. Sang Hyang Seri Cabang Lubuk Alung Sumatera Barat	2016	Lokal
		g. Perkara Dugaan tindak pidana korupsi Penyimpangan dalam pengelolaan Uang APBD Kab. Indragiri Hulu pada sekretariat Daerah Kab. Indragiri Hulu	2016	Nasional
		h. Perkara Praperadilan Nomor : 143/Pid.Prp/2016/PN.JKt.Sel	2016	Nasional
		a. Polres Kab. Solok (Saksi Ahli dalam perkara tindak pidana korupsi terhadap bantuan sapi dalam Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Tahun 2011 s/d 2012 di Kenagarian Saniang Bakar Kec. X Koto Singkarak Kab. Solok)	2015	Lokal
		b. POLRES Kab. Indragiri Hulu Prov. Riau (Saksi Ahli dalam perkara membuka lahan dengan cara membakar, di Desa Pulau Jum'at Kec. Kuala Cenaku Kab. Indragiri Hulu)	2015	Nasional
		c. POLRES Kab. Indragiri Hulu Prov. Riau (Saksi Ahli dalam pembahasan tindak lanjut putusan Pra Peradilan dalam perkara membuka lahan dengan cara membakar di Desa Pulau Jum'at Kec. Kuala Cenaku Kab. Indragiri Hulu Provinsi Riau)	2015	Nasional
		d. Keterangan ahli dalam perkara Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan hak dengan maksud akan menggunakan surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan,	2016	Lokal

5.	Prof. Dr. Ismansyah, SH, MH.	dengan Surat Tugas Nomor 1683/UN16.04.D/PP/2016		
		e. POLRES Kota Padang (Saksi Ahli dalam perkara Tidak Pidana penggelapan dengan cara dengan memiliki dengan melawan hak suatu barang dalam penguasaannya bukan karena kejahatan dalam bentuk titipan uang sdr. Zainal Abidin kepada sdr. Wadri berdasarkan laporan Polisi No. Pol: LP/62/V/2007/Polres tanggal 30 Mei 2007)	2016	Lokal
		f. POLRES Kab. Pasaman Barat (Saksi ahli dalam perkara tindak pidana penggelapan terhadap sertifikat hak milik (SHM) no.6008,No:6009,No:6010,No.6011 Tanggal 25 September 2012 dengan laporan polisi No.LP/120/III/2014-SPKT Res Pasbar)	2016	Lokal
		g. POLRES Kab. Palalawan (Saksi ahli dalam perkara Secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang/Pengrusakan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 di Petak 21701 dan Petak 221C01 Distrik Nilo Desa Kesuma Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan)	2016	Lokal
		h. POLDA Aceh (saksi ahli Pemalsuan Ijazah dan atau Pelanggaran Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional berkaitan dengan pelaksanaan ujian Pendidikan Luar Sekolah (PLS) program Paket C di Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh)	2017	Nasional
		i. POLSEK Padang Ganting Kab. Padang Pariaman (Saksi ahli Tindak Pidana yang terjadi di Polsek Padang Ganting Nagari Padang Kec. Padang ganting Kab. Tanah Datar)	2017	Lokal
6.	Prof. Dr. Yaswirman, MA.	Keterangan ahli dalam perkara tindak pidana memalsukan surat-surat sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 263 KUHPidana dan Pasal 266 KUHP yang diuga dilakukan oleh terlapor Nasrul Abit.	2016	Lokal
7.	Prof. Dr. Saldi Isra, SH, MPA	a. Keterangan ahli dalam pada persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan Nomor Perkara 06/G/2016/PTUN-MDN, dengan Surat Tugas Nomor 773/UN16.04.D/PP/2016.	2016	Nasional

		b. Keterangan ahli dalam dugaan tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh tersangka H. Bambang Irianto, SH, MH selaku Walikota Madiun periode tahun 2009-2014, baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, dengan Surat Tugas Nomor 1760/UN16.4.D/PP/2016	2016	Nasional
8.	Dr. Yuslim, SH, MH	a. Keterangan ahli sebagai Ahli Hukum Administrasi Negara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi, dengan Surat Tugas Nomor 665/UN16.04.D/PP/2016	2016	Lokal
		b. Keterangan ahli dalam perkara Tata Usaha Negara Padang No.06/G/2016/PTUN.PDG, dengan Surat Tugas Nomor 1276/UN16.04.D/PP/2016	2016	Lokal
		c. Keterangan ahli dalam dalam perkara tindak pidana Membuat Surat Palsu atau Memalsukan surat dan menggunakan surat palsu kedalam akta oktentik sebagaimana pasal 266 KUH Pidana, dengan Surat Tugas Nomor 1583/UN16.04.D/PP/2016	2016	Lokal
		d. Keterangan ahli dalam perkara dugaan tindak pidana perpajakan Nomor : 103/Pid.sus/2015/PN.BKT, dengan Surat Tugas Nomor 255/UN16.4.D/PP/2016	2016	Lokal
		e. Saksi ahli Hukum Administrasi Negara atas objek perkara Surat Keputusan Nomor : 821.2.2/335/DIDIKPORA-2016 tertanggal 13 Juli 2016 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Dalam Fungsional Guru yang merugikan pemohon, dengan Surat Tugas Nomor 1797/UN16.4.D/PP/2016	2016	Lokal
		f. Keterangan ahli dalam perkara Tindak Pidana Korupsi a.n. Terdakwa dan Terdakwa Yunarsah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dengan Surat Tugas Nomor 1939/UN16.4.D/PP/2016	2016	Lokal
		g. Dalam perkara permohonan pencabutan Surat Keputusan Bupati Solok Selatan	2016	Lokal

		Nomor : 540/16/IUP/DESDM/BUP-2010 tentang Persetujuan Perubahan Kuasa Pertambangan Eksploitasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Geominex Sapek, dengan Surat Tugas Nomor 1962/UN16.4.D/PP/2016		
9.	Dr. Busyra Azheri, SH, MH	a. Keterangan ahli dalam perkara tindak pidana penggelapan sertifikat yang diatur dalam Pasal 374 kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam laporan Polisi No. LP/32/I/2015/SPKT,Sbr, dengan Surat Tugas Nomor 1184/UN16.04.D/PP/2016	2016	Lokal
		b. Keterangan ahli dalam perkara No.06/PDT.G/2016/PN.SLK melawan Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jendral pajak cq. Kantor Wialyah Sumatera Barat dan Jambi cq. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Solok, dengan Surat Tugas Nomor 1467/UN16.04.D/PP/2016	2016	Lokal
		c. Keterangan ahli dalam perkara Dugaan tindak pidana korupsi Penyimpangan dana PKBL pada PT. Sang Hyang Seri Cabang Lubuk Alung Sumatera Barat, dengan Surat Tugas Nomor 798/UN16.04.D/PP/2016	2016	Lokal
		d. Keterangan ahli dalam perkara Perdata Nomor: 21/PDT.G/2015/PN.PSB di Pengadilan Negari Pasaman Barat, dengan Surat Tugas Nomor 700/UN16.04.D/PP/2016	2016	Lokal
		b. Keterangan ahli dalam perkara Perdada No. 108/Pdt.G/2015/PN.PDG, dengan Surat Tugas Nomor 429/UN16.4.D/PP/2016	2016	Lokal
		c. Keterangan ahli dalam perkara Perdata gugatan No. 111/6/PGF/2015, dengan Surat Tugas Nomor 428/UN16.4.D/PP/2016	2016	Lokal
		d. Tim Penasehat Investasi pada Sekretariat Daerah Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat, dengan Surat	2016	Lokal

		Tugas Nomor 993/UN16.4.D/PP/2016		
10.	Dr. Rembrandt, SH, MPd	a. Tim Penyusun Naskah Akademik Ranperda RPPLH Provinsi Sumatera Barat, dengan Surat Tugas No. 1407 / Un16.04.D/PP/2018	2018	Lokal
		b. Tenaga Ahli Bidang Hukum tentang Pengkajian Permasalahan Lingkungan Hidup Kawasan Mandeh dari Perspektif Hukum Lingkungan.	2017	Lokal
11.	Dr. Azmi Fendri, SH, MKn	a. Memberikan keterangan ahli dengan Surat Tugas Nomor : 194/UN 16.4 D/PP/2016, dalam perkara dugaan tindak pidana penggelapan sertifikat tanah yang dilakukan oleh terlapor Notaris Elfita Achtar, SH	2016	Lokal
		b. Memberikan keterangan ahli dalam perkara pemalsuan surat-surat dalam perkara tersebut terdapat bukti pemalsuan akta otentik berupa akta jual beli nomor : 13/Ppa/ST/IV/2004, dengan Surat Tugas Nomor : 1438/UN 16.04.D/PP/2017	2017	Lokal
		c. Memberikan keterangan ahli dengan Surat Tugas : 1249/UN 16.04.D/PP/2017 , membuat surat palsu atau menempatkan keterangan palsu ke dalam sesuatu akta otentik yg diduga dilakukan oleh terlapor an. Emril dan Notaris Husna Misbah, dengan cara memalsukan isi serta tanda tangan pada perjanjian penggantian hak dengan nomor akta 63 tanggal 26 Mei 2006	2017	Lokal
		d. Memberikan keterangan ahli dengan Surat Tugas nomor : 619/UN 16.04 D/PP/2017, dalam Perkara Nomor Pdt.Plw/2016 PN Pdg	2017	Lokal
		e. Memberikan keterangan ahli dengan Surat Tugas Nomor :2101/UN 16.04.D/PP/2017, dalam Perkara Perdata Nomor : 89/Pdt-G/2017/2017	2017	Lokal
		f. Memberikan keterangan ahli dengan Surat Tugas Nomor : 1580/UN 16.04 D/PP/2017, pemalsuan surat dan tanda tangan yang dilaporkan Sdr. Basrizal Koto sesuai dengan laporan polisi Nomor : LP/24/II/2012/SPKT Sbr	2017	Lokal

		g. Memberikan keterangan ahli dengan Surat Tugas Nomor : 1795/UN 16.04.WD 1/PP/2017, dalam Perkara Perdata Nomor : 02/Pdt..Bth/2017/PN. Siak	2017	Nasional
		h. Memberikan keterangan ahli dengan Surat Tugas Nomor : 1767/UN 16.04. WD/PP/2017, dalam Perkara nomor : 341/Pid.B/2017 PN. Pdg	2017	Lokal
12.	Dr. Yulfasni, SH, MH.	Keterangan ahli keterangan sebagai ahli pada pemeriksaan persidangan perkara Tindak Pidana Korupsi pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Sekijang Kab. Pelalawan Riau, dengan Surat Tugas Nomor 794/UN16.04.D/PP/2016	2016	Lokal
13.	Dr. Yussy Adelina Mannas, SH, MH.	Narasumber Focus Group Discussion (FGD) Dalam Rangka Penyempurnaan dan Penyelarasan Naskah Akademik RUU tentang Hukum Acara Perdata	2018	Nasional
Total jumlah dosen sebagai tenaga ahli dan narasumber adalah sebanyak : 13 (Tiga Belas) orang				

4.5.4.2 Keanggotaan Pada Organisasi/Asosiasi Profesi Dan Ilmiah

No.	Nama Dosen	Nama Lembaga	Waktu	Tingkat (Nasional, Internasional)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Prof. Dr. Yuliandri, SH, MH.	Ketua Tim Dewan Juri Kompetisi Debat Konstitusi Mahasiswa Tingkat Nasional, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia	2018	Nasional
		Ketua Panitia Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Propinsi Sumatera Barat	2013 - 2018	Daerah
		Members of the Degree Committee, Ph. D Candidate, Maastricht	2017	Internasional

		University		
		Tim Penilai Penganugerahan Nawacita Legislasi Tingkat Kementerian/ Lembaga Negara, Provinsi, Kabupaten dan Kota, Jakarta, 22 Juni 2016	2016	Nasional
		Wakil Ketua Panitia Seleksi Calon Anggota Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2015	2015	Nasional
		Asesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN- PT), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2014-sekarang.	2014 - sekarang	Nasional
		Reviewer Lembaga Pengembangan Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan RI, 2013 - 2018.	2013-2018	Nasional
		Juri pada Anugerah Konstitusi Prof. Moh Yamin Award, Mei 2014, 2016	2016	Nasional
		Ketua Panitia Seleksi, Komisioner Komisi Pemilihan Umum, Provinsi Sumatera Barat, 2013	2013	Daerah
		Anggota Tim Pakar, Penyusunan Peraturan Perundang- undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Tahun 2011	2011	Nasional
		Mitra Bestari pada Jurnal Konstitusi, MKRI 2013-2014.	2013-2014	Nasional
		Mitra Bestari, pada jurnal Komisi Yudisial RI, 2013-2014.	2013- 2014	Nasional
		Mitra Bestari, pada Jurnal Konstitusi FH Universitas Bengkulu, 2013	2013	Nasional
2.	Prof. Dr. Zainul Daulay, SH,	Anggota Badan Pekerja Transparency International Indonesia (TII)	2015	Nasional

	MH	Asosiasi Pengajar Hukum Internasional	2015	Nasional
3.	Prof. Dr. Yulia Mirwati, SH, CN, MH	Pusat Studi Hukum Ekonomi Fak.Hukum Unand	2015-2017	Lokal
4.	Prof. Dr. Elwi Danil, SH, MH	Sekretaris Badan Pembina Pengurus Pusat IKA Unand	2012-2015	Lokal
5.	Prof. Dr. Ismansyah, SH, MH.	Anggota Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia	2017	Nasional
		Anggota Komisi Kepolisian Nasional	2018	Nasional
6.	Prof. Dr. Yaswirman, MA.	Wakil Sekjen Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Univ. Andalas	2012-2015	Nasional
		Ketua Pusat Studi Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Andalas	2012-2016	Lokal
		Anggota Asosiasi Dosen Hukum Acara Perdata	2015	Nasional
7..	Prof. Dr. Saldi Isra, SH, MPA	Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara	2012	Nasional
8..	Dr. Yuslim, SH, MH	Asosiasi Pengajar Hukum Administrasi Negara	2015	Nasional
9.	Dr. Zefrizal Nurdin, SH, MH	Asosiasi Pengajar Hukum Islam	2017	Nasional
		Asosiasi Dosen Hukum Indonesia (ADHI)	2017	Nasional
10.	Dr. Busyra Azheri, SH, MH	Anggota Badan Kerjasama Dekan PTN	2018	Nasional
11.	Dr. Dahlil Marjon, SH, MH.	Asosiasi Dosen Hukum Acara Perdata	2014	Nasional

12.	Dr. Rembrandt, SH, MPd	Asosiasi Pengajar Hukum Lingkungan	2015	Nasional
13.	Dr. Azmi Fendri, SH, MKn	Anggota Badan Kerjasama MKn PTN se Indonesia	2015 - 2019	Nasional
		Asosiasi Pengajar Hukum Administrasi Negara	2010 - sekarang	Nasional
14.	Dr. Jean Elfardi, SH, MH	Asosiasi Pengajar Hukum Internasional	2015	Nasional
15.	Dr. Yussy Adelina Mannas, SH, MH.	Bendahara Umum pada Pengurus Pusat Asosiasi Dosen Hukum Acara Perdata (ADHAPER)	2013 – 2016 2016 - 2020	Nasional
		Anggota Asosiasi Dosen Hukum Kesehatan	2015	Nasional
		Anggota Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia (MHKI)	2015	Nasional

4.5.4.3 Visiting professor

No.	Nama Dosen	Nama Lembaga	Waktu	Tingkat (Nasional, Internasional)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Prof. Dr. Yuliandri, SH, MH	Faculty of Law Maastricht University	8 Desember 2017	Internasional
		Universitas Sumatera Utara	2017	Nasional
		Universitas Diponegoro	2017	Nasional
		Universitas Airlangga	2017	Nasional
		Universitas Brawijaya	2017	Nasional
		Universitas Indonesia	2017	Nasional
2.	Prof. Dr. Elwi Danil, SH, MH	Univerisitas Sumatera Utara	2017	Nasional
		Universitas Trisakti	2017	Nasional
		Universitas Jayabaya	2017	Nasional
3.	Prof. Dr. Zainul	Universitas Diponegoro	2017	Nasional

	Daulay, SH, MH	Universitas Syah Kuala	2017	Nasional
4.	Prof. Dr. Ismansyah, SH, MH	Universitas Sriwijaya	2017	Nasional
		Universitas Sumatera Utara	2017	Nasional
		Universitas Islam Riau	2017	Nasional
5.	Prof. Dr. Saldi Isra, SH, MPA	Faculty of Law Maastricht University	8 Desember 2017	Internasional
		Universitas Gadjah Mada	2017	Nasional

Penjelasan Tabel :

Dari Data pada Tabel *Visiting Professor* diatas, maka :

- Jumlah dosen melakukan visiting Professor dengan **tingkat internasional berjumlah 2 (dua)**
- Jumlah dosen melakukan Visiting Professor dengan **tingkat nasional berjumlah 5 (lima)**

4.5.5 Sebutkan pencapaian prestasi/reputasi dosen (misalnya prestasi dalam pendidikan, penelitian dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat).

No.	Nama Dosen	Prestasi yang Dicapai*	Waktu Pencapaian	Tingkat (Lokal, Nasional, Internasional)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Prof. Dr. Yuliandri, SH, MH	Menggagas Peraturan Daerah Yang Berpihak Kepada Kepentingan Masyarakat Adat dan Investor di Sumatera Barat	2016	Nasional
		Kajian Evaluasi UU No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospal dengan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	2017	Nasional
2.	Prof. Dr. Zainul Daulay, SH., MH	Pembatasan Hak Remisi Narapidana Korupsi Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Internasional	2015	Nasional

* Sediakan dokumen pendukung pada saat asesmen lapangan.

4.6 Tenaga kependidikan

4.6.1 Tuliskan data tenaga kependidikan yang ada di PS, Jurusan, Fakultas atau PT yang melayani mahasiswa PS dengan mengikuti format tabel berikut:

No	Jenis Tenaga Kependidikan	Jumlah Tenaga Kependidikan dengan Pendidikan Terakhir								Unit Kerja
		S3	S2	S1	D4	D3	D2	D1	SMA/SMK	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Pustakawan *		1	9		11				Perpustakaan Universitas Andalas
2	Laboran/ Teknisi/ Analis/ Operator/ Programmer			2						Fakultas Hukum Universitas Andalas
3	Tenaga Administrasi		1	8					1	Fakultas Hukum Universitas Andalas
4	Lainnya :									Fakultas Hukum Universitas Andalas
Total		0	2	19	0	11	0	0	1	

* Hanya yang memiliki pendidikan formal dalam bidang perpustakaan

Penjelasan Tabel :

Dari Data pada Tabel diatas, maka dapat disimpulkan :

1.6.1.1 Pustakawan

Pustakawan dengan kualifikasi S2 berjumlah 1 orang, kualifikasi S1 berjumlah 9 orang dan kualifikasi D3 berjumlah 11 orang.

1.6.1.2 Teknisi / Programmer

Teknisi / Programmer berjumlah 2 orang dengan kualifikasi S1.

4.6.1.3 Tenaga Administrasi

Tenaga Administrasi dengan kualifikasi S2 berjumlah 1 orang, kualifikasi S1 berjumlah 8 orang dan kualifikasi SMA 1 orang.

4.6.2 Jelaskan upaya yang telah dilakukan PS dalam meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan.

Upaya Prodi MKn FH Unand dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi Tenaga Kependidikan adalah :

1. Mengirimkan tenaga kependidikan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan baik oleh Kemenristek Dikti serta di lingkungan Universitas Andalas. Bagi Tenaga Kependidikan yang telah memenuhi Daftar Urutan Kepangkatan maka berhak untuk mengikuti DIKLATPIM.
2. Memfasilitasi Tenaga Kependidikan untuk melanjutkan studi baik pada tingkat Strata 1 (S1) maupun Strata 2 (S2).
3. Peningkatan kompetensi di tingkat Universitas, seperti Pelatihan ICT, Pelatihan Kehumasan, Pelatihan Bahasa, Pelatihan service excellent dalam peningkatan kualitas pelayanan terhadap dosen dan mahasiswa.

Pelatihan yang diikuti oleh Tenaga Kependidikan dalam 3 (tiga) tahun terakhir diantaranya adalah :

1. Rini Suciati mengikuti pelatihan bidang keuangan di Jakarta
2. Indra Lesmana, pelatihan Sistem Informasi Akademik
3. Deswan Juwita, SE, pelatihan Pengadaan barang dan Jasa
4. Azral, S.Pt., M.Pd, mengikuti bimbingan Teknis calon Tim Penilaian Kinerja Instansi Jabatan Fungsional Arsiparis.
5. Azral, S.Pt.,M.Pd, pelatihan ISO9001:2015 Foundation



STANDAR 5

KURIKULUM, PEMBELAJARAN, DAN SUASANA AKADEMIK

IIIA

Borang Akreditasi Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Andalas

5.1 Kurikulum

- Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi, bahan kajian, maupun bahan pelajaran serta cara penyampaian, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi.
- Kurikulum seharusnya memuat standar kompetensi lulusan yang terstruktur dalam kompetensi utama, pendukung dan lainnya yang mendukung tercapainya tujuan, terlaksananya misi, dan terwujudnya visi program studi. Kurikulum memuat mata kuliah/modul/blok yang mendukung pencapaian kompetensi lulusan dan memberikan keleluasaan pada mahasiswa untuk memperluas wawasan dan memperdalam keahlian sesuai dengan minatnya, serta dilengkapi dengan deskripsi mata kuliah/modul/blok, silabus, rencana pembelajaran dan evaluasi.
- Kurikulum harus dirancang berdasarkan relevansinya dengan tujuan, cakupan dan kedalaman materi, pengorganisasian yang mendorong terbentuknya *hard skills* dan keterampilan kepribadian dan perilaku (*soft skills*) yang dapat diterapkan dalam berbagai situasi dan kondisi.

5.1.1 Kompetensi

Uraikan secara ringkas kompetensi lulusan (kompetensi utama, kompetensi pendukung, kompetensi lainnya).

5.1.1.1 Kompetensi Lulusan Dalam Kurikulum

Kurikulum Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas memiliki standar kompetensi lulusan yang meliputi kompetensi utama, kompetensi pendukung, dan kompetensi lainnya, yang disesuaikan dengan visi, misi, sasaran dan tujuan program studi :

a. KOMPETENSI UTAMA

1. Mampu menyusun konsep penyelesaian masalah hukum dengan mengembangkan, dan/atau melalui pengembangan ilmu hukum dan hukum positif, serta melakukan penalaran hukum, khususnya hukum kenotariatan
2. Mampu merumuskan ide secara argumentatif dan kreatif di bidang ilmu hukum, khususnya bidang kenotariatan
3. Mampu menggunakan bahasa hukum, komunikasi hukum dan sistem IT yang menunjang pengembangan ilmu hukum khususnya hukum
4. Menguasai teknik pembuatan akta secara cermat dan benar

b. KOMPETENSI PENDUKUNG

1. Mampu melakukan penelitian hukum dengan pendekatan inter atau multi disipliner, penelitian yang menjadi bagian dari peta penelitian bidang ilmu hukum khususnya hukum kenotariatan.
2. Lulusan Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas mampu mengajukan dan menuangkan ide, konsep, gagasan dan temuannya dalam bentuk karya tulis ilmiah yang kemudian dipresentasikan dan dipublikasikan secara luas di kalangan masyarakat.

c. KOMPETENSI LAINNYA

Bersikap religius serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika, serta mampu untuk merespon dan mengkritisi dinamika perkembangan hukum yang terjadi di masyarakat.

Catatan: Pengertian tentang kompetensi utama, pendukung, dan lainnya dapat dilihat pada Kepmendiknas No. 045/U/2002.

5.1.1.2 Orientasi dan Kesesuaian Lulusan Dengan Visi Misi Program Studi

Dengan tujuan untuk menghasilkan lulusan Magister Kenotariatan yang memiliki kompetensi utama, kompetensi pendukung dan kompetensi lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Visi dan Misi Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Visi Misi Prodi MKn FH Unand, maka ditetapkanlah capaian pembelajaran pada setiap mata kuliah pada kurikulum Prodi MKn FH Unand sesuai dengan Standar KKNl sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 dan Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 8

Tahun 2018 tentang Kurikulum Prodi MKn FH Unand. Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan Prodi MKNn FH Unand, maka capaian pembelajaran dirumuskan dengan sangat jelas pada Pasal 2 Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 8 Tahun 2018 tentang Kurikulum Prodi MKn FH Unand, yang menyatakan bahwa pendidikan Prodi MKn FH Unand bertujuan untuk memenuhi capaian pembelajaran dalam hal sikap, penguasaan pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus, yang memiliki kesesuaian dengan visi dan misi program studi. Masing – masing capaian pembelajaran tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

C. Capaian Pembelajaran Sikap :

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius.
2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika.
3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila.
4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa.
5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinal orang lain.
6. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara
7. Menginternalisasi nilai, norma dan etika akademik.
8. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri
9. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika kewirausahaan
10. Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial, kepedulian serta berkontribusi terhadap masyarakat dan lingkungan.
11. Menghormati, menghargai serta menginternalisasikan nilai-nilai kearifan lokal.

D. Capaian Pembelajaran Penguasaan Pengetahuan :

1. Bidang Ilmu Hukum, teori Hukum dan Penemuan Hukum secara mendalam dan utuh sehingga dapat menjadi landasan berpikir kritis terhadap penerapan hukum positif di Indonesia.

2. Bidang hukum tertentu yang berkaitan dengan kenotariatan, merupakan kajian utama secara mendalam dan utuh, sebagai pengembangan dari bidang-bidang hukum dasar dan hukum terapan.
3. Kemampuan berpikir ilmiah dengan metode penelitian hukum normatif, sosiologis dan empiris melalui pendekatan inter dan multidisipliner.
4. Kemampuan untuk menggunakan teknologi dan informasi dalam menunjang bidang hukum terapan.

E. Capaian Pembelajaran Keterampilan Umum :

1. Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai hukum sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional.
2. Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya.
3. Mampu menyusun ide, hasil pemikiran dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etik akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas.
4. Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi objek penelitiannya dan memosisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin.
5. Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data.
6. Mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas.
7. Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri.
8. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan dan menemukan

kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

F. Capaian Pembelajaran Keterampilan Khusus :

1. Mampu menyusun konsep penyelesaian masalah hukum dengan mengembangkan, dan/atau melalui pengembangan ilmu hukum dan hukum positif, serta melakukan penalaran hukum.
2. Mampu merumuskan ide secara argumentatif dan kreatif di bidang ilmu hukum dan/atau hukum positif khususnya di bidang kenotariatan.
3. Kemampuan menguasai bahasa hukum, komunikasi hukum dan sistem IT yang menunjang pengembangan ilmu hukum dan penerapannya.
4. Mampu melakukan penelitian hukum dengan pendekatan inter atau multidisipliner, secara mandiri atau kolaboratif, sehingga menghasilkan produk penelitian yang menjadi bagian dari peta penelitian bidang ilmu hukum dan/atau hukum positif Indonesia.
5. Menguasai teknik pembuatan akta secara cermat dan benar.

Berdasarkan uraian di atas, maka kurikulum Prodi MKn FH Unand telah disusun berdasarkan Visi dan Misi Prodi MKn FH Unand, yang berorientasi kepada Visi dan Misi FH Unand serta Visi dan Misi Universitas Andalas.

5.1.2 Struktur Kurikulum

Beban studi program magister bagi peserta sekurang-kurangnya 36 SKS dan sebanyak-banyaknya 50 SKS yang dijadwalkan untuk 4 (empat) semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 4 (empat) semester dan selama-lamanya 10 (sepuluh) semester termasuk penyusunan tesis, setelah program sarjana, atau yang sederajat (Kepmendiknas No. 232/U/2000).

5.1.2.1 Jelaskan struktur kurikulum (perkuliahan, tugas-tugas khusus, penelitian tesis, penulisan hasil penelitian tesis) serta keterkaitan di antaranya, serta lengkapi tabel di bawah ini.

5.1.2.1.1 Struktur Kurikulum

Struktur kurikulum Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas didasarkan pada Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 8 Tahun 2018 yang ditetapkan pada 31 Januari 2018 tentang Kurikulum Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas. Maka berdasarkan Peraturan Rektor tersebut, struktur kurikulum Prodi MKn FH Unand dapat dijelaskan sebagaimana berikut :

1. BEBAN STUDI, MASA STUDI DAN PENGELOMPOKAN MATAKULIAH

Mahasiswa reguler mempunyai beban studi sebanyak 46 (empat puluh enam) SKS yang diprogram dapat diselesaikan dalam waktu 4 (empat) semester. Mahasiswa Penyetaraan mempunyai beban studi sebanyak 16 (enam belas) SKS yang diprogram dapat diselesaikan dalam 2 (dua) semester.

Pengelompokan matakuliah pada Prodi MKn FH Unand terdiri atas :

- a. Kelompok Kemagisteran, terdiri dari 14 (empat belas) SKS
- b. Kelompok Inti, terdiri dari 28 (dua puluh delapan) SKS
- c. Kelompok Pilihan, terdiri dari 10 (sepuluh) SKS

Mata kuliah wajib bagi Mahasiswa Reguler adalah matakuliah yang termasuk ke dalam Kelompok Kemagisteran dan Kelompok Inti. Mata kuliah wajib bagi Mahasiswa Penyetaraan adalah mata kuliah yang termasuk ke dalam kelompok Kemagisteran. Bagi matakuliah yang mempunyai hubungan prasyarat, dapat diambil setelah matakuliah prasyarat dimaksud lulus dengan nilai minimal B.

2. KELAS KHUSUS REMEDIAL

Ketentuan Kelas Khusus Remedial di Prodi MKn FH Unand, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Remedial Untuk Matakuliah Prasyarat

Bagi mahasiswa yang tidak lulus matakuliah prasyarat (nilai dibawah B) diberikan kesempatan untuk mengikuti ujian remedial 1x (satu kali) yang dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan setelah nilai tersebut diumumkan.

b. Remedial Untuk Mata Kuliah Keprofesian

Bagi mahasiswa yang tidak lulus mata kuliah keprofesian (nilai dibawah B) diberikan kesempatan untuk mengikuti ujian remedial 1x (satu kali) yang dapat dilaksanakan setelah mahasiswa tersebut melaksanakan Seminar Hasil Penelitian Tesis.

Bagi mahasiswa yang telah mengikuti kelas khusus remedial tetapi masih tidak lulus, maka mahasiswa tersebut harus mengulang mata kuliah tersebut di kelas reguler.

3. INDIKATOR EVALUASI (PENILAIAN)

Indikator evaluasi terhadap mahasiswa Prodi MKn FH Unand dilaksanakan dalam beberapa bentuk, yaitu:

- a. Pemberian tugas oleh Dosen pengampu mata kuliah kepada mahasiswa.
- b. Pelaksanaan Ujian Tengah Semester (UTS), dan;
- c. Pelaksanaan Ujian Akhir Semester.

Sistem penilaian nilai akhir mahasiswa digunakan dengan penilaian sebagai berikut :

- a. Point penilaian hasil ujian terhadap satu mata kuliah dilakukan oleh setiap dosen dengan memberikan nilai antara 0-100 (nol sampai dengan seratus).
- b. Nilai akhir mahasiswa dari setiap mata kuliah adalah gabungan nilai tugas, nilai Ujian Tengah Semester (UTS) dan nilai Ujian Akhir Semester (UAS).
- c. UAS hanya dapat diikuti bagi mahasiswa yang memenuhi tingkat kehadiran minimal 75 % (tujuh puluh lima persen) dari jumlah tatap muka perkuliahan.
- d. Batas waktu penyerahan nilai oleh dosen pengampu mata kuliah ditentukan berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 3 Tahun 2016 tentang Peraturan Akademik Universitas Andalas, yaitu 2 minggu setelah dilaksanakannya ujian. Jika sampai pada batas waktu yang ditentukan dosen tersebut belum menyerahkan nilai akhir, maka Koordinator Prodi MKn dapat mengambil kebijakan dengan memberikan nilai B kepada seluruh mahasiswa yang mengambil mata kuliah tersebut, dan Pimpinan fakultas beserta Koordonator Prodi akan melakukan evaluasi dan mengambil tindakan terhadap dosen yang bersangkutan akibat keterlambatan pemasukan nilai tersebut.

e. Pola penghitungan Nilai Akhir Mata Kuliah :

$$\text{Nilai Akhir} = (15\% \times \text{Nilai Tugas}) + (35\% \times \text{Nilai UTS}) + (50\% \times \text{Nilai UAS})$$

Sesuai dengan Pasal 41 Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 3 Tahun 2016 tentang Peraturan Akademik Universitas Andalas, Penilaian prestasi akademik mahasiswa dilakukan melalui evaluasi dengan menganut prinsip keadilan, relevansi, dan akuntabilitas. Konversi Nilai Akhir didasarkan pada tabel berikut :

NILAI ANGKA	NILAI MUTU	ANGKA MUTU	SEBUTAN MUTU
$85 \leq \text{NA} \leq 100$	A	4,00	Sangat Cemerlang
$80 \leq \text{NA} < 85$	A-	3,50	Cemerlang
$75 \leq \text{NA} < 80$	B+	3,25	Sangat Baik
$70 \leq \text{NA} < 75$	B	3,00	Baik
$65 \leq \text{NA} < 70$	B-	2,75	Hampir Baik
$60 \leq \text{NA} < 65$	C+	2,25	Lebih dari Cukup
$55 \leq \text{NA} < 60$	C	2,00	Cukup
$40 \leq \text{NA} < 55$	D	1,75	Hampir Cukup
< 40	E	0,00	Gagal

4. EVALUASI STUDI MAHASISWA

Berdasarkan Pasal 44 Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 3 Tahun 2016 tentang Peraturan Akademik Universitas Andalas, evaluasi studi mahasiswa Prodi MKn FH Unand dilakukan dengan ketentuan berikut :

- Setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan rangkaian kegiatan akademiknya pada suatu program studi harus menempuh ujian akhir.
- Mahasiswa diperkenankan mengikuti ujian Tesis bila memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling kurang 3,00.
- Mata kuliah yang memiliki nilai D wajib untuk diulang, dan mahasiswa yang memiliki nilai C boleh untuk diulang.
- Pada saat mengikuti ujian Tesis, mahasiswa hanya diperkenankan mempunyai nilai C paling banyak 2 (dua) buah
- Telah lulus TOEFL minimal institusi dengan nilai 500.
- Telah mempublikasikan minimal satu tulisan dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi atau terindex (DOAJ).

5.1.2.1.2 Matakuliah

Smt	Kode MK	Nama Mata Kuliah ⁽¹⁾	Bobot SKS	SKS MK dalam Kurikulum		Kelengkapan ⁽³⁾			Unit/ Jur/ Fak Penyelenggara
				Inti ⁽²⁾	Insti-tusional	Desk-ripsi	Silabus	SAP	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Semester I									
1.	MKN-511	Teori Hukum	2	√	-	√	√	√	Program Studi
2.	MKN-512	Politik Hukum Kenotariatan	2	√	-	√	√	√	Program Studi
3.	MKN-513	Peraturan Jabatan Notaris dan PPAT	2	√	-	√	√	√	Program Studi
4.	MKN-514	Hukum Keluarga dan Harta Perkawinan	2	√	-	√	√	√	Program Studi
5.	MKN-515	Hukum Perikatan	2	√	-	√	√	√	Program Studi
6.	MKN-516	Hukum Perusahaan	2	√	-	√	√	√	Program Studi
7.	MKN-517	Hukum Agraria	2	√	-	√	√	√	Program Studi
8.	MKN-518	Hukum Jaminan	2	√	-	√	√	√	Program Studi
Jumlah			16						
Semester II									
1.	MKN-521	Metode Penelitian Hukum	2	√	-	√	√	√	Program Studi
2.	MKN-522	Penemuan Hukum	2	√	-	√	√	√	Program Studi
3.	MKN-523	Hukum Waris KUH Perdata	2	√	-	√	√	√	Program Studi
4.	MKN-524	Pengurusan Hak Atas Tanah	2	√	-	√	√	√	Program Studi
5.	MKN-525	Hukum Perbankan	2	√	-	√	√	√	Program Studi
6.	MKN-526	Peraturan Lelang	2	√	-	√	√	√	Program Studi
7.	MKN-527	Hukum Investasi*	2	√	-	√	√	√	Program Studi

8.	MKN-528	Hukum Waris Islam dan Adat*	2	√	-	√	√	√	Program Studi
9.	MKN-529	Hukum Tanah Adat*	2	√	-	√	√	√	Program Studi
10.	MKN-530	Kontrak Bisnis Internasional*	2	√	-	√	√	√	Program Studi
11.	MKN-531	Hukum Pajak*	2	√	-	√	√	√	Program Studi
Jumlah			16						
Semester III									
1.	MKN-611	Teknik Pembuatan Akta (TPA) I: Akta Pemisahan dan Pembagian Harta Peninggalan **)	2	√	-	√	√	√	Program Studi
2.	MKN-612	Teknik Pembuatan Akta (TPA) II: Akta Berbagai Macam Perjanjian **)	2	√	-	√	√	√	Program Studi
3.	MKN-613	Teknik Pembuatan Akta (TPA) III: Akta Badan-Badan Usaha**)	2	√	-	√	√	√	Program Studi
4.	MKN-614	Akta Tanah **)	2	√	-	√	√	√	Program Studi
Jumlah			8						
Semester IV									
1.	MKN-621	Tesis	6	√	-	√	√	√	Program Studi
Total SKS			46						

Penjelasan Tabel :

Jumlah mata kuliah yang dilengkapi dengan deskripsi mata kuliah, silabus dan SAP adalah sebanyak 24 (dua puluh empat) mata kuliah dari 24 mata kuliah yang ada (100%) .

- (1) Tuliskan matakuliah pilihan sebagai matakuliah pilihan I, matakuliah pilihan II, dst. (nama-nama matakuliah pilihan yang dilaksanakan dicantumkan dalam tabel 5.1.3.)
- (2) Menurut rujukan *peer group* / Kepmendiknas 045/U/2002 (ps. 3 ayat 2e)
- (3) Beri tanda \checkmark pada matakuliah yang dilengkapi dengan deskripsi, silabus, dan atau SAP. Sediakan dokumen pada saat asesmen lapangan.

5.1.2.2 Tuliskan matakuliah pilihan yang dilaksanakan dalam tiga tahun terakhir, pada tabel berikut:

Semester	Kode MK	Nama MK (Pilihan)	Bobot SKS	Unit/Jur/Fak Pengelola
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	MKN-527	Hukum Investasi	2	Program
2	MKN-529	Hukum Tanah Adat	2	Program
2	MKN-528	Hukum Waris Islam dan Adat	2	Program
2	MKN-530	Hukum Kontrak Bisnis Internasional	2	Program
2	MKN-531	Hukum Pajak	2	Program
		Jumlah	10	

5.1.3 Peninjauan Kurikulum Dalam Lima Tahun Terakhir

Jelaskan mekanisme peninjauan kurikulum dan pihak-pihak yang dilibatkan dalam proses peninjauan tersebut.

5.1.3.1 Pelaksanaan Peninjauan Kurikulum

Kurikulum sebagaimana dalam Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 8 Tahun 2018 tentang Kurikulum Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas dinyatakan bahwa kurikulum merupakan penjabaran lebih lanjut dari visi dan misi FH Unand yang disusun berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan sistem hukum nasional. Kurikulum senantiasa memerlukan pembaharuan dalam rangka memenuhi capaian pembelajaran berdasarkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Untuk memenuhi capaian pembelajaran, serta dikaitkan dengan kesepakatan Badan Kerjasama

(BKS) Dekan Fakultas Hukum PTN se Indonesia, dan pertimbangan Senat Universitas Andalas, telah diusulkan untuk melakukan perubahan kurikulum Prodi MKn FH Unand. Adapun tahapan dilakukannya perubahan kurikulum adalah sebagai berikut:

1. EVALUASI SUBSTANSI MATA KULIAH (SEPTEMBER – NOVEMBER 2014)

Evaluasi terhadap substansi mata kuliah ini dilakukan untuk mendapatkan materi matakuliah terakhir guna disesuaikan dengan perkembangan keilmuan dan masyarakat.

2. BENCHMARK (JANUARI - NOVEMBER 2017)

Melakukan kunjungan ke beberapa Prodi MKn PTN untuk perubahan dan penyempurnaan kurikulum Prodi MKn FH Unand, antara lain Prodi MKn Universitas Gadjah Mada (UGM), Prodi MKn Universitas Indonesia (UI) dan Prodi MKn Universitas Sumatera Utara (USU).

3. LOKAKARYA KURIKULUM (26 – 28 NOVEMBER 2017)

Lokakarya Kurikulum Program Pascasarjana FH Unand dilaksanakan selama dua hari di Hotel Amaris Padang.

Hari Pertama, kegiatan lokakarya dilakukan secara panel yang diikuti oleh semua Prodi Pascasarjana FH Unand dengan narasumber Prof. Dr. Yuliandri, SH, MH sebagai Guru Besar FH Unand dan sekaligus sebagai Asesor BAN-PT.

Hari kedua, kegiatan dilakukan secara paralel oleh masing – masing program studi yang dipimpin oleh KaProdi. Hasil pembahasan masing-masing prodi terkait dengan perubahan dan penyempurnaan kurikulum dibawa ke dalam Rapat Paripurna.

4. TINDAK LANJUT HASIL LOKAKARYA KURIKULUM

Hasil Lokakarya perubahan dan penyempurnaan kurikulum dibawa ke Rapat Senat FH Unand untuk dimintai pertimbangan dan masukan Senat. Hasil Rapat Senat memutuskan untuk menyetujui perubahan dan penyempurnaan kurikulum.

Tuliskan hasil peninjauan kurikulum mengikuti format tabel berikut.

No.	No. MK	Nama MK	MK Baru/ Lama/ Hapus	Perubahan pada		Alasan Peninjauan	Atas Usulan/ Masukan dari	Berlaku Mulai Sem./Th.
				Silabus /SAP	Buku Ajar			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	MKN-511	Teori Hukum	Lama	√	-	Penekanan pada lembaga kenotariatan	Dosen	Sem. 1/2010
2	MKN-512	Politik Hukum Kenotariatan	Lama	√	-	Penekanan pada lembaga kenotariatan	INI dan Dosen	Sem. 1/2010
3	MKN-513	Peraturan Jabatan Notaris dan PPAT	Lama	√	-	Penekanan pada lembaga kenotariatan dan PPAT	INI dan IPPAT	Sem. 1/2010
4	MKN-514	Hukum Keluarga dan Harta Perkawinan	Lama	√	-	Penekanan pada lembaga kenotariatan	INI dan IPPAT	Sem. 1/2010
5	MKN-515	Hukum Perikatan	Lama	-	-	-	-	-
6	MKN-516	Hukum Perusahaan	Lama	√	-	Penekanan pada aspek pendirian dan perbuatan hukum yang berkaitan dengan perseroan	Dosen, INI dan IPPAT	Sem. 1/2010
7	MKN-517	Hukum Agraria	Lama	√	-	Kebijakan di bidang pertanahan	Dosen dan IPPAT	Sem. 1/2010
8	MKN-518	Hukum Jaminan	Lama	√	-	Kebijakan di bidang jaminan	Dosen dan INI	Sem. 1/2010
9	MKN-521	Metode Penelitian Hukum	Lama	-	-	-	-	Sem. 2/2011

10	MKN-522	Penemuan Hukum	Lama	√	-	Perubahan lebih diarahkan pada aspek kenotariatan	Dosen dan INI	Sem. 2/2011
11	MKN-523	Hukum Waris KUH Perdata	Lama	-	-	-	-	-
12	MKN-524	Pengurusan Hak Atas Tanah	Lama	√	-	Kebijakan di bidang pertanahan	Dosen dan IPPAT	Sem. 2/2011
13	MKN-525	Hukum Perbankan	Lama	√	-	Kebijakan di bidang perbankan	Dosen dan INI	Sem. 2/2011
14	MKN-526	Peraturan Lelang	Lama	-	-	-	-	-
15	MKN-527	Hukum Investasi*	Baru	-	-	Disesuaikan dengan tuntutan dunia usaha	Dosen dan INI	Sem. 2/2011
16	MKN-528	Hukum Waris Islam dan Adat*	Baru	-	-	-	-	Sem. 2/2011
17	MKN-529	Hukum Tanah Adat*	Baru	-	-	-	-	Sem. 2/2011
18	MKN-530	Kontrak Bisnis Internasional*	Baru	-	-	-	-	Sem. 2/2011
19	MKN-531	Hukum Pajak*	Baru	-	-	-	-	Sem. 2/2011
20	MKN-611	Teknik Pembuatan Akta (TPA) I: Akta Pemisahan dan Pembagian Harta Peninggalan **)	Lama	-	-	-	-	Sem. 3/2011
21	MKN-612	Teknik Pembuatan Akta (TPA) II: Akta Berbagai Macam Perjanjian **)	Lama	-	-	-	-	Sem. 3/2011

22	MKN-613	Teknik Pembuatan Akta (TPA) III: Akta Badan-Badan Usaha**)	Lama	-	-	-	-	Sem. 3/2011
23	MKN-614	Akta Tanah **)	Lama	-	-	-	-	Sem. 3/2011

- 1) Tanda *) berkaitan dengan matakuliah pilihan yang harus diambil mahasiswa maksimal 4 sks (dua mata kuliah).
- 2) Tanda **) berkaitan dengan matakuliah keprofesian yang wajib diambil oleh mahasiswa.

1.1.3.2 Penyesuaian Kurikulum Dengan Perkembangan IPTEKS dan Kebutuhan Masyarakat

Penyesuaian terhadap kurikulum pada Prodi MKn FH Unand telah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Dimana pada waktu lokakarya penyempurnaan kurikulum yang dilakukan pada tanggal 26-28 November 2017 di Hotel Amaris Padang, telah ditampung masukan dari stakeholders dengan menambahkan beberapa mata kuliah, dan ditetapkanlah bahwa mata kuliah Hukum Waris, Hukum Perikatan, Hukum Perusahaan dan Hukum Agraria adalah mata kuliah prasayarat untuk mata kuliah Teknik Pembuatan Akta I, II, III dan Akta Tanah.

5.2 Persyaratan Mengikuti Pendidikan Magister, Proses Pelaksanaan dan Persyaratan Kelulusannya.

5.2.1 Jelaskan persyaratan mukim (*residency requirement*), pelaksanaan dan kendala yang dihadapi.

Berdasarkan struktur kurikulum yang dimiliki oleh Prodi MKn FH Unand, mahasiswa diwajibkan mengikuti kelas perkuliahan selama 3 (tiga) semester, maka mahasiswa harus bermukim di kota Padang selama kurun waktu tersebut agar dapat menjalani perkuliahan dengan baik.

Khusus untuk kelas Reguler Mandiri yang pelaksanaan perkuliahannya pada hari Jumat dan Sabtu, sebagian besar mahasiswanya telah bekerja dan berdomisili pada kota dan kabupaten yang ada di Sumatera Barat dan di luar Sumatera Barat, seperti Pekanbaru, Jambi, Batam dan Kepulauan Riau.

Berdasarkan pengalaman selama ini tidak ada kendala pelaksanaan berkaitan dengan persyaratan mukim dalam proses belajar mengajar, karena semua tempat mukim mahasiswa mudah dijangkau dari sisi transportasi dan penggunaan ICT untuk data dan informasi pendidikan. Dengan demikian persoalan persyaratan mukim mahasiswa yang berada di luar kota Padang tidak menjadi persoalan.

5.2.2 Jelaskan persyaratan penguasaan bahasa Inggris. Untuk penguasaan bahasa Inggris digunakan standar TOEFL.

Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 3 Tahun 2016 tentang Peraturan Akademik Universitas Andalas, dan Pasal 11 Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 8 Tahun 2018 tentang Kurikulum Program Studi Magister Kenotariatan FH Unand, ditetapkan persyaratan calon mahasiswa dan calon lulusan harus memiliki Sertifikat TOEFL dari Pusat Bahasa Universitas Andalas atau Pusat Bahasa lain yang teregistrasi dengan minimal skor 500. Ketentuan syarat TOEFL ini berkaitan dengan visi Prodi MKn FH Unand, yaitu menjadi program pendidikan Magister Kenotariatan terkemuka dan bermartabat serta mampu bersaing pada tingkat nasional dan regional.

5.2.3 Jelaskan persyaratan perkuliahan dan ujian matakuliah yang isinya berupa perkembangan ilmu mutakhir dalam bidangnya. Berikan pula penjelasan tentang pelaksanaan dan kendala yang dihadapi.

1. Persyaratan Perkuliahan

Berdasarkan Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 3 Tahun 2016 tentang Peraturan Akademik Universitas Andalas, Setiap mahasiswa Unand juga wajib melakukan pendaftaran ulang sebelum mengikuti kegiatan akademik pada semester terkait, sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam kalender akademik Unand. Hal ini ditindaklanjuti dalam *Standart Operational Procedure* (SOP) Prodi MKn FH Unand yang ditetapkan oleh Dekan FH Unand, pelaksanaan registrasi mahasiswa sebagai persyaratan perkuliahan dilakukan sebagaimana berikut :

- a. Setiap mahasiswa melakukan registrasi akademik dan keuangan melalui bank

untuk memperoleh slip pembayaran pendidikan dan PIN yang sesuai dengan kalender akademik Unand.

- b. Setiap mahasiswa melakukan registrasi ulang secara online melalui website <http://registrasi.unand.ac.id> dengan memasukkan Username dan PIN.
- c. Bagian akademik Prodi MKn FH Unand melakukan pengecekan kelengkapan administrasi calon mahasiswa baru dan lama.
- d. Bagian akademik Prodi MKn FH Unand mencetak tanda terima bagi calon mahasiswa baru dan lama yang telah melengkapi persyaratan administrasi.
- e. Admin SIA Prodi MKn memberikan Username dan Password Portal Akademik untuk melakukan entry KRS online.

2. Kegiatan Perkuliahan

Mahasiswa Prodi MKn FH Unand diwajibkan untuk mengikuti mata kuliah dengan beban studi Mahasiswa reguler mempunyai beban studi sebanyak 46 (empat puluh enam) SKS yang diprogram dapat diselesaikan dalam waktu 4 (empat) semester dan beban studi sebanyak 16 (enam belas) SKS yang diprogram dapat diselesaikan dalam 2 (dua) semester bagi Mahasiswa Penyetaraan.

Pengelompokan matakuliah pada Prodi MKn FH Unand terdiri atas :

- a. Kelompok Kemagisteran, terdiri dari 14 (empat belas) SKS
- b. Kelompok Inti, terdiri dari 28 (dua puluh delapan) SKS
- c. Kelompok Pilihan, terdiri dari 10 (sepuluh) SKS.

3. Ujian Mata Kuliah

Berdasarkan Pasal 39 Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 3 Tahun 2016 tentang Peraturan Akademik Universitas Andalas, mahasiswa dinyatakan sah dan diperkenankan mengikuti ujian suatu mata kuliah apabila :

- a. Membawa KTM dan kartu ujian yang sah sebagai bukti diri.
- b. Terdaftar dalam mata kuliah yang diujikan.
- c. Mengikuti mata kuliah yang diujikan paling sedikit kehadiran 75%.
- d. Tidak sedang dikenakan sanksi akademik; dan
- e. Memenuhi semua persyaratan untuk menempuh ujian tersebut.

Prodi MKn FH Unand memberikan kewenangan penuh kepada Dosen Pengampu Matakuliah untuk menentukan jenis ujian yang akan diberikan terhadap mata kuliah yang diampunya tersebut. Secara terstruktur evaluasi perkuliahan dilaksanakan melalui Penilaian Tugas, Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS).

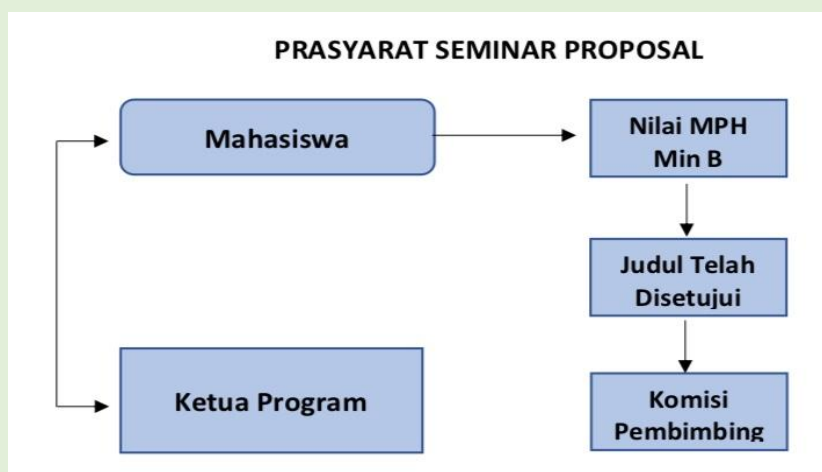
4. Kendala Yang Dihadapi

Terkait dengan pemutakhiran materi perkuliahan, belum ditemukan kendala-kendala yang cukup berarti dari dosen karena didukung dengan sarana, prasarana dan fasilitas-fasilitas yang tersedia di Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas. Kendala yang dihadapi terkait dengan penggunaan Metode Pembelajaran dan Sistem penilaian berbeda yang dilakukan oleh satu *team teaching* mata kuliah.

5.2.4 Jelaskan cara penyajian dan penilaian rencana penelitian tesis.

Permohonan Proposal Tesis diajukan oleh Mahasiswa sebagaimana yang diatur di dalam Standart Operational Procedure (SOP) Prodi MKn FH Unand, yang mana KaProdi setelah menerima permohonan proposal Tesis dari Mahasiswa selanjutnya mengusulkan kepada Dekan untuk menetapkan 2 dosen pembimbing untuk masing-masing mahasiswa dalam penulisan tesis. Penulisan tesis diawali dengan pengajuan proposal penelitian. Proposal penelitian tesis dibuat oleh mahasiswa dan harus mendapatkan persetujuan dari dosen pembimbing. Setelah dosen pembimbing menyetujui mahasiswa mengajukan proposal penelitian kepada KPS untuk diujikan. Proposal tesis diuji oleh 4 orang dosen yang terdiri atas 2 dosen pembimbing dan 2 dosen bukan pembimbing. Proposal tesis terdiri atas (a) bagian awal, (b) bagian utama, dan (c) bagian akhir. Untuk mengetahui rencana penelitian tesis yang dilakukan mahasiswa dengan memperhatikan hal-hal sebagaimana berikut:

A. PERSYARATAN PENGAJUAN PROPOSAL PENELITIAN TESIS



Bagan 5.2.4 A : Prasyarat Seminar Proposal

1. Mahasiswa yang telah lulus mata kuliah Metode Penelitian Hukum dengan nilai minimal B.
2. Mahasiswa mengisi formulir isian yang menerangkan rencana judul penelitian tesis berikut dengan usulan dosen pembimbing.

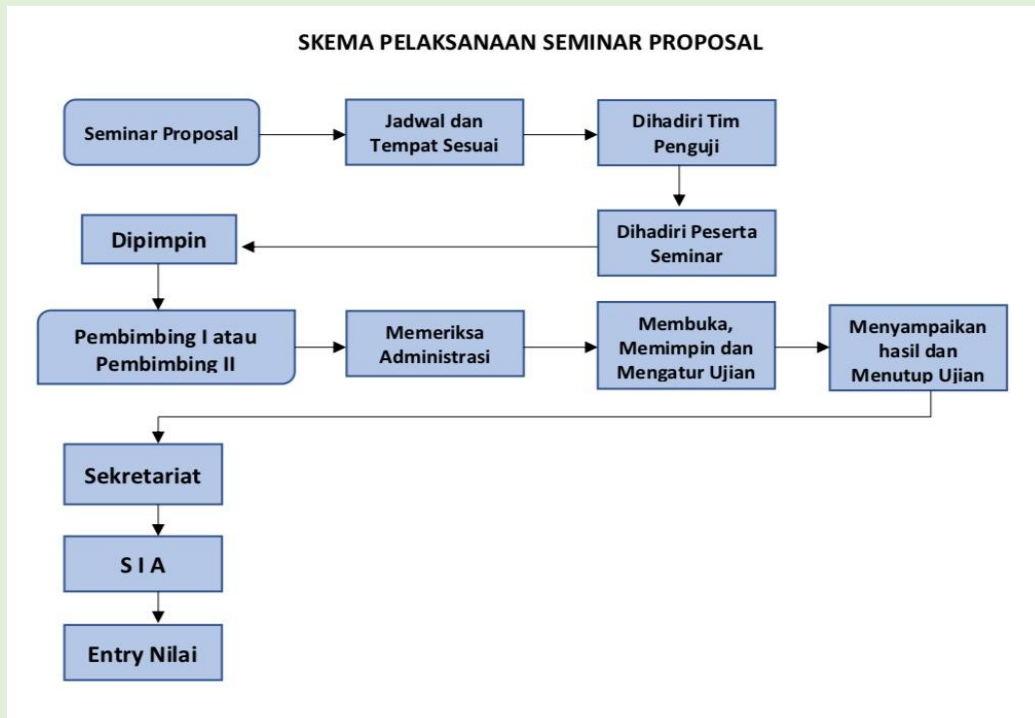
B. PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING



Bagan 5.2.4 B : Skema Penentuan Pembimbing

Judul Penelitian dan Dosen Pembimbing yang telah disetujui oleh KaProdi akan ditetapkan oleh Dekan dengan Surat Keputusan (SK) tentang Penunjukan Pembimbing I dan Pembimbing II. SK Penunjukan Dosen Pembimbing menjadi dasar bagi mahasiswa untuk melakukan proses bimbingan, yang dimulai dari Pembimbing II, dan dilanjutkan kepada Pembimbing I.

C. PENILAIAN PROPOSAL PENELITIAN TESIS



Bagan 5.2.4 C : Skema Pelaksanaan Seminar Proposal

1. Seminar proposal dapat diajukan setelah mendapatkan persetujuan Pembimbing I dan II, serta dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan tempat ditentukan.
2. Dihadiri paling kurang salah seorang pembimbing dan 3 (tiga) orang penguji.
3. Dihadiri paling kurang 5 (lima) orang mahasiswa Prodi MKn sebagai peserta seminar.
4. Komponen penilaian dalam Proposal Tesis, antara lain :
 - a. Penulisan Proposal Tesis, berkaitan dengan penguasaan sistematika penulisan, konsistensi penggunaan Bahasa dan istilah, serta kerapian penulisan.
 - b. Segi Ilmiah Tulisan, berkaitan dengan kesesuaian judul dan isi, pemakaian latar belakang masalah, kemampuan menganalisis problematika relevansi, penggunaan kepustakaan, tujuan dan manfaat penelitian, perumusan hipotesis serta penggunaan metode penelitian.
 - c. Penyajian Proposal Tesis, berkaitan dengan kemampuan penyajian mengemukakan konsep/teori, kemampuan berbicara dengan jelas, kemampuan mengajukan materi secara sistematis, kemampuan menekankan hal-hal penting serta kemampuan teknik penyajian secara keseluruhan.

Penilaian juga dilakukan terhadap kemampuan berdiskusi, yaitu kemampuan berkomunikasi, kemampuan menjawab dengan tepat, kemampuan menerima fakta baru secara terbuka, kemampuan menerima pendapat lain secara kritis, serta kejujuran mengemukakan pendapat,

- d. Setiap penguji memberikan penilaian , dengan nilai lulus proposal tesis minimal 70 (setara B). Proposal tesis yang tidak lulus dalam seminar proposal tesis harus menempuh ujian ulang.
- e. Kesetaraan Nilai Angka, Nilai Huruf dan Bobot ditunjukkan pada tabel berikut:

NILAI ANGKA	NILAI HURUF	BOBOT
≥ 85 - 100	A	4,00
≥ 80 - 84	A-	3,50
≥ 75 - 79	B+	3,25
≥ 70 - 74	B	3,00
≥ 65 - 69	B-	2,75
≥ 60 - 64	C+	2,25
≥ 55 - 59	C	2,00
≥ 50 - 54	C-	1,75
≥ 40 - 49	D	1,00

5.2.5 Jelaskan peraturan tentang kewajiban penyajian hasil penelitian tesis dalam seminar (internasional, nasional, wilayah, lokal PT) serta pelaksanaan dan kendala yang dihadapi.

Kewajiban penyajian hasil penelitian tesis dalam seminar berpedoman pada *Standart Operational Procedure (SOP)* Prodi MKn FH Unand. Seminar hasil penelitian dapat dilaksanakan jika dihadiri paling kurang salah seorang Pembimbing, 3 (tiga) orang penguji yang telah ditetapkan, dan paling kurang 5 (lima) orang mahasiswa Prodi MKn.

Disamping ketentuan tersebut, kewajiban penyajian hasil penelitian tesis dalam suatu artikel yang diterbitkan pada jurnal diatur dalam Pasal 45 Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 3 Tahun 2016 tentang Peraturan Akademik Universitas Andalas. Setiap mahasiswa pascasarjana diperkenankan mengikuti ujian akhir bila telah memenuhi syarat-syarat administratif dan akademik, diantaranya mempublikasikan minimal satu tulisan dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi atau terindeks (DOAJ).

5.2.6 Jelaskan sistem penjaminan mutu tesis, pelaksanaan serta kendala yang dihadapi.

Sistem penjaminan mutu tesis pada Prodi MKn FH Unand dilakukan mulai dari pengajuan judul tesis kepada KaProdi setelah mahasiswa yang bersangkutan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Mahasiswa yang telah lulus mata kuliah Metode Penelitian Hukum dengan nilai minimal B.
2. Mahasiswa mengisi formulir isian yang menerangkan rencana judul penelitian tesis berikut dengan usulan dosen pembimbing.

Selain itu, untuk menjaga kualitas tesis yang dihasilkan ditetapkan dengan tahapan sebagaimana yang telah dijelaskan pada poin 5.2.4 dan poin 5.2.5. Dalam hal tertentu, sesuai dengan tema tesis yang ditulis dimana salah seorang anggota tim penguji bisa ditunjuk dari kalangan profesional (notaris, PPAT, dan dari kalangan perbankan) yang penunjukannya ditetapkan dengan SK Dekan.

Penjaminan mutu tesis juga dilakukan melalui uji plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, yaitu sebuah website yang dapat digunakan oleh Dosen sebagai pendidik untuk mengecek tingkat plagiasi yang terdapat dalam karya mahasiswa. Untuk menjamin mutu tesis yang dihasilkan, berdasarkan Pasal 70 Ayat (2) huruf f Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 3 Tahun 2016 tentang Peraturan Akademik Universitas Andalas ditegaskan bahwa bila setelah mahasiswa diwisuda ternyata skripsi, tesis, disertasi atau tugas akhir yang dilakukan merupakan plagiat atau ditulis oleh orang lain, atau hasil pemalsuan data, dan sejenisnya, maka ijazah yang bersangkutan dibatalkan.

Pihak yang terlibat dalam penjaminan mutu tesis melibatkan Komisi Pembimbing, Komisi Penguji dan Ketua Sidang Ujian Akhir Tesis.

Berkenaan dengan kendala yang dihadapi adalah mengenai pemahaman Akademisi ataupun Praktisi mengenai permasalahan yang dikaji oleh mahasiswa. Untuk mengatasi kendala tersebut maka dilakukan pembagian tugas bimbingan secara proporsionalitas antara Pembimbing dari kalangan akademisi (Pembimbing I) dan Pembimbing dari kalangan praktisi (Pembimbing II).

5.2.7 Jelaskan peraturan tentang keanggotaan tim penguji dalam ujian akhir studi magister, pelaksanaan serta kendala yang dihadapi.

Berdasarkan *Standard Operational Procedure (SOP)* Prodi MKn FH Unand yang ditetapkan oleh Dekan FH Unand, pelaksanaan ujian akhir dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Ujian Akhir dapat dilaksanakan apabila :

- a. Sesuai dengan jadwal dan tempat yang ditentukan.
- b. Dihadiri oleh komisi pembimbing (pada sidang ujian akhir tesis pembimbing juga akan bertindak sebagai penguji), 3 (tiga) orang dosen penguji yang telah ditetapkan oleh Ketua Program Studi.
- c. Ujian akhir dipimpin oleh Ketua Program Studi.
- d. Apabila Ketua program berhalangan, ujian akhir dapat dipimpin oleh Sekretaris program atau Wakil Dekan I, atas penunjukan oleh Ketua Program Studi.

2. Pemimpin Ujian Akhir Tesis berkewajiban untuk :

- a. Memeriksa kelengkapan persyaratan ujian akhir.
- b. Membuka ujian akhir apabila persyaratan dan korum telah terpenuhi.
- c. Memimpin dan mengatur pelaksanaan ujian akhir agar tujuan ujian akhir tercapai dan terlaksana dengan tertib.
- d. Memimpin rapat penentuan hasil ujian akhir dan mencantumkannya di dalam Berita Acara Ujian Akhir.
- e. Menyampaikan hasil dan menutup ujian akhir.
- f. Menyerahkan berita acara kepada Ketua Program Studi melalui Sekretariat untuk di *entry* pada Portal Akademik.

3. Hasil Ujian Akhir

Berdasarkan Pasal 44 Ayat (4) dan PASal 47 Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 3 Tahun 2016 tentang Peraturan Akademik Universitas Andalas mengatur tentang Penyelesaian Program Magister yaitu sebagai berikut :

- a. Ujian akhir ditentukan jadwalnya oleh Program Studi dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- b. Hasil ujian akhir dinyatakan dalam bentuk Lulus / Tidak Lulus.
- c. Seorang mahasiswa dinyatakan lulus ujian akhir dari Prodi MKn bila mempunyai nilai ujian akhir minimal B.

- d. Bagi mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus Ujian Akhir dapat diberi kesempatan mengulang ujian maksimum dua kali, dan sesuai dengan kesepakatan Tim Penguji, dengan jarak minimal 1 bulan, dan paling lama 3 bulan sejak ujian akhir sebelumnya.
- e. Setiap mahasiswa yang telah ujian akhir diwisuda sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Andalas.
- f. Untuk menyelesaikan pendidikan program magister, setiap mahasiswa dapat dinyatakan lulus jika :
 - 1) Telah mengambil semua mata kuliah yang disyaratkan untuk Program Magister dan dinyatakan lulus tanpa nilai D atau BL.
 - 2) Mencapai IP \geq 3,00 (tiga koma nol nol).
 - 3) Telah menyerahkan tesis magister yang disetujui oleh pembimbing dan persyaratan lainnya kepada Fakultas / Pascasarjana.
 - 4) Memenuhi semua persyaratan lain yang ditetapkan oleh Fakultas / Pascasarjana.
 - 5) Telah dilaporkan kelulusannya oleh Fakultas / Pascasarjana secara resmi dan tertulis kepada Rektor cq Wakil Rektor 1.

5.3 Pelaksanaan Proses pembelajaran

Sistem pembelajaran dibangun berdasarkan perencanaan yang relevan dengan tujuan, ranah belajar dan hierarkinya.

Pembelajaran dilaksanakan menggunakan berbagai strategi dan teknik yang menantang, mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis bereksplorasi, berkreasi dan bereksperimen dengan memanfaatkan aneka sumber.

Pelaksanaan pembelajaran memiliki mekanisme untuk memonitor, mengkaji, dan memperbaiki secara periodik kegiatan perkuliahan (kehadiran dosen dan mahasiswa), penyusunan materi perkuliahan, serta penilaian hasil belajar.

5.3.1 Mekanisme Monitoring Perkuliahan

Jelaskan mekanisme untuk memonitor perkuliahan, antara lain kehadiran dosen dan mahasiswa, serta materi perkuliahan.

A. Monitoring dan Evaluasi Terhadap Kehadiran Mahasiswa

1. Mahasiswa wajib menandatangani sendiri Daftar Hadir Kuliah sesuai kehadirannya pada setiap pertemuan, dan wajib menghadiri perkuliahan minimal 75% dari jumlah tatap muka.
2. Setiap tengah dan akhir semester wajib dilakukan evaluasi Proses Belajar Mengajar (PBM) dengan mengacu pada SOP yang telah ditetapkan.
3. Pada tatap muka terakhir dari setiap mata kuliah di akhir semester, mahasiswa akan diberikan kuesioner yang berkaitan dengan proses belajar mengajar selama perkuliahan, yaitu : keterkaitan materi perkuliahan yang diberikan oleh Dosen dengan materi ujian yang diberikan pada saat ujian, baik UTS maupun UAS. Pada kuesioner juga ditanyakan mengenai serta tingkat kehadiran dan kedisiplinan dosen dalam melaksanakan perkuliahan. Hasil kuesioner mahasiswa ini diserahkan kepada KaProdi MKn guna dijadikan bahan evaluasi untuk proses belajar mengajar pada semester selanjutnya.

B. Monitoring dan Evaluasi Terhadap Kehadiran Dosen

1. Jumlah tatap muka setiap mata kuliah adalah 16 (enam belas) kali yang dilaksanakan dengan 8 (delapan) pertemuan. Lama pertemuan untuk mata kuliah dengan bobot 2 sks dilaksanakan adalah 2 (dua) x 100 (seratus) menit, dan untuk mata kuliah dengan bobot 3 (tiga) sks adalah 2 (dua) x 150 (seratus lima puluh) menit.
2. Dosen wajib mengisi berita acara sesuai dengan pokok bahasan yang disampaikan dan membubuhkan tandatangan pada Blangko Uraian Kuliah.
3. Berita acara perkuliahan dosen akan diserahkan oleh Tenaga Kependidikan pada Wakil Dekan Bidang Akademik (Wadek I) secara berkala setiap tengah semester dan akhir semester sebagai bahan evaluasi terhadap dosen yang bersangkutan.

C. Monitoring dan Evaluasi Terhadap Materi Kuliah

Prodi MKn FH Unand mengacu kepada Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 3 Tahun 2016 tentang Peraturan Akademik Universitas Andalas, Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 8 Tahun 2018 tentang Kurikulum Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas, serta SOP Prodi MKn FH Unand yang dilakukan sebagai berikut :

1. Ketua Program mengadakan rapat untuk menetapkan Dosen Pengasuh Mata Kuliah H-30 (H = Hari pertama kuliah).
2. Petugas sekretariat menyusun jadwal kuliah untuk semester yang bersangkutan dan menyampaikannya kepada Dekan melalui Ketua Program untuk mendapat pengesahan H-15.
3. Dekan menetapkan jadwal kuliah melalui Surat Keputusan Dekan dan mengumumkannya kepada mahasiswa dan Dosen H-15.
4. Petugas Sistem Informasi Akademis (SIA) mengentrikan jadwal kuliah ke Portal Akademik Fakultas Hukum dan mengaktifkannya H-15.
5. Dosen wajib menyampaikan RKPPS mata kuliah yang diasuh dan membuat kontrak belajar dengan mahasiswa pada saat kuliah pertama.

5.3.2 Lampirkan contoh soal ujian dalam 1 tahun terakhir untuk 5 matakuliah keahlian berikut silabusnya. (Teknik Pembuatan Akta I, Teknik Pembuatan Akta II, Teknik Pembuatan Akta III, Akta Tanah dan Peraturan Jabatan Notaris)

1. TEKNIK PEMBUATAN AKTA I



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS HUKUM

PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN

Jl. Pancasila No. 10 Padang Telp. 0751 – 27404, Fax. 0751 - 34605
Laman. www.fhuk.unand.ac.id Email. mkn.unand@gmail.com

UJIAN AKHIR SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2017/2018

Mata Kuliah : Teknik Pembuatan Akta I
Dosen : Not. Dr. Beatrix Benni, SH., M.Pd., M.Kn
Kelas : Reguler Mandiri (A) & (B) 2016
Hari/Tgl : Sabtu / 20 Januari 2018
Waktu : 09.00 – 12.00 Wib

Pada tanggal 18 April 1970 Tuan P kawin sah dengan Nyonya A, dari perkawinan mana telah dilahirkan anak-anak secara berturut-turut :

B (LK) th 1974, C (PR) th 1977, D (LK) th 1980
E (PR) th 1983 F (PR) th 1985 G (PR) th 1990

Sebelum perkawinan Tuan P dengan Nyonya A antara mereka telah dibuat suatu Perjanjian Kawin dalam Perjanjian mana ditetapkan :

- a. Bahwa antara mereka suami istri akan ada percampuran untung rugi;
- b. Satu set peralatan bengkel senilai Rp.15.000.000,- dan
- c. Tanah HM No.25 + Toko di atasnya yang terletak di Jl.Veteran No.2 senilai Rp.100.000.000,- (kedua-duanya) tetap dikuasai dan hak milik P,
- d. Satu set perhiasan merk Flower senilai Rp.20.000.000,- tetap dikuasai dan hak milik A;

Dari perkawinan sah antara C dengan H th 2005 dilahirkan H1 (lk) th 2004 dan H2 (Pr) th 2006.

Sepanjang perkawinan Tuan P dengan Nyonya A telah diterima oleh mereka :

- a. Hibah berupa satu unit mobil sedan Ford senilai Rp.90.000.000,- dengan syarat dari pemberi hibah barang tersebut hanya untuk P pribadi (tidak masuk harta campur perkawinan),
- b. Hibah berupa Tanah HM no. 30 + rumah di atasnya yang terletak di Jl.Pemuda no.1 senilai Rp.120.000.000,- dengan syarat dari pemberi hibah barang tersebut untuk Tuan P dan Nyonya A bersama-sama,
- c. Hibah berupa satu perhiasan merk Cendrawasih senilai Rp.10.000.000,- dengan syarat dari pemberi hibah barang tersebut hanya untuk B pribadi (tidak masuk harta campur perkawinan);

Tuan P adalah pemilik Bengkel Kendaraan, guna mengembangkan usahanya tersebut telah meminjam uang sebesar Rp.20.000.0000,- dari Tuan F;
Pada tanggal 10 Maret 2017 Tuan P meninggal dunia dan waktu meninggalnya Tuan P, telah ditinggalkan harta berupa :

1. Tanah HGB + bangunan bengkel di atasnya senilai-----
Rp. 180.000.000,-
2. Perabot rumah tangga senilai----- Rp.
28.000.000,-
3. Perhiasan merk cendrawasih senilai-----
Rp. 10.000.000,-
4. Satu set peralatan bengkel senilai-----
Rp. 15.000.000,-
5. Uang tunai sejumlah-----
Rp. 60.000.000,-
6. satu unit mobil sedan Ford senilai-----
Rp. 90.000.000,-
7. satu set perhiasan merk Flower senilai-----
Rp. 20.000.000,-
8. Tanah HM No.25 + Toko di atasnya yang terletak di Jl.Veteran No.2 senilai---
Rp. 100.000.000,-
9. Tanah HM no. 30 + rumah di atasnya yang terletak di Jl.Pemuda no.1 seniRp.
120.000.000,-

1. Ongkos peti mati seharga-----
Rp. 1.000.000,-
2. Ongkos perawatan selama sakitnya Tuan P sebesar-----
Rp. 15.500.000,-
3. Biaya pendaftaran harta sebesar-----
Rp. 1.750.000,-
4. Biaya iklan dalam BNRI sebesar-----
Rp. 150.000,-
5. Biaya penaksiran barang tetap sebesar-----
Rp. 2.500.000,-
6. Biaya akta notaris tentang pembagian harta-----
Rp. 2.250.000,-
7. Biaya penguburan sebesar-----
Rp. 800.000,-
8. Biaya penaksiran barang bergerak sebesar-----
Rp. 1.000.000,-

Para ahli waris Tuan P datang kepada Saudara mohon dibuatkan akta pembagian harta peninggalan dalam mana termasuk harta warisan A dengan ketentuan-ketentuan :

- a. D karena sudah maju dalam usahanya, menolak warisan di kepaniteraan P.N

- kelas I.A Padang untuk menerima warisan (10-7-2016),
- b. B th. 2009 dihukum (keputusan P.N) karena mencoba membunuh P dan dinyatakan tidak patut menerima warisan,
 - c. C meninggal dunia th 2015,
 - d. I mengalami keterbelakangan mental.
 - e. hadir :
 - X 1 menunjukkan akte pengakuan dirinya oleh P th 1968, (X1 lahir th 1967).
 - X 1 tidak dapat hadir untuk dapat menerima legaat tersebut dan memberi kuasa kepada H untuk mewakilinya;
 - Tuan Budi, dari Balai Harta Peninggalan
- Syarat :
- a. Pembagian menurut KUH Perdata Indonesia (BW),
 - b. U.U pokok perkawinan (U.U no.1/1974) sementara waktu dikesampingkan,
 - c. Data-data/dokumen yang dibutuhkan hrs dilengkapi guna membuat akta Pemisahan dan Pembagian.
 - d. Para ahli waris menuntut bagian LP nya masin.g-masing.

2. TEKNIK PEMBUATAN AKTA II



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS HUKUM

PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN

Jl. Pancasila No. 10 Padang
Telp. 0751 – 27404, Fax. 0751 - 3460
Laman. www.fhuk.unand.ac.id, Email. mkn.unand@gmail.com

UJIAN AKHIR SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2017/2018

Mata Kuliah : Teknik Pembuatan Akta II
Dosen : Not. Helsi Yasin, SH., M.Kn
Kelas : Reguler 2016
Hari/Tgl : Rabu / 17 Januari 2018
Waktu : 09.00 – 12.00 Wib
Sifat Ujian : Close Book.

1. Nyonya Sukma sudah menikah selama tiga tahun secara siri, lalu telah bercerai pada tahun dua ribu enam, dan dikarunia dua orang anak, datang ke Kantor Anda selaku Notaris/ PPAT yang menggantikan Joana Sarjana Hukum yang cuti dua bulan dan dilanjutkan enam bulan. Nyonya Sukma bermaksud membuat Perjanjian Jual Beli dengan Tuan Evan, pada waktu itu Nyonya Sukma datang bersama dengan mantan suaminya tersebut. Sertipikat Hak Milik nomor 640/Kelurahan Lubuk Begalung, tercatat atas nama Nyonya Sukma yang kidal dan tangan kanannya terkena stroke, dari proses jual beli tahun dua ribu empat. Buatlah Awal Akta, Komparisi, dan Akhir Aktanya.
2. Tuan Sardi yang tuna wicara dan Ibu Dewi yang tidak bisa tulis baca merupakan orang tua Almarhumah Lola. Nona Yeni, Tuan Abidin, dan Nyonya Senada, merupakan saudara dari Almarhumah Lola. Mereka akan menjual tanah dan bangunan yang diwariskan tersebut kepada Tuan Zaid. Almarhumah Nyonya Lola tidak menikah dan tidak punya anak. Tentukan pemilik Sertipikat Hak Milik tersebut, dan buat Judul Akta, komparisi, serta akhir akta nya.
3. Tuan Edi, Sarjana Hukum setelah dua puluh tahun bersama pada akhirnya

berpisah dengan Nyonya Gemala pada Juli dua ribu tujuh belas. Tanah yang berdiri di atasnya sebuah bangunan rumah toko beralaskan sertipikat hak guna bangunan atas nama bersama. Tuan Edi bermaksud untuk menyewakan rumah toko tersebut yang diperoleh pada tahun dua ribu sepuluh tersebut kepada Tuan Varel. Tuan Edi tidak pernah tidak pernah membuat perjanjian kawin dengan pisah harta. Pada waktu penandatanganan akta yang dimaksud, Nyonya Gemala hadir dengan tangan kanan di gips. Buatlah Aktanya secara lengkap apabila dibuat dihadapan saudara sebagai Pejabat Sementara Notaris Zaki.

4. Persekutuan Komanditer Indo Sentral memenangkan sebuah proyek pembangunan Gedung Penyimpanan Arsip Daerah, namun ternyata Persekutuan Komanditer Indo Sentral tidak mempunyai uang yang cukup untuk mendanai proyek tersebut. Perseroan Terbatas Badai Tornado bersedia untuk pasang badan untuk Persekutuan Komanditer Indo Sentral tersebut dan Bank Penyimpanan Harta setuju untuk memberikan kredit konstruksi sebesar satu milyar lima ratus enam puluh tujuh juta rupiah.

Pertanyaan :

- a) Jenis akta apa yang akan anda buat ?
- b) Buatlah komparasi hingga premis untuk akta tersebut diatas.

Catatan : Semua data-data yang tidak disebutkan dalam soal ini bebas anda buat sendiri.

3. TEKNIK PEMBUATAN AKTA III



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN

Jl. Pancasila No. 10 Padang Telp. 0751 – 27404, Fax. 0751 - 34605
Laman. www. fhuk.unand.ac.id Email.mkn.unand@gmail.com

Soal Ujian Akhir Semester (UAS) Ganjil TA 2016/2017

Mata Kuliah : TPA III

Kelas : Reguler 2015

Soal

1. Yayasan KEMALA JAYA berkedudukan di Padang, didirikan dengan akta tanggal 02 Januari 2010, No.02 dibuat dihadapan YUSMARNI, SH, Notaris di Padang, Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI nomor AHU-00697.AH.01.01.Tahun 2010, tanggal 03 Februari 2010, tambahan Berita Negara RI tanggal 19 April 2011, No. 32.

Pembina : 1. Ny. SUSI ANDRIANI
2. Tn. RONI SYAHPUTRA

Pengurus :

Ketua : Tn. RENDI YULIDIN
Sekretaris : Ny. MONICA NOVIRA
Bendahara : Tn. NIZAM AL BASYIL

Pengawas : Tn. ROBI MAHENDRA

Pengurus dan Pengawas telah berakhir masa jabatannya. Pembina akan mengangkat Pengurus dan Pengawas yang baru yaitu :

Pengurus :

Ketua : Tn. BENI RAHMAN
Sekretaris : Ny. DELA PUSPITA
Bendahara : Ny. NOLA FEBRIDA

Pengawas : Tn. RAHMAT ILAHI

Pertanyaan :

- Seandainya saudara menjadi notaris, buatlah aktanya sesuai permintaan Pembina.
2. Perseroan Terbatas PT. ANUGRAH JAYA, berkedudukan di Kabupaten Solok, didirikan dengan akta tanggal 02 Januari 2016, nomor 01, yang dibuat di hadapan YUSMARNI, SH, Notaris di Padang, SK pengesahan nomor AHU-00567.AH.01.01.Tahun 2016, tanggal 03 Januari 2016, tambahan Berita Negara

RI tanggal 20 April 2016, nomor 50, Modal dasar Rp.2.000.000.000,- modal setor Rp.1.000.000.000,- pemegang saham :

1. Tn. YOGA PRASETIA Rp.300.000.000,- (Direktur)
2. Tn. AIDIL FITRI Rp.300.000.000,- (Komisaris)
3. Ny. RAHMAWATI : Rp. 400.000.000,-

Nilai nominal satu lembar saham Rp.1.000.000,-

Kasus :

- a. Tn. AIDIL FITRI meninggal dunia tanggal 05 Desember 2016
- b. Bahwa PT. INDO MEGA SARI, berkedudukan di Pekanbaru ingin menyetorkan modalnya dalam bentuk uang sebesar Rp.500.000.000,- kedalam PT. ANUGRAH JAYA, berkedudukan di Kabupaten Solok.

Pertanyaan :

Seandainya saudara menjadi notaris, buatlah aktanya sesuai permintaan direktur dimana notaris hadir dalam RUPS.

4. AKTA TANAH



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN INGGI
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS HUKUM

PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN

Jl. Pancasila No. 10 Padang Telp. 0751 – 27404, Fax. 0751 - 34605
Laman. www.fhuk.unand.ac.id Email. mkn.unand@gmail.com

UJIAN AKHIR SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2017/2018

Mata Kuliah : Akta Tanah
Kelas : Reguler Mandiri (A) & (B) 2016
Hari/Tgl : Sabtu / 20 Januari 2018
Waktu : 13.00 – 16.00 Wib

Soal A :

1. Sebutkan dan jelaskan periode-periode tentang pendaftaran tanah di Indonesia.
2. Jelaskan bagaimana pendaftaran pemindahan hak atas bidang tanah hak milik yang dilakukan diantara perorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan akta yang tidak dibuat dihadapan PPAT. Apa dasar hukumnya ?
3. Bandingkan cara penghitungan PPh dan BPHTB antara Akta Tukar Menukar dengan Akta Pembagian Hak Bersama. Berikan contoh dan hitung pajaknya masing-masing.
4. a. Siapa subjek BPHTB ?
b. Apa objek BPHTB ?
c. Ada berapa akta yang dibuat PPAT yang perbuatan hukumnya dikenakan pajak PPh dan BPHTB ? Siapa subjeknya? Jelaskan.
5. Buat Akta Pemasukan Kedalam Perusahaan dimana anda sendiri yang menentukan semua data-data dan dokumennya yang diperlukan dalam pembuatan akta tersebut.

Soal B :

- (1) Apa yang dimaksud dengan Rumah Susun.
- (2) Jelaskan maksud Tanah Bersama dalam Rumah Susun.
- (3) Dimana Sertipikat Pemilikan bangunan gedung Sarusun berdiri.

- (4) Jelaskan apa itu nilai perbandingan proposional.
- (5) Coba saudara uraikan bagaimana cara balik nama Sertipikat Hak Milik mulai dari Pembayaran Pajak, Pembuatan Akta dan Pendaftaran ke BPN.
- (6) Apa yang saudara ketahui tentang delivery Hak Milik atas tanah.
- (7) Apa yang saudara ketahui Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah pertama kali. Jelaskan.
- (8) Apa yang saudara ketahui Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang pemeliharaan data pendaftaran tanah. Jelaskan.
- (9) Saudara jelaskan tentang apa itu PPAT Sementara.
- (10) Sebutkan macam-macam akta PPAT.

Soal C :

- (1) SAAT KAPAN SKMHT BERLAKU 1 BULAN DAN 3 BULAN ALASANNYA
- (2) APABISA PENOMORAN AKTA SKMHT DAN APHT SEBELUM PK BANK ALASANNYA
- (3) DIMANA DIATUR TENTANG HAK TANGGUNGA

Selamat Ujian

5. PERATURAN JABATAN NOTARIS



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN

Jl. Pancasila No. 10 Padang Telp. 0751 – 27404, Fax. 0751 - 34605
Laman. www.fhuk.unand.ac.id Email. mkn.unand@gmail.com

UJIAN AKHIR SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2017/2018

Mata Kuliah : PJN/PPAT
Dosen : Dr. Azmi Fendri, SH., M.Kn
Kelas : Reguler Mandiri A 2017
Hari/Tgl : Sabtu / 27 Januari 2018
Waktu : 90 (sembilan puluh) menit
Sifat Ujian : OPEN BOOK

Soal :

1. Notaris A telah menjalankan jabatan selama 3 tahun yang berkedudukan di Kota Padang. Pada suatu kesempatan Notaris A terpilih sebagai anggota legislatif untuk Kota Padang. Setelah melalui prosesi sumpah jabatan maka mulailah notaris A menjalankan jabatan sebagai anggota legislatif Kota Padang. Pada saat akan dilantik sampai menjalankan jabatan sebagai anggota legislatif, Notaris A tidak pernah mengajukan permohonan cuti sebagai Notaris.
 - a. Jelaskan apa yang seharusnya dilakukan oleh Notaris A sebelum memutuskan untuk menjadi anggota legislatif dan bagaimana prosedurnya. Jawaban disertai dengan dasar hukumnya.
 - b. Terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Notaris A, tindakan hukum apa yang dapat dijatuhkan dan bagaimana prosedur penjatuhan sanksinya!
2. Notaris B yang berkedudukan di Kota Padang akan memasuki masa pensiun sebagai Notaris sehingga sebelum berakhirnya masa jabatan, notaris yang bersangkutan harus melaksanakan kewajiban-kewajiban yang syaratkan dalam undang-undang. Sampai dengan berakhirnya masa jabatan (telah berusia 65 tahun), Notaris B tidak menunaikan kewajiban-kewajiban menurut undang-undang.
 - a. Jelaskan kewajiban-kewajiban apa yang harus dilakukan oleh Notaris B sebelum berakhirnya masa jabatan. Jawaban disertai dengan dasar hukumnya.
 - b. Oleh karena Notaris B (yang sudah pensiun) tidak melaksanakan kewajiban yang disyaratkan undang-undang, tindakan apa yang harus dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris terkait dengan protocol Notaris yang pension tersebut

3. Notaris C berkedudukan di Kota Padang atas permintaan para pihak (Pihak Pertama dan Pihak Kedua) membuat perjanjian pengikatan jual beli atas sebidang tanah yang belum bersertipikat yang terletak di Kelurahan Pauh Kecamatan Pauh Kota Padang seluas kurang lebih 1000 m². Setelah akta Pengikatan jual beli dibuat kemudian dibacakan kepada para pihak lalu ditandatangani oleh akta tersebut oleh para pihak, saksi dan Notaris. Tiga bulan setelah akta pengikatan jual beli dibuat, ada pihak lain yang mengklaim bahwa tanah yang menjadi obyek perjanjian pengikatan jual beli merupakan kepunyaannya.

Pertanyaannya :

- a. Apakah Notaris C bertanggung jawab secara hukum atas kerugian yang diderita oleh pihak yang mengklaim sebagai pemilik tanah. Berikan analisis hukum saudara
- b. Jika sekiranya ada dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris C dalam pembuatan akta pengikatan jual, mekanisme apa yang dapat dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan tersebut. Jelaskan jawabannya secara runtut.

5.4 Penelitian Tesis

5.4.1 Jelaskan sistem pembimbingan penelitian tesis pada program studi ini, mencakup informasi tentang: ketersediaan panduan, kebijakan pembimbingan, mekanisme penunjukan pembimbing dan mahasiswa bimbingan, serta proses pembimbingannya.

Sistem Pembimbingan Penelitian Tesis pada Prodi MKn FH Unand mengacu kepada Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 8 Tahun 2018 tentang Kurikulum Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas, dan SOP Prodi MKn FH Unand dengan tahapan sebagai berikut :

1. Mekanisme Penunjukan Pembimbing.

Mahasiswa dibolehkan untuk melakukan Penunjukan Bimbingan dengan ketentuan :

- a. Telah lulus mata kuliah Metode Penelitian dengan nilai minimal B.
- b. Mengisi Blanko Penunjukan Pembimbing
- c. Judul Penelitian telah disetujui oleh Ketua Program
- d. Pembimbing I dan II telah disetujui oleh Ketua Program dan ditetapkan dengan SK Dekan tentang penunjukan pembimbing.

2. Proses Bimbingan.

Mahasiswa dapat melakukan bimbingan tesis dengan ketentuan :

- a. SK Penunjukan Bimbingan telah diterima.
- b. SK Penunjukan Bimbingan telah diberikan kepada Dosen sesuai dengan SK.
- c. Membawa draft proposal tesis.

Setelah melakukan tahapan di atas, mahasiswa melakukan penelitian dan hasil penelitiannya wajib untuk dipresentasikan pada seminar hasil penelitian yang dihadiri oleh Dosen Pembimbing, Dosen Penguji dan sekurang-kurangnya 5 (lima) orang mahasiswa MKn. Seluruh saran dan masukan yang disampaikan pada waktu Seminar Hasil Penelitian harus diperbaiki sebelum mahasiswa yang bersangkutan melaksanakan Ujian Akhir Tesis.

Panduan Penelitian Tesis. Penelitian tesis yang dilakukan oleh setiap mahasiswa Prodi MKn FH Unand dilakukan berdasarkan Buku Pedoman Penelitian dan Penulisan Tesis Prodi MKn FHUA. Buku ini secara memuat secara komprehensif rangkaian kegiatan atau tahapan proses penelitian yang dimulai dari Proposal Penelitian, Seminar Proposal Penelitian, Penelitian, Penulisan Laporan Penelitian, Seminar Hasil Penelitian, Penulisan Tesis, Pedoman Penulisan Sumber Rujukan hingga Ujian Tesis dan Perbaikan Tesis.

Sosialisasi dan Pelaksanaan. Buku Pedoman ini disosialisasikan kepada mahasiswa yang mengajukan usulan judul penelitian guna sebagai persiapan dalam penulisan proposal penelitian jika usulan judul yang disampaikan telah disetujui oleh KaProdi. Tahapan dan seluruh panduan serta sosialisasi yang diuraikan diatas dilaksanakan secara konsisten pada Prodi MKn FH Unand, guna memudahkan mahasiswa dalam memahami proses penelitian tesis serta sebagai salah satu upaya untuk menjamin mutu tesis.

5.4.2 Tuliskan nama dosen pembimbing penelitian tesis dan jumlah mahasiswa yang dibimbingnya pada TS dengan mengikuti format tabel berikut :

No	Nama Dosen Pembimbing Tesis	Pendidikan Tertinggi	Jabatan Akademik Dosen	Banyaknya Mahasiswa yang Dibimbing dan Status Pembimbing	
				Ketua	Anggota
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Prof. Dr. Yuliandri, SH, MH	Doktor	Guru Besar	4	-
2.	Prof. Dr. Zainul Daulay SH, MH	Doktor	Guru Besar	4	-
3.	Prof. Dr. Yulia Mirwati, SH., MH.	Doktor	Guru Besar	4	-
4.	Prof. Dr. Elwi Danil, SH, MH	Doktor	Guru Besar	4	-
5.	Prof. Dr. Saldi Isra, SH, MPA.	Doktor	Guru Besar	3	-
6.	Prof. Dr. Ismansyah, SH, MH	Doktor	Guru Besar	4	-
7.	Prof. Dr. Yaswirman, MA.	Doktor	Guru Besar	4	-
8.	Dr. Yuslim, SH, MH.	Doktor	Lektor Kepala	4	2
9.	Dr. Zefrizal Nurdin, SH, MH.	Doktor	Lektor Kepala	-	4
10.	Dr. Busyra Azheri, SH, MH	Doktor	Lektor Kepala	4	1
11.	Dr. Dahlil Marjon, SH, MH	Doktor	Lektor Kepala	-	3
12.	Dr. Rembrandt, SH, MPd	Doktor	Lektor Kepala	2	4
13.	Dr. Jean Elfardi, SH, MH	Doktor	Lektor Kepala	-	2
14.	Dr. Azmi Fendri, SH, MKn	Doktor	Lektor	4	4
15.	Dr. Yulfasni, SH, MH	Doktor	Lektor	4	-
16.	Dr. Yussy A. Mannas, SH, MH.	Doktor	Asisten Ahli	-	4
Total				45	24

Penjelasan Tabel :

5.4.2.1 : Jumlah maksimum mahasiswa yang dibimbing oleh seorang dosen sebagai pembimbing utama tesis adalah 4 (empat) orang

5.4.2.2 : Jumlah maksimum mahasiswa yang dibimbing oleh seorang dosen pembimbing sebagai anggota adalah 4 (empat) orang

5.4.2.3 : Jabatan akademik dosen sebagai ketua pembimbing adalah Guru Besar dan Lektor Kepala.

5.4.3 Rata-rata lama penyelesaian tugas akhir/tesis pada tiga tahun terakhir : 8 bulan. (Menurut kurikulum tugas akhir direncanakan 2 semester).

5.5 Sistem Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pembelajaran

Untuk setiap aspek pada subbutir 5.5.1 s.d. 5.5.4, uraikan (1) keberadaan *standard operating procedure* (SOP), (2) keberadaan dan keefektifan lembaga/komisi pelaksana, dan (3) mekanisme monev.

5.5.1 Monitoring dan Evaluasi Proses Penyusunan Usul Penelitian dan Pelaksanaan Penelitian Tesis

Kebijakan Monitoring dan Evaluasi Proses Penyusunan Usul Penelitian dan Pelaksanaan Penelitian Tesis pada Program MKn FH Unand mengacu kepada Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 8 Tahun 2018 tentang Kurikulum Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas, dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Prodi MKn FH Unand.

Komisi Pelaksana Monitoring dan Evaluasi Proses Penyusunan Usul Penelitian dan Pelaksanaan Penelitian Tesis dilakukan oleh :

1. Dekan / Wakil Dekan I
2. Koordinator Program Studi
3. Gugus Kendali Mutu (GKM)
4. Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Sub Bagian Akademik dan Kemahasiswaan.
5. Dosen Pembimbing Proposal Tesis

Mekanisme Monitoring dan Evaluasi Proses Penyusunan Usul Penelitian dan Pelaksanaan Penelitian Tesis

Sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 8 Tahun 2018 tentang Kurikulum Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas, dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Prodi MKn FH Unand, maka mekanisme monitoring dan evaluasi penyusunan usul penelitian dan pelaksanaan penelitian tesis dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Mahasiswa telah lulus mata kuliah Metode Penelitian dengan nilai minimal B.
- b. Mengisi Blanko Penunjukan Pembimbing
- c. Judul Penelitian telah disetujui oleh Ketua Program
- d. Pembimbing I dan II telah disetujui oleh Ketua Program dan ditetapkan dengan SK Dekan tentang Penunjukan Pembimbing.
- e. Mahasiswa melakukan proses bimbingan, yang didahului oleh Pembimbing II dan dilanjutkan pada Pembimbing I.
- f. Draft Proposal yang telah disetujui oleh Komisi Pembimbing dilanjutkan pada tahap Seminar Proposal yang dihadiri oleh Komisi Pembimbing dan 3 (tiga) orang Dosen Penguji. Dalam hal tertentu, sesuai dengan tema tesis yang ditulis dimana salah seorang anggota tim penguji bisa ditunjuk dari kalangan profesional (notaris, PPAT, dan dari kalangan perbankan) yang penunjukannya ditetapkan dengan SK Dekan.

Setelah melakukan tahapan di atas, mahasiswa melakukan penelitian dan hasil penelitiannya wajib untuk dipresentasikan pada seminar hasil penelitian yang dihadiri oleh Dosen Pembimbing, Dosen Penguji dan sekurang-kurangnya 5 (lima) orang mahasiswa MKn. Seluruh saran dan masukan yang disampaikan pada waktu Seminar Hasil Penelitian harus diperbaiki sebelum mahasiswa yang bersangkutan melaksanakan Ujian Akhir Tesis.

5.5.2 Monitoring dan Evaluasi Proses Penulisan Tesis

Kebijakan Monitoring dan Evaluasi Proses Penulisan Tesis

Kebijakan Monitoring dan Evaluasi Proses penulisan tesis didasarkan pada **Standard Operational Procedure** (SOP) MKn FH Unand dan **Buku Pedoman Penelitian dan Penulisan Tesis** Prodi MKn FH Unand.

Komisi Pelaksana Monitoring dan Evaluasi Penulisan Tesis dilakukan oleh :

1. Dekan / Wakil Dekan I
2. Koordinator Program Studi
3. Gugus Kendali Mutu (GKM)
4. Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Sub Bagian Akademik dan Kemahasiswaan.
5. Dosen Pembimbing Draft Tesis

Mekanisme Monitoring dan Evaluasi Penulisan Tesis dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan tesis dilakukan oleh mahasiswa berpedoman kepada **Buku Panduan Penulisan Tesis** dengan sistematika sebagai berikut :

a. **Penelitian Hukum Normatif.** Format penulisan terdiri dari :

BAB I Pendahuluan

- 1) Latar Belakang Masalah
- 2) Rumusan Masalah
- 3) Tujuan Penelitian
- 4) Manfaat Penelitian
- 5) Kerangka Teoritis dan Konseptual
- 6) Metode Penelitian ;
 - a) Pendekatan dan Sifat Penelitian,
 - b) Teknik Dokumentasi Bahan Hukum,
 - c) Alat Pengumpulan Bahan Hukum,
 - d) Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum),
- 7) Sistematika Penulisan,

BAB II : Tinjauan Pustaka (diberi judul)

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan (masalah pertama, diberi judul)

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan (masalah kedua, diberi judul)

BAB V : Hasil Penelitian dan Pembahasan (masalah ketiga (jika ada), diberi judul)

BAB VI : Penutup (Kesimpulan dan Saran)

- 8) Daftar Pustaka
- 9) Lampiran
- 10) Daftar Riwayat Hidup

b. Penelitian Hukum Empiris. Format penulisan terdiri dari :

BAB I : Pendahuluan

- 1) Latar Belakang Masalah
- 2) Rumusan Masalah
- 3) Tujuan Penelitian
- 4) Manfaat Penelitian
- 5) Kerangka Teoritis dan Konseptual
- 6) Hipotesis (Jika Ada)
- 7) Metode Penelitian ;
 - a) Pendekatan dan Sifat Penelitian,
 - b) Teknik Sampling (Populasi, Sampel, dan Jenis Sampel),
 - c) Alat Pengumpulan Data,
 - d) Pengolahan Data dan Analisis Data (Kuantitatif dan Kualitatif)
- 8) Sistematika Penulisan Tesis

BAB II : Tinjauan Pustaka (diberi judul)

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan (masalah pertama, diberi judul)

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan (masalah kedua, diberi judul)

BAB V : Hasil Penelitian dan Pembahasan (masalah ketiga (jika ada), diberi judul)

BAB VI : Penutup (Kesimpulan dan Saran)

9) Daftar Pustaka

10). Lampiran

11) Daftar Riwayat Hidup

4. Proposal yang telah disetujui oleh Komisi Pembimbing dilanjutkan dengan tahapan Ujian Seminar Proposal Tesis. Setelah dinyatakan lulus dalam Ujian Seminar Proposal serta memperbaiki sesuai dengan saran oleh Tim Penguji maka mahasiswa melakukan penelitian sesuai dengan Metode Penelitian yang digunakan.
5. Hasil penelitian dalam bentuk draft tesis yang telah disetujui oleh Komisi Pembimbing dibawa ke tahapan Seminar Hasil Penelitian yang dihadiri oleh Komisi Pembimbing, 3 (tiga) orang Dosen Penguji, dan minimal 5 (lima) orang mahasiswa MKn.
6. Mahasiswa yang dinyatakan lulus dalam ujian Seminar Hasil Penelitian harus memperbaiki draft tesis sesuai usulan dan saran, serta mendapatkan persetujuan Komisi Pembimbing untuk selanjutnya mengikuti tahapan Ujian Akhir Tesis.
7. Kegiatan bimbingan mahasiswa dibuktikan dengan Kartu Proses Bimbingan yang ditandatangani oleh Pembimbing dan KaProdi sebagai prasyarat untuk melaksanakan

Ujian Akhir.

8. Pelaksanaan Ujian Akhir Tesis dilaksanakan secara tertutup, dan dihadiri oleh Pimpinan Sidang (KaProdi), Komisi Pembimbing, dan 3 (tiga) orang Dosen Penguji.

5.5.3 Monitoring dan Evaluasi Kelayakan Dosen Dalam Proses Pembimbingan Penulisan Tesis

Komisi Pembimbing terdiri dari 2 (dua) orang, yaitu Pembimbing I dan Pembimbing II. Judul penelitian yang diajukan oleh mahasiswa akan diinventarisasi oleh KaProdi sesuai dengan minat dan keinginan mahasiswa. Hasil inventarisasi judul penelitian berikut Komisi Pembimbing oleh KaProdi akan disampaikan kepada Dekan untuk disetujui.

Adapun persyaratan penunjukan Dosen Pembimbing Tesis adalah :

1. Memiliki jabatan akademik Guru Besar untuk Pembimbing I ; atau
2. Bergelar doktor dengan jabatan lektor kepala atau lektor untuk Pembimbing I atau II.
3. Bergelar doktor dengan jabatan asisten ahli untuk Pembimbing II.

Apabila dalam proses bimbingan tesis terdapat kendala, maka mahasiswa dapat menyampaikan kepada KaProdi untuk dicarikan solusi atau jalan keluarnya.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap proses pembimbingan dilakukan oleh Dekan / Wakil Dekan I, KaProdi dan Gugus Kendali Mutu (GKM).

5.5.4 Monitoring dan Evaluasi Ujian Akhir Studi Magister.

Ujian akhir Program MKn FHUK Unand sebagaimana yang ditetapkan dalam SOP, adalah ujian tesis yang berkaitan dengan penguasaan kompetensi keilmuan program studi secara komprehensif yang mengacu pada tesis yang dibuat oleh mahasiswa yang bersangkutan. Ujian akhir baru bisa dilakukan apabila mahasiswa yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademis dan administratif. Adapun pelaksanaan ujian akhir dapat dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Tesis yang bersangkutan telah di setujui oleh Komisi Pembimbing.
2. Telah lulus semua mata kuliah yang diambil dengan IPK minimal sekurang-kurangnya 3,00 dan tidak mempunyai nilai C lebih dari 2 matakuliah teori. Khusus untuk matakuliah keprofesian (Teknik Pembuatan Akta) nilai minimal adalah B.
3. Ujian akhir dilakukan secara tertutup dalam bentuk ujian lisan selama \pm 90 menit yang

dipimpin oleh Ketua Program.

4. Susunan tim penguji ujian akhir terdiri dari sama dengan seminar proposal dan seminar hasil yaitu komisi pembimbing 2 (dua) orang dan penguji 3 (tiga) orang dan ditambah dengan Ketua Program.
5. Ujian akhir baru dapat dilakukan apabila telah dihadiri minimal oleh 3 (tiga) orang tim penguji yaitu salah seorang anggota Komisi Pembimbing dan 2 (dua) orang penguji.
6. Yudisium kelulusan didasarkan pada pencapaian Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dan masa studi, sebagai berikut :
 - a. Dengan Pujian (cumlaude), bila
 - (1) IPK sama atau lebih dari $\geq 3,75$
 - (2) Tidak mempunyai nilai mata kuliah lebih rendah dari B
 - (3) Menyelesaikan pendidikan Program Magister dalam waktu tidak lebih dari 4 semester
 - b. Sangat Memuaskan, bila
 - (1) IPK sama atau lebih daripada $\geq 3,50$
 - (2) Tidak mempunyai nilai mata kuliah lebih rendah dari B
 - (3) Menyelesaikan pendidikan Program Magister dalam waktu tidak lebih dari 6 semester
 - c. Memuaskan, bila IPK sama atau lebih dari $\geq 3,00$

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan ujian akhir berdasarkan SOP dan evaluasi kualitas tesis dilakukan oleh KaProdi dan Gugus Kendali Mutu (GKM).

5.6 Upaya Peningkatan Suasana Akademik

Berikan gambaran yang jelas mengenai upaya dan kegiatan untuk menciptakan suasana akademik yang kondusif di lingkungan PS, khususnya mengenai hal-hal berikut:

5.6.1 Uraikan kebijakan tentang suasana akademik (otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, kemitraan dosen-mahasiswa)

Kebijakan tentang suasana akademik pada Prodi MKn FH Unand berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas, Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 25 Tahun 2012 tentang Kode Etik Dosen Universitas Andalas, Peraturan Rektor Nomor 24 Tahun 2012 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tenaga Kependidikan Universitas

Andalas, Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2016 tentang Peraturan Akademik Universitas Andalas, Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kode Etik Mahasiswa, Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 3 Tahun 2016 dan Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor: 13/XIII/A/Unand/2015 tentang Standar Mutu Suasana Akademik Universitas Andalas, serta SOP Prodi MKn FH Unand.

Kebijakan yang dilakukan dalam mendukung suasana akademik yang kondusif terutama berkaitan dengan:

1. **Otonomi Keilmuan**, diwujudkan dengan penunjukkan dosen pengampu matakuliah yang didasarkan atas kompetensi dan kepakaran pada matakuliah yang bersangkutan.
2. **Kebebasan Akademik**, diwujudkan dengan :
 - b. Setiap dosen harus mendapatkan hak kebebasan pengembangan IPTEKS yang sesuai dengan bidangnya.
 - c. Setiap dosen harus mendapatkan hak kebebasan menulis dan menerbitkan buku ilmiah yang sesuai dengan bidangnya.
 - d. Setiap dosen harus mendapatkan hak kebebasan mendemonstrasikan dan mendiskusikan kajian IPTEKS dalam bidangnya sesuai dengan etika dan moral akademik.
 - e. Setiap mahasiswa harus mendapatkan hak kebebasan mendemonstrasikan dan mendiskusikan kajian IPTEKS dalam bidangnya sesuai dengan etika dan moral akademik.

Kebebasan akademik juga diwujudkan dengan memberikan kebebasan kepada setiap dosen untuk melakukan tri dharma perguruan tinggi. Dosen diberikan kebebasan dalam proses belajar mengajar dan teknik penilaian. Dosen juga diberikan motivasi dan kesempatan untuk melakukan berbagai penelitian atau riset berdasarkan keilmuannya serta melakukan pengabdian pada masyarakat. Pola pembiayaan untuk kegiatan ini ada yang diberikan oleh lembaga dalam bentuk kompetitif maupun bekerjasama dengan lembaga atau instansi lain.

3. **Kebebasan Mimbar**, diwujudkan dalam bentuk memberikan kebebasan kepada setiap dosen berkaitan metode pembelajaran dan media yang digunakan dalam proses belajar mengajar dengan waktu yang memadai.
4. **Dalam Hal Kemitraan Dosen-Mahasiswa**, diwujudkan dengan menyediakan ruangan konsultasi berbagai kegiatan berkaitan dengan proses belajar mengajar, kesediaan dosen untuk menyediakan waktu konsultasi pada waktu tertentu di luar

jam perkuliahan, melibatkan mahasiswa dalam penelitian yang dilakukan oleh dosen ataupun kegiatan akademik yang diselenggarakan oleh Prodi. Interaksi dosen dan mahasiswa dalam perkuliahan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dan interaksi di luar kelas dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Interaksi Dosen dan Mahasiswa Dalam Perkuliahan :

- 1) Dosen harus melaksanakan proses pembelajaran yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
- 2) Setiap dosen harus memenuhi kehadiran minimal (90%) dari jumlah total tatap muka perkuliahan.
- 3) Setiap mahasiswa harus memenuhi kehadiran minimal (75%) dari jumlah total tatap muka perkuliahan.

b. Interaksi Dosen dan Mahasiswa Dalam Penelitian :

- 1) Dosen harus melibatkan mahasiswa dalam kegiatan penelitian.
- 2) Dosen harus melibatkan mahasiswa dalam mengkomunikasikan penelitian bersamanya melalui seminar atau pada jurnal ilmiah.
- 3) Dosen harus membimbing mahasiswa dalam penulisan artikel ilmiah yang bersumber dari skripsi, tesis dan disertasi yang akan dipublikasikan pada jurnal ilmiah.

c. Interaksi Dosen dan Mahasiswa Dalam Pengabdian Masyarakat, yaitu dengan melibatkan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

d. Interaksi Akademik Dosen dan Mahasiswa di Luar Kelas, yaitu dosen dan mahasiswa harus berintegrasi baik secara langsung maupun melalui media informasi dan komunikasi secara tidak langsung dalam proses akademik.

5.6.2 Jelaskan ketersediaan dan kelengkapan jenis prasarana (laboratorium, ruang kerja mahasiswa, ruang seminar, perpustakaan, *common room*, prasarana olah raga dan seni, ibadah dll.), sarana (koleksi jurnal ilmiah dan buku, akses internet, fasilitas komputer, fasilitas lab., sarana olah raga dan seni dll.) dan dana yang memungkinkan terciptanya interaksi akademik antara sivitas akademika

KETERSEDIAAN DAN KELENGKAPAN PRASARANA, SARANA DAN DANA

Program MKn FH Unand memiliki prasarana gedung dalam kampus tersendiri, yaitu Kampus Pascasarjana FH Unand yang beralamat di Jalan Pancasila Nomor 10 Padang. Prodi MKn menggunakan prasarana yang terdapat pada kampus tersebut yang memiliki 12 ruang kuliah, terdiri dari 5 ruang berkapasitas 40 – 50 mahasiswa, 1 ruang studio berkapasitas 60 mahasiswa, 2 ruang berkapasitas 30 mahasiswa dan 4 ruang berkapasitas 20 mahasiswa. Seluruh ruang kuliah dilengkapi dengan AC, LCD (*Liquid Colour Display*), OHP (*Overhead Proyektor*).

Pada kampus Prodi MKn FH Unand ini juga terdapat aula yang berkapasitas 150 orang, 1 ruang Guru Besar, 1 ruang KaProdi, 1 ruang Sekretaris Prodi, 1 ruang untuk tenaga administrasi, 1 ruang untuk tenaga keuangan serta 1 ruang untuk pelayanan mahasiswa. Di samping itu juga terdapat ruang dosen serta 3 ruang khusus yang dapat digunakan Dosen dalam proses bimbingan tesis dengan mahasiswa, serta 1 ruang Labor Akta.

Untuk perpustakaan, seluruh mahasiswa Unand, S1, S2 dan S3 dapat menggunakan Perpustakaan Pusat yang dimiliki oleh Universitas Andalas. Pada tingkat fakultas, Fakultas Hukum Unand juga memiliki perpustakaan yang dapat digunakan oleh seluruh mahasiswa Fakultas Hukum baik S1, S2 dan S3. Khusus untuk mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Unand, di Kampus Pascasarjana FH Unand ini juga terdapat perpustakaan yang dapat digunakan oleh mahasiswa Prodi MKn FH Unand. Koleksi karya ilmiah pada perpustakaan ini antara lain adalah buku, jurnal, dan sumber – sumber lain. Perpustakaan ini dilengkapi dengan ruang baca, e-journal science dan proquest, serta fasilitas komputer dan internet untuk mengakses bahan – bahan hukum ataupun jurnal online.

Dalam hal sarana olahraga, FH Unand mempunyai lapangan basket dan bulutangkis yang terletak di Kampus FH Limau Manis, fasilitas olahraga ini dapat digunakan oleh seluruh mahasiswa FH Unand tingkat S1, S2 dan S3. Untuk kegiatan organisasi kemahasiswaan pada kampus Prodi MKn FH Unand juga terdapat 1 ruangan untuk Ikatan Mahasiswa Kenotariatan (IMK). Kampus Prodi MKn juga dilengkapi dengan Musholla sebagai fasilitas tempat ibadah, Kantin, 1 ruang *security*, 1 *pantry*, 2 toilet wanita dan 2 toilet pria, serta area parkir. Seluruh area Kampus Prodi MKn FH Unand telah dilengkapi dengan *Closed Circuit*

Television (CCTV).

Untuk mendukung terciptanya interaksi akademik antar civitas akademika juga telah dialokasikan dana melalui RKKL Fakultas dan Program Studi melalui DIPA Universitas.

5.6.3 Jelaskan interaksi akademik berupa program dan kegiatan di dalam dan di luar proses pembelajaran, yang dilaksanakan baik di dalam maupun di luar kelas, untuk menciptakan suasana akademik yang kondusif (misalnya seminar, simposium, lokakarya, bedah buku, penelitian bersama, pengenalan kehidupan kampus, dan temu dosen-mahasiswa-alumni).

Interaksi akademik yang dilakukan oleh Prodi MKn FH Unand untuk menciptakan suasana akademik yang kondusif adalah :

1. **Proses pembelajaran di dalam kelas.** Hal ini dilakukan dengan melakukan interaksi secara aktif dengan mahasiswa, serta membahas isu – isu hukum atau permasalahan hukum yang terkait dengan substansi mata kuliah, dan juga menerapkan metoda pembelajaran dengan pola diskusi, pemberian tugas terstruktur, *small group discussion*, *student centered learning* ataupun dengan *problem based learning*. Untuk mahasiswa pascasarjana, metode pembelajaran seperti yang tersebut diatas akan membantu mahasiswa untuk memahami suatu isu hukum atau masalah hukum dengan baik dan cepat.
2. **Proses pembelajaran di luar kelas.** Suasana akademik masih dapat dilakukan mahasiswa di luar kelas dengan melakukan diskusi pada di beberapa tempat dalam area kampus diantaranya, lobby kuliah, ruang dosen dan kantin. Kegiatan akademik di luar kelas dengan seminar, lokarkarya, diklat ataupun bedah buku melibatkan mahasiwayang juga dilakukan oleh Prodi MKn FH Unand, diantaranya adalah :
 - a. Seminar Nasional : Quo Vadis Pendidikan Kenotariatan dan Profesi Notaris. Diselenggarakan oleh Ikatan Mahasiswa Kenotariatan FH Unand, dengan narasumber Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU). Diselenggarakan pada 29 November 2017.
 - b. Kuliah Umum dalam rangka orientasi mahasiswa baru program pascasarjana FH Unand. Diselenggarakan pada 25 Agustus 2018.

- c. Kuliah Umum : Profesionalisme Notaris Dalam Memberikan Kepastian Hukum Kepada Masyarakat. Dengan narasumber Ketua Umum Ikatan Notaris Indonesia. Diselenggarakan pada 31 Agustus 2018.
- d. Pendidikan dan Pelatihan Notaris Pembuat Akta Koperasi. Dengan narasumber Asisten Deputi Perundang-undangan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI. Diselenggarakan pada 20 September 2018.

Kegiatan pembelajaran di luar kelas juga dilakukan dengan melibatkan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Dosen. Pengelola Prodi MKn juga mengadakan diskusi dan dialog interaktif dengan mahasiswa mengenai proses PBM dan pelayanan akademik dalam kegiatan *Public Complain* yang dikemas dalam bentuk acara *Coffee Morning*.

5.6.4 Jelaskan upaya PS untuk mengembangkan perilaku kecendekiawanan dalam hal kepedulian terhadap lingkungan dan kemampuan untuk memberikan tanggapan dan solusinya.

Upaya yang dilakukan oleh Prodi MKn FH Unand untuk mengembangkan perilaku kecendekiawanan dalam hal kepedulian terhadap lingkungan dan kemampuan untuk memberikan tanggapan dan solusinya adalah dengan Metode pembelajaran pada Proses Belajar Mengajar (PBM), penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang melibatkan mahasiswa.

A. Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan

Prodi MKn FH Unand melakukan kegiatan bakti sosial dalam bentuk memberikan sumbangan pada masyarakat yang terkena musibah / bencana alam, serta mengelola infaq dan zakat profesi dosen / tenaga kependidikan untuk didistribusikan kepada yang berhak menerima.

B. Pelestarian Lingkungan

Prodi MKn FH Unand melakukan kegiatan penanaman pohon pelindung dan perawatan tanaman serta menerapkan aturan larangan merokok di area kampus.

C. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Prodi MKn FH Unand memberikan beasiswa kepada mahasiswa yang

berprestasi, baik secara akademik maupun non akademik.

D. Kegiatan Penanggulangan Masalah Ekonomi, Politik, Sosial Budaya dan Lingkungan

Prodi MKn FH Unand memfasilitasi dalam bentuk konsultasi hukum kepada masyarakat, terutama sekali kepada masyarakat yang kurang mampu.

Metode Pembelajaran. Dengan metode pembelajaran yang dilakukan oleh Dosen Prodi MKN FH Unand, sebagaimana yang diuraikan pada point **5.6.3**, mahasiswa dibiasakan untuk membahas masalah dan isi hukum dengan berfikir ilmiah dan menyampaikan pendapatnya dengan dasar hukum dan logika hukum yang tepat. Menyampaikan pendapat dan tanggapan dalam forum kelas ini juga melatih kemampuan mahasiswa dalam memberikan pendapat dan tanggapan di forum yang lebih besar seperti seminar dan konferensi nasional.

Penelitian. Mahasiswa dan dosen diberikan pemahaman nilai – nilai kejujuran dalam suatu karya ilmiah dan plagiat adalah suatu penggaran di dunia akademik.

Pengabdian Masyarakat . Dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun, yang dalam pelaksanaannya selalu melibatkan mahasiswa. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah selain pengabdian pada masyarakat sekaligus menjadi sarana belajar bagi mahasiswa dalam mengimplementasikan ilmu yang telah didapatkan pada perkuliahan. Dengan terlibatnya mahasiswa dalam kegiatan pengabdian masyarakat, mahasiswa mampu mencerna, menganalisis dan memberikan tawaran solusi terhadap permasalahan-permasalahan sosial kemasyarakatan.



STANDAR 6 PEMBIAYAAN, PRASARANA, SARANA, DAN SISTEM INFORMASI

IIIA

Borang Akreditasi Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Andalas

6.1 Pengelolaan Dana

Keterlibatan aktif program studi harus tercerminkan dalam dokumen tentang proses perencanaan, pengelolaan dan pelaporan serta pertanggungjawaban penggunaan dana kepada pemangku kepentingan melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel.

Jelaskan keterlibatan PS dalam perencanaan anggaran dan pengelolaan dana.

Perencanaan anggaran Prodi MKn FH Unand dijabarkan ke dalam Renca Kerja Anggaran Kementerian / Lembaga (RKA-KL) Fakultas Hukum Unand yang ditetapkan sebelum tahun anggaran berjalan. Perencanaan anggaran prodi ini mengacu pada :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga.
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 501/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Andalas sebagai Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU)
7. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyusunan Pedoman Anggaran Berbasis Program Studi.

Universitas Andalas sebagai salah satu Perguruan Negeri yang mengelola keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) semenjak tahun 2010. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 501/KMK/05/2009 tentang Penetapan Universitas Andalas pada Kementerian Pendidikan Nasional sebagai instansi pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-

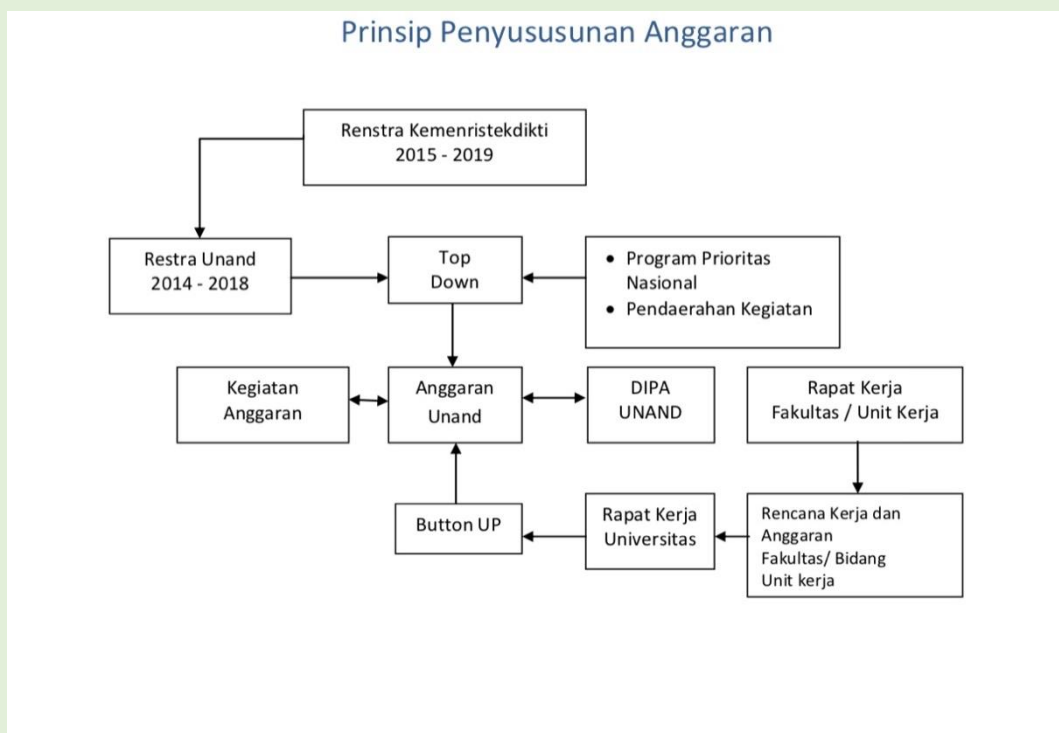
BLU) dengan status PK-BLU Penuh.

Sebagai institusi Pemerintah yang melaksanakan PK-BLU, Universitas Andalas telah menyusun Rencana Strategis Bisnis Tahun 2015-2019 yang memuat Rencana Penerimaan dan Belanja yang bersumber dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), Kegiatan Program dan Indikator agar Visi dan Misi Universitas Andalas, Fakultas hingga Prodi dapat tercapai.

Proses penyusunan anggaran Universitas Andalas bersifat dua arah, dari atas ke bawah (*top down*) dan dari bawah ke atas (*bottom up*). Yang bersifat *top down* adalah kebijakan pimpinan, sedangkan yang bersifat *bottom up* adalah usulan program/kegiatan dan anggaran dari unit kerja terendah.

Berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyusunan Pedoman Anggaran Berbasis Program Studi, maka siklus penyusunan anggaran Universitas Andalas dapat dilihat pada diagram berikut :

Bagan 6.1 : Prinsip Penyusunan Anggaran Universitas Andalas



Penyusunan Rencana Program, Kegiatan dan Anggaran (RPKA) dan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) dimulai dengan dikeluarkannya pedoman penyusunan RPKA dan RBA oleh Rektor. Pedoman berisikan rencana kerja Unand pada tahun ke $n+1$ (tahun depan) sebagai bagian dari RENSTRA Universitas, pagu anggaran sementara

untuk Universitas serta pagu sementara untuk masing-masing Fakultas. standar harga dan standar biaya yang berlaku, dan lain-lain. Pedoman tersebut disampaikan kepada seluruh pimpinan Fakultas.

Pimpinan Fakultas meneruskan pedoman penyusunan RPKA dan RBA tersebut ke Program Studi. Dalam meneruskan pedoman tersebut, Fakultas juga menetapkan pagu sementara untuk setiap Prodi.

Keterlibatan Program Studi adalah setelah menerima pedoman tersebut. Prodi melakukan penyusunan RAB tahun n+1. Dalam menyiapkan RPKA dan RBA, rencana kerja dan renstra Fakultas, standar harga dan standar biaya perlu diperhatikan. Penyusunan dan Penyampaian RPKA dan RBA tahun n+1 Prodi dilengkapi dengan data pendukung seperti TOR, RAB, Spesifikasi Peralatan, Gambar Perencanaan, dan lain-lain. Prodi menyampaikan RPKA dan RBA serta kelengkapannya ke Fakultas dan ditembuskan ke Biro Perencanaan Pengembangan dan Kerjasama Universitas. Fakultas akan melakukan kompilasi dan Rekapitulasi terhadap RPKA dan RBA Prodi tersebut, dan hasilnya disampaikan kepada Rektorat.

Dengan adanya Penyusunan Pedoman Anggaran Berbasis Program Studi yang telah ditetapkan melalui Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 14 Tahun 2016, maka pelaksanaan penganggaran di Universitas Andalas dapat tepat sasaran, tepat waktu, efektif, efisien dan akuntabel.

6.2.1. Tuliskan realisasi perolehan dana dalam juta rupiah, selama tiga tahun terakhir, pada tabel berikut :

Sumber Dana	Jenis Dana	Jumlah Dana (Juta Rupiah)			
		TS-2	TS-1	TS	Rata-Rata per Tahun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Usaha Sendiri	Sewa	6,00	6,00	8,00	20,00
	Jumlah Dana Usaha Sendiri	6,00	6,00	8,00	6,67
Mahasiswa	UKT	2.853,97	4.096,47	4.265,21	11.215,65
	Uang Wisuda	53,00	43,00	65,50	161,50
	Jumlah Dana Mahasiswa	2.906,97	4.139,47	4.330,71	3.792,38
Pemerintah (Pusat &	Gaji Induk	2.173,47	2.362,37	2.373,12	6.908,96
	Uang Makan	256,57	256,50	270,50	783,58

Daerah)	Serdos	271,70	328,15	409,15	1.009,00
	Tunjangan Kehormatan	108,53	114,07	134,89	357,49
	Tunjangan Kinerja	1.018,95	1.019,36	891,0	2.929,32
	BOPTN	649,00	621,61	611,07	1.881,68
	Jumlah Dana Pemerintah	4.478,22	4.702,06	4.689,74	4.623,34
Sumber lain (antara lain dari kegiatan kerjasama atau hibah langsung dari luar negeri)	-	-	-	-	-
Total		7.391,19	8.847,53	9.028,45	8.422,39

6.2.2. Jumlah mahasiswa dan dana operasional program studi dalam tiga tahun terakhir.

2011		2012		2013	
Jumlah Mahasiswa	Jumlah Dana Operasional (Juta Rupiah)	Jumlah Mahasiswa	Jumlah Dana Operasional (Juta Rupiah)	Jumlah Mahasiswa	Jumlah Dana Operasional (Juta Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
308 orang	7.391,19	295 orang	8.847,53	290 orang	9.028,45
Rata-rata dana operasional per mahasiswa per tahun =					28,29
Gunakan rumus: $(B1+B2+B3)/(A1 + A2 + A3)$					

Catatan: Dana operasional adalah seluruh dana yang digunakan oleh PS untuk penyelenggaraan program, termasuk gaji, upah, pembelian bahan dsb. (Kecuali dana untuk pembangunan dan penelitian tesis).

6.2.3. Tuliskan dana penelitian pada tiga tahun terakhir yang melibatkan dosen yang bidang keahliannya sesuai dengan program studi, dengan mengikuti format tabel berikut:

Tahun	Judul Penelitian	Nama Dosen yang Terlibat	Sumber dan Jenis Dana	Jumlah Dana* (Juta Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2016	Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Dalam Tindak Kekerasan Melalui Hukum Adat Sebagai Manifestasi Hak Asal Usul di Sumatera Barat	Prof. Dr. Elwi Danil, SH, MH	Universitas Andalas	50.000.000
2016	Perampasan Aset Sebagai Pidana Tambahan Dalam Kerangka Memiskinkan Koruptor.		Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi	130.000.000
2017	Pelaksanaan Peradilan Pidana Adat oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Sumatera Barat ditinjau dari Asas-asas Peradilan Nasional		Universitas Andalas	38.500.000
2015	Pembatasan Hak Remisi Narapidana Korupsi Pelaku Korupsi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Internasional	Prof. Dr. Zainul Daulay, SH, MH.	Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.	50.000.000
2016	Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengaturan Air dalam Kaitannya dengan Pembangunan Berkelanjutan		Universitas Andalas	50.000.000
2016	Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Liberalisasi Perdagangan Bebas Antara Asean-Cina (Tiongkok) dan Pengaruhnya Bagi Indonesia		Universitas Andalas	50.000.000
2015	Pandangan Kritis Pendaftaran Wakaf Tanah Ulayat kaum Di Sumatera Barat	Prof. Dr. Yulia Mirwati, SH, CN, MH	Universitas Andalas	50.000.000
2016	Model Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Dari Tanah Ulayat di Sumatera Barat		Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi	80.000.000
2016	Sewa menyewa dan alih fungsi tanah PT.KAI di Sumatera Barat		Riset Guru Besar	110.000.000

2016	Sertifikasi sebagai jaminan produk halal berdasarkan undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal	Prof. Dr. Yaswirman, MA	Riset Guru Besar	110.000.000
2017	Pendirian Badan Usaha Milik Nagari Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Nagari di Sumatera Barat. Nomor Kontrak : 34/UN.16.17/PP.UPT/LPPM/2017	Dr. Busyra Azheri, SH, MH	Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.	100.000.000
2017	Pola hubungan Hukum Dalam Pemanfaatan Tanah Ulayat di Kanagarian Ranah Rantau Provinsi Sumatera Barat. Nomor Kontrak : 15/UN.16.17/PP.UPT/LPPM/2017	Dr. Zefrizal Nurdin, SH, MH	Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.	54.500.000
2016	Upaya Peningkatan Daya saing Pelabuhan Teluk Bayur Melalui Optimalisasi Hukum Internasional	Dr. Jean Elvardi, SH, MH	Universitas Andalas	50.000.000
2017	Peningkatan Keamanan di Pelabuhan Teluk Bayur Melalui Kepatuhan Terhadap Hukum Internasional dan Nasional Dalam Kerangka Indian Ocean Rim Association (IORA). Nomor Kontrak : 19/UN.16.17/PP.UPT/LPPM/2017		Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.	30.000.000
2017	Pensertipikatan Tanah Aset Pemda Yang Berasal Dari Tanah Negara, Tanah Hak dan Tanah Ulayat di Sumatera Barat	Dr. Dahlil Marjon, SH, MH	Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.	130.000.000
2015	Implementasi Prinsip Tata Ruang Dalam Perizinan Investasi di Bidang Pertambangan Mineral dan	Dr. Azmi Fendri, SH, MH	Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan	50.000.000

	Batubara Dalam Konteks Otonomi Daerah”, Penelitian Fundamental No.31/H.16/Fundamental/LP PM/2015		Tinggi.	
2016	Implementasi Prinsip Tata Ruang Dalam Perizinan Investasi di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Konteks Otonomi Daerah”, Penelitian Fundamental Tahun Kedua 2016		Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.	50.000.000
2017	Pensertipikatan Tanah Aset Pemda Yang Berasal Dari Tanah Negara, Tanah Hak dan Tanah Ulayat Di Sumatera Barat	Dr. Dahlil Marjon, SH, MH	Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	30.000.000
2015	Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Melalui Penerapan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dan Lingkungan Di Sumatera Barat	Dr. Rembrandt, SH, M.Pd	Universitas Andalas	40.000.000
2018	Penerapan Asas Pembuktian Terbalik Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Lembaga Peradilan di Sumatera Barat	Dr. Yussy Adelina Mannas, SH, MH	Universitas Andalas	30.000.000
Jumlah				1.333.000.000
Rata-Rata per Tahun				63.476.000

* Di luar dana penelitian/penulisan tesis sebagai bagian dari studi lanjut.

6.2.4 Tuliskan dana pelayanan/pengabdian kepada masyarakat pada tiga tahun terakhir dengan mengikuti format tabel berikut:

Tahun	Judul Kegiatan Pelayanan/Pengabdian kepada Masyarakat	Sumber dan Jenis Dana	Jumlah Dana (Juta Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)
2015	Sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar	Universitas Andalas	5.000.000
2016	Sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Nagari Maninjau Kabupaten Agam	Universitas Andalas	5.000.000
2016	Pemberdayaan Majelis Taklim Untuk Menanggulangi Lesbian, Gay, Bisexual dan Transgender di Kec Naggalo	Dipa BLU Universitas Andalas	5.000.000
2017	Sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa d Kanagarian kayu Tanam Kabupaten padang Pariaman	Universitas Andalas	10.000.000
2016	Penyuluhan Hukum Pertanahan: Penguasaan Tanah Bekas Kereta Api/ PT. KAI (Persero)	Dipa BLU Universitas Andalas	5.000.000
2016	Pembekalan Program Anti Korupsi kepada Perangkat Nagari Simawang Kab. Simawang	Prodi	5.000.000
2015	Sosialisasi Pelecehan Pornografi Terhadap Bundo Kandung Nagari Panyalaian Kabupaten Tanah Datar	Universitas Andalas	5.000.000
2016	Sosialisasi Perlindungan Hukum Korban KDRT Terhadap Bundo Kandung Nagari Panyalaian Kabupaten Tanah Datar	Universitas Andalas	5.000.000
2016	Sosialisasi Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kanagarian Lubuak Batingkok Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota.	Universitas Andalas	10.000.000
2017	Kegiatan Pelatihan Pencegahan Pornografi dan	Universitas Andalas	5.000.000

	Kejahatan Seksual Bagi Ibu Ibu PKK Kelurahan Lubuk Buaya Kecamatan Koto Tengah.		
2015	Sosialisasi tentang Perlindungan Lingkungan Hidup dari Aspek Hukum Pada masyarakat Desa Rimbo.	Universitas Andalas	5.000.000
2016	Kegiatan Pelatihan Penanggulangan Penyalagunaan Narkotika dan Bahan Psicotropika Pada Masyarakat	Universitas Andalas	5.000.000
2016	Kegiatan Pelatihan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Bundo Kandung di Kanagarian Lubuk Batangkok Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota	Universitas Andalas	10.000.000
2017	Sosialisasi Undang – Undang Nomor Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Prosedur Pendaftaran Merek Pada Masyarakat Kelompok UKM Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam	Universitas Andalas	10.000.000
2015	Penyelesaian Sengketa Tanah Pusako	DIPA MKn FH Unand	20.000.000
2015	Sertifikat Ganda Terhadap Hak Milik Atas Tanah	Pribadi	5.000.000
2015	Klausula Akta Notaris Sehubungan Yayasan Setealah Berlakunya Undang-Undang Yayasan	Notaris	5.000.000
2015	Penyuluhan Hukum tentang Desa, KDRT, Perkawinan dan Pengadaan Tanah di Solok Selatan	DIPA Universitas Andalas	5.000.000
2016	Penyuluhan Hukum tentang Desa, KDRT, Perkawinan dan Pengadaan Tanah di Pasaman	Bagian Hukum Perdata FH Universitas Andalas	5.000.000
2016	Penyuluhan Hukum Penyewaan Tanah Kereta Api Oleh Masyarakat di Payakumbuh	Universitas Andalas	5.000.000

2017	Penyuluhan Hukum Menyangkut Tanah Hak Pakai Untuk Pembangunan Kampus IAIN Padang	Notaris	5.000.000
2017	Penyuluhan Hukum Menyangkut Tanah-Tanah PT. KAI (Persero) di Sawah Lunto	Universitas Andalas	5.000.000
2017			
Jumlah			145.000.000
Rata-Rata per Tahun			6,500.000

6.3 Prasarana

6.3.1. Tuliskan data ruang kerja dosen tetap dengan mengikuti format tabel berikut:

Ruang Kerja Dosen	Jumlah Ruang	Jumlah Luas (m ²)
(1)	(2)	(3)
Satu ruang untuk lebih dari 4 dosen	-	(a) 0
Satu ruang untuk 3 - 4 dosen	-	(b) 0
Satu ruang untuk 2 dosen	-	(c) 0
Satu ruang untuk 1 dosen (bukan pejabat struktural)	-	(d) 40
Total		(t) 40

6.3.2 Jelaskan ketersediaan tempat kerja dan fasilitas internet (*bandwidth*) untuk mahasiswa program magister.

Prodi MKn FH Unand menyediakan tempat kerja dan ruang baca bagi mahasiswa.

Ruang kerja khusus bagi mahasiswa juga dapat menggunakan ruang sekretariat organisasi mahasiswa Ikatan Mahasiswa Kenotariatan (IMK). Ruangan ini dilengkapi dengan AC, komputer, printer, meja rapat, dan kursi-kursi. Selain berfungsi sebagai ruangan sekretariat IMK, ruangan ini juga dapat digunakan oleh mahasiswa MKn Unand untuk tempat berkumpul, berinteraksi dan berdiskusi di antara sesama mahasiswa. Aktifitas kegiatan mahasiswa lainnya juga dilaksanakan di ruang Labor Akta. Labor Akta tersebut digunakan mahasiswa untuk praktik membuat akta dan terkadang juga digunakan sebagai tempat diskusi.

Ruang baca terdapat pada Perpustakaan Pascasarjana yang berada di area Kampus MKn Unand, dan telah dilengkapi dengan fasilitas internet. Mahasiswa juga dapat berdiskusi pada ruang – ruang kelas selama tidak digunakan untuk perkuliahan.

Fasilitas internet yang disediakan dalam bentuk hot spot tersebar di beberapa titik dan dapat diakses secara bebas oleh mahasiswa. Pada tahun 2018 ini *bandwith* internet yang dilanggan oleh Universitas Andalas adalah sebesar 1,7 Gbps, dengan kombinasi 1,5 Gbps dilayani oleh PT. Telkom, Tbk dan 200 Mbps dari PT Indosat, Tbk. Sesuai dengan perkembangan teknologi dan kemampuan Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (LPTIK) Unand, saat ini pembagian kuota tidak lagi dilakukan berdasarkan *router* yang ada pada setiap gedung, tetapi langsung kepada perangkat yang terhubung dengan jaringan. Setiap perangkat dijaminakan penggunaan *bandwith* sebesar 12 Mbps, yang artinya setiap user di Unand diberikan akses ke internet melalui jaringan Unand sampai 12 Mbps per orang. Dengan kapasitas internet yang tersedia di Unand saat ini adalah 1.700 Mbps dan jumlah mahasiswa sekitar 28.358 orang, maka *bandwith* per mahasiswa Unand adalah 59,95 Kbps.

6.3.3 Tuliskan data prasarana (kantor, ruang kelas, ruang laboratorium, studio, ruang perpustakaan, kebun percobaan, dsb. kecuali ruang dosen) yang dipergunakan PS dalam proses belajar mengajar dengan mengikuti format tabel berikut:

No	Jenis Prasarana	Jumlah Unit	Total Luas (m ²)	Kepemilikan		Kondisi		Utilisasi (Jam/Minggu)
				SD	SW	Terawat	Tidak Terawat	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Prasarana Universitas								
1.	Kantor Rektorat	1	4000	√	-	√	-	45 jam / minggu
2.	Gedung Convention Hall	1	300	√	-	√	-	45 jam / minggu
3.	Auditorium	1		√	-	√	-	45 jam / minggu
4.	Perpustakaan	1	6000	√	-	√	-	45 jam / minggu
5.	Pusat Kegiatan Mahasiswa	1	1000	√	-	√	-	45 jam / minggu
Prasarana Fakultas								
1.	Dekanat	1	574	√	-	√	-	45 jam / minggu
2.	Ruang Seminar	1	105	√	-	√	-	45 jam / minggu
3.	Ruang Bapem	1	18	√	-	√	-	45 jam / minggu
4.	Ruang <i>Center of International and Alumni Relation</i> (CIAR)	1	27	√	-	√	-	45 jam / minggu
5.	Ruang Peradilan Semu	5	380	√	-	√	-	25 jam / minggu

6.	Perpustakaan	1	240	√	-	√	-	45 jam / minggu
7.	Ruang Serba Guna	1	980	√	-	√	-	45 jam / minggu
Prasarana Program Studi MKn								
1	Ruang Ketua Program	1	24 m ²	√	-	√	-	25 jam/minggu
2	Ruang Akademik dan Kemahasiswaan	1	45 m ²	√	-	√	-	54 jam/minggu
3	Ruang Administrasi Umum dan Keuangan	1	15 m ²	√	-	√	-	54 jam/minggu
4.	Gedung Aula	1	300 m ²	√	-	√	-	10 jam / minggu
5.	Ruang Perpustakaan	1	200 m ²	√	-	√	-	54 jam/minggu
6.	Labor Akta	1	20 m ²	√	-	√	-	54 jam/minggu
7.	Ruang Kelas	12	720 m ²	√	-	√	-	29 jam / minggu

Keterangan: SD = Milik PT/fakultas/jurusan sendiri; SW = Sewa/Kontrak/Kerjasama

6.3.4 Tuliskan data prasarana lain yang menunjang (misalnya tempat olah raga, ruang bersama, ruang himpunan mahasiswa, poliklinik) dengan mengikuti format tabel berikut :

No	Jenis Prasarana Penunjang	Jumlah Unit	Total Luas (m ²)	Kepemilikan		Kondisi		Unit Pengelola
				SD	SW	Terawat	Tidak Terawat	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Prasarana Penunjang Universitas								
1.	Mesjid Nurul Ilmi	1		√		√		Universitas
	Rumah Sakit	1		√		√		Universitas
	Convention Hall	1		√		√		Universitas
	Auditorium	1		√		√		Universitas
	Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM)	1		√		√		Universitas
	Banking Center	3		√		√		Universitas
	Lapangan Bola	1		√		√		Universitas
	Lapangan Futsal	1		√		√		Universitas
	Lapangan Tenis	1		√		√		Universitas

	Lapangan Basket	1		√		√		Universitas
	Lapangan Voli	1		√		√		Universitas
	Sarana Panjat Tebing	1		√		√		Universitas
	Gudang dan Pool Mobil	1		√		√		Universitas
	Pusat Pengolahan Sampah Terpadu (PPSTP)	1		√		√		Universitas
2.	Prasarana Fakultas							
	Meeting Room	1		√		√		Fakultas
	Lapangan Basket	1		√		√		Fakultas
	Ruang Ikatan Mahasiswa	1		√		√		Fakultas
	Musholla	1		√		√		Fakultas
	Kantin	1		√		√		Fakultas
3.	Prasarana Prodi							
	Ruang Pengelola Jurnal	1		√		√		Fakultas
	Ruang Ikatan Mahasiswa Kenotariatan	1		√		√		Fakultas
	Musholla	1		√		√		Fakultas
	Kantin	1		√		√		Fakultas
	Pantry	1		√		√		Fakultas
	Toilet	4		√		√		Fakultas

Keterangan:

SD = Milik PT/fakultas/jurusan sendiri; SW = Sewa/Kontrak/Kerjasama.

6.4 Sarana Pelaksanaan Kegiatan Akademik

6.4.1 Pustaka (buku teks, karya ilmiah, dan jurnal baik dalam bentuk tercetak (*hard copy*) maupun dalam bentuk elektronik (bentuk CD-ROM dan media lainnya).

Tuliskan rekapitulasi jumlah ketersediaan pustaka yang relevan dengan bidang PS dengan mengikuti format tabel 1 berikut :

Tabel 1. Rekapitulasi jumlah ketersediaan pustaka yang relevan dengan bidang PS

Jenis Pustaka	Jumlah Judul	Jumlah Copy
(1)	(2)	(3)
Buku teks	12622	29516
Jurnal nasional yang terakreditasi	10	0
Jurnal internasional yang nomornya lengkap	5	0
Jurnal Internasional yang nomornya tidak lengkap	1	0
Prosiding	10	4
Tesis	818	818
Disertasi	22	22
TOTAL	13488	30360

Isikan jurnal/prosiding seminar yang tersedia/ yang diterima secara teratur (lengkap), terbitan 3 tahun terakhir dengan mengikuti format tabel 2 berikut:

Tabel 2. Jurnal yang tersedia/ yang diterima secara teratur (lengkap), terbitan 3 tahun terakhir

Jenis	Nama Jurnal	Rincian Tahun dan Nomor
(1)	(2)	(3)
Jurnal Terakreditasi Dikti/LIPI	Jurnal Legislasi Indonesia	Vol. 12 No. 3 September 2015
	Jurnal Ilmu Hukum Yustisia	Vol. 22 No. 1 (Januari – Juni) 2015
	Jurnal Ilmu Hukum Yustisia	Vol. 21 No. 2 (Juli – Desember) 2014
	Jurnal Ilmu Hukum Yustisia	Vol. 20 No. 1 (Januari – Juni) 2013
	Jurnal Opini Juris	Vol. 18 Mei – September 2015
	Jurnal Ilmu Hukum Yustisia	Vol. 20 No. 2 (Juli - Desember) 2013
	Jurnal Ilmu Hukum Yustisia	Vol. 19 No. 2 (Juli - Desember) 2012
	Jurnal Ilmu Hukum Yustisia	Vol. 19 No. 1 (Januari - Juni) 2012
	Jurnal Legislasi Indonesia	Vol. 11 No. 4 Desember 2014
	Jurnal Legislasi Indonesia	Vol. 12 No. 2 Juni 2015
	Jurnal Legislasi Indonesia	Vol. 9 No. 3 Oktober 2012
	Jurnal Legislasi Indonesia	Vol. 11 No. 3 Sep. 2014
	Jurnal Legislasi Indonesia	Vol. 12 No. 1 Maret 2015
	Jurnal Bhineka Tunggal Ika	Vol. 1 No. 2 Th. 2013
	Jurnal Hukum Internasional	Vol. 1 No. 2 Januari 2014
	Jurnal Hukum Internasional	Vol. 1 No. 4 Juli 2004
	Jurnal Penelitian Hukum	Vol. 1 No. 1 Sep. 2011
	Jurnal Penelitian Hukum	Vol. 2 No. 1 September 2012
Jurnal Penelitian Hukum	Vol. 2 No. 2 Januari 2013	
Jurnal Penelitian Hukum	Vol. 2 No. 3 Mei 2013	
Jurnal Hukum Kesehatan	Vol. 2 No. 4 Tahun 2009	

Adliya Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan	Vol. 8 No. 2 Juli- Desember 2014
Jurnal Ilmu Hukum	Vol. 4 No. 1 September - Januari 2014
Jurnal Hukum Militer	Vol. 2 No. 1 Nov 2014
Dignitas Jurnal Hak Asasi Manusia	Vol. V No. 11 2008
Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi Delicti	Vol. 11 No. 4 April s/d Agus 2005
Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi Delicti	Vol. X No. 2 Juli s/d Desember 2012
Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi Delicti	Vol. XI No. 3 Januari s/d Juni 2013
AI - Risalah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum	Vol. 13 No. 2 Desember 2013
AI - Risalah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum	Vol. 13 No. 1 Juni 2013
Jurnal Cita Hukum	Vol. 1 No. 1 Juni 2014
Jurnal Keadilan Progresif Prog. Studi Ilmu Hukum	Vol. 3 No. 1 Maret 2012
Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung	
Legality Jurnal Ilmiah Hukum FHUK Univ.	Vol. 20 No. 20 Sep s/d Feb. 2013
Muhammadiyah Malang	
Jurnal Hukum Prioritas FHUK. Univ. Trisakti	Vol. 3 No. 2 Th. 2013
Jurnal Hukum & Pembangunan FHUK Univ. Indonesia	Tahun ke 39 No. 2 April 2009
Pranata Hukum; Jurnal Hukum Prog Pascasarjana Univ. Bandar Lampung	Vol. 7 No. 1 Januari 2012
Selisik, Jurnal Hukum dan Bisnis	Vol. 1 No. 1 Juni 2015
Jurnal Opini Juris	Vol. 12 Januari - April 2013
Jurnal Opini Juris	Vol. 13 Mei - Agustus 2013
Jurnal Konstitusi	Vol. 1 No. 1 Juli 2004
Jurnal Cita Hukum	Vol. 1 No. 2 Desember 2014
Jurnal Rechts Vinding	Vol. 3 No. 2 Agustus 2014
Jurnal Rechts Vinding	Vol. 4 No. 2 Agustus 2015
Jurnal Konstitusi	Vol. 12 No. 4 Desember 2015
Constitutional Review	Vol. 1 No. 2 Desember 2015
Jurnal Hukum &Pembangunan	Tahun 43 No. 1 Januari 2013
Jurnal Hukum dan Peradilan	Vol. 03 No. 1 Maret 2014
Jurnal Hukum dan Peradilan	Vol. 03 No. 03 Nopember 2014
Minuta. Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan	Vol. 1 No. 1 Th. 2013 periode Maret-Agus
Junal Legislasi Indonesia	Vol. 6 No. 2 Juni 2009
Jurnal Konstitusi	Vol. II No. 1 September 2013
Junal Legislasi Indonesia	Vol. 8 No. 4 Desember 2011
Junal Legislasi Indonesia	Vol 7 No. 1 Maret 2010
Junal Legislasi Indonesia	Vol. 6 No. 3 September 2009

	Jurnal Legislasi Indonesia	vol. 8 No. 1 April 2011
	Jurnal Legislasi Indonesia	Vol. 4 No. 3 September 2007
	Jurnal Hukum Kesehatan	Vol. 1 No. 1 Tahun 2008
	Jurnal Legislasi Indonesia	Vol. 1 No. 1 Juli 2004
	Jurnal Legislasi Indonesia	Vol. 9 No. 2 Juli 2012
	Jurnal Legislasi Indonesia	Vol. 8 No. 3 September 2011
	Jurnal Hukum Kesehatan	Vol. 2 No. 3 Tahun 2009
	Jurnal Legislasi Indonesia	Vol. 8 No. 2 Juni 2011
	Jurnal Legislasi Indonesia	vol. 9 No. 1 April 2012
	Jurnal Legislasi Indonesia	Vol. 3 No. 3 September 2006
	Jurnal Legislasi Indonesia	Vol. 5 No. 4 Desember 2008
	Jurnal Legislasi Indonesia	Vol. 5 no. 1 Maret 2008
	Jurnal Legislasi Indonesia	Vol. 7 No. 3 Oktober 2010
	Jurnal Hukum Internasional	volume 12 Number 1 Oktober 2014
	Jurnal Legislasi Indonesia	Vol. 5 No. 3 September 2008
	Jurnal Legislasi Indonesia	Vol. 7 No. 4 Desember 2010
	Jurnal Legislasi Indonesia	Vol. 7 No. 3 Oktober 2010
	Jurnal Legislasi Indonesia	Vol. 3 No. 4 Desember 20016
	Asy - Syari'ah	Vol. 16 No. 2 Agustus 2014
	Jurnal Hukum dan Peradilan	Vol. 04 No. 02 Juli 2015
	Jurnal Hukum dan Peradilan	Vol. 04 No. 1 Maret 2015
	Jurnal Hukum dan Peradilan	Vol. 04 No. 3 Nopember 2015
	Jurnal Legislasi Indonesia	Vol. 12 No. 4 Desember 2015
Jurnal Internasional	Jurnal Hukum Unternasional	Vol. 2 No. 2 Januari 2005
	Jurnal Hukum Internasional	Vol. 3 No. 1 Oktober 2005
	Jurnal Hukum Internasional	Vol. 3 No. 3 April 2006
	Jurnal Hukum Internasional	Vol. 8 No. 4 Juli 2011
	Jurnal Hukum Internasional	Vol. 10 No. 3 April 2013
	Jurnal Hukum Internasional	Vol. 10 No. 2 Januari 2013
	Jurnal Hukum Internasional	Vol. 11 No. 1 Oktober 2013
	Jurnal Hukum Internasional	Vol. 2 No. 2 Januari 2005

Jika melanggan *e-journal*, agar dilampirkan daftar judul jurnal yang dapat diakses penuh.

1.4.2 Tuliskan peralatan utama yang digunakan di laboratorium (tempat praktikum, bengkel, studio, ruang simulasi, rumah sakit, puskesmas/balai kesehatan, *green house*, lahan untuk pertanian, dan sejenisnya) yang dipergunakan dalam proses pembelajaran di jurusan/fakultas dengan mengikuti format tabel berikut:

No.	Nama Laboratorium	Jenis Peralatan Utama	Jumlah Unit	Kepemilikan		Kondisi		Rata-Rata Waktu Penggunaan (jam/minggu)
				SD	SW	Tera-wat	Tidak Terawat	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Labor Akta	Meja	10	√	-	√	-	16 jam
		Kursi	20	√	-	√	-	16 jam
		Infocus	1	√	-	√	-	16 jam
		White board	1	√	-	√	-	16 jam
		Lemari	2	√	-	√	-	16 jam
		Layar Infocus	1	√	-	√	-	16 jam

Keterangan :

SD = Milik PT/fakultas/jurusan sendiri; SW = Sewa/Kontrak/Kerjasama /Hak Pakai.

6.5 Sistem Informasi

6.5.1 Jelaskan sistem informasi dan fasilitas yang digunakan oleh program studi untuk proses pembelajaran (*hardware, software, e-library, dll.*), administrasi, dan pengambilan keputusan.

Setiap unit kerja pada Prodi MKN FH Unand disediakan fasilitas berupa hardware komputer. Komputer juga terdapat di perpustakaan serta Labor Akta yang diperuntukkan bagi mahasiswa. Komputer yang tersedia di Prodi MKN FH Unand juga dilengkapi dengan software yang mempunyai lisensi, serta didukung dengan software pendeteksi plagiat (*plagiarism detector*). FH Unand juga memiliki perangkat video conference. Untuk melaksanakan pengelolaan institusi berbasis teknologi informasi dan komunikasi, Universitas Andalas melalui Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi menyediakan beragam aplikasi untuk dipakai oleh civitas akademika dan umum, yaitu :

A. Mail Server

Server email berbasis Web.

B. SIA (Sistem Informasi Akademik) dan Portal Akademik

- **Sistem Informasi Akademik** digunakan oleh operator akademik pada setiap fakultas yang terdapat di lingkungan Unand guna melaksanakan proses administrasi seluruh kegiatan perkuliahan dan pembimbingan mahasiswa dan dosen.
- **Portal Akademik**
Portal Akademik bagi Mahasiswa dalam pengelolaan rencana studi, hasil studi dan status pembayaran. Portal akademik bagi Dosen untuk persetujuan rencana studi dan input nilai online, dan bagi orang tua untuk memonitor kegiatan akademik anaknya.

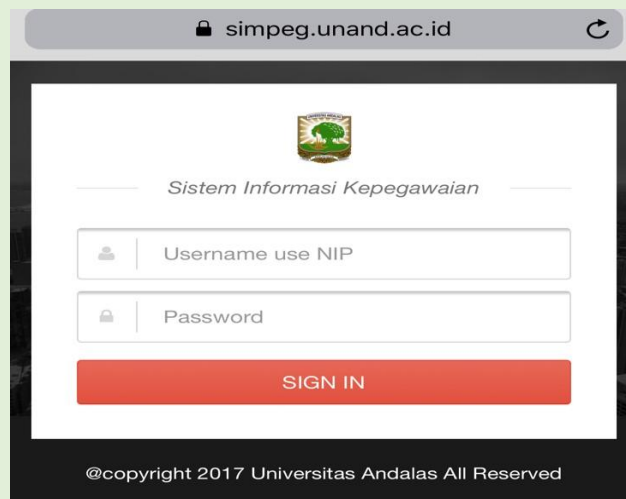
Aktivitas pada Sistem Informasi Akademik diakses dari *front-end* melalui Portal Akademik di alamat <http://portal.unand.ac.id>. Melalui Portal Akademik ini mahasiswa dapat melakukan pengambilan mata kuliah, melihat nilai, melakukan pembimbingan akademik, mengetahui tagihan pembayaran yang harus dilakukan, mengajukan izin istirahat kuliah, dan lain-lain. Sementara bagi dosen, Portal Akademik dapat digunakan untuk mengetahui mata kuliah yang diampu berikut jadwal kuliah dan peserta kuliahnya, melakukan pembimbingan akademik, memasukkan nilai, dan lain-lain. Semua aktivitas dapat dilakukan baik dari jaringan dalam kampus maupun dari luar kampus via internet. Dengan fasilitas pada Sistem Informasi Akademik ini pula, pembayaran uang kuliah mahasiswa bisa dilakukan pada semua cabang Bank yang bekerja sama dengan Unand, karena sudah memanfaatkan fasilitas *host-to-host*.



C. SIMPEG (Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian)

Layanan yang mendokumentasikan seluruh kegiatan kepegawaian mulai dari data pribadi, mutasi dan kinerja pegawai yang diakses melalui portal pegawai.

- Aplikasi sistem informasi gaji (aplikasi GPP).
- Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) Unand yang berisi informasi tentang sumber daya manusia (SDM) yang dapat diakses melalui alamat <https://simpeg.unand.ac.id>. Layanan ini mendokumentasikan seluruh kegiatan kepegawaian mulai dari data pribadi, mutasi, dan kinerja pegawai, yang dapat diakses melalui portal pegawai. Aplikasi ini juga menyediakan modul untuk pengisian dan penilaian Beban Kerja Dosen (BKD) dan Laporan Kinerja Dosen (LKD) serta Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).



D. Registrasi

Aplikasi utama untuk pencatatan biodata, jalur masuk dan pembuatan nomor induk mahasiswa baru sebagai basis data awal sistem informasi akademik. Informasi umum tentang penerimaan mahasiswa baru, di luar program yang dikelola secara nasional, dapat dilihat pada: <http://pmb.unand.ac.id/> . Pada laman ini dapat dilihat jalur dan jadwal penerimaan, tata cara pendaftaran, daya tampung, persyaratan, dan lain-lain. Aplikasi utama untuk pencatatan biodata, jalur masuk dan pembuatan nomor induk mahasiswa (NIM) bagi mahasiswa baru sebagai basis data awal sistem informasi akademik dilakukan melalui tahap Registrasi pada alamat: <http://registrasi.unand.ac.id/> .



E. Pra-Registrasi

Mekanisme penentuan besar Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa baru berdasarkan parameter-parameter yang telah ditentukan dengan mengunggah dokumen terkait. Mekanisme penentuan besar uang kuliah tunggal (UKT) bagi mahasiswa baru berdasarkan parameter-parameter yang telah ditentukan dengan mengunggah dokumen terkait dilakukan melalui tahapan Praregistrasi di alamat: <http://ukt.unand.ac.id/>.



F. Ujian Masuk Program Pascasarjana

Aplikasi pendaftaran / ujian masuk mahasiswa baru program Pascasarjana dengan mekanisme pembelian PIN di bank dan mengisi formulir pendaftaran dengan login pada aplikasi ini sesuai dengan PIN yang di dapat dari bank. Prosedur Pendaftaran Mahasiswa Baru Program Pascasarjana Universitas Andalas ditampilkan pada laman <http://pmb.unand.ac.id>

atau pada link <https://pasca.unand.ac.id/id/pendaftaran/pengumuman> .



G. Sistem Informasi Wisuda

Sistem Informasi Wisuda *Online* Universitas Andalas merupakan sistem yang digunakan calon wisudawan/ti untuk melakukan pendaftaran wisuda yang terhubung dengan Sistem Informasi Akademik (SIA) secara *online*. Sistem informasi wisuda ini dapat dilihat pada laman <http://wisuda.unand.ac.id> .



H. Layanan Jurnal dan Seminar Berbasis *Online*

Untuk meningkatkan desiminasi hasil-hasil penelitian, Unand menyediakan layanan berupa layanan jurnal dan seminar berbasis online. Hal ini dimaksudkan agar semua publikasi ilmiah baik melalui jurnal maupun seminar dapat diakses oleh publik. Layanan jurnal online di lingkungan Unand dapat diakses melalui <http://ejournal.unand.ac.id/>. Saat ini terdapat 42 sub domain jurnal online yang terdistribusi pada masing-masing fakultas. Sedangkan untuk layanan manajemen seminar dan konferensi ilmiah, telah disediakan layanan

untuk tingkat fakultas dan universitas. Pada tingkat universitas informasi dan manajemen seminar dapat diakses melalui <https://seminar.unand.ac.id/> .



I. Sistem Informasi Manajemen Perencanaan dan Anggaran

Aplikasi pengelolaan perencanaan kegiatan tiap unit dengan merujuk kepada Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKAKL) yang dibuat.

- Pengelolaan perencanaan kegiatan dan anggaran tiap unit dengan merujuk kepada Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA K/L) yang dibuat dilakukan melalui Sistem Informasi Manajemen Perencanaan dan Anggaran (<http://siker.kerjasama.unand.ac.id/aplikasi/sipa/>)
- Monitoring dan Evaluasi. Sistem monitoring dan evaluasi anggaran dilakukan menggunakan Sistem Informasi Monitoring Evaluasi SIME (<http://siker.kerjasama.unand.ac.id/aplikasi/monev/>) Pengelola dapat memonitor realisasi anggaran secara online.



J. Sistem Informasi Manajemen Tes Bahasa

Sistem Informasi Manajemen Data Tes Bahasa merupakan sebuah media komunikasi yang dibangun guna memberikan kemudahan akses kepada calon peserta tes bahasa di Pusat Bahasa Universitas Andalas secara online. Dapat diakses pada laman <http://simtb.lc.unand.ac.id/> .

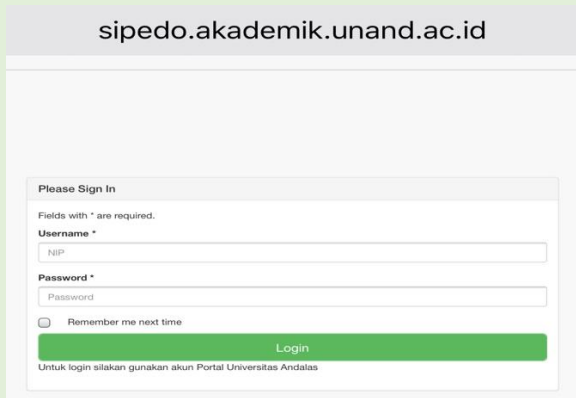


The screenshot shows the login page for the Pusat Bahasa Universitas Andalas Sistem Informasi Manajemen Tes Bahasa. The page has a blue header with the university's logo and name. Below the header is a navigation menu with options like Home, Informasi Jadwal, Pendaftaran Member, Cek Sertifikat Online, and Tentang Kami. The main content area is titled 'Login Member' and contains a form with fields for 'Member ID/ Email' and 'Password'. There is a 'Remember me next time' checkbox and a 'Login' button. A link for 'Atau Anda lupa password?' is also present.

K. Sistem Informasi Pengembangan Dosen (SIPEDO)

Sistem ini digunakan dosen yang ingin mengembangkan diri melalui seminar dan studi lanjut. Dapat diakses melalui laman :

<http://sipedo.akademik.unand.ac.id> .

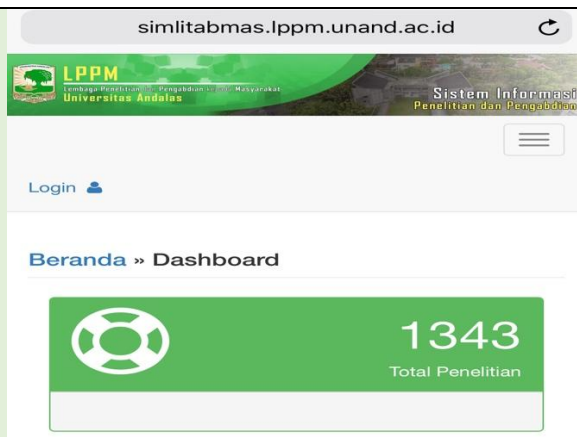


The screenshot shows the login page for sipedo.akademik.unand.ac.id. The page has a white background with a grey header containing the URL. Below the header is a 'Please Sign In' form with fields for 'Username' (NIP) and 'Password'. There is a 'Remember me next time' checkbox and a green 'Login' button. A note at the bottom says 'Untuk login silakan gunakan akun Portal Universitas Andalas'.

L. Sistem Informasi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (SIMLIBTAMAS)

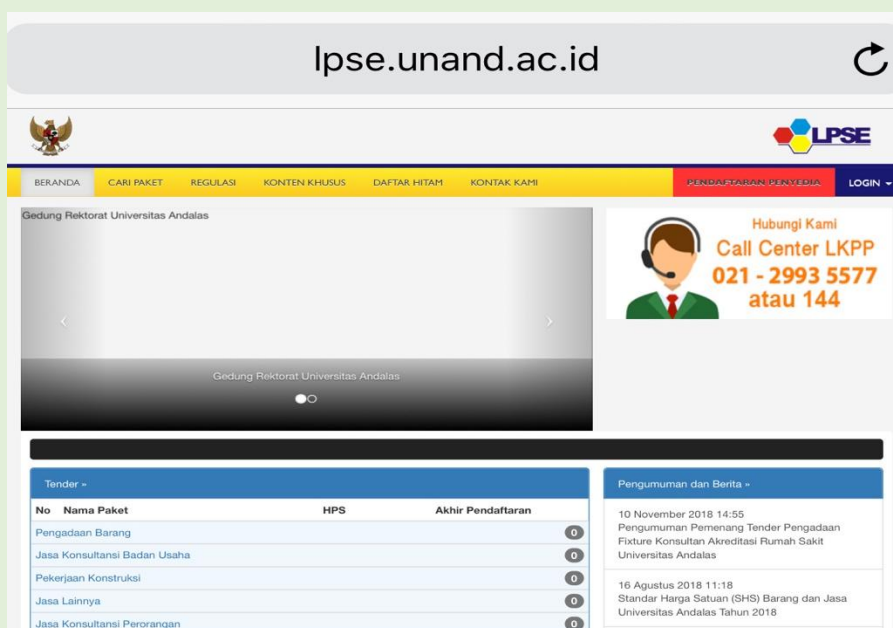
Merupakan sistem yang digunakan dosen untuk mengusulkan penelitian dan pengabdian masyarakat yang didanai institusi. Dapat diakses melalui laman

<http://simlibtamas.lpp.unand.ac.id> .



M. Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Halaman akses informasi mengenai Layanan Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik di lingkungan Universitas Andalas, dapat diakses melalui laman <http://lpse.unand.ac.id> .



N. Katalog Koleksi Perpustakaan Daring (OPAC)

Aplikasi pengelolaan katalog koleksi fisik yang ada di Perpustakaan Universitas Andalas, dapat dilihat pada laman <https://pustaka.unand.ac.id> .



O. SMS dan WA Broadcast

Sistem Informasi yang digunakan sebagai media penyebaran informasi pada lingkungan internal Fakultas Hukum Universitas Andalas.

6.5.2. Beri tanda \checkmark pada kolom yang sesuai dengan aksesibilitas tiap jenis data, dengan mengikuti format tabel berikut:

No	Jenis Data	Sistem Pengelolaan Data			
		Secara Manual	Dengan Komputer Tanpa Jaringan	Dengan Komputer Jaringan Lokal (LAN)	Dengan Komputer Jaringan Luas (WAN)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Mahasiswa				\checkmark
2	Kartu Rencana Studi (KRS)	-	-		\checkmark
3	Jadwal mata kuliah				\checkmark
4	Nilai mata kuliah				\checkmark
5	Transkrip akademik				\checkmark
6	Lulusan				\checkmark
7	Dosen				\checkmark
8	Pegawai				\checkmark
9	Keuangan				\checkmark
10	Inventaris			\checkmark	
11	Perpustakaan				\checkmark



STANDAR 7

PENELITIAN, PELAYANAN / PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN KERJASAMA

IIIA

Borang Akreditasi Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Andalas

7.1 Penelitian Dosen Tetap yang Bidang Keahliannya Sesuai dengan PS dalam Tiga Tahun Terakhir

7.1.1 Agenda dan judul penelitian dosen tetap dan judul tesis

Tuliskan agenda dan judul penelitian dosen tetap mengikuti format tabel berikut :

No	Nama Dosen	Agenda Penelitian	Judul Penelitian	Keterlibatan dengan Jaringan Penelitian*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Prof. Dr. Yuliandri, SH, MH	2015	Problematika Pemekaran Nagari di Kabupaten Sijunjung di Lihat dari Perspektif Hukum.	Universitas Andalas
		2016	Menggagas Peraturan Daerah yang Berpihak Kepada Kepentingan Masyarakat Adat dan Investor di Sumatera Barat	Mahkamah Konstitusi RI
		2017	Kajian Evaluasi UU No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial dengan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan UU No. 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan.	Mahkamah Konstitusi RI
2.	Prof. Dr. Yulia Mirwati, SH, CN, MH.	2015	Pandangan Kritis Pendaftaran Wakaf Tanah Ulayat kaum Di Sumatera Barat	Universitas Andalas
		2016	Model Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Dari Tanah Ulayat di Sumatera Barat	Universitas Andalas
		2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pensertipikatan Tanah Aset Pemda yang Berasal Dari Tanah Negara, Tanah Hak dan Tanah Ulayat di Sumatera Barat. 2. Dialog Pesertipikatan Tanah Aset Pemda Aman, Lancar Sesuai Dengan Ketentuan Hukum di Provinsi Sumatera Barat 3. Pola Penyelesaian Sengketa Adat Salingka Nagari dalam Meningkatkan Pemberdayaaan Nagari Di Sumatera Barat 	Universitas Andalas Universitas Andalas Universitas Andalas

			<p>4. Penataan Ruang Kawasan Nagari Dalam Rangka Mengoptimalkan Pariwisata Di Propinsi Sumatera Barat</p> <p>5. Kepastian Hukum Pensertipikatan Tanah Ulayat Dalam Pemberdayaan Aset Nagari Di Propinsi Sumatera Barat</p>	<p>Universitas Andalas</p> <p>Universitas Andalas</p>
3.	Prof. Dr. Ismansyah, SH, MH	2016	<p>1. Penjatuhan Sanksi Adat dalam Kawin Sasuku menurut Perspektif Adat Minangkabau dikaitkan dengan Hak Asal Usul di Sumatera Barat.</p> <p>2. Model Penanggulangan Tindak Pidana Susila yang Dilakukan oleh Anak melalui Penerapan Sanksi Pidana Adat di Sumatera Barat.</p>	<p>Universitas Andalas</p> <p>Universitas Andalas</p>
4.	Prof. Dr. Elwi Danil, SH, MH	2015	Model Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Oleh Korporasi	Universitas Andalas
		2016	<p>1. Perampasan Aset Sebagai Pidana Tambahan Dalam Kerangka Memiskinkan Koruptor.</p> <p>2. Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak dalam Tindak Kekerasan Melalui Hukum Adat Sebagai Manifestasi Hak Asal Usul di Sumatera Barat.</p>	<p>Universitas Andalas</p> <p>Universitas Andalas</p>
		2017	Pelaksanaan Peradilan Pidana Adat oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Sumatera Barat di Tinjau dari Asas - Asas Peradilan Nasional	Universitas Andalas
5.	Prof. Dr. Zainul Dauly, SH, MH.	2015	Pembatasan Hak Remisi Narapidana Korupsi Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Internasional	Kemenristek Dikti
		2016	Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat Hukum Adat dalam Pengaturan Air dalam kaitannya dengan Pembangunan Berkelanjutan	Universitas Andalas
6.	Prof. Dr. Yaswirman, MA	2016	Sertifikasi Halal Dikaitkan dengan Undang-Undang N0. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal	Universitas Andalas
7.	Dr. Yuslim, SH, MH	2015	Implikasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Terhadap Kopetensi Pengadilan Tata Usaha Negara	Universitas Andalas

		2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pola Pengelolaan Sumber Dayar Air Dalam Rangka Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Pasca Pembatalan UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air Oleh Mahkamah Konstitusi. 2. Pelaksanaan Wewenang Pembentukan Peraturan Nagari Dalam Penyelenggaraan Otonomi Nagari. 	<p>Universitas Andalas</p> <p>Universitas Andalas</p>
		2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengisian Jabatan Perangkat Nagari Pemekaran Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah 2. Potensi Pendapatan Asli Nagari Dalam Membiayai Urusan Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat 	<p>Universitas Andalas</p> <p>Universitas Andalas</p>
8.	Dr. Zefrizal Nurdin, SH, MH	2017	Pola Hubungan Hukum dalam Pemanfaatan Tanah Ulayat di Kanagarian Ranah Rantau Provinsi Sumatera Barat	Universitas Andalas
9.	Dr. Busyra Azheri, SH,MH	2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tinjauan Yuridis Terhadap Pengaturan Kepalabuhanan Berdasarkan Hukum Internasional Dan Nasional Dalam Upaya Peningkatan Daya Saing Pelabuhan Menyambut Keketuaan Indonesia Di Indian Ocean Rim Association (Iora) Tahun 2. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan oleh Perusahaan yang Bergerak di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam di Sumatera Barat 	<p>Kemenristek Dikti</p> <p>Universitas Andalas</p>
		2016	Pendirian Badan Usaha Milik Nagari Berdasarkan Kearifan Lokal.	Universitas Andalas
		2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendirian Badan Usaha Milik Nagari Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Nagari di Sumatera Barat 2. Pemanfaatan Tanah Sebagai Aset Pemerintahan Nagari Dalam Menunjang Pendapatan Nagari di Propinsi Sumatera Barat 	<p>Universitas Andalas</p> <p>Universitas Andalas</p>

10.	Dr. Dahlil Marjon, SH, MH	2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perspektif Hukum Tentang Kebijakan Pemerintah Dalam Mewujudkan Tuntas Sengketa Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Indonesia 2. Prinsip Bussines Judgement Rule (Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas) dalam Mewujudkan Tatakelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) 	Kemenristek Dikti Universitas Andalas
		2016	Pendirian Badan Usaha Milik Nagari Berdasarkan Kearifan Lokal	Universitas Andalas
		2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sewa menyewa dan alih fungsi tanah PT.KAI di Sumatera Barat. 2. Dialog Pesertifikatan Tanah Aset Pemda Aman, Lancar Sesuai Dengan Ketentuan Hukum di Provinsi Sumatera Barat 	Kemeristek Dikti Kemenristek Dikti
11.	Dr. Jean Elfardi, SH, MH	2015	Kajian Yuridis terhadap Bentuk Penyelesaian Sengketa Perbatasan di Wilayah Negara Anggota ASEAN di Tinjau dari Piagam ASEAN dan Implikasinya terhadap Indonesia”	Kemenristek Dikti
		2016	Tinjauan Hukum Terhadap Sistem Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam Rangka Liberalisasi Perdagangan ASEAN dan Pengaruhnya Bagi Indonesia	Kemeristek Dikti
		2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Implemetasi Kebijakan Liberalisasi Penanaman Modal/Investasi di ASEAN dan Pengaruhnya Bagi Indonesia. 2. Pengaturan Hukum Internasional dan Nasional Kepelabuhan Untuk Mengurangi <i>Dwelling Time</i>. 	Universitas Andalas Universitas Andalas
12.	Dr. Rembrandt, SH, M.Pd	2015	Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Melalui Penerapan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan di Sumatera Barat.	Universitas Andalas
		2018	Penerapan Asas Pembuktian Terbalik Dalam Sengketa Konsumen Pada Lembaga Peradilan di Sumatera Barat	Universitas Andalas

13.	Dr. Azmi Fendri, SH, M.Kn	2015	Implementasi Prinsip Tata Ruang Dalam Perizinan Investasi di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (Tahun Pertama)	Universitas Andalas
		2016	1. Implementasi Prinsip Tata Ruang Dalam Perizinan Investasi di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lanjutan Tahun Kedua)	Universitas Andalas
			2. Pemberdayaan Pemerintahan Nagari Untuk Pengelolaan Dana Nagari Dalam Rangka Melaksanakan Otonomi Nagari.	Universitas Andalas
2017	Pemanfaatan Tanah Sebagai Aset Pemerintahan Nagari Dalam Menunjang Pendapatan Nagari di Propinsi Sumatera Barat	Universitas Andalas		
14.	Dr. Yulfasni, SH., MH	2015	a. Implementasi Prinsip Tata Ruang Dalam Perizinan Investasi di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara	Kemenristek Dikti
			b. Tinjauan Yuridis Kepailitan Bank	Universitas Andalas
		2016	1. Implementasi Prinsip Tata Ruang Dalam Perizinan Investasi di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (Tahap II)	Kemenristek Dikti
2017	2. Pendirian Badan Usaha Milik Nagari Berdasarkan Kearifan Lokal.	Universitas Andalas		
	2017	Pendirian Badan Usaha Milik Nagari Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Nagari di Sumatera Barat	Universitas Andalas	
15.	Dr. Yussy A. Mannas, SH., MH.	2017	Konsep Pengelolaan Sumber daya Air dalam Pengembangan Pariwisata berbasis Nagari di Sumatera Barat	Universitas Andalas
		2018	Penerepan Asas Pembuktian Terbalik Pada Sengketa Konsumen di Lembaga Peradilan Sumatera Barat	Universitas Andalas

*Contoh penelitian dengan jaringan internasional: penelitian bidang kehutanan dengan lembaga *Center for International Forestry Research (CIFOR)*, *International Center for Research in Agroforestry (ICRAF)*. Contoh penelitian dengan jaringan nasional: penelitian yang bekerjasama dengan lembaga penelitian nasional (LIPI, BPPT, dll).

Tuliskan judul tesis mahasiswa program magister yang lulus pada tiga tahun terakhir mengikuti format tabel berikut :

No	Nama Mahasiswa	Judul Tesis	Nama Dosen Pembimbing
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Elvi Rahmi Rizal	Perlindungan Nasabah Terhadap Klausula Eksonerasi Pada Perjanjian Kredit Di BCA (Bank Central Asia) Bukittinggi	Dr. Hj. Yulfasni, SH., MH M. Hasbi, SH., MH
2	Nadia Fitri	Eksistensi Kredit Angsuran Sistem Fidusia (Kreasi) Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarandam Padang	Dr. Dahlil Marjon, SH., MH H. Syahrial Razak, SH., MH
3	Dara	Konsekuensi Yuridis Terhadap Perseroan Terbatas Yang Didirikan Oleh Suami Istri Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007	Prof. Dr. H. Elwi Danil, SH., MH Dr. Ferdi, SH., MH
4	Safitri Handayani	Penggunaan Surat Keterangan Waris Sebagai Dasar Balik Nama Sertipikat Hak Milik Di Kota Padang	Dr. Kurnia Warman, SH., M.Hum Bachtiar Abna, SH., SU
5	Dewi Prima Laila Sari	Pencantuman Klausula Terminasi Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Pada Bank Nagari Cabang Utama Padang	Prof. H. Firman Hasan, SH., LLM Gusminarti, SH., MH
6	M. Salim Akbar	Pelaksanaan Pembiayaan Pada Baitul Maal Wattamwil (BMT) Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Di Kec. IV. Koto Kab. Agam	Prof. Dr. Yaswirman, MA Rembrandt, SH., MPd
7	Ali Opera	Kedudukan Hukum Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Penyidikan	Prof. Dr. Ismansyah, SH., MH Yoserwan, SH., MH., LLM
8	Rossy Angraini	Pelaksanaan Pengangkatan, Penggantian Dan Pemberhentian Anggota Direksi Pada PT. BPR Mitra Rakyat Riau	Prof. H. Firman Hasan, SH., LLM Hj. Ulfanora, SH., MH
9	Andryannor N.	Pertanggungjawaban Perdata Perbuatan Melawan Hukum Notaris Sebagai Pejabat Umum (Analisis Kasus Di Pengadilan Negeri Jambi)	Prof. Dr. Ismansyah, SH., MH Dr. H. Busyra Azheri, SH., MH

10	Rahma Dewi	Penggunaan Akta Pernyataan (Aquit) Untuk Pelaksanaan Roya Atas Sertipikat Hak Tanggungan Yang Hilang Di Kota Padang	Dr. Kurnia Warman, SH., M.Hum Hengki Andora, SH., LLM
11	Zulhaimi	Kedudukan Hukum Cover Note Notaris Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan	Prof. Dr. Ismansyah, SH., MH Dr. Azmi Fendri, SH., MKn
12	Gitri Roserizal	Pemeriksaan Notaris Di Kota Padang Dalam Penyidikan Tindak Pidana Terkait Dengan Pemeriksaan Akta Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No: 49/PUU-X/2012	Prof. Dr. Yuliandri, SH., MH Dr. Suharizal, SH., MH
13	Deni Ramon	Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Melanjutkan Pendidikan Antara Pengelola Pendidikan Dengan Dosen Pengajar Pada Perguruan Tinggi Swasta Di Kota Padang	Dr. Zainul Daulay, SH., MH Syahrial Razak, SH., MH
14	Umi Khairiyah	Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Sebagai Akibat Perceraian Di Pengadilan Agama Klas IB Bukittinggi Perkara No. 618/Pdt.g/2012/PA.Bkt	Prof. Dr. Yaswirman, MA Linda Elmis, SH., MH
15	Kiki Nofitri	Pemberian Jaminan Surety Bond Dalam Pembangunan Proyek Pemerintah Oleh PT. Asuransi Ramayana Cabang Padang	Dr. H. Busyra Azheri, SH., MH Frenadin Adegustara, SH., MS
16	Andre Prima Ramanda	Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Terdegradasi Nilai Pembuktiannya Menjadi Akta Di Bawah Tangan	Dr. H. Busyra Azheri, SH., MH Daswirman, SH., MH
17	Doni Hendra	Perubahan Status Persekutuan Komanditer (CV) Menjadi Perseroan Terbatas (PT) (Studi Kasus CV. Rantau Tunas Baru Jadi PT. Rantau Tunas Baru)	Dr. Hj. Yulfasni, SH., MH Hj. Ulfanora, SH., MH
18	Vinaya Karlita	Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Akta Di Kota Padang	Prof. Dr. H. Elwi Danil, SH., MH Dr. Azmi Fendri, SH., MKn

19	Dedi Susanto	Pelaksanaan Perjanjian Pengalihan Utang/Novasi (Over Kredit) Mobil Pada Perusahaan Pembiayaan PT. Batavia Prosperindo Finance, Tbk Cabang Padang	Dr. H. Busyra Azheri, SH., MH Tasman, SH., MH
20	Ilham Syofyana, SH	Kedudukan Saksi Instrumenter Pada Akta Notaris Dalam Kaitannya Dengan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Serta Perlindungan Hukumnya	Prof. Dr. Elwi Danil, SH., MH Ilhamdi Taufik, SH., MH
21	Aflora Vetri, SH	Pembuatan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Untuk Oleh Notaris Untuk Pendaftaran Hak Tanggungan Pada Kantor Pertanahan Kota Padang	Dr. Dahliil Marjon, SH., MH Linda Elmis, SH., MH
22	Reny Anggraini, SH	Legalitas Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED SP) Sebagai Lembaga Simpan Pinjam Di Kabupaten Pelalwan	Dr. Hj. Yulfasni, SH., MH Ulfanora, SH., MH
23	Rahmat Safri, SH	Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Cover Note Dalam Pemberian Kredit Pada Bank Nagari Cabang Payakumbuh	Prof. Firman Hasan, SH., LLM Dr. Azmi Fendri, SH., MKn
24	Nurul Pratama, SH	Penyelesaian Sengketa Pendaftaran Tanah Milik Kaum Melalui Mediasi Di Kota Solok	Dr. Kurnia Warman, SH., M.Hum Hengki Andora, SH., LLM
25	Dadang Solichin, SH	Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Pinjaman Dana Bergulir Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Kota Pariaman	Dr. Ferdi, SH., MH Neneng Oktarina, SH., MH
26	Satri Taufik, SH	Penyelesaian Klaim Asuransi Agunan Kredit Nasabah Pada Bank Nagari Sumatera Barat Cabang Pasar Raya Padang	Prof. Dr. Elwi Danil, SH., MH Neneng Oktarina, SH., MH
27	Yenni Rusvida, SH	Keberadaan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Yang Dijaminkan Dengan Sertipikat Palsu	Prof. Dr. Elwi Danil, SH., MH Yoserwan, SH., MH., LLM

28	Mhd. Deni, SH	Pemanfaatan Tanah Ulayat Untuk Usaha Pertambangan Mineral Di Nagari Simpang Tanjung Nan IV Kabupaten Solok	Dr. Kurnia Warman, SH.,M.Hum Zefrizal Nurdin, SH., MH
29	Nova Ravita, SH	Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Pekerja Dalam Pemborongan Pekerjaan Perbaikan Piping System dan Konstruksi Lainnya Di Area FOC II Kilang PT. Pertamina	Prof. Dr. Zainul Daulay, SH., MH Khairani, SH., MH
30	Edi Martin, SH	Kecakapan Bertindak Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Oleh Notaris Sebagai Perjanjian Awal Peralihan Hak Atas Tanah	Dr. Azmi Fendri, SH., MKn Bachtiar Abna, SH., SU
31	Ethica Honesty, SH	Pelaksanaan Perjanjian Dengan Jaminan Fidusia Pada BPR Dharma Nagari Koto Baru Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130 Tahun 2012	Dr. Dahlil Marjon, SH., MH Syahrial Razak, SH., MH
32	Dwi Anita, SH	Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Menjadi Tanah Untuk Perumahan	Prof. Dr. Yulindri, SH., MH Frenadin Adegustara, SH., MS
33	Titi Dianti Putri, SH	Pembuatan Akta Koperasi Melalui Notaris Sebagai Pejabat Akta Koperasi Di Kota Padang	Dr. Kurnia Warman, SH., M.Hum Syahrial Razak, SH., MH
34	Hendri, SH	Tanggung Jawab Notaris Dalam Hal Terdapat Perbedaan Data Dalam Akta	Dr. H. Busyra Azheri, SH., MH Daswirman, SH., MH
35	Zulmahdi, SH	Perjanjian Kredit Kepemilikan Rumah Pada Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Cabang Padang	Dr. Azmi Fendri, SH., MKn Frenadin Adegustara, SH., MS
36	Dina Wahyuni, SH	Perlindungan Hukum Terhadap Kepentingan Kreditur Dengan Grosse Akta Pengakuan Hutang	Prof. Firman Hasan, SH., LLM Daswirman, SH., MH
37	Riana Permata Shanty, SH	Kewajiban Melekatkan Sidik Jari Penghadap Pada Minuta Akta Berdasarkan Pasal 16 Ayat 1 Huruf C Undang-Undang	Prof. Dr. Ismansyah, SH., MH Dr. Azmi Fendri, SH., MKn

		No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris	
38	Harry Gusman, SH	Penggunaan Ranji Sebagai Pendukung Alas Hak Dalam Pendaftaran Tanah Kaum Di Kota Sawahlunto	Dr. Kurnia Warman, SH., M.Hum Hengki Andora, SH., LLM
39	Dewi Harianti Hatta, SH	Status Pergantian Kelamin Berdasarkan Hak Asasi Manusia Dan Implikasi Terhadap Hak Waris	Prof. Dr. Yaswirman, MA Dr. Azmi Fendri, SH., MKn
40	Yan Akhiar, SH	Pengikatan Jaminan Fidusia Terhadap Benda Bergerak Berupa Stok Barang Pada PT. BRI Cabang Painan	Dr. H. Busyra Azheri, SH., MH Daswirman, SH., MH
41	Mairiko Sabri, SH	Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Pasca Diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013	Prof. Dr. Zainul Daulay, SH., MH Neneng Oktarina, SH., MH
42	Azizah, SH	Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Carana Kiat Andalas Di Kabupaten Agam	Prof. Dr. Yaswirman, MA Neneng Oktarina, SH., MH
43	Lili Lastari, SH	Penyelesaian Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor Sebagai Jaminan Kredit Pada PT. Dipo Star Finance Oleh PT. Asuransi Wahana Tata Cabang Padang	Dr. H. Busyra Azheri, SH., MH M. Hasbi, SH., MH
44	Ilhendri, SH	Kedudukan Hukum Dokumen Pesanan Barang Dalam Dunia Bisnis (Studi Kasus Perkara No. 133/Pdt.G/2014/Pn.Jkt/Pst)	Dr. H. Busyra Azheri, SH., MH Syahrial Razak, SH., MH
45	Weno Kurnia Putra, SH	Pencairan Klaim Bank Garansi Sebagai Jaminan Pembayaran Pembelian Barang Oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Pariaman Kepada PT. Bintang Wahana Persada Melalui Jaminan Asuransi Kredit Indonesia Cabang Padang	Dr. H. Busyra Azheri, SH., MH Syahrial Razak, SH., MH

46	Harminda, SH	Pengaturan Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Lagu Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta	Prof. Dr. Elwi Danil, SH., MH Yoserwan, SH., MH., LLM
47	Ilham, SH	Kedudukan Hukum Syarat Umum (SU) Di Dalam Akta Perjanjian Kredit Notariil Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Wilayah Pekanbaru	Dr. Hj. Yulfasni, SH., MH Rembrandt, SH., MPd
48	Yanuar Anadi, SH	Mediasi Sengketa Tanah Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Pada Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru	Dr. H. Busyra Azheri, SH., MH Daswirman, SH., MH
49	Fitria Kurniawan, SH	Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Pinjaman Tanpa Jaminan Pada Koperasi Simpan Pinjam Lumbuang Pusako Kota Bukittinggi	Dr. Ferdi, SH., MH Syahrial Razak, SH., MH
50	Roni Ermanto, SH	Penentuan Harga Tanah Sebagai Dasar Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Di Kota Pekanbaru	Dr. Yuslim, SH., MH Syofiarti, SH., MH
51	Riva Elfiosa, SH	Kedudukan Keterangan Notaris Dalam Perkara Pidana Dikaitkan Dengan Kerahasiaan Jabatan Notaris	Dr. Azmi Fendri, SH., MKn Yoserwan, SH., MH., LLM
52	Nuraida, SH	Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Tanggungan Atas Tanah Hak Guna Bangunan Yang Berakhir Jangka Waktunya (Studi Pada PT. BPR Faiza Pradani Andi Kota Pekanbaru)	Dr. Kurnia Warman, SH., M.Hum Frenadin Adegustara, SH., MS
53	Akhirudin, SH	Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan	Dr. H. Busyra Azheri, SH., MH M. Hasbi, SH., MH
54	Deri Suryati, SH	Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pada Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Dan	Prof. Dr. Yaswirman, MA M. Hasbi, SH., MH

		Pengadilan Agama	
55	Yanesia Utami, SH	Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Menjalankan Tugas dan Kewenangan	Prof. Dr. H. Elwi Danil, SH., MH Dr. Suharizal, SH., MH
56	Mas'ut, SH	Penerapan Sanksi Terhadap Notaris Yang Terlambat Cuti Saat Diangkat Sebagai Pejabat Negara	Dr. H. Busyra Azheri, SH., MH Neneng Oktarina, SH., MH
57	Burhanuddin, SH	Penyelesaian Sengketa Konsolidasi Tanah Pembangunan Jalan By Pass Teluk Bayar-Bandara Internasional Minangkabau Di Kabupaten Padang Pariaman	Dr. Kurnia Warman, SH., M.Hum Dr. Azmi Fendri, SH., MKn
58	Alex Syaputra, SH	Peran Kantor Badan Pertanahan Kota Sawahlunto Dalam Pendaftaran Tanah Melalui Proyek Operasi Nasional Agraria	Dr. Yuslim, SH., MH Syofiarti, SH., MH
59	Rini Ardianty, SH	Pengikatan Hipotek Kapal Laut Sebagai Jaminan Dalam Perjanjian Kredit	Dr. H. Busyra Azheri, SH., MH Syahrial Razak, SH., MH
60	Feby Feldo, SH	Pelaksanaan Over Credit Kepemilikan Rumah Pada PT. Kerta Jaya Kencana Padang	Prof. Dr. Zainul Daulay, SH., MH Daswirman, SH., MH
61	Yuli Elvita, SH	Balik Nama Sertifikat Berdasarkan Akta Jual Beli Yang Beli Yang Lewat Waktu Di Kabupaten Kampar	Dr. Azmi Fendri, SH., MKn Syofiarti, SH., MH
62	Hikmah, SH	Eksekusi Hak Atas Satuan Rumah Susun Sebagai Jaminan KPR Pada PT. Bank Central Asia (BCA) Cabang Mampang Prapatan Jakarta Selatan	Dr. H. Busyra Azheri, SH., MH Daswirman, SH., MH
63	Yusnelita, SH	Pengikatan Hak Tanggungan Milik Orang Tua Atas Utang Salah Seorang Anak Pada PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk, Melalui Cabangnya Di Danamon Simpan Pinjam Pasar Siteba	Dr. Ferdi, SH., MH Rembrandt, SH., MPd
64	Herry Suksessy, SH	Pembebanan Hipotik Kapal Laut Sebagai Jaminan Kredit Perbankan Di Kota Padang	Dr. H. Busyra Azheri, SH., MH Dr. Kurnia Warman, SH.,

			M.Hum
65	Mutia Latifah, SH	Pemanfaatan Sumber Daya Air Sebagai Kekayaan Nagari Di Nagari Sungai Tanang Kabupaten Agam	Dr. Kurnia Warman, SH., M.Hum Hengki Andora, SH., LLM
66	Mesi Kurnia Sari, SH	Eksekusi Putusan Hakim Dalam Perkara Tanah Adat Sebagai Jaminan Kepastian Hukum Bagi Pencari Keadilan Di Kabupaten Pesisir Selatan	Dr. Kurnia Warman, SH., M.Hum Hengki Andora, SH., LLM
67	Nurferawati, SH	Penggunaan Hak Ingkar Notaris Sebagai Saksi Dalam Perkara Pidana Sehubungan Dengan Akta Yang Dibuatnya	Prof. Dr. Elwi Danil, SH., MH Dr. Azmi Fendri, SH., MKn
68	Mubarok, SH	Perjanjian Pembiayaan Dengan Sistem Penyertaan Modal (Musyarakah) Pada PT. bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Pekanbaru	Prof. Dr. Yaswirman, MA Syahrial Razak, SH., MH
69	Mutia Fadilla, SH	Pemanfaatan Tanah Ulayat Oleh PT. Brantas Cakrawala Energi Untuk Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro Di Nagari Muara Air Kabupaten Pesisir Selatan	Dr. Kurnia Warman, SH., M.Hum Syofiarti, SH., MH
70	Roza Eka Putri, SH	Pencoretan Hak Tanggungan Dalam Praktek Di Kota Bukittinggi	Dr. Yuslim, SH., MH Frenadin Adegustara, SH., MS
71	Yeni Yusera, SH	Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Yang Beritikad Baik Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Di Pengadilan Negeri Solok	Dr. Kurnia Warman, SH., M.Hum Hengki Andora, SH., LLM
72	Epadiana, SH	Pendaftaran Tanah Berdasarkan Alas Hak Jual Beli Secara Adat Di Kabupaten Padang Pariaman	Dr. Kurnia Warman, SH., M.Hum Dr. Azmi Fendri, SH., MKn
73	Darma Syahrullah Ekajaya, SH	Penyelesaian Kredit Usaha Mikro Tanpa Agunan Pada PT. Bank Danamon Tbk, Cabang Pembantu Simpan Pinjam Pekanbaru	Dr. H. Busyra Azheri, SH., MH Tasman, SH., MH
74	Ridho Pebrianda, SH	Penyelesaian Kredit Yang Dijaminkan Fidusia Yang Objeknya Musnah (Studi Kasus	Dr. Hj. Yulfasni, SH., MH Syahrial Razak, SH., MH

		Pada Bank Bukopin, Tbk Cabang Padang)	
75	Ilip Jaya Dharma, SH	Penyelesaian Kredit Bermasalah Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan Terhadap Usaha Mikro Pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Utama Pekanbaru	Prof. Firman Hasan, SH., LLM Dr. Hj. Yulfasni, SH., MH
76	Tahta Amrillah, SH	Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Pembiayaan Kendaraan Bermotor Yang Di bebankan Jaminan Fidusia Pada PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance Di Kota Pekanbaru	Dr. Ferdi, SH., MH Daswirman, SH., MH
77	Willy Rolanda, SH	Pertanggungjawaban Direksi Dalam Melakukan Penjualan Asset Perusahaan (Studi Kasus PT. Barata Indonesia Persero)	Dr. H. Busyra Azheri, SH., MH Hj. Ulfanora, SH., MH
78	Rachman Kamil, SH	Perpanjangan Hak Guna Bangunan Yang Dibebani Hak Tanggungan Di Kantor Badan Pertanahan Kota Padang	Prof. Dr. Yuliandri, SH., MH Syofiarti, SH., MH
79	Desi Sandra, SH	Pendaftaran Tanah Ulayat Kaum Untuk Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Kota Bukittinggi	Dr. Kurnia Warman, SH., M.Hum Frenadin Adegustara, SH., MS
80	Dwi Anggun, SH	Penyelesaian Kredit Macet Dalam Pemberian Kredit Usaha Kecil dan Menengah Pada PT. Bank Negara Indonesia (BNI) (Persero) Tbk, Sentra Kredit Kecil (SKC) Bukittinggi	Dr. Hj. Yulfasni, SH., MH Rembrandt, SH., MPd
81	Regina Malviani, SH	Implikasi Hukum Terhadap Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Yang Berstatus Tersangka	Prof. Dr. Ismansyah, SH., MH Yoserwan, SH., MH., LLM
82	Titiek Maryani, SH	Balik Nama Waris Berdasarkan Hibah Wasiat Di Kota Padang	Dr. Azmi Fendri, SH., MKn Syofiarti, SH., MH
83	Widya Admadonna, SH	Jaminan Dalam Perjanjian Kredit Usaha Mikro Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat	Dr. Hj. Yulfasni, SH., MH Neneng Oktarina, SH., MH

84	Yogi Kurniawan, SH	Penyelesaian Sengketa Harta Waris Melalui Wasiat Wajibah Dalam Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.16K/AG/2010	Prof. Dr. Yaswirman, MA Linda Elmis, SH., MH
85	Rini Anggraini, SH	Tanggung Jawab Developer Dalam Perjanjian Kredit Perumahan Rakyat (KPR) Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Cabang Pekanbaru (Studi Pada PT Indah Harisanda)	Dr. Hj. Yulfasni, SH., MH Hj. Ulfanora, SH., MH
86	Vinda Noriza Yuhendra, SH	Kepastian Hukum Terhadap Jaminan Fidusia Yang Tidak Dilakukan Pencoretan Pendaftaran (Roya)	Dr. Dahlil Marjon, SH., MH H. Syahrial Razak, SH., MH
87	Sherly Saputri, SH	Kedudukan Kreditor Separatis Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	Dr. H. Busyra Azheri, SH., MH Zulkifli, SH., MH
88	Elsi Fitriyaningsih, SH	Akta Pengakuan Hutang Dan Kuasa Untuk Menjual Dalam Pemberian Kredit Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Cabang Padang	Dr. Azmi Fendri, SH., MKn H. Syahrial Razak, SH., MH
89	Norza Yulisa, SH	Perjanjian Pemborongan Bangunan Tanggul Manual 8 Km Antara CV. Kuala Indragiri Dengan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir	Dr. H. Zainul Daulay, SH., MH M. Hasbi, SH., MH
90	Risa Betrida Essaura, SH	Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Batu Bara Antara PT. Expo Indomas Perkasa Dengan PT. Lutarindo Surya Sentosa	Dr. Ferdi, SH., MH Daswirman, SH., MH
91	Vionesha, SH	Pelaksanaan Kewajiban Pembayaran BEA Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Atas Waris Di Kota Bukittinggi	Dr. Yuslim, SH., MH Syofiarti, SH., MH
92	Suyono, SH	Tanggung Jawab Induk Perusahaan Terhadap Perbuatan Hukum Anak Perusahaan Menurut Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perusahaan Terbatas	Dr. H. Busyra Azheri, SH., MH Hj. Ulfanora, SH., MH
93	Nur Ilham, SH	Akibat Hukum Tidak	Dr. Hj. Yulfasni, SH., MH

		Terdaftar Perubahan Anggaran Dasar Pada Perseroan Terbatas	Neneng Oktarina, SH., MH
94	Dilla Nofika, SH	Perkara Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah (Kajian Terhadap Perkara No. 48/Pdt.G/2011/PN.PDG)	Dr. Azmi Fendri, SH., MKn M. Hasbi, SH., MH
95	M. Lutfi, SH	Implikasi Hukum Jaminan Fidusia Perusahaan Pembiayaan Yang Tidak Di Daftarkan Pasca Dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012	Dr. Azmi Fendri, SH., MKn Syahrial Razak, SH., MH
96	Reni Yulianti, SH	Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli/PPJB (Dalam Perkara Nomor 98/Pdt.G/2013/PN.PBR)	Dr. H. Busyra Azheri, SH., MH H. Syahrial Razak, SH., MH
97	Ruslan Rivanny, SH	Peranan Notaris Sebagai Profesi Penunjang Dalam Go Publik (Penawaran Umum)	Dr. H. Busyra Azheri, SH., MH Daswirman, SH., MH
98	Oki Susandy, SH	Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Penyerapan Karbondioksida Antara Co2 Operate BV Dengan Kelompok Pengelola Lahan VCM Di Nagari Paninggahan Kabupaten Solok	Dr. Azmi Fendri, SH., MKn Neneng Oktarina, SH., MH
99	Silvitriani, SH	Penerapan Renvoi Pada Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Di Sumatera Barat	Dr. Azmi Fendri, SH., MKn Hengki Andora, SH., LLM
100	Pemi Hafemarini, SH	Verifikasi Hak Milik Atas Tanah Dalam Peralihan Hak Melalui Jual Beli Di Kota Padang	Dr. Azmi Fendri, SH., MKn Syofiarti, SH., MH
101	Srikandi Eka Putri, SH	Permohonan Eksekusi Kepada Pengadilan Negeri Berkaitan Dengan Perjanjian Fidusia Terhadap Jaminan Digelapkan (Studi Kasus Di PT. BPR Gema Ampek Koto Sejahtera Cabang Payakumbuh)	Prof. Dr. Ismansyah, SH., MH Yoserwan, SH., MH., LLM
102	Melta Dyana Putri, SH	Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Pembuatan Akta Oleh Notaris	Dr. H. Busyra Azheri, SH., MH Hj. Ulfanora, SH., MH

		Di Kota Pekanbaru	
103	Sarina. S, SH	Kewenangan Mamak Kepala Waris Dalam Penyelesaian Harta Pusaka Tinggi Di Nagari Sungai Sariak VII Koto Kabupaten Padang Pariaman	Prof. Dr. Yaswirman, MA Bachtiar Abna, SH., SU
104	Helmi Susanti, SH	Perjanjian Kerjasama Dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan Antara Rumah Sakit Dengan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Di Kota Padang	Dr. H. Zainul Daulay, SH., MH M. Hasbi, SH., MH
105	Fauziah Arbi, SH	Penyelesaian Sengketa Eksekusi Putusan Hakim Melalui Perdamaian Pada Pengadilan Negeri Padang (Studi Perkara No. 2333 K/PDT/2006)	Dr. Kurnia Warman, SH., M.Hum M. Hasbi, SH., MH
106	Tessa Olivia, SH	Pengawasan Perusahaan Pembiayaan Modal Ventura Oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Di Sumatera Barat	Dr. H. Busyra Azheri, SH., MH Zulkifli, SH., MH
107	Elda Nazar, SH	Pelaksanaan Pengangkatan Anak Oleh Pasangan Suami Istri Tanpa Penetapan Pengadilan Di Kota Bukittinggi	Prof. Dr. Yaswirman, MA Linda Elmis, SH., MH
108	Radhi Utama, SH	Penyelesaian Sengketa Tanah Yang Disebabkan Oleh Sertifikat Ganda (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Klas IA. Padang)	Dr. Shinta Agustina, SH., MH Hengki Andora, SH., LLM
109	Fadilla Zen, SH	Pelaksanaan Hak-Hak Setelah Terjadinya Perceraian Dalam Perkara No. 240/Pdt.G/2006/PA.PDG	Prof. Dr. Yaswirman, MA Neneng Oktarina, SH., MH
110	Kurnia Abdi Leswara, SH	Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Profesi Notaris Oleh Majelis Pengawas Notaris Di Kota Padang	Dr. Kurnia Warman, SH., M.Hum Dr. Yuslim, SH., MH
111	Vista Anggarda Paramita, SH	Penetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Berdasarkan Transaksi Jual Beli Oleh Pemerintah Kota Padang	Dr. Zainul Daulay, SH., MH Hengki Andora, SH., LLM

112	Meiliarusi, SH	Pemanfaatan Hak Guna Usaha Yang Berasal Dari Tanah Ulayat Untuk Perkebunan Sawit Di Kabupaten Agam (Studi Kasus: Perkebunan PT. AMP. Plantation)	Dr. Kurnia Warman, SH., M.Hum Bachtiar Abna, SH., SU
113	Vien Shinta Putri, SH	Penyelesaian Sengketa Dalam Kesalahan Penginputan Data Kredit Nasabah Pada Sistem Informasi Debitur (SID) (Studi Kasus PT. BPR Pariangan Kabupaten Tanah Datar)	Dr. H. Busyra Azheri, SH., MH Daswirman, SH., MH
114	Hanafi Syahputra Harsian, SH	Penerapan Prinsip Akad Murabahah Pada Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Dikaitkan Dengan Peran Dewan Pengawas Syariah Di Bank Nagari Syariah Cabang Padang	Prof. Dr. Yaswirman, MA Dr. Hj. YuLfasni, SH., MH
115	Suci Kartika, SH	Kesepakatan Bersama Atas Pemisahan Harta Bersama Dalam Perkawinan Campuran	Dr. Kurnia Warman, SH., M.Hum Bachtiar Abna, SH., SU
116	Fatwa Wilda, SH	Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Semen Dengan D.0 (Delivery Order) Antara PT. Igasar Sebagai Distributor Semen Padang Dan Pedagang	Dr. Dahliil Marjon, SH., MH M. Hasbi, SH., MH
117	Dito Syaferli, SH	Penetapan Tanah Ulayat Sebagai Obyek Landreform Untuk Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Tanah Di Nagari Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat	Dr. Kurnia Warman, SH., M.Hum Hengki Andora, SH., LLM
118	Lina Susanti, SH	Pelelangan Barang Jaminan Bergerak Nasabah Yang Wanprestasi Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarandam	Dr. Yuslim, SH., MH Daswirman, SH., MH
119	Khairani Dewi Putri, SH	Penjaminan Kredit Modal Kerja Pada PT. Jamkrida Sumbar Pada Bank Nagari	Dr. H. Busyra Azheri, SH., MH Hj. Ulfanora, SH., MH
120	Ruri Famelia, SH	Pembaruan Utang Dalam Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja Oleh Bank (Studi Kasus Pada Bank Nagari	Prof. H. Firman Hasan, SH., LLM Dr. Busyra Azheri, SH., MH

		Cabang Payakumbuh)	
121	Nilma Nisprawati, SH	Pembatasan Sertifikat Hak Milik Ganda (Overlapping) Studi Kasus Pada Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 21/G/2012/PTUN-JBI	Prof. Dr. Ismansyah, SH., MH Sri Arneti, SH., MH
122	M. Bahrul Muhiith, SH	Penertiban Sertipikat Pengganti Berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Putusan PTUN Padang Nomor: 13/G/2011/PTUN-PDG	Prof. Dr. Yuliandri, SH., MH Dr. Suharizal, SH., MH
123	Renni Meisyaroh Lubis, SH	Penerapan Pembiayaan Haji Melalui Akad Ijarah Di Unit Usaha Syariah Pada PT. Bank Riau	Prof. Dr. Yaswirman, MA Hj. Ulfanora, SH., MH
124	Hilda Agus, SH	Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Penjualan Obyek Jaminan Fidusia Di Bawah Tangan Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarandam Di Kota Padang	Dr. Ferdi, SH., MH Neneng Oktarina, SH., MH
125	M. Arief Afandi, SH	Pemberian Kredit Usaha Rakyat Dengan Agunan Tanah Melalui Surat Model A Pada PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk (BRI) Unit Lubuk Basung	Dr. Dahliil Marjon, SH., MH Hengki Andora, SH., LLM
126	Dian Maireno, SH	Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Tidak Dibacakan	Dr. Zainul Daulay, SH., MH Dr. Yuslim, SH., MH
127	Reny Kusumawardani, SH	Peralihan Hak Milik Atas Tanah Melalui Pemasukan Tanah Dalam Perusahaan Di Kota Padang	Dr. Azmi Fendri, SH., MKn Hj. Dian Amelia, SH., MH
128	Doni Mardani, SH	Tanggung Jawab Notaris Dalam Perjanjian Kredit Yang Dijaminkan Dengan Fidusia Sehubungan Dengan Akta Yang Dibuatnya (PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Sentra Kredit Kecil Padang	Prof. Dr. Yaswirman, MA Linda Elmis, SH., MH
129	Andriani Lidya Putri, SH	Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Pada Kantor Notaris/PPAT Di Kota	Dr. Yuslim, SH., MH Dr. Khairani, SH., MH

		Bukittinggi	
130	Ismun Andi Wahyuni, SH	Proses Perceraian Antara Suami Istri Qabla Al-Dukhul (Studi Putusan Pengadilan Agama Kelas IA Nomor: 0641/Pdt.G/2015/PA.Pdg)	Prof. Dr. Yaswirman, MA Dr. Mardenis, SH., Msi
131	Yuli Trinia, SH	Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Perjanjian Pembiayaan Pada Sumber Pembiayaan Elektronik ASTRA (Studi Pada PT. Federal International Finance (FIF) Group Cabang Padang	Dr. Zainul Daulay, SH., MH Hj. Ulfanora, SH., MH
132	Silvia Diana, SH	Pengecekan Sertipikat Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah Untuk Mencegah Terjadinya Sengketa Pertanahan Di Kota Pekanbaru	Dr. Kurnia Warman, SH., M.Hum Syahrial Razak, SH., MH
133	Susastriwati, SH	Pelaksanaan Perjanjian Kredit Tanpa Agunan Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Cempaka Wadah Sejahtera Di Kota Pekanbaru	Dr. Yulfasni, SH., MH Dr. Ferdi, SH., MH
134	Mega Dwita Andayati, SH	Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Oleh Balai Lelang Mandiri Prasarana (PT BALEMAN) Dalam Penyelesaian Kredit Macet Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat	Prof. Dr. Elwi Danil, SH., MH Tasman, SH., MH
135	Rizki Trianto, SH., MM	Sewa Menyewa Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Untuk Penyediaan Hunian Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Di Kota Padang	Prof. Dr. Hj. Yulia Mirwati, SH., CN., MH Linda Elmis, SH., MH
136	M. Feri Andriawan, SH	Eksekusi Hak Tanggungan Dalam Akad Pembiayaan Murabahah Pada PT. PNM (Persero) Ullam Syariah Padang	Dr. Hj. Yulfasni, SH., MH Dr. Yuslim, SH., MH
137	Kadra Hidayatul Mullah, SH	Perlindungan Hukum Terhadap Istri Konsumen Dalam Pembagian Waris Pada Perkawinan Poligami (Studi	Prof. Dr. Yaswirman, MA Linda Elmis, SH., MH

		Perkara Nomor 286/PDT.G/2012/PA.PDG dan Nomor 12/PDT.G/2013/PTA.PDG)	
138	Fauzan Prasetya, SH	Kedudukan Hukum Addendum Perjanjian Pemborongan Kerja Yang Berlaku Setelah Jangka Waktu Perjanjian Pokoknya Berakhir (Studi Kasus: Addendum I Perjanjian Kerjasama PT. Semen Padang No. 428/PJJ/PJS10.9/05.13)	Dr. Sukanda Husin, SH., LLM Dr. Ferdi, SH., MH
139	Yulfrizawati. Yrn, SH	Roya Hak Tanggungan Sebagai Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar	Dr. Kurnia Warman, SH., M.Hum Syofiarti, SH., MH
140	Rahmi Maulidna Rahim, S.TP., SH	Perlindungan Hukum Bagi Notaris Terhadap Akta Yang Dibuatnya Jika Terjadi Sengketa Atau Perkara Di Pengadilan	Prof. Dr. Elwi Danil, SH., MH Dr. Ferdi, SH., MH
141	Nofriyanto Putra, SH	Kepastian Hukum Eksekusi Tanah Terhadap Putusan MA RI No. 1990/K/Pdt/2006	Dr. Hj. Yulfasni, SH., MH Dr. Ferdi, SH., MH
142	Hera Agustianti Putri, SH	Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Di Nagari Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung Kab. Agam	Prof. Dr. Yaswirman, MA Neneng Oktarina, SH., MH
143	Rahmi Febrina, SH	Eksekusi Jaminan Hak Tanggung dalam Hal Terjadinya Kredit Macet Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Cabang Pekanbaru	Dr. Busyra Azheri, SH., MH Dr. Azmi Fendri, SH., MKn
144	Ferdinan Hidayat, SH	Penerapan Azas Proporsionalitas Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Outlet Kentucky Fried Chicken (KFC) Khatib Sulaiman Padang	Dr. Busyra Azheri, SH., MH Ulfanora, SH., MH
145	Boni Pramutius, SH	Tanggung Jawab Notaris Dalam Proses Pendaftaran Fidusia Online Terhadap Penerima Fidusia	Prof. Dr. Ewi Danil, SH., MH Dr. Dahlil Marjon, SH., MH

146	Putri Wulandari, SH	Tanggung Jawab PPAT Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah Bersertifikat Yang Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Pembuatan Akta PPAT (Studi Pada PPAT Di Kabupaten Dharmasraya)	Prof. Dr. Ewi Danil, SH., MH Dasman, SH., MKn
147	Wita Fitrianti, SH	Pertanggungjawaban Direksi Dalam Hal Timbulnya Kerugian Karena Tindakan Melampaui Batas Kewenangan (Ultra Vires) (Studi Perkara Perdata, Putusan Nomor:130/PDT/2014/PT.BPR)	Dr. Busyra Azheri, SH., MH Dr. Mardenis, SH., Msi
148	Narita Citra Yani, SH	Pengikatan Pesawat Udara Dengan Kep. Internasional Sebagai Jaminan Dalam Pemberian Kredit Oleh PT. BNI (Persero) Tbk, SKM Bekasi	Dr. Busyra Azheri, SH., MH Neneng Oktarina, SH., MH
149	Sri Indrayeni, SH	Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Kendaraan Bermotor Pada Perusahaan Pembiayaan PT. Mitra Dana Putra Utama Ujung Batu	Dr. Hj. Yulfasni, SH., MH Dr. Rembrandt, SH., MPd
150	Desi Zulfiana, SH	Pengalihan Debitur Dalam Perjanjian Kredit Yang Dibe-bani Hak Tanggungan Pada Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Pekanbaru	Dr. Kurnia Warman, SH., M.Hum Dr. Azmi Fendri, SH., MKn
151	Rage Cikal Nugroho, SH	Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Hal Dibatalkannya Sertifikat Hak Guna Bangunan Yang Dibe-bani Hak Tanggungan (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor: 27/PDT.G/2010/PN.PDG)	Prof. Dr. Ismansyah, SH., MH Dr. Busyra Azheri, SH., MH
152	Isnaini Iskandar, SH	Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Antara PT. PLN (Persero) Dengan Pelanggan Dalam Hal Terjadinya Perubahan Pemilik Bangunan	Dr. H. Busyra Azheri, SH., MH Syahrial Razak, SH., MH
153	Intan Kumala Sari, SH	Peralihan Hak Guna Bangunan Yang Jangka Waktunya	Dr. Yuslim, SH., MH Hengki Andora, SH., LLM

		Berakhir Melalui Proses Pewarisan Pada Perumnas Siteba Kota Padang	
154	Novriar Adhansyah Rosya, SH	Izin Pengalihan Pendaftaran Tanah Dari Kepala Kantor Pertanahan Untuk Proses Balik Nama Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar	Dr. Yuslim, SH., MH Dr. Ferdi, SH., MH
155	Anil Dasra Asmarta, SH	Tanggung Jawab Kepala Kantor Pertanahan Dan Tata Ruang Kabupaten Kampar Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tentang Sertifikat Ganda Bagi Pemegang Hak Atas Tanah	Dr. Yuslim, SH., MH Dr. Jean Elvardi, SH., MH
156	Halimah Suci Warti, SH	Perlindungan Hukum Terhadap Isteri Sebagai Akibat Cerai Talak Dalam Pemenuhan Mut'ah Dan Nafkah	Prof. Dr. Yaswirman, MA Dr. Ferdi, SH., MH
157	Resu Silsia, SH	Akibat Hukum Perjanjian Kawin Terhadap Harta Perkawinan	Dr. Azmi Fendri, SH., MKn Dr. Khairani, SH., MH
158	Roni Trino Marta, SH	Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Rumah Melalui Sistem Pesan-Bangun Pada Perumahan Graha Mahrum Regency Di Kabupaten Kampar	Dr. Kurnia Warman, SH., M.Hum Dr. Jean Elvardi, SH., MH
159	Hendra Nugraha, SH	Perjanjian Kerjasama PT. Pertamina (Persero) Dengan Pengusahaan SPBU Dalam Penyaluran dan Pemasaran Bahan Bakar Minyak (BBM)	Dr. Busyra Azheri, SH., MH Neneng Oktarina, SH., MH
160	Syafrinal Siregar, SH	Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Dalam Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo Di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau	Dr. Kurnia Warman, SH., M.Hum Sri Arnetti, SH., MH
161	Tauppiqurrahman, SH	Implementasi Sanksi Pelanggaran Kode Etik Dalam Jabatan Notaris Di Kabupaten Bungo	Prof. Dr. Saldi Isra, SH., MPA Dr. Yuslim, SH., MH
162	Doni Rachvi Hendra, SH	Proses E-Procurement Praktek Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Mewujudkan	Pro. Dr. Yuliandri, SH., MH Frenadin Adegustara, SH., MS

		Pronsiip-Prinsip Good Governance (GCG) Pada Proyek Indarung VI PT. Semen Padang	
163	Trisna Yosefa, SH	Analisis Yuridis Eksekusi Hak Tanggungan (Studi Kasus Perkara Nomor 38/PDT.G/2012/PN.PBR)	Dr. Azmi Fendri, SH., MKn Bachtiar Abna, SH., MH
164	Susi Dewi Kumala, SH	Pelaksanaan Pindah Tempat Kedudukan Notaris Dalam Satu Wilayah Jabatan Notaris	Prof. Saldi Isra, SH., MPA Syofiarti, SH., MH
165	Vinda Della, SH	Pemabatalan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht Van Gewijsde)	Dr. Azmi Fendri, SH., MKn Dr. Khairani, SH., MH
166	Nanda Firmansyah, SH	Klaim Asuransi Kredit Konsumtif Pegawai Negeri Sipil (PNS) Yang Dillunasi Sebelum Jatuh Tempo Pada Bank Nagari Cabang Utama Padang	Dr. Busyra Azheri, SH., MH Ulfanora, SH., MH
167	Rizki Febrian, SH	Pelindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Proses Peralihan Kreditur (Take Over) Jual Beli Objek Jaminan Pada PT. BPR Banda Raya Batam	Prof. Firman Hasan, SH., LLM Dr. Busyra Azheri, SH., MH
168	Eva Maisari, SH	Pemberian Kredit Usaha Mikro Tanpa Agunan Pada Bank Perkreditan Rakyat Gemilang Di Kabupaten Indragiri Hilir	Dr. Kurnia Warman, SH., M.Hum Dr. Azmi Fendri, SH., MKn
169	Putri Widyati, SH	Pemberhentian Direksi Melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tangan Pada Perseroan Terbatas	Dr. Zainul Daulay, SH., MH Neneng Oktarina, SH., MH
170	Dendi Doran, SH	Pembuatan Akta Perjanjian Jual Beli Sebagai Perjanjian Pendahuluan Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Di Kota Padang	Dr. Zainul Daulay, SH., MH Dr. Azmi Fendri, SH., MKn
171	Silvia Mahna Putri, SH	Pelaksanaan Perkawinan Sesuku Di Nagari Lubuk Basung	Prof. Dr. Yaswirman, MA Dr. Shinta Agustina, SH., MH
172	Alfajar Prima Putra, SH	Sertifikasi Tanah Waqaf Di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Padang	Dr. Shinta Agustina, SH., MH Neneng Oktarina, SH., MH

173	Nasuha, SH	Pengesahan Surat Keterangan Ahli Waris Oleh Lurah Di Kota Bukittinggi	Prof. Dr. Yuliandri, SH., MH Linda Elmis, SH., MH
174	Fifi Rahmayanti, SH	Penggunaan Blanko Akta PPAT Setelah Keluarnya Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 8 Tahun 2012 Untuk Kepastian Hukum Peralihan Hak Atas Tanah Di Kota Bukittinggi	Dr. Kurnia Warman, SH., M.Hum Frenadin Adegustara, SH., MS
175	Zulisman, SH	Eksekusi Jaminan Utang Yang Dibuat Dengan Perjanjian Kredit Dalam Bentuk Akta Di Bawah Tangan Pada Bank Perkreditan Rakyat Tambun Ijuk Payakumbuh	Dr. Busyra Azheri, SH., MH Neneng Oktarina, SH., MH
176	Zulhendri, SH	Penyelesaian Secara Damai Sebagai Salah Satu Upaya Penyelesaian Kredit Ritel Bermasalah (Studi Kasus Pada BRI Cabang Bukittinggi)	Dr. Shinta Agustina, SH., MH Linda Elmis, SH., MH
177	Zulkifli Tangerang, SH	Penerapan Prinsip Kehati-hatian Berkaitan Dengan Tanggung Jawab Direksi Dalam Pemberian Kredit Pada PT. BPR Mutiara Nagari Sijunjung	Dr. Busyra Azheri, SH., MH Neneng Oktarina, SH., MH
178	Riery Adriati, SH	Pemeriksaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli Di Kota Padang	Dr. Yuslim, SH., MH Syofiarti, SH., MH
179	Elvi Sandriyani, SH	Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris Dalam Pemeriksaan Protokol Notaris Di Kota Padang	Prof. Dr. Zainul Daulay, SH., MH Dr. Yuslim, SH., MH
180	Defika Yufiandra, SH	Antisipasi Notaris Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik	Prof. Dr. Elwi Danil, SH., MH Ilhamdi Taufik, SH., MH
181	Muhammad Adithya Rayhansyah. R	Pertanggung Jawaban Direksi Perseroan Dalam Hal Terjadinya Pailit (Studi Kasus 14/Pailit/2011/PN.Niaga/Medan)	Dr. Hj. Yulfasni, SH., MH Dr. Shinta Agustina, SH., MH
182	Farid Darusman, SH	Perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB) Yang Sedang Dibebani Hak Tanggungan	Dr. Azmi Fendri, SH., MKn Sri Arnetti, SH., MH

		Pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Pekanbaru	
183	Evawati, SH	Pembacaan Akta Notaris Sebagai Upaya Kepastian Hukum Bagi Pengguna Jasa Notaris	Dr. Shinta Agustina, SH., MH Syahrial Razak, SH., MH
184	Sintia Habsari, SH	Pelaksanaan Penghapusan (Roya) Terhadap Objek Jaminan Fidusia Di Kota Bukittinggi	Dr. Busyra Azheri, SH., MH Syahrial Razak, SH., MH
185	Dina Andriana, SH	Penyewaan Tanah Untuk Bangunan Dalam Pemanfaatan Barang Milik Daerah Di Kota Padang	Dr. Kurnia Warman, SH., M.Hum Hengki Andora, SH., LLM
186	Ikhwal Fadli, SH	Konversi Hak Atas Tanah Ulayat Kaum Menjadi Hak Milik Berdasarkan Alas Hak Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Di Kota Padang	Dr. Kurnia Warman, SH., M.Hum Dr. Yuslim, SH., MH
187	Harvy Gusman, SH	Kepastian Hukum Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Di Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota	Dr. Kurnia Warman, SH., M.Hum Dr. Azmi Fendri, SH., MKn
188	Yeni Irawati, SH	Pendaftaran Tanah Hak Milik Pertama Kali Melalui Bantuan PPAT Di Tanah Datar	Dr. Yuslim, SH., MH Dr. Azmi Fendri, SH., MKn
189	Muhammad Bayu Abdullah, SH	Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Outsourcing (Alih Daya) Dalam Perjanjian Kerja Antara PT. Wiratama Jaya Perkasa Padang Dengan Tenaga Kerja	Prof. Dr. Zainul Daulay, SH., MH Neneng Oktarina, SH., MH
190	Nova Silvia Triastuti, SH	Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Antara Perum Jasa Tirta II Dengan PT. Cikarang Listrindo Terhadap Tanah Yang Dimilki Oleh Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan (Kementerian Pertanian)	Dr. Mardenis, SH., Msi Neneng Oktarina, SH., MH
191	Rian Prima Akhdiawan, SH	Pengaturan Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Murtad Dalam Pembagian Harta Keluarga (Analisis Putusan No. 368/K/AG/1995)	Dr. Dahliil Marjon, SH., MH Dr. A. Irzal Rias, SH., MH

192	Martiapri Yanti, SH	Penggunaan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Penipuan Di Kota Padang	Dr. Kurnia Warman, SH., M.Hum Dr. A. Irzal Rias, SH., MH
193	Dian Arsyadi, SH	Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Yang Tidak Di Bacakan Di Kota Padang	Prof. Dr. Zainul Daulay, SH., MH Dr. Azmi Fendri, SH., MKn
194	Didi Sabir, SH	Kewenangan Yayasan Mengumpulkan Dana Zakat, Infak, Sedekah dan Dana Sosial Lainnya Di Kota Pekanbaru	Prof. Dr. Elwi Danil, SH., MH H. Syahrial Razak, SH., MH
195	Ansari Roni Marune Simbolon, SH	Kedudukan Akta Notaris Yang Ditandatangani Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Kota Padang	Prof. Dr. Elwi Danil, SH., MH Dr. Jean Elvardi, SH., MH
196	Siaga Yoze Rosario, SH	Peran Organisasi Profesi Notaris Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Notaris Di Kota Jambi	Prof. Dr. Elwi Danil, SH., MH Dr. Azmi Fendri, SH., MKn
197	Angga Kurniawan, SH	Pelaksanaan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Yang Berkaitan Dengan Pertanahan Di Kota Padang	Dr. Azmi Fendri, SH., MKn Syahrial Razak, SH., MH
198	Riky Asfajri, SH	Perlindungan Terhadap Pekerja Wanita Pada PT. Sentosa Sarana Sevice Kota Pekanbaru Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan	Dr. Khairani, SH., MH Neneng Oktarina, SH., MH
199	Juni Wandri, SH	Tanggungjawab Notaris Terhadap Penandatanganan Akta Yang Sebahagian Isinya Masih Kosong Di Kabupaten Sijunjung	Prof. H. Firman Hasan, SH., LLM Dr. Azmi Fendri, SH., MKn
200	Dekky Aditya K. Putra, SH	Tanggungjawab Hukum Jasa Penilai Publik (Appraisal) Dalam Kegiatan Perkreditan Perbankan (Studi Kasus Pada Bank Mandiri Business Banking Area Padang)	Prof. Dr. Zainul Daulay, SH., MH Linda Elmis, SH., MH
201	Riki Sumarta Hidayat, SH, MH	Pembatalan Akta Jual Beli Tanah Milik Melalui Putusan Pengadilan Dan Akibat Hukum	Prof. Dr. Zainul Daulay, SH., MH Dr. Sukanda Husin, SH., LLM

		Terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)	
202	Puti Intan Suri, SH	Perjanjian Kerjasama Keagenan Jasa Pelayanan Pos Swasta Antara PT. Citosarana Jasapratama Dengan PT. Rajasa Dinamika Ekspres	Dr. Ferdi, SH., MH Ulfanora, SH., MH
203	Mardatilah, SH	Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi	Dr. Busyra Azheri, SH., MH Syofiarti, SH., MH
204	Gunanda Rizal, SH	Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Pengikatan Fidusia Secara Di Bawah Tangan Pada Swamitra Geha Insani Bank Bukopin Cabang Padang	Dr. Busyra Azheri, SH., MH Neneng Oktarina, SH., MH
205	Ade Arisha, SH	Tanggung Jawab Notaris Yang Telah Pensiun Terhadap Akta Yang Dibuatnya	Dr. Kurnia Warman, SH., M.Hum Dr. Azmi Fendri, SH., MKn
206	Yana Ikhrami, SH	Pelaksanaan Pembubaran Perseroan Terbatas Yang Diikuti Dengan Likuidasi Oleh Likuidator Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007	Prof. Dr. Saldi Isra, SH., MPA Dr. Beatrix Benni, SH., MPd., MKn
207	Handri Yuliana, SH	Penerapan Prinsip Transparan Dalam Pengadaan Barang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Dharmasraya Pada Tahun Anggaran 2015 (Studi Kasus Pengadaan Excavator Mini)	Prof. Dr. Ismansyah, SH., MH Frenadin Adegustara, SH., MS
208	Wiheh Yuhandra, SH	Kedudukan Notaris Atas Tindakan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Karyawan Notaris (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang No. 535/Pid.B/2013/PN.Pdg)	Prof. Dr. Ismansyah, SH., MH Frenadin Adegustara, SH., MS
209	Dhian Fitrah, SH	Kolektibilitas Debitur Terkait Dengan Objek Jaminan Hak Tanggungan Yang Akan Di Lelang (Studi Pada PT. BTPN	Dr. Busyra Azheri, SH., MH Frenadin Adegustara, SH., MS

		Area Bukittinggi)	
210	Connie Cinthia, SH	Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pembuatan Akta Tanah Di Kabupaten Pasaman Barat	Dr. Kurnia Warman, SH., M.Hum Dr. Yuslim, SH., MH
211	Gillang Olla Rahmadhan, SH	Jaksa Pengacara Negara Selaku Kuasa Badan Usaha Milik Negara Dalam Menyelesaikan Tunggakan Kredit Pada PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Padang (Studi Pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat)	Dr. Busyra Azheri, SH., MH Neneng Oktarina, SH., MH
212	Thesa Ayutha Putri, SH	Pembayaran Pajak Penghasilan Oleh Notaris Dan/Atau Pejabat Pembuat Akta Tanah Di Kota Padang	Dr. Khairani, SH., MH Syofiarti, SH., MH
213	Ferawaty, SH	Kedudukan Surat Keterangan Waris Yang Dibuat Oleh Notaris Dalam Proses Turun Waris (Studi Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Kota Padang)	Dr. Busyra Azheri, SH., MH Dr. Khairani, SH., MH
214	Rinrani Patrisia, SH	Pelaksanaan Putusan Perkara Cerai Talak Yang Terkait Dengan Nafkah Istri dan Anak Di Pengadilan Agama Padang	Prof. Dr. Yaswirman, MA Neneng Oktarina, SH., MH
215	Annisa Putri Sundana, SH	Analisis Yuridis Sengketa Harta Bersama Setelah Putusan Perceraian Di Pengadilan Agama Payakumbuh	Prof. Dr. Yaswirman, MA Neneng Oktarina, SH., MH
216	Maya Indria Sari, SH	Efektivitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Luar Kawin Di Catatan Sipil Wilayah Hukum Sumatera Barat	Prof. Dr. Yaswirman, MA Linda Elmis, SH., MH
217	Fhani Alhakki, SH	Klausula Eksenorasi Dalam Perjanjian Kredit Komersil Pada Bank Nagari	Dr. Busyra Azheri, SH., MH Neneng Oktarina, SH., MH
218	Putri Anita, SH	Perlindungan Hukum Hak Waris Anak Angkat Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa Sehubungan Dengan Surat	Prof. Dr. Zainul Daulay, SH., MH Neneng Oktarina, SH., MH

		Keterangan Waris Yang Dibuat Notaris	
219	Endah Wardian Ningsih, SH	Pelaksanaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Dengan Menggunakan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Pada PT. Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Padang	Dr. Dahlil Marjon, SH., MH Neneng Oktarina, SH., MH
220	Runi Viola, SH	Notaris Sebagai Pejabat Lelang Kelas II	Prof. Firman Hasan, SH., LLM Dr. Suharizal, SH., MH
221	Yudi Pratama, SH	Penggunaan Hak Ingkar Dalam Pemberian Kesaksian Oleh Notaris Dalam Perkara Pidana	Prof. Dr. Ismansyah, SH., MH Ilhamdi Taufik, SH., MH
222	Endi Suardi, SH	Jaminan Dalam Perjanjian Pembiayaan Modal Ventura Pada PT. Sarana Sumatera Barat Ventura	Dr. Busyra Azheri, SH., MH Tasman, SH., MH
223	T. Meiza Fitri, SH	Pertanggungjawaban Pidana PPAT Dalam Pemalsuan Akta (Studi Kasus Pidana No. 137/PID.B/2016/PN.PBR)	Prof. Dr. Elwi Danil, SH., MH Dr. Shinta Agustina, SH., MH
224	Yona Safitri, SH	Pelaksanaan Perjanjian Gadai Emas Syariah Di PT. Pegadaian Syariah Cabang Sei Panas Kota Batam	Dr. Shinta Agustina, SH., MH Linda Elmis, SH., MH
225	Rahmadona Putri, SH	Proses Penyimpanan Protokol Notaris Yang Telah Memasuki Usia 25 Tahun Di Kota Padang	Prof. Dr. Yaswirman, MA Dr. Sukanda Husin, SH., LLM
226	Bismi Annisa Fadhilla, SH	Konsekuensi Yuridis Penetapan Pengampunan Dalam Perkara Perdata Nomor 122/Pdt.G/2015/PN.PBR	Prof. Dr. Yaswirman, MA Syahrial Razak, SH., MH
227	Faisal Zakir, SH	Penghentian Perjanjian Pembangunan Pasar Pusat Kota Padang Panjang Secara Sepihak Oleh Pemerintah Kota Padang Panjang	Dr. Busyra Azheri, SH., MH Neneng Oktarina, SH., MH
228	Rozi Oktri Novika, SH	Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Yang Telah Diubah Secara Sepihak (Studi Kasus Putusan Perkara No. 1003K/PID/2015)	Prof. Dr. Zainul Daulay, SH., MH Dasman, SH., MKn

229	Rahmad Hidayat, SH	Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Yang Dibautnya Dalam Proses Peradilan Perdata Ditinjau Dari Hukum Acara Perdata	Prof. Dr. Zainul Daulay, SH., MH Daswirman, SH., MH
230	Gemala Pratiwi Tohab, SH	Pertanggungjawaban Pidana Notaris/PPAT Terhadap Pembuatan Akta Jual Beli Berdasarkan Pemalsuan Surat Bersama-Sama Dengan Para Pihak	Prof. Dr. Elwi Danil, SH., MH Dr. Azmi Fendri, SH., MKn
231	Alendi Pramulin, SH	Kedudukan Akta Pernyataan Pembagian Harta Warisan Yang Dibuat Dihadapan Notaris (Studi Kasus Perkara Nomor 118/PDT/V/2000)	Dr. Ferdi, SH., MH Neneng Oktarina, SH., MH
232	Sudarmono, SH	Balik Nama Sertipikat Hak Milik Berdasarkan Akta Jual Beli Yang Menggunakan Kuasa Mutlak Di Kota Pekanbaru	Dr. Kurnia Warman, SH., M.Hum Dr. Sukanda Husin, SH., LLM
233	Zarfitson Zanuar, SH	Eksekusi Objek Angunan Yang Diikat Dengan Hak Tanggungan Sebagai Jaminan Kredit Di BPR Kabupaten Sijunjung	Prof. Dr. Zainul Daulay, SH., MH Dr. Dahliil Marjon, SH., MH
234	Rati Narulia, SH	Pembelian Tanah Dan Rumah Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Dan Kuasa Yang Obyeknya Terikat Hak Tanggungan Pada Perbankan Di Kota Padang	Dr. Kurnia Warman, SH., M.Hum Dr. Beatrix Benni, SH., MPd., MKn
235	Chintya Paramitha Ziano, SH	Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Dalam Pengembangan Kawasan Pemukiman Di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang	Dr. Kurnia Warman, SH., M.Hum Syofiarti, SH., MH
236	Richa Sonada, SH	Pengikatan Jual Beli Rumah Melalui Pengembang Pada PT. Riau Runggo Abadi Abadi Di Kota Pekanbaru	Dr. Azmi Fendri, SH., MKn Dr. Jean Elvardi, SH., MH
237	Rafika Sari, SH	Akibat Hukum Penolakan Itsbat Nikah Poligami Terhadap Anak dan Harta Bersama Dalam Perkawinan (Studi Perkara Nomor :0321/Pdt.G/2014/PA.BSK)	Prof. Dr. Yaswirman, MA Linda Elmis, SH., MH

238	Erinaldi, SH	Pelaksanaan Parate Executie Pbjek Hak Tanggungan Sebagai Bentuk Pelunasan Utang Debitor Wanprestasi Di Bank Syariah Bukopin Bukittinggi	Prof. Dr. Zainul Daulay, SH., MH Dr. Busyra Azheri, SH., MH
239	Restu Mardhatillah, SH	Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Dalam Melakukan Pemeriksaan Terhadap Notaris Di Provinsi Sumatera Barat	Prof. Dr. Ismansyah, SH., MH Dr. Azmi Fendri, SH., MKn
240	Echo Pratama, SH	Kedudukan Hukum Perjanjian Kesepakatan Perdamaian Di Bawah Tangan Dengan Adanya Putusan Pengadilan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap	Prof. Dr. Ismansyah, SH., MH Dr. Azmi Fendri, SH., MKn
241	Muhammad Fauzan, SH	Kewajiban Notaris Dalam M emberikan Jasa Hukum Dibidang Kenotariatan Secara Cuma-Cuma Kepada Orang Tidak Mampu Di Kota Padang	Prof. Dr. Saldi Isra, SH., MPA Dr. Yuslim, SH., MH
242	Hayatin Nufus, SH	Tanggung Jawab Notaris/PPAT Dalam Proses Balik Nama Sertifikat Hak Milik Atas Tanah (Studi Kasus Perkara Nomor:535/Pid.B/2013/PN.Pdg)	Prof. Dr. Elwi Danil, SH., MH Dr. Azmi Fendri, SH., MKn
243	Fachria Yelfi, SH	Perlindungan Hukum Dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris	Prof. Dr. Ismansyah, SH., MH Yoserwan, SH., MH., LLM
244	Yena Handayani, SH	Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Dengan Klausula Baku Di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Prof. Dr. Yuliandri, SH., MH Neneng Oktarina, SH., MH
245	M.Alvin Andithira, SH	Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Penggunaan Fasilitas Kredit Perbankan PT. Bank Tabungan Negara Cabang Utama Jambi	Dr. Dahlil Marjon, SH., MH Neneng Oktarina, SH., MH
246	Rahmad Rudi Yanto, SH	Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang	Prof. Dr. Yaswirman, MA Dr. Dahlil Marjon, SH., MH

		Padang	
247	Ferdiko, SH	Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Di Kota Padang	Dr. Busyra Azheri, SH., MH Syofiarti, SH., MH
248	Deni Asnanto, SH	Kedudukan Hukum Jasa Pihak Ketiga Dalam Penarikan Objek Fidusia Oleh Perusahaan Finance Di Kota Padang	Dr. Mardenis, SH., Msi Dr. Azmi Fendri, SH., MKn
249	Fuad Brylian Yanri, SH	Pertanggungjawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Dibuat Berindikasi Perbuatan Pidana	Prof. Dr. Ismansyah, SH., MH Hj. Ulfanora, SH., MH
250	Ade Wirtanto Roja Paing, SH	Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Yang Dinyatakan Pailit Oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)	Dr. Busyra Azheri, SH., MH Dr. Dahlil Marjon, SH., MH
251	Lusiah Lisza, SH	Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Pada PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Cabang Padang Melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang	Prof. Dr. Zainul Daulay, SH., MH Frenadin Adegustara, SH., MS
252	Melati Handayani, SH	Pencairan Kredit Pada PT. Bank Rakyat Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pekanbaru Sudirman Berdasarkan Cover Note Yang Dikeluarkan Oleh Notaris/PPAT	Prof. Firman Hasan, SH., LL.M Frenadin Adegustara, SH., MS
253	Budi Kurnia, SH	Tinjauan Yuridis Pemanggilan Notaris Sehubungan Dengan Akta Atau Protokol Notaris Yang Berada Dalam Penyimpanan Notaris Oleh Aparat Penegak Hukum (Ditinjau Dari Putusan Mahkamah Kontitusi No. 49/PUU-X/2012 DAN Permenkumham No. 7 Tahun 2016)	Prof. Dr. Zainul Daulay, SH., MH Neneng Oktarina, SH., MH
254	Hadri Herlynda, SH	Penerapan Sanksi Administrasi Bagi Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Terhadap	Dr. Azmi Fendri, SH., MKn Dr. Jean Elvardi, SH., MH

		Jabatannya Di Kota Padang	
255	Indra Ismanto, SH	Penyelesaian Kredit Macet Pada Kredit Konsumtif Aparatur Sipil Negara Di PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Utama Padang	Prof. Firman Hasan, SH., LLM Syahrial Razak, SH., MH
256	Yossi Yolanda Jushardi, SH	Pengikatan Penjaminan Gadai Saham Yang Akan Ada Dikemudian Hari Dalam Akta Gadai Saham	Dr. Busyra Azheri, SH., MH Neneng Oktarina, SH., MH
257	Sadri, SH	Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pegalihan Hak Atas Tanah Bagi Wajib Pajak Yang Mengikuti Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Di Kota Pekanbaru	Dr. Suharizal, SH., MH Syofiarti, SH., MH
258	Noverdi Saat, SH	Pewarisan Harta Pencaharian Dalam Masyarakat Matrilineal (Studi Di Nagari Ulakan Kabupaten Padang Pariaman)	Dr. Kurnia Warman, SH., M.Hum Dr. Zefrizal Nurdin, SH., MH
259	Tomi Firdaus, SH	Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Lingkar Lubuk Kilangan Bungus Teluk Kabung Kota Padang	Dr. Kurnia Warman, SH., M.Hum Dr. Zefrizal Nurdin, SH., MH
260	Jovi Putra Darupa, SH	Tanggung Jawab Notaris Terhadap Peralihan Protokol	Dr. Azmi Fendri, SH., MKn Neneng Oktarina, SH., MH
261	Syukry Gusril, SH	Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Secara Damai Pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Padang	Prof. Dr. Yaswirman, MA Syahrial Razak, SH., MH
262	Indri Dina Yanti, SH	Pelelangan Objek Jaminan Hak Tanggungan Melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pada Bank Mega Cabang Dosen	Dr. Busyra Azheri, SH., MH Dr. Rembrandt, SH., MPd
263	Resa Oktaviani, SH	Pengawasan Terhadap Notaris Dalam Menjalankan Kewenangan Di Kota Padang	Prof. Dr. Yuliandri, SH., MH Dr. Azmi Fendri, SH., MKn
264	Rezi Yanita Parastika, SH	Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Sehubungan Dengan Pemeriksaan Oleh Majelis	Prof. Dr. Zainul Daulay, SH., MH Frenadin Adegustara, SH.,

		Kenormatan Notaris Dalam Memberikan Izin Kepasa Penyidik Kepolisian Terhadap Dugaan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Notaris Di Wilayah Sumatera Barat	MS
265	Nico Elsar Ferdian, SH	Konsolidasi Tanah Dalam Pembangunan Jalur II Jalan Padang By Pass	Prof. Dr. Yuliandri, SH., MH Dr. Azmi Fendri, SH., MKn
266	Victor Martin Cori, SH	Kewajiban Notaris Yang Telah Diangkat dan Disumpah Untuk Menjalankan Jabatan Di Kota Padang	Dr. Azmi Fendri, SH., MKn Neneng Oktarina, SH., MH
267	Yudi Prama Yasmir, SH	Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Beritikad Baik (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1017 K/Pdt/2008)	Prof. Dr. Yulia Mirwati, SH., CN., MH Hj. Ulfanora, SH., MH
268	Irdayusman, SH	Eksekusi Obyek Jaminan Hak Tanggungan Pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Batusangkar	Prof. Dr. Ismansyah, SH., MH Dr. Dahlil Marjon, SH., MH
269	Miko Hidayat, SH	Analisis Yuridis Perjanjian Kerja Sama Penyaluran Dana Program Kemitraan Antara PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Dengan PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero)	Dr. Busyra Azheri, SH., MH M. Hasbi, SH., MH
270	Valery Sundana, SH	Pendaftaran Tanah Wakaf Di Kota Padang Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004	Prof. Dr. Yaswirman, MA Dr. Azmi Fendri, SH., MKn
271	Suci Amelia Permata Sari, SH	Pelaksanaan Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Pada PT. Bank Negara Indonesia Tbk Cabang Padang Berdasarkan Permenko Bidang Perekonomian No. 13 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat	Prof. Dr. Yaswirman, MA Neneng Oktarina, SH., MH
272	Mahliyanti Adelia Warman, SH	Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Hutang Piutang (Studi Kasus Perkara Nomor:16/Pdt.G/2014/PN.PRM)	Dr. Yulfasni, SH., MH Ulfanora, SH., MH
273	Irhan Sarmen, SH	Kekuatan Hukum Sertipikat Hak Tanggungan Yang Batal	Dr. Busyra Azheri, SH., MH Neneng Oktarina, SH., MH

		Berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Balikpapan (Studi Perkara No. 129/Pdt.G/2011.Bpp Tanggal 23 April 2012)	
274	Yulia Syafitri, SH	Penyelesaian Kredit Berdasarkan Hak Tanggungan Dalam Hal Terjadi Perceraian	Dr. Kurnia Warman, SH., M.Hum Ulfanora, SH., MH
275	Heru Gunawan Putra, SH	Mediasi Sengketa Pendaftaran Tanah Kaum Melalui Kantor Pertanahan Kota Padang	Dr. Kurnia Warman, SH., M.Hum Linda Elmis, SH., MH
276	Afrizal, SH	Pengembangan Dalam Kaitannya Dengan Pelaksanaan Perjanjian Pembangunan Rumah Toko	Dr. Busyra Azheri, SH., MH M. Hasbi, SH., MH
277	Yondrival, SH., MM	Tanggung Jawab Dewan Komisaris Dikaitkan Dengan Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Pada Bank Umum	Dr. Busyra Azheri, SH., MH Ulfanora, SH., MH
278	Hengky Nofriwardi, SH	Penambahan Nama Pada Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Berdasarkan Hibah Di Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat	Dr. Kurnia Warman, SH., M.Hum Dasman, SH., MKn
279	Nova Susanti, SH	Penadftaran Tanah Pertama Kali Berdasarkan Jual Beli Di BAWAH Tangan Di Kabupaten Padang Pariaman	Dr. Kurnia Warman, SH., M.Hum Sri Arnetti, SH., MH
280	R. Balkhis Tiarani Putri, SH	Akibat Hukum Terhadap Perkawinan Tidak Tercatat Bagi Etnis Tionghoa Di Kabupaten Karimun	Prof. Dr. Saldi Isra, SH., MPA Dr. Beatrix Benni, SH., MPd., MKn
281	Widya Putri, SH	Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Fidusia Kendaraan Bermotor Melalui Media Internet Pada PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Bukittinggi	Dr. Yuslim, SH., MH Frenadin Adegustara, SH., MS
282	Mutiara Hamelya Putri, SH	Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Melalui Penjualan Di Bawah Tangan Dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada PT. Bank Mayapada Internasional Cabang Pekanbaru	Dr. Yulfasni, SH., MH Dr. Rembrandt, SH., MPd., MKn

283	Apriyandi Mizwar, SH	Penyelesaian Kredit Macet Melalui Penjualan Di Bawah Tangan Atas Objek Pajak Jaminan Yang Diikat Dengan Jaminan Fidusia Dengan Perusahaan Pembiayaan PT. Bima Multi Finance Cabang Pekanbaru	Dr. Yulfasni, SH., MH Dr. Dahlil Marjon, SH., MH
284	Evita Yulianti, SH	Pemanfaatan Objek Wisata Lawang Park Oleh CV. Wisata Sumbar Madani	Dr. Yuslim, SH., MH Frenadin Adegustara, SH., MS
285	Elma Yuliska, SH	Pembuatan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Oleh Notaris Menurut Perkaban Nomor 8 Tahun 2012 Di Payakumbuh	Prof. Dr. Yaswirman, MA Neneng Oktarina, SH., MH
286	Roby Danil, SH	Efektivitas Majelis Pengawas Daerah Notaris Bukittinggi Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Notaris	Dr. Azmi Fendri, SH., MKn Frenadin Adegustara, SH., MS
287	Chair Arrafi, SH	Pengalihan Piutang Secara Cessie Dari PT. Bank Sahabat Sampoerna Cabang Pekanbaru Kepada Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati Cabang Kandis Yang Diikat Hak Tanggungan	Dr. Busyra Azheri, SH., MH Syahrial Razak, SH., MH
288	Alexander, SH	Pengawasan Terhadap Notaris Yang Rangkap Jabatan Oleh Majelis Pengawas (Studi Kasus Di Sumater Barat)	Dr. Busyra Azheri, SH., MH Yoserwan, SH., MH., LLM
289	Yona Evanita, SH	Eksekusi Putusan Hakim Dalam Sengketa Pembagian Harta Waris Terhadap Tanah Di Pengadilan Agama Padang Panjang	Prof. Dr. Yaswirman, MA Linda Elmis, SH., MH
290	Sri Yulianti, SH	Pengangkatan Anak Tunggal Oleh Orang Tua Tunggal Pada Masyarakat Hukum Adat Bali	Prof. Dr. Yaswirman, MA Linda Elmis, SH., MH
291	Firstly Markhaputri, SH	Penggunaan Girik Sebagai Alas Hak Dalam Pendaftaran Tanah Hak Milik Pertama Kali Di Kabupaten Bekasi	Dr. Kurnia Warman, SH., M.Hum Dasman, SH., MKn

292	Rahman Aulia, SH	Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Jual Beli Tanah Yang Belum Bersertipikat Di Kota Padang	Dr. Kurnia Warman, SH., M.Hum Syofiarti, SH., MH
293	Suci Wulandari, SH	Jual Beli Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Di Atas Tanah Hak Guna Bangunan Atas Hak Pengelolaan Pemko Padang (Studi Kasus Sentral Pasar Raya)	Dr. Kurnia Warman, SH., M.Hum Dr. Ferdi, SH., MH
294	Ronal Miza, SH	Wanprestasi Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pembangunan Ruko Antara PT. Menara Bumi Perdana Dengan PT. Wiko Manggara Putra	Prof. Dr. Saldi Isra, SH., MPA Syahrial Razak, SH., MH
295	Megawati, SH	Pembuatan Surat Di Bawah Tangan Yang Dilegalisasi Oleh Notaris Di Kota Padang	Dr. Azmi Fendri, SH., MKn Syofiarti, SH., MH
296	Indah Andarini, SH	Eksekusi Jaminan Gadai Emas Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarandam	Dr. Busyra Azheri, SH., MH Ulfanora, SH., MH
297	Olan Suryadi, SH	Tanggung Jawab Debitur Terhadap Musnahnya Objek Jaminan Fidusia Tidak Terdaftar Dalam Perjanjian Kredit Pada PT. BPR Guguk Mas Makmur	Dr. Busyra Azheri, SH., MH Ulfanora, SH., MH
298	Elfika, SH	Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian (Putusan Nomor 0576/Pdt.G/2014/PA.Bkt dan Putusan Nomor 0012/Pdt.G/2015/PTA.Pdg)	Prof. Dr. Yaswirman, MA Linda Elmis, SH., MH
299	Dihka Almira Faith, SH	Pemberian Hak Milik Atas Tanah Negara Bekas Erfpacht Verponding 1974 Di Kota Padang	Prof. Dr. Saldi Isra, SH., MPA Dr. Azmi Fendri, SH., MKn
300	Masya Toni, SH	Kepastian Hukum Akta Keterangan Hak Waris Yang Dibuat Oleh Notaris Dan Prakteknya Di Kota Padang	Dr. Azmi Fendri, SH., MKn Linda Elmis, SH., MH
301	Soni Ferdinandez, SH	Pengurusan Hak Atas Tanah Pasca Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di Kab.	Prof. Dr. Yuliandri, SH., MH Hengki Andora, SH., MH

		Kerinci	
302	Sonya Silvia, SH	Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Kontrak Pengadaan Barang Atau Jasa Oleh Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang Dengan CV Afiza Limko Konsultan	Prof. Firman Hasan, SH., LLM Dr. Dahlil Marjon, SH., MH
303	Lola Wira Agusni, SH	Pengikatan Jual Beli Tanah Di Bawah Tangan Sebagai Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Antara Pengembang Dengan Konsumen Di Kota Padang	Dr. Azmi Fendri, SH., MKn Sri Arnetti, SH., MH
304	Zul Efendi, SH	Tanggung Jawab Perusahaan Pers Sebagai Badan Hukum Berbentuk Perseroan Terbatas (Studi Kasus Pada PT. Haluan Sumbar Mandiri)	Prof. Dr. Elwi Danil, SH., MH Yoserwan, SH., MH., LLM
305	Dilan Marve, SH	Perjanjian Jual Beli Alat Berat Dengan Sistem Direct Credit (Studi Kasus PT. Hexindo Adi Perkasa Cabang Pekanbaru)	Dr. Ferdi, SH., MH Ulfanora, SH., MH
306	Meilisa Fitri Harahap, SH	Pengawasan Ombudsman Republik Indonesia Terhadap Majelis Pengawas Notaris	Prof. Dr. Yuliandri, SH., MH Dr. Yuslim, SH., MH
307	Beby Famelia, SH	Pelaksanaan Pemanggilan Notaris Terkait Akta Yang Dibuatnya Demi Kepentingan Penyidik Umun Di Polda Riau	Prof. Dr. Elwi Danil, SH., MH Dr. Shinta Agustina, SH., MH
308	Fauzi Apriza, SH	Status Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT) Yang Tidak Memenuhi Ketentuan Modal Di Setor	Dr. Busyra Azheri, SH., MH Dr. Syofiran Syofyan
309	Yunidarti, SH	Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Di Kota Padang	Prof. Dr. Yuliandri, SH., MH Dr. Azmi Fendri, SH., MKn
310	Ridwan, SH	Penyelesaian Tanah Konsolidasi Dalam Pembangunan Jalan By Pass Kota Padang	Dr. Azmi Fendri, SH., MKn Ilhamdi Taufik, SH., MH

311	Jenni Ramadhan, SH	Pertanggungjawaban Pidana Notaris Yang Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Kuasa (Studi Kasus Perkara 535/Pid.B/2013/PN.Pdg)	Prof. Dr. Elwi Danil, SH., MH Neneng Oktarina, SH., MH
312	Darman Munir, SH	Kedudukan Hukum Penyelesaian Sengketa Melalui Akta Perdamaian Yang Dikuatkan Dengan Putusan Pengadilan	Dr. Mardenis, SH., Msi Dr. Azmi Fendri, SH., MKn
313	Rima Melira, SH	Perlindungan Terhadap Pekerja Dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pada Proyek Indarung IV	Dr. Dahlil Marjon, SH., MH Dr. Shinta Agustina, SH., MH
314	Indra Jaya, SH	Implikasi Putusan Makamah Konstitusi Terhadap Wadah Organisasi Notaris	Prof. Dr. Yuliandri, SH., MH Dr. Suharizal, SH., MH
315	Agnes Yarmita, SH	Peralihan Hak Milik Atas Tanah Dalam Perkawinan Campuran	Dr. Azmi Fendri, SH., MKn Syahrial Razak, SH., MH
316	Riccardo Irwan, SH	Akibat Hukum Pembatalan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Berdasarkan Putusan Hakim Oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Padang	Dr. Azmi Fendri, SH., MKn Sri Arnetti, SH., MH
317	Kinta Arica Utami, SH	Kekuatan Hukum Akta Fidusia Terhadap Kreditur	Prof. Dr. Elwi Danil, SH., MH Linda Elmis, SH., MH
318	Arsil Ardi. S, SH	Larangan Pemilikan Tanah Absentee Dalam Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Di Kabupaten Kampar	Dr. Kurnia Warman, SH., M.Hum Dr. Khairani, SH., MH
319	Syafrizal, SH	Implementasi Dari Surat Edaran Kepala BPN RI No. 5/SE/IV/2013 Dalam Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah	Dr. Yuslim, SH., MH Frenadin Adegustara, SH., MS
320	Epy Kusnadi, SH	Legalitas Penguasaan Tanah 393 Ha Pasca Penyerahan Oleh PT. Tambang Batu Bara Bukit Asam (Persero) Tbk Kepada Pemerintah Kota	Dr. Yuslim, SH., MH Frenadin Adegustara, SH., MS

		Sawahlunto	
321	Mhd. Dwi Simon, SH	Peralihan Hak Milik Atas Tanah Kaum Berdasarkan Pewarisan Di Kota Payakumbuh	Dr. Kurnia Warman, SH., M.Hum Syofiarti, SH., MH
322	Rozi Septia, SH	Tanggung Jawab dan Peranan Notaris Dalam Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas	Prof. Dr. Yuliandri, SH., MH Dr. Yuslim, SH., MH

7.1.2 Jelaskan penggunaan pendekatan dan pemikiran baru dalam penelitian dosen dan mahasiswa

Pendekatan dan pemikiran baru selalu dikembangkan oleh Prodi MKn FH Unand terhadap penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa. Bentuk upaya yang dilakukan sebagai suatu pengembangan adalah terkait metode pendekatan pada penelitian – penelitian dosen dan mahasiswa, yaitu metode pendekatan pada penelitian hukum normatif dan dan penelitian hukum empiris. Pendekatan baru yang digunakan merupakan Pendekatan hermenutika dan Pendekatan Partisipatif.

Pendekatan Hermenutika merupakan suatu teori atau filsafat tentang interpretasi makna dari suatu peraturan perundang-undangan yang membahas pola hubungan antara teks, pembuat teks dan pembaca. Interpretasi terhadap hukum selalu berhubungan dengan isinya. Setiap hukum mempunyai dua segi yaitu yang tersurat dan yang tersirat, atau bunyi hukum dan semangat hukum, sehingga dalam hal ini ketepatan pemahaman dan ketepatan penjabaran adalah sangat relevan bagi dokumen hukum. Dengan demikian ruang lingkup hermeneutic hukum adalah ajaran filsafat mengenai hal memahami sesuatu atau suatu metode interpretasi (penafsiran) terhadap teks, baik berupa teks hukum, fakta hukum, naskah-naskah hukum, dokumen resmi negara dan yurisprudensi.

Pendekatan Partisipatif yaitu suatu pendekatan penelitian yang dilakukan dengan pendekatan secara langsung oleh peneliti ke masyarakat, dengan masuk ke dalam komunitas tersebut, untuk mendapatkan kenyataan yang terjadi sesungguhnya di lapangan. Dari beberapa penelitian yang dilakukan oleh dosen ataupun mahasiswa, dapat diklasifikasikan menjadi penelitian interdisipliner dan penelitian multidisipliner. Penelitian interdisipliner adalah penelitian yang menggunakan satu

disiplin ilmu, sedangkan penelitian multidisipliner adalah penelitian yang menggunakan beberapa disiplin ilmu.

Berdasarkan data yang terdapat pada Tabel 7.1.1.2 dan Tabel 7.1.5, terdapat gambaran sebagian besar penelitian dan artikel yang dilakukan oleh dosen ataupun mahasiswa menggunakan pendekatan penelitian hermeneutika dan partisipatif sebagai metode pendekatan penelitian yang saat ini sedang dikembangkan oleh Prodi MKn FH Unand. Dari penelitian mahasiswa yang terdapat pada Tabel 7.1.1.2 maka terdapat gambaran sebanyak 32% penelitian menggunakan metode pendekatan hermeneutika dan 68% menggunakan metode pendekatan partisipatif. Metode pendekatan ini akan terus dikembangkan oleh Prodi MKn FH Unand sebagai suatu metode pendekatan dan pemikiran baru dalam melakukan penelitian hukum.

7.1.3 Jelaskan hasil penelitian dosen atau penelitian tesis mahasiswa pada butir 7.1.1. yang berdampak pada peningkatan (1) produktivitas, (2) kesejahteraan masyarakat, dan (3) mutu lingkungan.

1. Hasil Penelitian Dosen Atau Penelitian Tesis Mahasiswa Yang Berdampak Pada Peningkatan Produktivitas

Penelitian Dosen Prodi MKn yang berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas baik yang dilakukan oleh Dosen maupun penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa MKn, yang bekerjasama dengan instansi pemerintah ataupun swasta telah menghasilkan beberapa dokumen dalam bentuk Naskah Akademik (NA) Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Hampir 40% dari penelitian yang dilakukan oleh Dosen menghasilkan beberapa dokumen NA.

Diantara penelitian tersebut antara lain Penyusunan Naskah Akademik dan Ranperda Koperasi, Dinas Koperasi Provinsi Sumatera Barat, Penyusunan Naskah Akademis dan Ranperda Penanaman Modal, Kabupaten Pesisir Selatan, Penyusunan Naskah Akademis dan Ranperda Perlindungan Konsumen, DPRD Provinsi Sumatera Barat, Penyusunan Naskah Akademis dan Ranperda Izin Toko Modern, Dinas Perdagangan dan UKM Kota Padang Panjang, Penyusunan Naskah Akademis dan Ranperda *Corporate Social Responsibility*. **Dampak dari**

penelitian – penelitian tersebut dalam kaitannya dengan produktivitas yaitu lahirnya Rancangan Peraturan Daerah yang berkualitas sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang mana Naskah Akademik memiliki fungsi sebagai kajian terhadap kebutuhan peraturan daerah dan implementasinya.

2. Hasil Penelitian Dosen Atau Penelitian Tesis Mahasiswa Yang Berdampak Pada Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Penelitian Dosen Prodi MKn yang berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat yaitu penelitian yang terkait dengan pengelolaan tanah ulayat dan asset nagari di Sumatera Barat. Penelitian ini menyoroti dimana begitu banyak sengketa pertanahan yang muncul di dalam pengelolaan tanah ulayat, baik dalam bentuk vertikal maupun horizontal. Penelitian yang berkaitan dengan ini diantaranya dilakukan oleh Prof. Dr. Yulia Mirwati pada tahun 2017 dengan judul Pola Penyelesaian Sengketa Adat Salingka Nagari dalam Meningkatkan Pemberdayaan Nagari Di Sumatera Barat, serta penelitian berikutnya dengan judul Kepastian Hukum Pensertipikatan Tanah Ulayat Dalam Pemberdayaan Aset Nagari Di Propinsi Sumatera Barat. Orientasi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat juga terdapat pada penelitian yang dilakukan pada tahun 2016 oleh Dr. Yuslim, SH, MH dengan judul Potensi Pendapatan Asli Nagari Dalam Membiayai Urusan Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat, dan penelitian yang dilakukan oleh Dr. Azmi Fendri, SH dengan judul penelitian Pemberdayaan Pemerintahan Nagari Untuk Pengelolaan Dana Nagari Dalam Rangka Melaksanakan Otonomi Nagari, dilanjutkan dengan penelitian tahun 2017 yang berjudul Pemanfaatan Tanah Sebagai Aset Pemerintahan Nagari Dalam Menunjang Pendapatan Nagari di Propinsi Sumatera Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat aset-aset nagari berupa tanah, hutan, yang menjadi aset nagari untuk dikelola oleh masyarakat nagari, dan berkontribusi terhadap pendapatan asli nagari.

3. Hasil Penelitian Dosen Atau Penelitian Tesis Mahasiswa Yang Berdampak Pada Peningkatan Mutu Lingkungan

Beberapa penelitian yang terkait dengan peningkatan mutu lingkungan telah dilakukan oleh Prodi MKn FH Unand. Penelitian yang terkait diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Dr. Rembrandt, SH, MPd pada tahun 2017 dengan judul Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Melalui Penerapan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan di Sumatera Barat. Juga terdapat penelitian yang dilakukan oleh Dr. Busyra Azheri, SH, MH pada tahun 2017 dengan judul penelitian Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan oleh Perusahaan yang Bergerak di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam di Sumatera Barat. Penelitian ini menghasilkan suatu konsep pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dengan meningkatkan kerjasama dengan para pemangku kepentingan. Perusahaan tidak mungkin bergerak sendiri dalam mengimplementasikan tanggung jawab sosial perusahaan, dibutuhkan keterlibatan masyarakat lokal dan pemerintah daerah. Dengan melibatkan pihak pemangku kepentingan dalam melakukan konservasi lingkungan, maka perusahaan dengan mudah menciptakan relasi yang baik dengan para pemangku kepentingan tersebut.

7.1.4 Tuliskan jumlah judul penelitian* yang sesuai dengan bidang keilmuan PS, yang dilakukan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS dalam tiga tahun terakhir dengan mengikuti format tabel berikut :

Sumber Dana Kegiatan Penelitian	Jumlah Penelitian dalam Tahun Pelaksanaan			Jumlah Penelitian Selama Tiga Tahun
	TS-2	TS-1	TS	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pembiayaan sendiri oleh peneliti	6	3	-	9
PT yang bersangkutan	2	4	1	7
Depdiknas	12	13	21	46
Institusi dalam negeri di luar Depdiknas	-	1	-	1
Institusi luar negeri	-	-	-	0

Catatan: (*) sediakan data pendukung pada saat asesmen lapangan

7.1.5 Tuliskan judul artikel ilmiah/karya ilmiah/karya seni/buku yang dipublikasikan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS dalam tiga tahun terakhir dengan mengikuti format tabel berikut:

No	Judul ⁽¹⁾	Nama-nama Dosen	Dipublikasikan pada	Tahun Penyajian/ Publikasi	Nama Lembaga Sitasi ⁽²⁾	Tingkat ⁽³⁾		
						Lokal/ Nasional Tidak Terakreditasi	Nasional Terakreditasi	Internasional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Seleksi Ideal Anggota Komisi Yudisial	Prof. Dr. Yuliandri, SH, MH	Buku Bunga Rampai, Komisi Yudisial RI	2016	-		√	
2.	Empowerment Community Leaders as to Strengthen the Implementation of Regional Autonomy	Prof. Dr. Yuliandri, SH, MH	Journal of Politics and Law; Vol. 10, No. 5; 2017 ISSN 1913-9047 E-ISSN 1913-9055 Published by Canadian Center of Science and Education	2017	Google Scholar			√
3.	Obstruction of Justice in the effort to Eradicate Corruption in Indonesia. “**”	Prof. Dr. Yuliandri, SH, MH	International Journal Of Law Crime and Justice, Volume 51 December 2017. ISSN 1756- 0616	2017	Google Scholar			√
4.	Retributive Justice Theory and the Application of the Principle of Sentencing Proportionality in Indonesia	Prof. Dr. Yuliandri, SH, MH	Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, Volume 21, Issue 4, 2018.	2018	Google Scholar			√

5.	<i>The Principle Of Non Maleficence In Relation With Construction Contract In Indonesia</i>	Prof. Dr. Yuliandri, SH, MH	<i>Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, Volume 21, Issue 3, 2018.</i>	2018	Google Scholar			√
6.	Penyelidikan, Penyidikan, Dan Penuntutan Tindak Pidana Di Bidang Perbankan.	Prof. Dr. Ismansyah, SH, MH	Buku dengan Penerbit Rajawali Pers Tahun 2015, ISBN 978-979-769-856-0.	2015	Ditjen HaKI Kemenkumham (Hak Cipta)		√	
7.	Penyelesaian Konflik Sosial Melalui Penegakan Hukum Yang Berkeadilan	Prof. Dr. Ismansyah, SH, MH	UNES JOURNAL OF LAW Vol.2 Issue 2	2017	-	√		
8.	Menegakan Hukum Tanpa Melanggar Hukum	Prof. Dr. Elwi Danil, SH, MH	Raja Grafindo Persada	2015	Ditjen HaKI Kemenkumham (Hak Cipta)		√	
9.	Sinerjitas Aparat Penegak Hukum Guna Efektivitas Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi	Prof. Dr. Elwi Danil, SH, MH	Lemhanas RI	2015	-		√	
10.	Korupsi : Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya.	Prof. Dr. Elwi Danil, SH, MH	Raja Grafindo Persada	2015	Ditjen HaKI Kemenkumham (Hak Cipta)		√	

11.	Perluah Keterangan Ahli Hukum Pidana dalam Sidang Peradilan Pidana	Prof. Dr. Elwi Danil, SH, MH	Pustaka Kemang	2016	Ditjen HaKI Kemenkumham (Hak Cipta)		√	
12.	Optimizing Confiscation of Assets in Accelarating the Eradicating of Corruptoin. "*"	Prof. Dr. Elwi Danil, SH, MH	Hasanuddin Law Review Vol. 3, Issu 1	2017	a. DOAJ b. Microsoft Academic c. EBSCO d. Index Copernicus e. Google Scholar f. Indonesia One Search g. Harvard Library h. GIGA i. Exlibris j. WorldCat k. IPI l. Copac		√	
13.	A Philosophical Analysis to Uncover the Meaning and Terminology of Person in Indonesia Criminal Law Context	Prof. Dr. Elwi Danil, SH, MH	Nagari Law Review	2017	Google Scholar	√		
14.	Obstruction of Justice in the effort to Eradicate Corruption in Indonesia	Prof. Dr. Zainul Daulay, SH, MH	International Journal Of Law Crime and Justice, Volume 51 December 2017. ISSN 1756- 0616	2017	Google Scholar			√

15.	<i>The Variegated Landscape of Mediation: A Comparative Study of Mediation Regulation and Practices in Europe and the World, Manon Schoneille and Fred Schonewille (editor)</i>	Prof. Dr. Zainul Daulay , SH, MH	Eleven International Publishing	2015	-			√
16.	<i>Settlement of Syariah Economic Dispute through the Special Court of Syariah Economic in the Religious Court</i>	Prof. DR. H. Yaswirman , MA.	Ahkam Jurnal Ilmu Syariah. Vol. 17, No. 2, 2017.	2017	a. DOAJ b. EBSCO c. Google Scholar d. IPI e. Base f. Indonesia One Search g. Sinta h. ISJD		√	
17.	Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia	Prof. DR. H. Yaswirman , MA.	Buku. Unand Press.	2016	-		√	
18.	Leasing of Land of PT. KAI (Persero) in West Sumatera	Prof. Dr. Yulia Mirwati, SH., Cn., MH	Jurnal Hukum dan Pembangunan. Vol. 47.No.4 Desember 2017.	2017	a. DOAJ b. Google Scholar c. WorldCat d. Scilit e. Sinta		√	
19.	<i>Leasing Of Land By Indonesian Railways - Legal Or Not?</i>	Prof. Dr. Yulia Mirwati, SH., Cn., MH	<i>International Journal Of Business, Economics And Law, Vol. 12, Issue 4, 2017. ISSN 2289-1552</i>	2017	Google Scholar			√

20.	<i>Legal Certainty Of Ulayat Lands Certification In The Empowerment Of Nagari Assets In West Sumatera Province</i>	Prof. Dr. Yulia Mirwati, SH., Cn., MH	International Journal of Law, Government and Communication, Vol. 2, Issues: 6, December, 2017, pp.127-138. eISSN: 0128-1763	2017	Google Scholar			√
21.	<i>Application of Land Management Right in Indonesias against Law</i>	Prof. Dr. Yulia Mirwati, SH., Cn., MH	IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS), 22 (3). pp. 117-124. ISSN 2279-0837	2017	Google Scholar			√
22.	<i>Registration Of Local Government Asset In West Sumatra That Derived From Communal Land</i>	Prof. Dr. Yulia Mirwati, SH., Cn., MH	Proceedings of the 5th International Conference On Social Sciences Research 2017 (e-ISBN: 978-967-0792-14-9). 27th & 28th March 2017, Berjaya Times Square Hotel, Kuala Lumpur, Malaysia. Organized by http://worldconferences.net/home	2017	Google Scholar			√

23.	Konflik Tanah Ulayat	Prof. Dr. Yulia Mirwati, SH., Cn., MH	Buku. Unand University Press.	2015	-		√	
24.	Living and Evolving Constitution of Indonesia	Prof. Dr. Saldi Isra, SH, MPA	Buku. Diterbitkan oleh Konpress, 2018	2018	-		√	
25.	Pergeseran Fungsi Legislasi	Prof. Dr. Saldi Isra, SH, MPA	Buku edisi Revisi. Diterbitkan oleh Rajawali Pers, 2018.	2018	Ditjen HaKI Kemenkumham (Hak Cipta)		√	
26.	Konstitusi untuk Negeri. 50 Jejak Pena Saldi Isra	Prof. Dr. Saldi Isra, SH, MPA	MI Publishing, 2018	2018	-		√	
27.	Sistem Pemerintah an Indonesia: Pergulatan Ketatanegaraa n Menuju Sistem Pemerintahan Presidensial	Prof. Dr. Saldi Isra, SH, MPA	Buku edisi Revisi. Diterbitkan oleh Rajawali Pers, 2018.	2018	Ditjen HaKI Kemenkumham (Hak Cipta)		√	
28.	<i>Indonesian National Development Planning System Based on State Policy Guidelines (GBHN) : A Return to the Future?</i>	Prof. Dr. Saldi Isra, SH, MPA	International Journal of Law Reconstructi on Volume II, Issue 1, March 2018. ISSN 2580-9245.	2018	Google Scholar			√

29.	<i>Enhancing legal pluralism: The role of adat and Islamic laws within the Indonesian legal system</i>	Prof. Dr. Saldi Isra, SH, MPA	Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues	2018	Google Scholar			√
30.	<i>Judge's Decision on Work Termination Dispute in Indonesia after Constitutional Court Decision Number 37/PUU-IX/2011</i>	Prof. Dr. Saldi Isra, SH, MPA	Jurnal Dinamika Hukum, vol. 18, No. 2, May 2018	2018	a. DOAJ b. Slna c. IPI d. CrossRef e. Google Scholar f. ISJD g. CORE h. COPAC i. LIVIVO j. BASE k. Indonesia One Search l. EBSCO m. Journal TOCs n. OAJI o. Cornell University Library p. Sherpa q. Toronto Public Library r. WorldCat s. Academic Resource Index t. Electronic Journals Library u. Stanford v. ROAD		√	

31.	<i>The Restriction of Suffrage in the Perspective of Fair Election in Indonesia</i>	Prof. Dr. Saldi Isra, SH, MPA	Hasanuddin Law Review, Volume 4 Issue 1, April 2018.	2018	<ul style="list-style-type: none"> a. DOAJ b. Microsoft Academic c. EBSCO d. Index Copernicus e. Google Scholar f. Indonesia One Search g. Harvard Library h. GIGA i. Exlibris j. WorldCat k. IPI l. Copac 		√	
32.	<i>Obstruction of Justice in the effort to Eradicate Corruption in Indonesia.</i>	Prof. Dr. Saldi Isra, SH, MPA	International Journal Of Law Crime and Justice, Volume 51 December 2017. ISSN 1756- 0616	2017	Google Scholar			√

33.	<i>Rule of Law and Human Rights Challenges in South East Asia: A Case Study of Legal Pluralism in Indonesia</i>	Prof. Dr. Saldi Isra, SH, MPA	Hasanuddin Law Review. Volume 3 Issue 2, August 2017. P-ISSN: 2442-9880, E-ISSN: 2442-9899	2017	a. DOAJ b. Microsoft Academic c. EBSCO d. Index Copernicus e. Google Scholar f. Indonesia One Search g. Harvard Library h. GIGA i. Exlibris j. WorldCat k. IPI l. Copac		√	
34.	<i>Legal Policy of Sexual Violence in Indonesia</i>	Prof. Dr. Saldi Isra, SH, MPA	Journal of Law, Policy & Globalization, Vol. 67, 2017. ISSN 2224-3240 (paper), ISSN 2224-3259 (online)	2017	Google Scholar			√
35.	Pemilu dan Pemulihan Daulat Rakyat	Prof. Dr. Saldi Isra, SH, MPA	Buku. Jakarta: Themis Publisng, 2017.	2017	Ditjen HaKI Kemenkumham (Hak Cipta)			√
36.	<i>Rule of Law and Human Rights Challenges in South East Asia: A Case Study of Legal Pluralism in Indonesia</i>	Prof. Dr. Saldi Isra, SH, MPA	Papers.ssrn.com. 2016.	2016	Google Scholar			√

37.	Titik Singgung Wewenang Mahkamah Agung Dengan Mahkamah Konstitusi (Authority Connectivity Of Supreme Court And Constitutional Court)	Prof. Dr. Saldi Isra, SH, MPA	Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 1 Maret 2015 : 17-30.	2015	a. Google Scholar b. BASE c. DOAJ d. Crossref e. EBSCO f. HOLLIS g. IPI h. ISJD i. Mendeley j. OAJI k. ROAD l. Sherpa m. Sinta n. WorldCat o. SOLO (University of Oxford)		√	
38.	<i>The Anomaly Of The Authority Of The Village Government In Establishing Village Owned Enterprise</i>	Dr. Busyra Azheri, SH., M.Hum	<i>Hasanuddin Law Review, Volume 4 Issue 2, Agustus 2018.</i>	2018	a. DOAJ b. Microsoft Academic c. EBSCO d. Index Copernicus e. Google Scholar f. Indonesia One Search g. Harvard Library h. GIGA i. Exlibris j. WorldCat k. IPI l. Copac		√	
39.	<i>The Principle Of Non Maleficence In Relation With Construction Contract In Indonesia</i>	Dr. Busyra Azheri, SH., M.Hum	<i>Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, Volume 21, Issue 3, 2018.</i>	2018	Google Scholar			√

40.	<i>Urgency Of The Establishment Of A Special Court For The Resolution Of Sharia Economic Dispute In The Religious Courts</i>	Dr. Busyra Azheri, SH., M.Hum	<i>Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, Volume 21, Issue 1, 2018.</i>	2018	Google Scholar			√
41.	Pemberantasan Penyakit Masyarakat	Dr. Busyra Azheri, SH., M.Hum	Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (Kesbangpo I Provinsi Sumatera Barat)	2018	-	√		
42.	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	Dr. Busyra Azheri, SH., M.Hum	Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat)	2018	-	√		

43.	<i>Corporate Social Responsibility in the Rule of Law Welfare State (Verzorgings Staat)</i>	Dr. Busyra Azheri, SH., M.Hum	<i>Hasanuddin Law Review</i> , Agustus 2016.	2016	a. DOAJ b. Microsoft Academic c. EBSCO d. Index Copernicus e. Google Scholar f. Indonesia One Search g. Harvard Library h. GIGA i. Exlibris j. WorldCat k. IPI l. Copac		√	
44.	Pengaturan CSR dalam Konteks Hukum Perusahaan di Indonesia	Dr. Busyra Azheri, SH., M.Hum	Proseding PERHAPI, 2015.	2015	-		√	
45.	<i>The Idea Of Regulating Of The Governor“ s Authority As The Represent Of Government After The Amendment Of 1945 Constitution</i>	Dr. Yuslim, SH., MH	Jurnal Hukum dan Pembangunan. Vol. 47.No.4 Desember 2017	2017	a. DOAJ b. Google Scholar c. WorldCat d. Scilit e. Sinta		√	

46.	Pola Pengelolaan Sumberdaya Air Dalam Rangka Perlindungan Hak Masyarakat hukum Adat Pasca pembatalan UU No 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air Oleh Mahkamah Konstitusi	Dr. Yuslim, SH., MH	Yustisia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 24 No. 2 (Jul-Des) ISSN : 0854-6185	2016	-	√		
47.	<i>Leasing of Land of PT. KAI (Persero) in West Sumatera</i>	Dr. Dahlil Marjon, SH., MH	Jurnal Hukum dan Pembangunan. Vol. 47.No.4 Desember 2017.	2017	a. DOAJ b. Google Scholar c. WorldCat d. Scilit e. Sinta		√	
48.	Aplikasi Kode Etik Hak Ingkar Notaris Sebagai Saksi Dalam Perkara Perdata Dan Pidana	Dr. Dahlil Marjon, SH., MH	Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 1 November 2016, 89	2016	Google Scholar		√	
49.	Penerapan Kode Etik Hak Ingkar Notaris Sebagai Saksi Dalam Perkara Perdata dan Pidana	Dr. Dahlil Marjon, SH., MH	RechtIdee Jurnal Hukum, Vol. 10. No. 2, Desember 2015	2015	Google Scholar		√	

50.	Kewenangan Komisi Kepolisian Nasional Terhadap Peningkatan Profesionalisme Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)	Dr. Dahliil Marjon, SH., MH	International Journal of Social and Local Economic Governance (IJLEG)	2015	a. Google Scholar b. IPI		√	
51.	<i>An International Treaty According To The Convention Of Vienna 1969 And Correlation With International Trading Cooperation In Indonesia</i>	Dr. Jean Elvardi, SH., MH	Dipresentasikan pada Seminar International The 2nd International Conference on Law and Governance in a Global Context (iClave) Faculty of Law Universitas Indonesia Bali, Nov 7-8, 2018	2017	-			√
52.	Perjanjian Internasional Tentang Kesepakatan Masyarakat Ekonomi Asean Dan Tiongkok Dalam Hukum Nasional Indonesia	Dr. Jean Elvardi, SH., MH	De Lega Lata, Volume 2, Nomor 1, Januari – Juni 2017	2017	Google Scholar		√	
53.	<i>Preservation of Environmental Functions by the Implementation of Corporate Social</i>	Dr. Rembrandt, SH., M.Pd	TDMU <i>Scientific Journal of Thu Dau Mot University</i>	2016	Google Scholar			√

54.	Kedudukan Hak Ulayat Dalam Status Kawasan Lindung di Simatera Barat	Dr. Rembrandt, SH, M.Pd	Bina Hukum Lingkungan (Jurnal Ilmu Hukum Lingkungan)	2017	<ul style="list-style-type: none"> a. Google Scholar b. ISJD c. Indonesia One Search d. Garuda e. Crossref f. Base g. Cornell University Library h. Worldcat i. DRJI j. Academic Resource Index 		√	
55.	Kebebasan Bertindak Pemerintah (Diskresi) Sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Moral dan Etika	Dr. Azmi Fendri, SH., MH	Jurnal Ilmu Hukum UNRI, Volume 5/Nomor 1/2015	2015	<ul style="list-style-type: none"> a. IPI b. Google scholar c. Garuda (Garda Rujukan Digital) 		√	
56.	Pengaturan Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Mineral dan Batubara.	Dr. Azmi Fendri, SH., MH	PT. Rajagrafindo Persada, 2016. ISBN 6024250460	2016	Ditjen HaKI Kemenkumham (Hak Cipta)		√	

57.	Dilema Pemanfaatan Tanah Ulayat Untuk Investasi Di Sumatera Barat Pada Norma Dan Implementasi	Dr. Zefrizal Nurdin, SH., MH	Jurnal Media Hukum. Vol. 22 No.1 Juni 2015 , DOI: 10.18196/jmh.2015.0049 / 95-109	2015	a. Crossref b. Google Scholar c. IPI d. Open Academic Journals Index (OAPI) e. DOAJ (Directory of Open Access Journals)		√	
58.	Perlindungan Hukum Konsumen: Maskapai Penerbangan di Indonesia	Dr. Yulfasni, SH., MH	Buku. Diterbitkan oleh Andalas University Press, 2018	2018	-		√	
59.	Upaya Keberatan Atas Putusan BPSK Ditinjau dari Hukum Acara dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen	Dr. Yussy A. Mannas, SH., MH	Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER	2015	Google Scholar		√	
60.	<i>Principle of Balance in Health Services in Indonesia</i>	Dr. Yussy A. Mannas, SH., MH	Law and Justice in a Globalized World- Taylor & Francis Group London	2017	a. OAPEN (Open Access Publishing in European Network) b. Google Scholar			√

61.	<i>Legal Relations Between Doctors and Patients and the Accountability of Doctors in Organizing Health Services</i>		Jurnal Cita Hukum (Indonesian Law Jurnal), Volume 6 Number 1	2018	a. Microsoft Academic Search b. EBSC Host c. DOAJ d. Sherpa Romeo e. Universiteit Leiden f. Boston University g. Princeton University h. Harvard Library i. Mendeley j. ISJD k. Google Scholar l. Cross Ref m. SSRN n. Sinta o. IPI p. Moraref q. One Search		√	
-----	---	--	--	------	--	--	---	--

Catatan: (1) Beri tanda “*” pada artikel yang dikutip (masuk dalam *citation index*)

(2) Contoh nama lembaga sitasi: *Thompson Reuters Web of Science, Elsevier Scopus, Google Scholar.*

(3) Beri tanda √ pada kolom yang sesuai.

7.1.6 Tuliskan dosen yang melakukan penelitian dengan melibatkan mahasiswa program magister untuk penelitian tesisnya, pada tahun akademik terakhir (TS).

No.	Nama Dosen	Topik Penelitian	Jumlah Mahasiswa yang Terlibat
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Prof. Dr. Elwi Danil, SH, MH	Model Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi	4 orang
2.	Prof. Dr. Ismansyah, SH,	Model Penanggulangan Tindak Pidana Susila yang Dilakukan	4 orang

	MH	Anak Melalui Penerapan Sanksi Pidana	
3.	Dr. Azmi Fendri, SH., M.Kn	Prinsip Dasar Pengaturan Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Mineral dan Batubara Dalam Konteks Otonomi Daerah	1 orang
4.	Dr. Yussy A. Mannas, SH., MH	Penerapan Asas Pembuktian Terbalik Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Lembaga Peradilan di Sumatera Barat	1 orang
Total jumlah mahasiswa yang penelitian tesisnya terkait dengan penelitian dosen			A = 8 orang
Jumlah mahasiswa yang penelitian tesisnya tidak terkait dengan penelitian dosen			B = 2 orang
Total mahasiswa yang melakukan penelitian tesis pada TS			A+B = 10 orang

7.1.7 Sebutkan karya dosen dan atau mahasiswa program studi yang telah memperoleh hak paten/HaKI atau karya yang mendapat pengakuan/ penghargaan dari lembaga nasional/ internasional, tiga tahun terakhir.

No	Nama Karya*	
	Paten/HaKI	Karya yang Mendapat Pengakuan/Penghargaan dari Lembaga Nasional/Internasional
(1)	(2)	(3)
1	Hak Cipta / Karya	Prof. Dr. Yuliandri, SH, MH. Seleksi Ideal Anggota Komisi Yudisial
2	Hak Cipta / Karya	Prof. Dr. Yuliandri, SH, MH. Empowerment Community Leaders as to Strengthen the Implementation of Regional Autonomy, Journal of Politics and Law
3	Hak Cipta / Karya	Prof. Dr. Yuliandri, SH, MH. Obstruction of Justice in the effort to Eradicate Corruption in Indonesia
4	Hak Cipta / Karya	Prof. Dr. Elwi Danil, SH, MH. Menegakan Hukum Tanpa Melanggar Hukum, Raja Grafindo Persada
5	Hak Cipta / Karya	Prof. Dr. Elwi Danil, SH, MH. Korupsi : Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya.
6	Hak Cipta / Karya	Prof. Dr. Ismansyah, SH, MH. Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan Tindak Pidana di Bidang Perbankan.
7	Hak Cipta / Karya	Prof. Dr. Zainul Daulay , SH, MH. The Variegated Landscape of Mediation: A Comparative Study of Mediation Regulation and Practices in Europe and the World.

8	Hak Cipta / Karya	Prof. Dr. Saldi Isra, SH., MPA. Parlemen Dua Kamar: Analisis Perbandingan Menuju Sistem Bikameral Efektif
9	Hak Cipta / Karya	Prof. Dr. H. Yaswirman, MA. Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia.
10	Hak Cipta / Karya	Prof. Dr. Yulia Mirwati, SH., Cn., MH. Konflik Tanah Ulayat.
11	Hak Cipta / Karya	Prof. Dr. Saldi Isra, SH., MPA. Living and Evolving Constitution of Indonesia
12	Hak Cipta / Karya	Prof. Dr. Saldi Isra, SH., MPA. Pergeseran Fungsi Legislasi
13	Hak Cipta / Karya	Prof. Dr. Saldi Isra, SH., MPA. Konstitusi untuk Negeri. 50 Jejak Pena Saldi Isra
14	Hak Cipta / Karya	Prof. Dr. Saldi Isra, SH., MPA. Sistem Pemerintantahan Indonesia: Pergulatan Ketatanegaraan Menuju Sistem Pemerintahan Presidensial
15	Hak Cipta / Karya	Prof. Dr. Saldi Isra, SH., MPA. Pemilu dan Pemulihan Daulat Rakyat
16	Hak Cipta / Karya	Dr. Azmi Fendri, SH, MKn, Pengaturan Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Mineral dan Batubara. Penerbit : PT. Rajagrafindo Persada, 2016. ISBN 6024250460.

* Lampirkan surat paten/HaKI atau surat pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional/ internasional.

7.2 Kegiatan Pelayanan/Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dalam Tiga Tahun Terakhir

7.2.1 Tuliskan jumlah kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat (*) yang sesuai dengan bidang keilmuan PS yang dilakukan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS dalam tiga tahun terakhir dengan mengikuti format tabel berikut:

Sumber Dana Kegiatan Pelayanan/Pengabdian kepada Masyarakat	Tahun Pelaksanaan			
	TS-2	TS-1	TS	Jumlah Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pembiayaan sendiri oleh dosen	-	1	-	1
PT yang bersangkutan	5	13	1	19
Depdiknas	-	-	-	0
Institusi dalam negeri di luar Depdiknas	1	-	1	2
Institusi luar negeri	-	-	-	0

Catatan: (*) Pelayanan/pengabdian kepada masyarakat adalah penerapan bidang ilmu untuk membantu menyelesaikan masalah di masyarakat (termasuk masyarakat industri, pemerintah, dsb.)

7.2.2 Tuliskan nama dosen, judul, waktu dan hasil/dampak kegiatan pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat.

No.	Nama Dosen	Judul Kegiatan Pelayanan/Pengabdian kepada Masyarakat	Waktu Kegiatan	Hasil atau Dampak Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Prof. Dr. Yulia Mirwati, SH, CN, MH	Pengabdian kepada Masyarakat : Pernikahan dan Permasalahannya	2015	Peningkatan pengetahuan masyarakat terkait Hukum Perkawinan
2.	Prof. Dr. Yulia Mirwati, SH, CN, MH	Pengabdian kepada Masyarakat : Penyelesaian Sengketa Tanah Adat	2015	Peningkatan pengetahuan masyarakat terkait penyelesaian sengketa tanah adat
3.	Prof. Dr. Yulia Mirwati, SH, CN, MH	Pengabdian kepada Masyarakat : Pencatatan Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.	2015	Peningkatan pengetahuan masyarakat terkait pencatatan perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974
4.	Prof. Dr. Yulia Mirwati, SH, CN, MH	Pemberdayaan Majelis Taklim Untuk Menanggulangi Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender di Kec Naggalo	2016	Peningkatan pengetahuan masyarakat terkait pemberdayaan majelis taklim untuk menanggulangi lesbian, gay, biseksual dan transgender
5.	Prof. Dr. Yulia Mirwati, SH, CN, MH	Penyuluhan Hukum Pertanahan Menyangkut Penguasaan Tanah Bekas Kereta Api/ PT. KAI (Persero)	2016	Peningkatan pengetahuan masyarakat terkait Hukum Pertanahan
6.	Prof. Dr. Yulia Mirwati, SH, CN, MH	Pendirian Badan Usaha Milik Desa Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	2017	Peningkatan pengetahuan masyarakat terkait pendirian Badan Usaha Milik Desa
7.	Prof. Dr. Yuliandri, SH,	Sosialisasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang	2015	Peningkatan pengetahuan

	MH	Desa di Kenagarian Salido Kabuoaten Pesisir Selatan.		masyarakat terkait dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa khusus pada Masyarakat Salido
8.	Prof. Dr. Yuliandri, SH, MH	Sosialisasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa di Nagari Maninjau Kabupaten Agam.	2016	Peningkatan pengetahuan masyarakat terkait dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa khusus pada Masyarakat Nagari Maninjau.
9.	Prof. Dr. Yuliandri, SH, MH	Sosialisasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa di Kanagarian Kayu Tanam Kecamatan Padang Pariaman.	2017	Peningkatan pengetahuan masyarakat terkait dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa khusus pada masyarakat Nagari Kayu Tanam.
10.	Prof. Dr. Elwi Danil, SH, MH	Sosialisasi Pencehan Pornografi terhadap Bundo Kandung Nagari Panyalaian Kabupaten Tanah Datar.	2016	Peningkatan pengetahuan masyarakat terkait dengan pencegahan pornografi terhadap Bundo Kandung.
11.	Prof. Dr. Elwi Danil, SH, MH	Sosialisasi Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kenagarian Lubuak Batingkok Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota	2017	Peningkatan pengetahuan masyarakat Tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
12.	Prof. Dr. Ismansyah, SH, MH	Kegiatan Pelatihan Pencegahan Pornografi Dan Kejahatan Seksual Bagi Ibu	2015	Peningkatan pengetahuan masyarakat

		PKK Kelurahan Lubuk Buaya Kecamatan Koto Tangah.		tentang pencegahan pornografi dan kejahatan seksual.
13.	Prof. Dr. Ismansyah, SH, MH	Sosialisasi perlindungan hukum korban KDRT terhadap Bundo Kandung Nagari Panyalaian Kabupaten Tanah Datar.	2016	Peningkatan pengetahuan masyarakat Tentang perlindungan hukum korban KDRT bagi Bundo Kandung.
14.	Prof. Dr. Ismansyah, SH, MH	Kegiatan Pelatihan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Bundo Kandung di Kanagarian Lubuk Batongkok, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota	2017	Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang penanggulangan penyalahgunaan narkoba.
15.	Prof. Dr. Zainul Daulay, SH, MH	Sosialisasi tentang Perlindungan Lingkungan Hidup dari Aspek Hukum pada Masyarakat Desa Rimbo Data Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok	2015	Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang perlindungan lingkungan hidup dari aspek Hukum.
16.	Prof. Dr. Zainul Daulay, SH, MH	Sosialisasi Upaya Pencegahan terhadap Penyalahgunaan Narkotika dan Bahan Psikotropika pada Masyarakat Kelurahan Tanjung Paku Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok.	2016	Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika dan bahan psikotropika.
17.	Prof. Dr. Zainul Daulay, SH, MH	Sosialisasi Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Prosedur Pendaftaran Merek pada Masyarakat Kelompok UKM Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam.	2017	Peningkatan pengetahuan masyarakat Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Prosedur Pendaftaran Merek.

18.	Prof. Dr. Yaswirman, MA	Pelatih/pendampingan Mahasiswa pada <i>Musabaqah Tilawatil Qur'an Mahasiswa Tingkat Nasional</i> , 2015 di Universitas Indonesia Depok	2015	Peningkatan <i>softskill</i> mahasiswa dalam kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an Mahasiswa Tingkat Nasional
19.	Prof. Dr. Yaswirman, MA	Pelatih/pendampingan Mahasiswa pada <i>Musabaqah Tilawatil Qur'an Mahasiswa Tingkat Nasional</i> , 2017 di Universitas Brawijaya dan Universitas Negeri Malang	2017	Peningkatan <i>softskill</i> mahasiswa dalam kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an Mahasiswa Tingkat Nasional
20.	Prof. Dr. Saldi Isra, SH, MPA	Anggota Panitia Seleksi Calon Penasehat KPK RI Periode 2017-2021,	Februari-Maret 2017.	Terbentuknya Penasehat KPK RI
21.	Prof. Dr. Saldi Isra, SH, MPA	Ketua Tim Seleksi Calon Anggota KPU RI dan Calon Anggota Bawaslu RI 2017-2022,	Oktober 2016-Januari 2017.	Terbentuknya Anggota KPU RI dan Anggota Bawaslu RI 2017-2022
22.	Prof. Dr. Saldi Isra, SH, MPA	Ketua Panitia Seleksi Hakim Konstitusi (usulan Presiden) Pengganti Hamdan Zoelva.	Desember 2014-Januari 2015.	Hakim Konstitusi (usulan Presiden) Pengganti Hamdan Zoelva.
23.	Prof. Dr. Saldi Isra, SH, MPA	Anggota Tim Seleksi Anggota KPU dan Anggota Bawaslu 2012-2017.	Desember 2011-februari 2012.	Terbentuknya Anggota KPU dan Anggota Bawaslu 2012-2017
24.	Dr. Yuslim, SH., MH	Sosialisasi Undang - Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan	2015	Peningkatan pengetahuan masyarakat terkait Undang - Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
25.	Dr. Yuslim, SH., MH	Pelatihan Penyusunan Peraturan Nagari di Nagari Sungai Buluh Timur Kec. Batang Anai	2017	Peningkatan pengetahuan masyarakat terkait Penyusunan Peraturan Nagari di

				Nagari Sungai Buluh Timur Kec. Batang Anai
26.	Dr. Zefrizal Nurdin, SH. MH	Hak Menguasai Nagari Atas Tanah Ulayat Nagari dan Perkembangan Pengaturannya	2015	Peningkatan pengetahuan masyarakat terkait Hak Menguasai Nagari Atas Tanah Ulayat Nagari
27.	Dr. Zefrizal Nurdin, SH. MH	Pencatatan Perkawinan Menurut Undang - Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	2015	Peningkatan pengetahuan masyarakat terkait Pencatatan Perkawinan Menurut Undang - Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
28.	Dr. Zefrizal Nurdin, SH. MH	Pendirian Badan Usaha Milik Desa Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	2017	Peningkatan pengetahuan masyarakat terkait Pendirian Badan Usaha Milik Desa
29.	Dr. Busyra Azheri, SH., MH	Penyelesaian Sengketa Tanah Adat	2015	Peningkatan pengetahuan masyarakat terkait Penyelesaian Sengketa Tanah Adat
30.	Dr. Busyra Azheri, SH., MH	Pencatatan Perkawinan Menurut Undang - Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	2015	Peningkatan pengetahuan masyarakat terkait Pencatatan Perkawinan Menurut Undang - Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
31.	Dr. Busyra Azheri, SH., MH	Pengembangan Wisata Halal Berbasis Nagari	2016	Peningkatan pengetahuan

				masyarakat terkait Pengembangan Wisata Halal Berbasis Nagari
32.	Dr. Dahlil Marjon, SH, MH	Penyelesaian Sengketa Tanah Adat	2015	Peningkatan pengetahuan masyarakat terkait penyelesaian sengketa tanah adat.
33.	Dr. Dahlil Marjon, SH, MH	Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Adat	2015	Peningkatan pengetahuan masyarakat terkait mediasi dalam penyelesaian sengketa adat
34.	Dr. Dahlil Marjon, SH, MH	Pendirian Badan Usaha Milik Desa Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	2017	Peningkatan pengetahuan masyarakat terkait Pendirian Badan Usaha Milik Desa
35.	Dr. Dahlil Marjon, SH, MH	4 Pilar Kebangsaan	2017	Peningkatan pengetahuan masyarakat terkait 4 pilar kebangsaan
36.	Dr. Jean Elvardi, SH., MH.	Sosialisasi pengaturan dan akibat penyalahgunaan narkoba	2016	Peningkatan pengetahuan masyarakat terkait pengaturan dan akibat penyalahgunaan narkoba
37.	Dr. Rembrandt, SH., M.Pd	Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Adat	2015	Peningkatan pengetahuan masyarakat terkait Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Adat
38.	Dr. Rembrandt, SH., M.Pd	Pengabdian dengan tema Pelatihan Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Mediasi	2017	Peningkatan pengetahuan masyarakat terkait penyelesaian sengketa perdata

				melalui mediasi
39.	Dr. Azmi Fendri, SH, MH	Sosialisasi Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan	2015	Peningkatan pengetahuan masyarakat terkait Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan
40.	Dr. Azmi Fendri, SH, MH	Sosialisasi Undang-undang Desa dan penyelesaian sengketa Adat melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN)	2016	Peningkatan pengetahuan masyarakat terkait Undang-undang Desa dan penyelesaian sengketa Adat melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN)
41.	Dr. Azmi Fendri, SH, MH	Pelatihan Penyusunan Peraturan Nagari di Nagari Sungai Buluh Timur Kec. Batang Anai	2017	Peningkatan pengetahuan masyarakat terkait penyusunan peraturan nagari.
42.	Dr. Yulfasni, SH., MH	Hak Menguasai Nagari Atas Tanah Ulayat Nagari dan Perkembangan Pengaturannya	2015	Peningkatan pengetahuan masyarakat terkait Hak Menguasai Nagari Atas Tanah Ulayat Nagari
43.	Dr. Yulfasni, SH., MH	Pencatatan Perkawinan Menurut Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	2015	Peningkatan pengetahuan masyarakat terkait Pencatatan Perkawinan Menurut Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
44.	Dr. Yulfasni, SH., MH	Pendaftaran Tanah	2016	Peningkatan pengetahuan masyarakat terkait pendaftaran tanah
45.	Dr. Yulfasni,	Pendirian Badan Usaha Milik	2017	Peningkatan

	SH., MH	Desa Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat		pengetahuan masyarakat terkait pendirian Badan Usaha Milik Desa
46.	Dr. Yussy A. Mannas, SH., MH.	Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Adat	2015	Peningkatan pengetahuan masyarakat terkait mediasi dalam penyelesaian sengketa adat.
47.	Dr. Yussy A. Mannas, SH., MH.	Pengabdian Tentang Pelatihan Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Mediasi	2017	Peningkatan pengetahuan masyarakat terkait penyelesaian sengketa perdata melalui mediasi.

7.3 Kegiatan kerjasama dengan instansi lain dalam tiga tahun terakhir

7.3.1 Tuliskan instansi dalam negeri yang menjalin kerjasama* yang terkait dengan program studi/jurusan dalam tiga tahun terakhir

No.	Nama Instansi	Jenis Kegiatan	Kurun Waktu Kerja Sama		Manfaat yang Telah Diperoleh
			Mulai	Berakhir	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia	Pengelolaan Perangkat Video Confrence dan Layanan Persidangan Jarak Jauh Melalui Video Confrence	2 Januari 2015	31 Desember 2015	Fakultas Hukum Universitas Andalas menjadi tempat Layanan Persidangan Jarak Jauh Melalui <i>Video Confrence</i> yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi baik pada Uji Materil Undang-Undang maupun Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.
2	Management System International (MSI)	Seminar Penguatan Lembaga Anti Korupsi, Belajar dari KPK Hongkong, (<i>Strengthening Anticorruption Body, Lesson-learnt from Hong Kong Independent Commission</i>)	12 Februari 2015	12 Februari 2015	Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dosen maupun mahasiswa tentang penguatan Lembaga Anti Korupsi.

		<i>Against Corruption</i>)			
3	Kementerian Hukum dan HAM RI	Nota Kesepahaman Kegiatan Konferensi Nasional Hukum Tata Negara Ke-3	10 Maret 2015	10 September 2015	Keberlanjutan kegiatan Konferensi Nasional Hukum Tata Negara dan pengembangan akademik dosen.
4	Komisi Yudisial Republik Indonesia	Klinik Etik dan Hukum	16 Maret 2015	10 Desember 2015	Mahasiswa mendapatkan pendidikan mengenai etika dan hukum sehingga dapat dipersiapkan untuk menjadi calon hakim atau profesi hukum yang lebih professional.
5	KPK RI	<i>Roadshow Anti Corruption Clearing House (ACCH)</i>	23 April 2015	23 April 2015	Meningkatkan pemahaman tentang <i>Anti Corruption Clearing House (ACCH)</i>
6	Kemitraan Partnership	Diskusi Publik di Daerah "Kodifikasi Undang-Undang Pemilu yang Terintegrasi untuk Mewujudkan Pemilu yang Efektif, Efisien dan Berintegritas"	09 Juni 2015	10 Juni 2015	Meningkatkan pengetahuan terkait dengan kodifikasi Undang-Undang Pemilu
7	Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI	<i>Foccus Group Discussion:</i> "Inventarisasi Materi RUU tentang Perubahan atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	15 Juni 2015	15 Juni 2015	Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terkait dengan Perubahan atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
8	Transparency International Indonesia	Perjanjian Kerjasama tentang "Penguatan KPK dengan Menyiapkan Pimpinan KPK	4 Juli 2015	15 Agustus 2015	Terlibatnya fakultas Hukum dalam aktifitas Penguatan Lembaga KPK dengan Menyiapkan Pimpinan KPK Masa Depan.

		Masa Depan”			
9	Pemerintah Daerah Kabupaten Solok	<i>Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Tentang Pengembalian Nama-Nama Nagari Ke Nama Asalnya</i>	1 Sept 2015	1 Nov 2015	Terlibatnya Fakultas Hukum Universitas Andalas dalam mewujudkan sebuah Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Tentang Pengembalian Nama-Nama Nagari Ke Nama Asalnya
10	Mahkamah Konstitusi	Kegiatan pengelolaan perangkat <i>video conference</i> dan layanan persidangan siding jarak jauh melalui <i>video conference</i>	01 Januari 2016	31 Desember 2016	Terselenggaranya pelayanan persidangan siding jarak jauh melalui <i>video conference</i> sehingga meningkatkan pengetahuan dan informasi baru terkait dengan perkembangan hukum yang terdapat di Mahkamah Konstitusi.
11	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Barat	Nota Kesepahaman Nomor 496a/UN.16.4/KS / 2016 tentang Labor Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	22 Maret 2016	21 Maret 2021	Menjadikan Fakultas Hukum Universitas Andalas sebagai salah satu tempat Labor Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
12	Kementerian Hukum dan HAM RI	Nota Kesepahaman Kegiatan Konferensi Nasional Hukum Tata Negara Ke-3	10 Maret 2016	10 Sept 2016	Terlaksananya kegiatan Konferensi Hukum Tata Negara Ke-3
13	Himpunan Konsultan Pasar Modal (HKPM)	Kerjasama antara dunia akademis dan praktisi dalam meningkatkan pengembangan sumber daya manusia khususnya terkait Pasar Modal	17 Nov 2016	17 Nov 2018	Terjalinnnya kerjasama antara dunia akademis dan praktisi dalam meningkatkan pengembangan sumber daya manusia dari lulusan Fakultas Hukum Universitas Andalas khususnya terkait Pasar Modal

14	Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI)	Pelaksanaan Pendidikan Khusus Profesi Advokat	4 Januari 2016	31 Desember 2016	Menghasilkan sumber daya manusia dari lulusan fakultas hukum untuk menjadi calon advokat yang memiliki kapabilitas dan profesionalitas dalam profesinya
15	IFES Indonesia	<i>Focuss Group Research and Expert Discussion Groups tentang Advancing The Electoral Process and Democracy (AEPD)</i>	01 April 2016	31 Desember 2016	Meningkatkan pengetahuan terhadap penelitian dan pemahaman tentang <i>The Electoral Process and Democracy (AEPD)</i> .
16	Tahir Foundation	Kesepakatan Bersama tentang Partisipasi Tahir Foundation dalam Penyediaan Dana Penelitian	1 Sept 2016	1 Maret 2017	Tahir Foundation akan berpartisipasi dalam penyediaan dana untuk penelitian bagi dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas
17	Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Kementerian Keuangan RI	Perjanjian Pelaksana Penugasan tentang Pemberian Bantuan Dana Riset Pembangunan Indonesia Berjudul Menggagas Peraturan Daerah yang Berpihak Kepada Kepentingan Masyarakat Adat dan Investor di Sumatera Barat.	21 Nov 2016	21 Nov 2017	Terlaksananya Riset Pembangunan Indonesia Berjudul Menggagas Peraturan Daerah yang Berpihak Kepada Kepentingan Masyarakat Adat dan Investor di Sumatera Barat.
18	Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI)	<i>Focus Group Discussion</i> "Sosialisasi Program Legislasi Nasional Tahun 2017 Usulan DPD RI"	24 Nov 2016	24 Nov 2016	Menjalin kerjasama dengan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) untuk peningkatan pemahaman tentang Program Legislasi Nasional.

19	Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi	Kegiatan Pengelolaan, Layanan Konsultasi Perkara Konstitusi dan Persidangan Jarak Jauh melalui <i>Video Conference</i>	01 Januari 2017	31 Desember 2017	<p>a. Adanya pelayanan dan pengelolaan perangkat <i>video conference</i>.</p> <p>b. Layanan konsultasi perkara konstitusi.</p> <p>c. Adanya penyelenggaraan persidangan jarak jauh.</p>
20	Perhimpunan Advokat Indonesia	Pelaksanaan Pendidikan Khusus Profesi Advokat	02 Januari 2017	31 Desember 2017	Terjalinnnya kerjasama dalam pelaksanaan pendidikan khusus profesi advokat dan menghasilkan peserta didik yang memahami bidang keimuan terkait dengan profesi advokat.
21	Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Dukungan Keahlian Pembentukan Undang-Undang	9 Februari 2017	9 Februari 2022	Terjalinnnya kerjasama dalam bidang penelitian, kajian, dan kegiatan akademik lainnya di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Andalas khususnya dalam hal keahlian untuk pembentukan undang-undang.
22	Badan Informasi Geospasial (BIG)	Expert Meeting Kajian Evaluasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan	12 Juni 2017	12 Juni 2017	Peningkatan pemahaman dan pengetahuan terkait dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan.
23	Komisi Yudisial RI	<i>Expert Meeting</i> "Peraturan Pelaksana Manajemen	14 Juni 2017	14 Juni 2017	Peningkatan pemahaman terkait dengan Manajemen Seleksi Hakim dalam Sistem <i>Shared</i>

		Seleksi Hakim dalam Sistem <i>Shared Responsibility</i> "			<i>Responsibility</i> dikalangan akademis.
24	Indonesian Parliamentary Center	Workshop Simulasi Manual Pengawasan DPRD Berbasis UU KIP	20 Juni 2017	21 Juni 2017	Peningkatan pemahaman terkait dengan Pengawasan DPRD Berbasis UU KIP
25	Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI	Nota Kesepahaman Kajian Penataan Ulang Kewenangan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial	19 Juli 2017	Desember 2017	Terwujudnya hasil Kajian Penataan Ulang Kewenangan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial, oleh para peneliti Fakultas Hukum Universitas Andalas
26	Indonesian Legal Roundtable (ILR)	Surat Perjanjian Kerjasama Mitra Program Pengembangan Instruksi Presiden Pencegahan dan & Pemberantasan Korupsi (Inpres PPK) Tahun 2018	18 Sept 2017	19 Sept 2017	Menghasilkan Kerjasama Mitra Program Pengembangan Instruksi Presiden Pencegahan dan & Pemberantasan Korupsi (Inpres PPK) Tahun 2018 antara Indonesian Legal Roundtable dengan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
27	Fakultas Hukum Universitas Airlangga	Kerjasama Bidang Pendidikan	30 Nov 2017	30 Nov 2022	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya pertukaran staf pengajar untuk sharing ilmu. b. Pertukaran mahasiswa. c. Kerjasama penelitian (Joint Research).
28	Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman Nomor 1906a/UN16.04.D/PP/ 2018.	Kerjasama Bidang Pendidikan dan Kegiatan Akademik	31 Agt 2018	-	<ul style="list-style-type: none"> c. Mengadakan Kuliah Umum dengan menghadirkan Ketua INI sebagai Narasumber. d. Mengadakan Seminar dan Pelatihan kerjasama INI dengan FH Unand.
29	Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang dituangkan dalam Perjanjian kerjasama	Kerjasama Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	2018	-	Dapat dilakukannya penelitian bersama antar institusi ataupun kegiatan pengabdian pada masyarakat.

	Nomor 625/UN16.04.D/ KS/2018				
30	Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Nomor : 6/PKS/FH/UI/2018	Kerjasama tentang Program Pertukaran Mahasiswa.	2018	-	Dapat dilakukannya pertukaran mahasiswa guna menambah wawasan keilmuan ataupun kegiatan akademik secara bersama.
31	Kerjasama dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Nomor 2123a/UN16.04.D/ KS/ 2017	Kerjasama tentang Pendidikan dan Pelatihan Notaris Pembuat Akta Koperasi.	28 Okt 2017	28 Okt 2020	Dilaksanakannya Pelatihan Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) pada tanggal 20 September 2018 di Kampus Prodi MKn FH Unand yang diikuti oleh 93 Peserta.

Catatan : (*) dokumen pendukung disediakan pada saat asesmen lapangan

7.3.2 Tuliskan instansi luar negeri yang menjalin kerjasama* yang terkait dengan program studi/jurusan dalam tiga tahun terakhir.

No.	Nama Instansi	Jenis Kegiatan	Kurun Waktu Kerjasama		Manfaat yang Telah Diperoleh
			Mulai	Berakhir	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Utrecht Universiteit	Kerjasama penelitian dan melakukan publikasi bersama serta pengembangan akademis lainnya	1 Mei 2015	1 Mei 2020	Terjalannya kerjasama dengan Utrecht Universiteit sehingga dapat melakukan pertukaran informasi dan pengembangan penelitian.
2	Waseda University	Meeting Faculty of Law Andalas University and School of Law Waseda University	26 July 2018		This Academic event creates the possibilities of further collaboration focuses on Indonesian Agrarian Law and other related issues.

3	Law School William & Merry University Virginia	Kerjasama peningkatan akademik, pengajaran, pelatihan dan kerjasama akademik lainnya	4 Sept 2018	4 Sept 2023	<ul style="list-style-type: none"> b. Kerjasama antara dua universitas terkait dengan pertukaran staf pengajar. c. Kerjasama penelitian gabungan antara dua universitas. d. Kerjasama gabungan konferensi internasional. e. Kerjasama pertukaran mahasiswa antara dua universitas.
4	Georgetown Law School, Washington DC	Kerjasama peningkatan akademik, pengajaran, pelatihan dan kerjasama akademik lainnya	2018	2023	<ul style="list-style-type: none"> a. Kerjasama antara dua universitas terkait dengan pertukaran staf pengajar. b. Kerjasama penelitian gabungan antara dua universitas. c. Kerjasama gabungan konferensi internasional. Kerjasama pertukaran mahasiswa antara dua universitas.

Catatan : (*) dokumen pendukung disediakan pada saat asesmen lapangan

DAFTAR LAMPIRAN

A. LAMPIRAN YANG HARUS DIKIRIM BERSAMA BORANG

No.	Nomor Butir	Keterangan
1	-	Fotokopi SK pendirian PS
2	-	Fotokopi SK izin operasional PS
3	4.3.1	Fotokopi ijazah dan sertifikat pendidik dosen tetap PS.
5	4.4	Fotokopi ijazah dan sertifikat pendidik dosen tidak tetap.
6	7.1.7	Surat paten/HaKI atau surat pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional/ internasional.

B. LAMPIRAN YANG HARUS DISEDIAKAN PROGRAM STUDI PADA SAAT ASESMEN LAPANGAN

No.	Nomor Butir	Keterangan
1	1.1.2	Dokumen mengenai strategi pencapaian sasaran program studi
2	2.1	Dokumen tentang aturan etika dosen, etika mahasiswa, etika tenaga kependidikan, sistem penghargaan dan sanksi, serta pedoman dan prosedur pelayanan.
3	2.3	(1) Rencana pengembangan program studi (2) <i>Standard Operating Procedure (SOP)</i>
4	2.4	Dokumen tentang jaminan mutu.
5	2.5	Dokumen (kuesioner dan hasil) kajian proses pembelajaran melalui umpan balik dari dosen, mahasiswa, alumni, dan pengguna lulusan.
6	3.1	Dokumen tentang sistem rekrutmen yang mencakup: kebijakan rekrutmen, kriteria seleksi mahasiswa baru, sistem pengambilan keputusan, dan prosedur penerimaan mahasiswa baru.
7	3.2.1	Daftar lulusan dalam lima tahun terakhir (termasuk IPK)
8	3.2.2	Bukti prestasi/reputasi yang dicapai mahasiswa di bidang akademik dan non-akademik (prestasi dalam penelitian, lomba karya ilmiah, olah raga, seni dsb)

No.	Nomor Butir	Keterangan
9	3.3	Dokumen (kuesioner dan hasil) kinerja lulusan oleh pihak pengguna.
10	3.4	Laporan kegiatan himpunan alumni.
11	4.1	Pedoman tertulis tentang sistem rekrutmen (termasuk persyaratan akademik dan pengalaman), penempatan, pengembangan, retensi dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan.
12	4.2	<ul style="list-style-type: none"> • Pedoman tertulis tentang monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja akademik dosen dan tenaga kependidikan. • Bukti tentang kinerja dosen di bidang pendidikan, penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat.
13	4.5.2	Bukti kehadiran tenaga ahli/pakar dari luar PT sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, sebagai pembicara tamu, dsb.
14	4.5.3	Bukti kegiatan dosen tetap dalam seminar ilmiah/ lokakarya/ penataran/ <i>workshop</i> / pagelaran/pameran/peragaan.
15	4.5.4.1	Bukti kegiatan dosen tetap sebagai pakar/konsultan/staf ahli/narasumber di luar PT.
16	4.5.4.2	Bukti keanggotaan dosen tetap dalam himpunan/asosiasi profesi dan atau ilmiah nasional dan internasional.
17	4.5.4.3	Bukti dosen tetap sebagai <i>visiting professor</i> di PT lain tingkat nasional atau internasional.
18	4.5.5	Bukti pencapaian prestasi/reputasi dosen tetap (dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat). Tidak termasuk ceramah, penyajian makalah, simposium, seminar.
19	4.6.1	Fotokopi ijazah dan sertifikat vokasi tenaga kependidikan.
20	5.1.1	Kurikulum pendidikan magister.
21	5.1.3	Dokumen pendukung kegiatan peninjauan kurikulum.
22	5.2	Dokumen tentang persyaratan mengikuti pendidikan magister, proses, pelaksanaan, dan persyaratan kelulusannya.
23	5.3	Dokumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan perkuliahan..
24	5.4	Dokumen tentang sistem pembimbingan penelitian tesis dan

No.	Nomor Butir	Keterangan
		penulisan tesis
25	5.5	Dokumen tentang sistem monitoring dan evaluasi proses pembelajaran (masing-masing untuk proses penyusunan usul penelitian dan pelaksanaan penelitian tesis, proses penulisan tesis, kelayakan dosen dalam proses pembimbingan, ujian akhir studi magister).
26	5.6	Dokumen tentang kebijakan untuk menciptakan suasana akademik yang kondusif serta bukti-bukti pelaksanaan kegiatannya.
27	6.1	Notulen rapat/ bukti keterlibatan PS dalam perencanaan anggaran dan pengelolaan dana.
28	6.2.3	Kontrak penelitian.
29	6.4.1	Daftar pustaka yang relevan dengan PS, yang dipilah berdasarkan kategorinya.
30	6.5.1	Daftar <i>software</i> , petunjuk pemanfaatan SIM.
31	7.1.1	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil penelitian dosen tetap (rekapitulasi judul dan dokumen laporan hasil penelitian) • Bukti keterlibatan dengan jaringan penelitian nasional atau internasional. • Tesis mahasiswa.
32	7.1.4	Bukti artikel ilmiah/karya ilmiah/karya seni/buku yang dihasilkan oleh dosen tetap.
33	7.2	Hasil pelayanan/pengabdian kepada masyarakat (rekapitulasi judul dan dokumen laporan PkM) yang jumlah judulnya ada dalam borang.
34	7.3.1	Dokumen pendukung kegiatan kerjasama dengan instansi dalam negeri
35	7.3.2	Dokumen pendukung kegiatan kerjasama dengan instansi luar negeri